IRAN TIDAK AKAN MEMAHAMI INDONESIA, JIKA TIDAK MEMAHAMI DUNIA

Strategi Peradaban, Diplomasi dan Masa Depan Hubungan Indonesia - Iran

Copyright © 2026

Prayogi R. Saputra, S.IP., M.M., Ph.D
Rinto Setiyawan, A.Md.T., S.H., M.H., CTP.
Sayyid Abdullah Assegaf, S.Sos., M.Hub.Int.

Diterbitkan oleh:
Penerbit X
Muara Sarana Indah C-17,
Malang, Indonesia

SEKOLAH
NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

Judul:

IRAN TIDAK AKAN MEMAHAMI INDONESIA, JIKA TIDAK MEMAHAMI DUNIA

Strategi Peradaban, Diplomasi dan Masa Depan Hubungan Indonesia - Iran

Penulis:

Prayogi R. Saputra, S.IP., M.M., Ph.D

Rinto Setiyawan, A.Md.T., S.H., M.H., CTP.

Sayyid Abdullah Assegaf, S.Sos., M.Hub.Int.

Penyunting:

Azizatul Nur Imamah, S.Pi

Ilustrasi

Risma Farah Hamidah, S.M

Penerbit

Penerbit X

Muara Sarana Indah C-17,

Malang - INDONESIA

Copyright©2026

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

All rights reserved

SEKOLAH
NEGARAWAN
X
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

Daftar Isi

Daftar Isi ..... **v**
Kata Pengantar ..... **xxi**
Ringkasan Eksekutif ..... **xxxiii**
Pernyataan Posisi ..... **xlvii**

A. Paradigma dan Catatan Metodologis *(Paradigm and Methodological Note)* lv
   1. Manusia sebagai Pusat Analisis lvii
   2. Islam sebagai Tata Nilai Primer lvii
   3. Pembedaan antara Wahyu dan Aktor Sejarah lix
   4. Pendekatan Historis-Struktural lx
   5. Indonesia sebagai Hasil Perjumpaan Dunia lxi
   6. Cak Nun sebagai Alarm, Bukan Sumber Tunggal Pembuktian lxii
   7. Sayid Ali Khamenei sebagai Cermin Pengalaman Iran lxiii
   8. Pendekatan Jalur Rakyat lxv
   9. Tingkatan Klaim dan Kehati-hatian Akademik lxv
   10. Sumber dan Hierarki Pembuktian lxvii
   11. Penolakan terhadap Teori Konspirasi lxviii
   12. Pendekatan terhadap Fakta Kontemporer lxix
   13. Pendekatan Komparatif Indonesia–Iran lxix
   14. Batasan Kajian lxx
   15. Tujuan Metodologis lxx

B. Kerangka Pembacaan Naskah (Framework for Reading This Report)..... lxxii

Pendahuluan.....1

A. Indonesia sebagai Negara Formal yang Tampak Lengkap.....1
B. Cak Nun sebagai Alarm tentang Negara yang Belum Menjadi Rumah Rakyat 4
C. Krisis Kepemimpinan dan Keruntuhan Peradaban.....7
D. Dari Kerajaan-Kerajaan Nusantara menuju Republik Modern 10
E. Globalisasi, Perang Modern, dan Kecerdasan Buatan 13
F. Tesis Sekolah Negarawan: Negara Formal Belum Tentu Negara Rakyat 16
G. Khamenei sebagai Cermin Spiritualitas dan Ketahanan Iran 19
H. Iran Tidak Akan Memahami Indonesia Jika Tidak Memahami Dunia 22
I. Kerja Sama Indonesia–Iran Tidak Cukup melalui Pemerintah.....24
J. Penutup Bab.....26

Bab I - Kesalahan Dunia Membaca Indonesia.....29

A. Indonesia sebagai Statistik Global 29
B. Indonesia sebagai Pasar dan Mitra Diplomatik 31
C. Kekeliruan Membaca Indonesia Hanya sebagai Negara Muslim Terbesar 34

D. Penjajahan yang Terlihat dan Penjajahan yang Tidak Terlihat 38
E. Struktur Terdalam yang Jarang Dibaca 41
F. Krisis Kepemimpinan yang Tidak Tampak dalam Statistik 43
G. Globalisasi dan AI sebagai Medan Perang Baru 45
H. Mengapa Iran Perlu Membaca Indonesia Lebih Dalam 48
I. Penutup Bab 50

Bab II - Indonesia Belum Pernah Menemukan Bentuk Negara 53
A. Negara Formal dan Negara Substantif 53
B. Mengapa Pengakuan Internasional Tidak Cukup 55
C. Rakyat sebagai Penduduk, Bukan Pemilik Negara 57
D. Dari Kerajaan-Kerajaan Nusantara Menuju Republik Modern 59
E. Negara, Globalisasi, Modernisasi, Perang Modern, dan AI 62
F. Apa yang Dibutuhkan Manusia, Rakyat, Pemerintah, dan Negara? 64
G. Tata Nilai Lebih Dahulu daripada Konstitusi 67
H. Sebelum Amandemen: MPR Ada, tetapi Rakyat Belum Menjadi Struktur Hidup 70
I. Setelah Amandemen Keempat: Lembaga Bertambah, Rakyat Makin Hilang 71
J. Negara, Pemerintah, Aparat, dan Rakyat 74

K. Kepemimpinan Administratif dan Kehilangan Arah Negara 76
L. Amandemen Kelima Sekolah Negarawan sebagai Pencarian Bentuk Negara Rakyat .. 78
M. Pelajaran dari Imam Khomeini: Perubahan Peradaban Memerlukan Fondasi Konstitusional 80
N. Penutup Bab 82

Bab III - Iran Pernah Menemukan Bentuk Negara: Spiritualitas, Kepemimpinan, dan Ketahanan Peradaban 88
A. Persia dan Monarki Konstitusional 90
B. Rakyat dalam Struktur Konstitusional Persia 92
C. Revolusi Islam sebagai Perubahan Bentuk Negara 94
D. Khamenei dan Spiritualitas sebagai Dasar Ketahanan Pemuda 97
E. Khamenei dan Kritik terhadap Konsesi kepada Hegemoni Amerika 99
F. Membela Kaum Tertindas Tanpa Melihat Mazhab 101
G. Umat Islam sebagai Satu Identitas Peradaban 103
H. Perbedaan Pemimpin Peradaban dan Pemimpin Administratif 105
I. Indonesia Tidak Perlu Meniru Iran, tetapi Perlu Belajar dari Keseriusannya 107
J. Penutup Bab 110

Bab IV -Kemerdekaan Formal dan Kolonialisme Struktural.....113
A. Kemerdekaan Indonesia dan Dekolonisasi Struktural.....113
B. Penjajah Pergi, Struktur Bertahan.....115
C. Penjajahan yang Terlihat dan Penjajahan yang Tidak Terlihat.....118
D. Hukum, Birokrasi, dan Administrasi Kolonial.....121
E. Rakyat sebagai Objek Pengaturan 123
F. Krisis Kepemimpinan sebagai Warisan Struktural.....125
G. Mengapa Kolonialisme Struktural Lebih Sulit Dikenali 127
H. Penutup Bab.....129

Bab V - *Invited Colonialism*: Ketika Kolonialisme Diundang oleh Elite Domestik.....133
A. Dari Kolonialisme Paksa ke Kolonialisme yang Diundang.....133
B. Elite Domestik sebagai Pintu Masuk Kekuasaan Luar.....136
C. Investasi, Utang, Konsesi, dan Hilangnya Kedaulatan Rakyat.....138
D. Data, Teknologi, dan Platform sebagai Kolonialisme Baru.....141
E. Krisis Kepemimpinan Domestik yang Mengundang Kekuasaan Luar.....144
F. Mengapa *Invited Colonialism* Lebih Berbahaya daripada Kolonialisme Lama..147

G. Indonesia sebagai Negara Merdeka Formal yang Rentan Mengundang Kolonialisme Baru 149
H. Penutup Bab 151

Bab VI -Dari Jaringan Dunia Awal ke Kolonialisme Maritim 155
A. Nusantara dalam Jaringan Samudra Hindia 155
B. Arab, Persia, India, dan China sebagai Jaringan Dagang, Agama, dan Budaya 158
C. Abad ke-13 dan ke-14: Nusantara dalam Catatan Musafir Eropa 162
D. Portugis dan Pintu Masuk Kolonialisme Maritim 164
E. Spanyol dan Perebutan Maluku 166
F. VOC sebagai Korporasi Kolonial 169
G. Dari Perdagangan Rempah ke Penguasaan Wilayah 171
H. Penutup Bab 173

Bab VII - Hindia Belanda dan Warisan Institusi Kolonial 177
A. Dari VOC Menuju Hindia Belanda 177
B. Hukum Kolonial dan Administrasi Penduduk 179
C. Pajak, Tanah, dan Perkebunan 183
D. Birokrasi Kolonial 187
E. Warisan Negara Administrasi dalam Indonesia Modern 190

F. Kepemimpinan Birokratis dan Jarak dengan Rakyat 193
G. Dari Negara Pengatur Menuju Negara Pengasuh 196
H. Penutup Bab 198

Bab VIII - Jepang: Pendudukan, Mobilisasi, dan Militerisasi Masyarakat 203
A. Pendudukan Militer Jepang 203
B. Propaganda dan Mobilisasi Massa 205
C. Organisasi Rakyat dan Disiplin Komando 207
D. Militerisasi Sosial 210
E. Warisan Jepang dalam Cara Negara Memandang Rakyat 212
F. Kepemimpinan Komando dan Bahaya Rakyat sebagai Massa yang Digerakkan 215
G. Dari Mobilisasi menuju Partisipasi Rakyat 217
H. Penutup Bab 219

Bab IX -Amerika Serikat, Perang Dingin, 1965, dan Orde Baru 223
A. Indonesia dalam Perang Dingin 223
B. Tahun 1965 sebagai Titik Balik Geopolitik 226
C. Tahun 1965 sebagai Luka Konstitusional dan Sosial 230
D. Orde Baru dan Negara Stabilitas 233
E. Modal Asing dan Pembangunan 236

F. Negara Keamanan dan Kontrol terhadap Rakyat 238
G. Kepemimpinan Stabilitas dan Harga yang Dibayar Rakyat 241
H. Amerika Serikat: Aktor Penting, Bukan Penjelasan Tunggal 243
I. Penutup Bab 245

Bab X - Krisis 1997–1998, Lembaga Keuangan Internasional, dan Reformasi Ekonomi 249
A. Krisis Moneter dan Runtuhnya Orde Baru 249
B. IMF dan Restrukturisasi Kebijakan 252
C. Liberalisasi, Restrukturisasi, dan Privatisasi 255
D. Rakyat Menanggung Krisis, Elite Menentukan Reformasi 258
E. Reformasi Kepemimpinan dan Demokrasi Elektoral 260
F. Reformasi Kepemimpinan atau Sekadar Reformasi Prosedur? 261
G. Demokrasi, Oligarki, Aristokrasi, Konglomerasi, dan Birokrasi 263
H. Mengapa Reformasi Belum Cukup Menjadi Reformasi Bentuk Negara 266
I. Lembaga Keuangan Internasional dan Batas Kedaulatan 267
J. Penutup Bab 269

Bab XI - China: Ekonomi, Teknologi, Industri, dan Rantai Pasok Kontemporer 273

A. China dalam Ekonomi Indonesia Kontemporer 273
B. Hilirisasi, Nikel, dan Kawasan Industri ... 276
C. Pembiayaan, Infrastruktur, dan Logistik .. 279
D. Teknologi dan Rantai Pasok 282
E. Peluang Industrialisasi dan Risiko Ketergantungan Baru 285
F. Lingkungan, Tenaga Kerja, dan Rakyat di Sekitar Industri 288
G. Kepemimpinan Ekonomi Nasional di Tengah Strategi Bangsa Lain 290
H. China sebagai Cermin Keseriusan Membangun Industri 292
I. Penjajahan Modern dalam Hubungan Indonesia–China 294
J. Penutup Bab 300

Bab XII - Rusia: Dibaca Secara Proporsional Sejauh Bukti Menunjukkan Peran Nyata 303
A. Uni Soviet dan Indonesia Era Soekarno ... 304
B. Pertahanan dan Kerja Sama Militer 305
C. Energi dan Geopolitik Multipolar 306
D. Rusia dalam Imajinasi Dunia Non-Barat .. 306
E. Penting, tetapi Harus Proporsional 307
F. Membaca Multipolaritas Tanpa Kehilangan Kedaulatan Rakyat 308
G. Penutup Bab 309

Bab XIII - Lembaga Keuangan, Korporasi Global, Teknologi, Data, Pendidikan, Jaringan Timur Tengah, AI, dan Elite Domestik 311

A. Kekuasaan Global Non-Negara 312
B. Korporasi Global dan Penguasaan Sumber Daya 313
C. Teknologi, Cloud, Platform, AI, dan Data 313
D. Globalisasi, Perang Pengetahuan, dan Ketidaksiapan Universitas 314
E. Pendidikan dan Produksi Kesadaran 315
F. Jaringan Timur Tengah, Pendidikan Keagamaan, Dana Sosial, dan Pengaruh Nilai 315
G. Islam sebagai Wahyu, Arab sebagai Aktor Sejarah 316
H. Elite Domestik sebagai Penghubung Kepentingan 316
I. Kepemimpinan Elite dan Krisis Tanggung Jawab Peradaban 317
J. Penjajahan Modern Global: Dari Negara Kolonial Menuju Sistem Global 318
K. Mengapa Tata Nilai Harus Mengendalikan Teknologi 324
L. Penutup Bab 325

Bab XIV - Mengapa Umat Islam Indonesia Besar tetapi Belum Menjadi Tata Nilai Primer 327
A. Mayoritas Demografis Bukan Mayoritas Peradaban 328
B. Islam sebagai Tata Nilai Primer, Bukan Sekadar Identitas 329
C. Nabi Muhammad SAW Diakui Secara Teknis, tetapi Nubuwwah Belum Menjadi Dasar Publik 330

D. Kemunafikan Sosial: Wajah Arif, Hati Kejam 331
E. Keadilan, Amanah, Ilmu, dan Perlindungan Manusia 331
F. Krisis Kepemimpinan Umat: dari Sosial, Ketatanegaraan, Budaya, hingga Ibadah Mahdhah 332
G. Mengapa Umat Islam Besar tetapi Negara Belum Bernilai Islam 333
H. Dari Simbol Islam Menuju Arsitektur Nilai 333
I. Doa Cak Nun: Mudah-Mudahan Ajaran Rasulullah Benar-Benar Dipakai di Indonesia 334

Bab XV - Dari Cak Nun Menuju Sekolah Negarawan: Krisis Kepemimpinan dan Jalan Pencarian Bentuk Negara 337
A. Cak Nun sebagai Alarm Budaya dan Peradaban 338
B. "Belum Punya Negara" sebagai Kritik Bentuk Negara, Bukan Penyangkalan Hukum Internasional 339
C. Krisis Kepemimpinan sebagai Sebab Kemunduran Peradaban 340
D. Islam sebagai Tata Nilai Primer, Kebudayaan sebagai Tubuh Sosial, Indonesia sebagai Wadah Negara 340
E. Dari Umat, Desa, Bangsa, Menuju Negara 341

F. *Indonesia Bagian dari Desa Saya*: Membaca Negara dari Ruang Hidup Rakyat.....341
G. Pemimpin Peradaban: Bukan Nasab, Bukan Uang, Bukan Elektoralitas Semata.....342
H. Dari Kegelisahan Budaya Menuju Rancangan Ketatanegaraan 343
I. Sekolah Negarawan sebagai Fase Eksekusi Gagasan 343
J. Rakyat sebagai Pemilik Kedaulatan Tertinggi 344
K. MPR sebagai Wadah Kedaulatan Rakyat 344
L. Utusan Daerah, Utusan Golongan, Rohaniawan, Cendekiawan, Budayawan, dan Patriot.....345
M. Presiden sebagai Kepala Pemerintahan....345
N. Amandemen Kelima sebagai Pencarian Bentuk Negara Rakyat.....346

Bab XVI - Mengapa Kerja Sama Peradaban Harus Melalui Jalur Rakyat: Sekolah Negarawan sebagai Mitra Peradaban, Bukan Instrumen Kekuasaan.....349
A. Hubungan Resmi Indonesia–Iran Tetap Penting dan Harus Dihormati.....350
B. Mengapa Kerja Sama Peradaban Tidak Cukup Melalui Pemerintah 351
C. Pemerintah, Birokrasi, Regulasi, dan Keterbatasan Diplomasi Formal 351

D. Rakyat yang Secara Formal Memiliki Banyak Wakil, tetapi Secara Substantif Sering Merasa Tidak Terwakili 352
E. Cak Nun dan Kritik tentang "Meyatimkan Rakyat" 353
F. Partai Politik, Lembaga Publik, dan Pendidikan Kewargaan 353
G. Membangun Kepercayaan melalui Pembuktian Sosial 354
H. Solidaritas terhadap Kaum Tertindas sebagai Nilai Kemanusiaan 355
I. Jalur Rakyat sebagai Jalan Seleksi Nilai 355
J. Sekolah Negarawan sebagai Mitra Peradaban, Bukan Instrumen Penguasa ... 356
K. Kerja Sama Kepemimpinan Nilai, Bukan Kerja Sama Perebutan Kekuasaan 357
L. Bukan Intervensi, Bukan Oposisi, dan Bukan Ekspor Sistem Pemerintahan..... 357
M. Jalur Rakyat sebagai Jalan Membangun Ilmu, Tata Nilai, Kader, dan Pembuktian Sosial 358

Bab XVII -Tawaran dan Program Konkret Kerja Sama Peradaban Indonesia–Iran..... 361
A. Dari Diagnosis Menuju Pembuktian 362
B. Iran sebagai Mitra Strategis Peradaban 364
C. Kerja Sama Dimulai dari Tata Nilai, Bukan dari Kekuasaan 365
D. Dari Gagasan Menuju Ekosistem Peradaban..... 367

E. Pusat Studi Indonesia–Iran: Dari Pertukaran Gagasan Menuju Produksi Pengetahuan .368
F. Center for Comparative Constitutional Statecraft 370
G. Mustad'afin Observatory Indonesia 371
H. Institute for Post-Colonial State Reconstruction 372
I. School of Statesmanship for the Muslim World 373
J. Program Transfer Pengetahuan Tata Kelola: Belajar Bersama, Bukan Menyeragamkan 375
K. Teknologi Sosial, AI, dan Platform Pengetahuan Digital 376
L. Tongkat Musa Zaman Now: Metafora Kepemimpinan yang Membebaskan 378
M. Spiritualitas sebagai Fondasi Kepemimpinan 379
N. Musa Village Project: Laboratorium Hidup Peradaban.....380
O. Forum Tahunan Peradaban Indonesia–Iran 381
P. Pembuktian adalah Bahasa Peradaban.....383
Q. Bab Penutup Bab XVII 385

Penutup - Indonesia yang Sedang Dicari.....389
A. Indonesia sebagai Bangsa yang Sedang Mencari Bentuk Negara 389
B. Kemerdekaan Sejati sebagai Kedaulatan Rakyat 390
C. Krisis Kepemimpinan dan Kebutuhan Akan Negarawan.....391

D. Cak Nun sebagai Alarm Indonesia.....392
E. Imam Khomeini dan Pelajaran tentang Perubahan Konstitusional.....393
F. Khamenei sebagai Cermin Ketahanan dan Solidaritas Umat.....395
G. Indonesia dan Iran: Tidak Saling Meniru, tetapi Saling Belajar.....396
H. Tongkat Musa Zaman Now: Dari Simbol Menuju Pembuktian 396
I.Kebangkitan Tata Nilai bagi Indonesia dan Dunia Islam 397

Epilog.....399
A. Peradaban Tidak Dibangun untuk Mengalahkan Bangsa Lain, tetapi untuk Memuliakan Manusia.....399

Daftar Pustaka 405

Kata Pengantar

Segala puji bagi Allah SWT yang telah menganugerahkan kehidupan, akal, ilmu, dan kesempatan kepada manusia untuk membaca tanda-tanda zaman, memahami perjalanan sejarah, serta memperbaiki kehidupan bersama. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh manusia yang berikhtiar menegakkan amanah, keadilan, ilmu pengetahuan, dan kemaslahatan bagi umat manusia.

Naskah ini lahir dari kegelisahan terhadap keadaan Indonesia, tetapi tidak dimaksudkan sebagai kumpulan keluhan mengenai pemerintahan, partai politik, elite, ataupun peristiwa tertentu. Kegelisahan yang melandasinya jauh lebih mendasar, yaitu setelah lebih dari delapan dasawarsa merdeka, apakah rakyat Indonesia benar-benar telah menjadi pemilik negara, ataukah mereka masih lebih sering ditempatkan sebagai sumber legitimasi periodik bagi struktur kekuasaan yang bekerja atas nama mereka?

Indonesia secara formal telah berdiri sebagai negara yang lengkap. Indonesia memiliki wilayah, rakyat, pemerintahan, Presiden, konstitusi, parlemen, pemilihan umum, aparat keamanan, angkatan bersenjata, lembaga peradilan, birokrasi, diplomasi, bendera, serta pengakuan internasional. Tidak ada keraguan bahwa Republik Indonesia merupakan negara yang sah dan berdaulat menurut hukum internasional.

Namun, kemerdekaan formal tidak selalu berarti seluruh tujuan kemerdekaan telah tercapai.

Berdirinya pemerintahan nasional tidak otomatis menjadikan rakyat sebagai pemilik nyata dari arsitektur negara. Pelaksanaan pemilihan umum tidak dengan sendirinya memastikan bahwa kedaulatan rakyat mengalir dalam seluruh proses pembentukan hukum, pengelolaan ekonomi, pembangunan ilmu pengetahuan, penguasaan teknologi, pendidikan, dan penentuan arah masa depan bangsa.

Dari pertanyaan itulah naskah ini bertumbuh.

Sekolah Negarawan memandang bahwa persoalan Indonesia tidak cukup dijelaskan hanya dengan menilai baik atau buruknya seorang pemimpin. Pemimpin tidak lahir dari ruang kosong. Pemimpin dibentuk oleh manusia, tata nilai, pendidikan, kebudayaan, sistem sosial, struktur ekonomi, mekanisme pemerintahan, desain konstitusi, dan pengalaman sejarah bangsa yang melahirkannya. Karena itu, krisis kepemimpinan harus dibaca bersama krisis manusia, krisis tata nilai, dan krisis hubungan antara rakyat dengan negara.

Emha Ainun Nadjib atau Cak Nun telah lama memberikan alarm mengenai keadaan tersebut. Cak Nun mengingatkan bahwa kerusakan peradaban dapat berakar pada kepemimpinan yang kehilangan nilai, bukan hanya dalam pemerintahan, tetapi juga dalam kehidupan sosial, kebudayaan, pendidikan, ekonomi, bahkan agama dan ibadah mahdhah. Ketika kepemimpinan tidak lagi mampu menjaga amanah,

ilmu, empati, dan tanggung jawabnya kepada manusia, masyarakat perlahan kehilangan arah.

Cak Nun juga mengingatkan bahwa Indonesia tidak cukup dibaca dari pusat kekuasaan. Bahkan sejak karya awalnya, *Indonesia Bagian dari Desa Saya*, ia memberi isyarat bahwa Indonesia harus dibaca dari desa, manusia, rakyat, dan ruang hidup sehari-hari tempat nilai benar-benar diuji.

Negara tidak hanya hadir melalui pasal konstitusi, istana, parlemen, kementerian, ataupun pengadilan. Negara hadir dalam pengalaman rakyat ketika mereka memperoleh pendidikan, mencari penghidupan, berhadapan dengan hukum, menjalankan agama, mengakses teknologi, dan mempertahankan martabat hidupnya.

Pemikiran tersebut menjadi salah satu pintu masuk moral bagi naskah ini.

Akan tetapi, kegelisahan moral saja tidak cukup untuk mengubah arah sebuah bangsa. Sejarah menunjukkan bahwa setiap perubahan besar memerlukan pelembagaan agar mampu hidup melampaui satu generasi. Dalam pengalaman Republik Islam Iran, Imam Khomeini tidak hanya memimpin sebuah revolusi, tetapi juga mendorong lahirnya bangunan konstitusional baru melalui Konstitusi Republik Islam Iran tahun 1979. Bagi penulis, pelajaran terpenting dari pengalaman tersebut bukanlah bentuk sistem ketatanegaraan Iran, melainkan kesadaran bahwa perubahan peradaban memerlukan fondasi konstitusional yang mampu menghubungkan tata nilai dengan penyelenggaraan negara.

Dari titik itulah Sekolah Negarawan mengembangkan gagasan Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Gagasan tersebut bukan dimaksudkan untuk meniru Konstitusi Republik Islam Iran ataupun mengubah identitas konstitusional Indonesia, melainkan sebagai ikhtiar konstitusional agar cita-cita kemerdekaan semakin mampu diwujudkan melalui bentuk negara yang benar-benar menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan.

Namun Sekolah Negarawan melanjutkannya dengan pertanyaan lain yaitu apabila Indonesia harus dibaca dari manusia dan rakyatnya, dunia apa yang telah membentuk manusia Indonesia?

Pertanyaan tersebut membawa kajian ini keluar dari batas sejarah nasional yang sempit.

Indonesia tidak lahir hanya pada 17 Agustus 1945. Republik Indonesia memang diproklamasikan pada tanggal tersebut, tetapi manusia dan masyarakat yang kemudian menjadi rakyat Indonesia telah dibentuk selama berabad-abad oleh perjumpaan berbagai peradaban dunia. Sebelum kolonialisme Eropa hadir secara langsung, Nusantara telah terhubung dengan jaringan Arab, Persia, India, China, Afrika Timur, Asia Tenggara, dan jalur Samudra Hindia.

Bersama perdagangan datang agama, bahasa, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, sanad keilmuan, pola kekuasaan, struktur sosial, dan kepentingan manusia. Dalam sejarah Islam Indonesia, jaringan Arab memiliki peran yang penting dalam dakwah, pendidikan, perdagangan, genealogi ulama,

serta pembentukan identitas keagamaan. Hubungan dengan Persia dan India juga meninggalkan jejak yang kuat dalam kebudayaan, bahasa, sastra, tasawuf, dan tradisi keilmuan Nusantara.

Namun sejarah harus dibaca secara jujur. Setiap jaringan peradaban dapat membawa ilmu dan manfaat, tetapi juga dapat membawa kepentingan, otoritas sosial, hierarki budaya, dan pengaruh pemerintah. Karena itu, naskah ini membedakan dengan tegas antara Islam sebagai wahyu dan Arab sebagai aktor sejarah.

Islam merupakan sumber tata nilai universal. Adapun orang Arab, elite Arab, negara Arab, serta jaringan Timur Tengah tertentu tetap merupakan pelaku sejarah yang dapat membawa kebaikan, tetapi juga memiliki kepentingan dan keterbatasan sebagaimana bangsa-bangsa lain.

Pembedaan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap Arab, melainkan usaha menjaga kesucian Islam agar tidak dicampuradukkan dengan seluruh perilaku manusia yang kebetulan berbahasa Arab atau berasal dari wilayah Arab. Bahasa Al-Qur'an adalah bahasa Arab, tetapi tidak semua kepentingan Arab identik dengan kehendak Allah. Sebaliknya, kritik terhadap kepentingan aktor Arab tidak boleh dipahami sebagai kritik terhadap Islam.

Setelah jaringan dunia awal tersebut, Nusantara memasuki periode baru sejak abad ke-16. Portugis hadir melalui jalur rempah. Spanyol ikut memperebutkan wilayah kepulauan. VOC tumbuh dari korporasi dagang menjadi kekuatan pemerintah dan militer. Hindia Belanda membangun administrasi kolonial yang

meninggalkan warisan hukum, birokrasi, ekonomi, pendidikan, dan cara negara memandang rakyat.

Pendudukan Jepang mengubah pola mobilisasi masyarakat dan struktur kemiliteran. Setelah kemerdekaan, Indonesia kembali berada dalam pusaran kekuatan global melalui Perang Dingin dan konfigurasi kekuasaan tahun 1965.

Pada masa kontemporer, Republik Rakyat Tiongkok hadir melalui perdagangan, teknologi, industri, pembiayaan, infrastruktur, energi, mineral kritis, dan rantai pasok. Federasi Rusia perlu dibaca secara proporsional sejauh bukti menunjukkan peran nyata.

luar negara-negara tersebut, Indonesia juga dibentuk oleh lembaga keuangan internasional, korporasi global, perusahaan konsultan, sistem pendidikan, media, teknologi digital, data, algoritma, kecerdasan buatan, jaringan keagamaan transnasional, serta elite domestik yang membuka, mengatur, atau memanfaatkan hubungan dengan berbagai kekuatan dunia.

Karena itu, judul naskah ini—*Iran Tidak Akan Memahami Indonesia Jika Tidak Memahami Dunia*—bukanlah kalimat yang dimaksudkan untuk meninggikan Indonesia atau menggurui Iran. Judul tersebut merupakan ajakan untuk membaca Indonesia melalui keseluruhan dunia yang membentuk manusia, rakyat, kepemimpinan, dan negaranya.

Iran dipilih sebagai mitra dialog bukan karena Indonesia harus meniru sistem pemerintahan Iran, bukan pula karena Sekolah Negarawan hendak

mengekspor atau mengimpor mazhab. Indonesia dan Iran memiliki sejarah, konstitusi, tradisi keagamaan, masyarakat, dan struktur ketatanegaraan yang berbeda. Perbedaan tersebut harus dihormati.

Namun Iran memiliki pengalaman peradaban yang layak dibaca. Bangsa Iran memiliki tradisi keilmuan yang panjang, pengalaman menghadapi intervensi, tekanan ekonomi, konflik geopolitik, serta upaya mempertahankan identitas, kedaulatan, ilmu pengetahuan, dan martabat nasional. Pengalaman tersebut tidak harus disalin, tetapi dapat menjadi bahan refleksi bagi bangsa lain.

Dalam naskah ini, Ayatollah Sayid Ali Khamenei ditempatkan bukan hanya sebagai cermin pengalaman Iran mengenai spiritualitas, pembelaan terhadap mustad'afin, dan ketahanan bangsa, tetapi juga sebagai contoh bagaimana sebuah negara berupaya menjaga kesinambungan arah konstitusinya di tengah tekanan geopolitik, ekonomi, dan perubahan dunia. Dengan demikian, pembahasan mengenai Ayatollah Ali Khamenei tidak dimaksudkan sebagai pembahasan tokoh semata, melainkan sebagai bagian dari kajian mengenai hubungan antara kepemimpinan, konstitusi, dan ketahanan negara.

Cak Nun dan Sayid Ali Khamenei juga tidak disamakan. Keduanya lahir dari konteks, kedudukan, sejarah, dan ruang pengabdian yang berbeda. Cak Nun membaca luka Indonesia dari dalam kehidupan rakyat, desa, kebudayaan, dan spiritualitas masyarakat. Sayid Ali Khamenei mencerminkan pengalaman Iran dalam

mempertahankan nilai, martabat bangsa, dan ketahanan negara di tengah tekanan global.

Keduanya digunakan sebagai dua cermin peradaban yang berbeda. Cak Nun membantu pembaca Iran memahami kegelisahan Indonesia dari dalam. Pengalaman Iran membantu Indonesia melihat bagaimana spiritualitas, kesadaran sejarah, dan kepemimpinan nilai dapat menjadi bagian dari ketahanan sebuah bangsa.

Naskah ini tidak dimaksudkan sebagai pamflet anti-pemerintah, propaganda anti-Barat, anti-Amerika Serikat, anti-China, anti-Rusia, anti-Arab, ataupun anti-kekuatan asing lainnya. Setiap bangsa harus dinilai secara proporsional berdasarkan bukti, kontribusi, kepentingan, serta dampak hubungannya terhadap rakyat Indonesia.

Naskah ini juga tidak mengundang intervensi asing. Indonesia harus menentukan jalan masa depannya sendiri melalui rakyat, ilmu pengetahuan, dialog, dan mekanisme konstitusional. Iran tidak diminta untuk menunjukkan jalan bagi Indonesia, apalagi menentukan bentuk negara Indonesia.

Yang ditawarkan adalah dialog peradaban yang sah, terbuka, damai, bermartabat, dan berbasis ilmu. Dialog tersebut diharapkan mampu mempertemukan pengalaman, pemikiran, sejarah, teknologi, kepemimpinan, ekonomi, dan tantangan kemanusiaan tanpa menghilangkan kedaulatan masing-masing bangsa.

Sekolah Negarawan juga tidak menempatkan pesantren, hawzah, dan kampus sebagai program

formal utama. Lembaga-lembaga tersebut merupakan bagian dari ekosistem masyarakat dan pengetahuan yang dapat dibaca, diajak berdialog, serta diuji keberpihakannya.

Orientasi utamanya adalah jalur rakyat, di mana mencari dan memperkuat simpul-simpul yang benar-benar mengasuh, membela, mendidik, memenuhi hak, menjaga martabat, dan tidak ikut meyatimkan rakyat.

Naskah ini berpijak pada keyakinan bahwa kebangkitan bangsa tidak dimulai dari perebutan kekuasaan. Kebangkitan dimulai dari tata nilai yang menyelamatkan manusia. Manusia yang diselamatkan akan membenahi keluarga, desa, dan masyarakatnya. Masyarakat yang sehat akan membangkitkan bangsa.

Bangsa yang memiliki tata nilai, ilmu, dan kepemimpinan yang amanah akan mampu membentuk negara yang benar-benar meletakkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan.

Alur yang ditawarkan adalah:



Islam dalam alur tersebut tidak ditempatkan sebagai simbol ketatanegaraan, melainkan sebagai sumber nilai tentang tauhid, amanah, keadilan, musyawarah, ilmu, tanggung jawab, perlindungan

terhadap kaum lemah, pembelaan terhadap yang tertindas, dan kemaslahatan.

Kebangkitan tata nilai Islam hanya berarti apabila ia mampu menghadirkan keadilan dalam kehidupan rakyat, bukan sekadar memperluas simbol agama dalam struktur kekuasaan.

Penulis menyadari bahwa naskah ini mengangkat persoalan yang luas, sensitif, dan berpotensi melahirkan perbedaan pandangan. Tidak semua pertanyaan dapat dijawab secara final. Tidak semua peristiwa memiliki bukti yang sempurna. Tidak semua hubungan kekuasaan mudah dibaca secara hitam-putih.

Karena itu, naskah ini tidak meminta pembaca menerima seluruh argumentasinya tanpa kritik. Naskah ini justru mengundang pembaca untuk menguji setiap tesis berdasarkan arsip, dokumen, data, konstitusi, ilmu pengetahuan, serta pengalaman masing-masing bangsa. Kebenaran ilmiah harus ditempatkan lebih tinggi daripada kepentingan untuk membenarkan pandangan sendiri.

Kepada para akademisi, ulama, pusat studi strategis, pembuat kebijakan, intelektual, mahasiswa, dan masyarakat sipil di Tehran, Qom, serta berbagai wilayah Republik Islam Iran, penulis menyampaikan penghargaan atas kesediaan membaca naskah ini. Semoga karya ini menjadi pintu bagi percakapan yang jujur mengenai manusia, rakyat, tata nilai, sejarah, kepemimpinan, negara, dan peradaban.

Harapan penulis sederhana. Indonesia dan Iran diharapkan dapat saling membaca tanpa saling

menguasai, saling belajar tanpa saling meniru, saling menghormati tanpa menghapus perbedaan, serta bekerja sama tanpa kehilangan kedaulatan dan identitas masing-masing.

Di dalam perjalanan naskah ini, pembaca akan menemukan satu benang merah yang menghubungkan empat gagasan besar. Cak Nun mengingatkan Indonesia agar kembali membaca manusia, rakyat, dan tata nilai sebagai dasar kehidupan berbangsa. Imam Khomeini menunjukkan bahwa perubahan peradaban memerlukan keberanian untuk diwujudkan dalam bangunan konstitusional. Sekolah Negarawan mengajukan Amandemen Kelima sebagai ikhtiar konstitusional Indonesia untuk terus mencari bentuk negara rakyat sesuai Pancasila dan cita-cita kemerdekaan. Ayatollah Ali Khamenei memperlihatkan bagaimana kepemimpinan berusaha menjaga kesinambungan konstitusi, kedaulatan, dan ketahanan negara di tengah perubahan zaman.

Benang merah tersebut tidak dimaksudkan untuk menyamakan Indonesia dengan Iran ataupun menyamakan para tokoh yang dibahas. Justru sebaliknya, naskah ini hendak menunjukkan bahwa setiap bangsa harus menemukan jalannya sendiri. Yang dapat dipelajari bukanlah bentuk sistemnya, melainkan keberanian menghubungkan tata nilai, manusia, konstitusi, kepemimpinan, dan negara menjadi satu bangunan peradaban yang utuh.

Pada akhirnya, setiap ilmu akan diuji oleh manfaatnya bagi manusia. Setiap kepemimpinan akan diuji oleh keberpihakannya kepada rakyat. Setiap

negara akan diuji oleh keadilan yang dihadirkannya. Dan setiap peradaban akan diuji oleh kemampuannya menjaga martabat manusia.

Semoga Allah SWT membimbing ikhtiar ini, melindunginya dari kesombongan ilmu dan kepentingan kekuasaan, serta menjadikannya bagian kecil dari usaha menegakkan keadilan, menyelamatkan manusia, dan menghadirkan kemaslahatan bagi Indonesia, Iran, dunia Islam, dan umat manusia.

Jakarta, Indonesia
Rinto Setiyawan

Pendiri Sekolah Negarawan

Ringkasan Eksekutif

Peradaban tidak hanya dibangun oleh kekayaan alam, luas wilayah, jumlah penduduk, kekuatan militer, ataupun kemajuan teknologi. Semua unsur tersebut penting, tetapi tidak dengan sendirinya menjamin tegaknya suatu peradaban. Sejarah menunjukkan bahwa bangkit dan runtuhnya suatu bangsa pada akhirnya sangat ditentukan oleh kualitas manusia, tata nilai, dan kepemimpinan yang mengarahkan kehidupan bersama.

Manusia membentuk masyarakat. Dari masyarakat lahir kepemimpinan. Kepemimpinan membangun dan mengoperasikan negara. Melalui negara, suatu bangsa menentukan apakah kekuasaan akan digunakan untuk menjaga manusia dan rakyatnya, atau justru menjadikan rakyat sebagai objek dari kekuasaan itu sendiri. Ketika tata nilai melemah, kepemimpinan kehilangan amanah, dan negara menjauh dari rakyat, kemunduran peradaban dapat berlangsung meskipun seluruh institusi formal masih tampak berdiri.

Cendekiawan Muslim sekaligus budayawan Indonesia, Emha Ainun Nadjib atau Cak Nun, telah lama mengingatkan bahwa salah satu penyebab kehancuran peradaban di Indonesia, dan mungkin juga di dunia, adalah krisis kepemimpinan. Krisis tersebut tidak hanya terjadi dalam negara dan pemerintahan, tetapi juga dalam kehidupan sosial, kebudayaan, pendidikan, ekonomi, bahkan kepemimpinan agama dan pelaksanaan ibadah *mahdhah*. Peringatan tersebut

menunjukkan bahwa persoalan kepemimpinan tidak berhenti pada siapa yang menduduki jabatan formal. Krisis dapat terjadi ketika manusia yang memimpin kehilangan orientasi nilai, kedalaman ilmu, tanggung jawab moral, dan empati terhadap penderitaan rakyat.

Naskah ini berangkat dari kegelisahan tersebut, tetapi tidak berhenti pada kritik terhadap individu-individu yang memimpin. Sekolah Negarawan mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar yaitu bagaimana suatu bangsa membentuk manusia dan menghasilkan pemimpinnya?

Apakah kepemimpinan hanya ditentukan oleh kualitas pribadi seseorang, ataukah ia merupakan hasil dari sejarah panjang yang membentuk tata nilai, pendidikan, kebudayaan, struktur sosial, sistem ekonomi, konstitusi, kelembagaan negara, serta hubungan bangsa tersebut dengan dunia?

Pertanyaan ini penting karena kepemimpinan tidak lahir dari ruang kosong. Pemimpin dibentuk oleh masyarakatnya. Masyarakat dibentuk oleh nilai dan pengalaman sejarahnya. Negara kemudian mengatur, memperkuat, atau justru merusak proses pembentukan manusia dan kepemimpinan tersebut.

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara terbesar di dunia Islam. Negara ini memiliki Presiden, konstitusi, parlemen, pemilihan umum, aparat keamanan, angkatan bersenjata, lembaga peradilan, birokrasi nasional, hubungan diplomatik, wilayah yang diakui, serta kedudukan sebagai negara berdaulat dalam sistem internasional. Dari sudut pandang formal,

Indonesia memiliki hampir seluruh perangkat yang diperlukan oleh sebuah negara modern.

Namun Sekolah Negarawan mengajukan pertanyaan yang lebih dalam yaitu apakah rakyat Indonesia benar-benar telah menjadi pemilik negara, ataukah rakyat hanya menjadi sumber legitimasi periodik bagi struktur kekuasaan?

Pertanyaan tersebut tidak dimaksudkan untuk menyangkal keberadaan Republik Indonesia ataupun mengurangi kedudukannya sebagai negara yang sah. Yang dipersoalkan adalah hubungan substantif antara rakyat dan negara. Apakah rakyat benar-benar ditempatkan sebagai pemilik kedaulatan dan pemilik arsitektur kekuasaan, ataukah mereka hanya dipanggil pada saat pemilihan umum, lalu kembali dijauhkan dari proses penentuan arah negara?

Dalam pemikiran Cak Nun, Indonesia tidak cukup dibaca hanya dari pusat kekuasaan. Bahkan sejak karya awalnya, *Indonesia Bagian dari Desa Saya*, ia telah memberi isyarat bahwa Indonesia harus dibaca dari desa, dari manusia, dari rakyat, dan dari ruang hidup sehari-hari tempat nilai diuji secara nyata. Negara tidak hanya hidup di dalam konstitusi, istana, parlemen, kementerian, atau lembaga peradilan. Negara hidup dalam pengalaman rakyat ketika memperoleh pendidikan, mencari penghidupan, menjalankan agama, menghadapi hukum, memperoleh pelayanan, dan berjuang mempertahankan martabat hidupnya.

Cak Nun juga mengingatkan bahwa Indonesia modern lahir dari kumpulan kerajaan, kesultanan, komunitas adat, desa, dan berbagai bentuk kehidupan

sosial yang telah memiliki tata nilai serta struktur kepemimpinannya sendiri. Ketika kumpulan dunia lama tersebut dilebur ke dalam bentuk negara republik yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, Indonesia sekaligus memasuki globalisasi nilai, pemikiran, hukum, sosial, ekonomi, dan kelembagaan modern.

Masalahnya, perubahan tersebut berlangsung sangat cepat. Bangsa yang selama berabad-abad hidup dalam beragam tata sosial, kerajaan, kesultanan, dan komunitas lokal tiba-tiba harus hadir sebagai republik modern di tengah pertarungan kekuatan global. Indonesia masuk ke dalam sistem dunia ketika masyarakat, negara, dan kepemimpinannya belum sepenuhnya siap memahami konsekuensi globalisasi tersebut.

Ketidaksiapan tersebut tidak hanya menyangkut teknologi atau ekonomi. Ketidaksiapan tersebut juga menyangkut kesiapan nilai, ilmu pengetahuan, konstitusi, pendidikan, kepemimpinan, dan kemampuan rakyat memahami perubahan dunia. Tantangan tersebut menjadi semakin berat pada masa modern ketika globalisasi tidak lagi hanya berlangsung melalui perdagangan dan diplomasi, tetapi juga melalui media, data, teknologi digital, algoritma, kecerdasan buatan, sistem pendidikan, budaya populer, serta perang pengetahuan dan persepsi. Karena itu, naskah ini mengajukan tesis utama, yaitu Iran tidak akan memahami Indonesia jika tidak memahami dunia yang membentuk Indonesia.

Yang dimaksud dengan "dunia" bukan hanya konstelasi hubungan internasional saat ini. Dunia dalam

naskah ini adalah seluruh jaringan peradaban, agama, perdagangan, ilmu pengetahuan, kekuasaan, kolonialisme, teknologi, dan geopolitik yang selama berabad-abad membentuk manusia Indonesia, masyarakat Indonesia, kepemimpinan Indonesia, serta arsitektur negara Indonesia.

Indonesia tidak lahir dari ruang sejarah yang tertutup. Jauh sebelum kolonialisme Eropa hadir secara langsung, Nusantara telah terhubung dengan jaringan dunia yang luas. Jalur perdagangan Samudra Hindia menghubungkan kepulauan Nusantara dengan Arab, Persia, India, China, Afrika Timur, Asia Tenggara, dan berbagai wilayah lain. Bersama perdagangan mengalir agama, ilmu pengetahuan, bahasa, teknologi, kebudayaan, sanad keilmuan, sistem perdagangan, pola kekuasaan, dan hubungan sosial yang ikut membentuk wajah masyarakat Nusantara.

Dalam sejarah Islam Indonesia, jaringan Arab memiliki peranan penting dalam dakwah, perdagangan, pendidikan, genealogi ulama, bahasa, tradisi keilmuan, dan pembentukan identitas keagamaan. Hubungan dengan Persia dan India juga meninggalkan jejak dalam kebudayaan, perdagangan, tasawuf, bahasa, sastra, dan berbagai ekspresi keagamaan masyarakat Nusantara. Sementara hubungan dengan China membentuk perdagangan, teknologi, komunitas, kebudayaan, dan berbagai unsur kehidupan sosial yang berkembang dalam waktu panjang.

Namun naskah ini tidak membaca jaringan-jaringan tersebut secara romantis ataupun hitam-putih.

Setiap jaringan dunia dapat membawa ilmu, manfaat, dan pembaruan, tetapi dapat pula membawa kepentingan, hierarki sosial, otoritas budaya, pengaruh, dan cara pandang tertentu terhadap masyarakat yang menerimanya. Atas dasar itu, Sekolah Negarawan membedakan secara tegas antara Islam sebagai wahyu dan Arab sebagai aktor sejarah.

Islam merupakan sumber tata nilai primer yang membawa prinsip-prinsip universal tentang tauhid, amanah, keadilan, ilmu, musyawarah, perlindungan terhadap kaum lemah, dan kemaslahatan. Adapun Arab, Persia, India, China, Eropa, Jepang, Amerika Serikat, Rusia, maupun bangsa-bangsa lainnya merupakan aktor sejarah yang memiliki kontribusi, kepentingan, keberhasilan, dan keterbatasannya masing-masing.

Islam tidak dapat dipersalahkan atas kepentingan orang Arab, elite Arab, negara Arab, ataupun jaringan Timur Tengah tertentu. Sebaliknya, Arab juga tidak patut dipuja secara mutlak hanya karena Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab. Pembedaan ini penting agar kesucian wahyu tidak dicampuradukkan dengan kepentingan manusia yang bergerak di dalam sejarah.

Setelah fase perjumpaan awal tersebut, perubahan besar terjadi sejak abad ke-16 ketika Portugis masuk melalui jalur maritim rempah. Spanyol ikut memperebutkan kawasan kepulauan rempah. Kemudian VOC hadir sebagai korporasi dagang yang memperoleh kekuasaan pemerintahan, ekonomi, dan militer. Hindia Belanda melanjutkannya melalui

administrasi kolonial, hukum, birokrasi, pendidikan, klasifikasi sosial, ekonomi ekstraktif, serta pola hubungan vertikal antara penguasa dan masyarakat.

Kolonialisme Belanda tidak hanya meninggalkan jalan, gedung, arsip, ataupun batas administrasi. Kolonialisme Belanda juga meninggalkan cara negara memandang rakyat, cara birokrasi bekerja, sistem hukum, struktur ekonomi, serta mentalitas kekuasaan yang sebagian dapat bertahan setelah berakhirnya penjajahan formal.

Pendudukan Jepang membawa pola kekuasaan yang berbeda. Jepang melakukan mobilisasi masyarakat, membangun organisasi, memperluas struktur militer, dan mempercepat lahirnya kelompok-kelompok yang kemudian memainkan peranan dalam proses kemerdekaan. Namun pendudukan tersebut juga menghadirkan kekerasan, eksploitasi, dan penderitaan yang besar.

Setelah kemerdekaan, Indonesia kembali masuk dalam medan perang global melalui konfigurasi Perang Dingin. Indonesia menjadi ruang penting dalam persaingan ideologi, ekonomi, diplomasi, dan strategi internasional. Episode pemerintahan tahun 1965 tidak cukup dipahami hanya sebagai persoalan internal Indonesia. Episode tersebut harus dibaca bersama konteks Perang Dingin, hubungan kekuatan global, operasi diplomatik, kepentingan ekonomi, dan dokumen-dokumen yang telah dideklasifikasi.

Memasuki abad ke-21, Republik Rakyat Tiongkok hadir semakin kuat dalam perdagangan, teknologi, industri, pembiayaan, pembangunan

infrastruktur, energi, mineral kritis, dan rantai pasok global. Peran tersebut harus dibaca berdasarkan bukti, tanpa prasangka anti-China, tetapi juga tanpa menutup mata terhadap kemungkinan ketergantungan dan ketimpangan hubungan.

Federasi Rusia dibahas secara proporsional sejauh bukti sejarah dan hubungan nyata menunjukkan peran yang dapat diverifikasi. Amerika Serikat dibaca terutama dalam hubungannya dengan Perang Dingin, konfigurasi 1965, ekonomi global, teknologi, pendidikan, keamanan, dan sistem internasional. Negara-negara Arab dan jaringan Timur Tengah kontemporer juga dibaca melalui hubungan agama, pendidikan, filantropi, ekonomi, sosial, dan pengaruh sosial yang berkembang di Indonesia.

Di luar negara-negara tersebut, perkembangan Indonesia turut dipengaruhi oleh lembaga keuangan internasional, korporasi multinasional, perusahaan konsultan, organisasi internasional, media global, teknologi digital, platform data, kecerdasan buatan, sistem pendidikan, standar pengetahuan, jaringan keagamaan transnasional, serta elite domestik yang membuka, mengatur, atau memanfaatkan hubungan dengan kekuatan-kekuatan tersebut.

Dalam konteks inilah naskah ini membahas kolonialisme struktural dan Invited Colonialism. Penguasaan pada masa kini tidak selalu datang melalui tentara dan pendudukan wilayah. Penguasaan dapat berlangsung melalui kontrak, utang, konsesi, ketergantungan teknologi, penguasaan data, standar pendidikan, penetrasi pasar, dominasi pengetahuan,

atau kebijakan yang memberikan ruang terlalu besar kepada kekuatan eksternal.

Invited Colonialism merujuk pada keadaan ketika dominasi eksternal memperoleh jalan bukan hanya karena tekanan dari luar, tetapi juga karena undangan, konsesi, kompromi, ketergantungan, atau keputusan elite domestik. Dalam keadaan seperti ini, kekuatan asing tidak selalu harus merebut pintu negara karena pintu tersebut telah dibukakan dari dalam.

Namun naskah ini tidak disusun untuk mencari musuh ataupun menuduh satu bangsa sebagai sumber tunggal seluruh persoalan Indonesia. Naskah ini bukan propaganda anti-Barat, anti-Amerika, anti-China, anti-Rusia, anti-Arab, maupun anti-kekuatan asing. Interaksi internasional merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari oleh setiap bangsa.

Persoalan sesungguhnya adalah apakah Indonesia memiliki manusia, ilmu pengetahuan, tata nilai, kepemimpinan, dan arsitektur negara yang cukup kuat untuk mengelola hubungan dunia secara merdeka, adil, dan berpihak kepada rakyat.

Di sinilah kemerdekaan formal perlu dibedakan dari kemerdekaan substantif. Kemerdekaan formal ditandai oleh konstitusi, bendera, pemerintahan, wilayah, diplomasi, dan pengakuan internasional. Kemerdekaan substantif menuntut kemampuan bangsa menentukan arah pembangunan, menguasai pengetahuan dan teknologi, menjaga sumber daya, mengendalikan data, menyusun sistem pendidikan, mengatur ekonomi, dan menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan.

Sekolah Negarawan berpandangan bahwa Indonesia telah mencapai kemerdekaan formal, tetapi masih menghadapi kolonialisme struktural serta hilangnya rakyat dari sebagian arsitektur negara. Karena itu, persoalan Indonesia tidak cukup diselesaikan dengan pergantian individu atau pemerintahan. Sebuah sistem akan terus menghasilkan pola kepemimpinan yang serupa apabila tata nilai, pendidikan, struktur ekonomi, budaya sosial, dan desain negara yang melahirkannya tidak diperbaiki.

Dalam naskah ini, Cak Nun ditempatkan sebagai alarm Indonesia. Cak Nun membaca luka Indonesia dari dalam yaitu dari desa, manusia, rakyat, kebudayaan, agama, dan pengalaman hidup sehari-hari. Cak Nun mengingatkan bahwa rakyat dapat diyatimkan oleh negara, pemimpin dapat kehilangan empati, agama dapat kehilangan kedalaman, dan bangsa dapat memasuki globalisasi tanpa kesiapan nilai serta ilmu pengetahuan yang memadai.

Dari pihak Iran, Ayatollah Sayid Ali Khamenei ditempatkan sebagai cermin pengalaman Iran dalam membangun ketahanan peradaban. Pembahasan mengenai beliau mencakup pentingnya spiritualitas, kekuatan batin, tawakal, kepemimpinan nilai, keteguhan menghadapi tekanan dan hegemoni global—termasuk konfrontasi panjang Iran dengan kebijakan Amerika Serikat—serta keberpihakan kepada kaum tertindas atau *mustad'afin* tanpa membatasi pembelaan hanya pada kelompok atau mazhab tertentu.

Dalam pandangan tersebut, umat Islam tidak semestinya dipandang sebagai kelompok-kelompok

yang hidup terpisah tanpa tanggung jawab satu sama lain. Penderitaan satu bagian umat harus membangkitkan kesadaran bagian lainnya. Kesadaran bahwa umat Islam merupakan satu tubuh menjadi sumber solidaritas, tanggung jawab moral, dan pembelaan terhadap mereka yang tertindas. Namun naskah ini tidak menyamakan Cak Nun dengan Khamenei. Keduanya lahir dari sejarah, kedudukan, fungsi, tradisi, dan sistem pemerintahan yang berbeda.

Cak Nun ditempatkan sebagai cermin yang membaca luka Indonesia dari dalam masyarakatnya. Cak Nun berbicara dari ruang kebudayaan, spiritualitas rakyat, desa, dan kehidupan sehari-hari. Khamenei ditempatkan sebagai cermin pengalaman Iran dalam mempertahankan martabat bangsa, identitas keislaman, kesinambungan kepemimpinan nilai, dan ketahanan menghadapi tekanan global.

Keduanya bukan dua tokoh yang hendak disejajarkan secara kelembagaan. Keduanya merupakan dua cermin peradaban yang berbeda. Cak Nun membantu Iran memahami kegelisahan dan luka Indonesia. Pengalaman kepemimpinan Khamenei membantu Indonesia melihat bagaimana spiritualitas, keteguhan nilai, dan kesadaran tentang kaum tertindas dapat menjadi sumber ketahanan suatu bangsa.

Naskah ini juga tidak mengajak Indonesia meniru sistem ketatanegaraan Iran, tidak menawarkan ekspor mazhab, dan tidak meminta Iran mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Perbedaan sejarah, masyarakat, konstitusi, dan tradisi kedua negara harus dihormati. Yang ditawarkan Sekolah Negarawan

adalah kerja sama peradaban yang sah, terbuka, damai, bermartabat, dan berbasis ilmu. Kerja sama tersebut bukan intervensi pemerintah dan bukan rekayasa kekuasaan. Ruang kerja sama ini merupakan ruang dialog untuk mempelajari sejarah, manusia, tata nilai, kepemimpinan, ketatanegaraan, teknologi, kecerdasan buatan, ekonomi, serta tantangan dunia Islam di tengah perubahan global.

Sekolah Negarawan juga tidak menempatkan pesantren, hawzah, atau kampus sebagai program kerja sama formal utama. Lembaga-lembaga tersebut merupakan bagian dari ekosistem sosial dan intelektual yang dapat dibaca, diajak berdialog, serta diuji keberpihakannya kepada rakyat. Fokus utama naskah ini adalah membangun jalur rakyat yaitumenemukan dan memperkuat simpul-simpul yang benar-benar mengasuh, membela, mendidik, memenuhi hak, dan tidak ikut meyatimkan rakyat.

Alur besar yang ditawarkan naskah ini adalah:



Islam dalam kerangka ini bukan sekadar identitas formal ataupun simbol negara. Islam ditempatkan sebagai sumber nilai tentang tauhid,

amanah, keadilan, ilmu, musyawarah, tanggung jawab, pembelaan terhadap kaum lemah, dan kemaslahatan. Kebangkitan tata nilai Islam hanya memiliki arti apabila mampu menyelamatkan manusia, memulihkan masyarakat, memperkuat rakyat, membentuk kepemimpinan yang amanah, serta mengendalikan negara agar tidak berubah menjadi alat dominasi.

Pada akhirnya, naskah ini berdiri di atas satu rangkaian pemikiran, di mana peradaban dibangun oleh manusia. Manusia dibentuk oleh tata nilai. Tata nilai berkembang melalui sejarah. Sejarah dibentuk oleh perjumpaan berbagai jaringan peradaban dunia. Dari manusia lahir kepemimpinan. Melalui kepemimpinan dibentuk negara. Dan melalui negara, suatu bangsa menentukan apakah rakyat akan menjadi pemilik kedaulatan atau hanya menjadi sumber legitimasi kekuasaan.

Karena itu, Iran tidak akan memahami Indonesia hanya dengan membaca pemerintahannya, pemilunya, statistik ekonominya, atau hubungan diplomatiknya. Iran harus memahami dunia yang membentuk manusia Indonesia, rakyat Indonesia, luka Indonesia, kepemimpinan Indonesia, dan arsitektur negaranya.

Melalui pemahaman tersebut, Sekolah Negarawan mengundang Republik Islam Iran untuk membangun kemitraan peradaban yang menghormati kedaulatan masing-masing bangsa, menolak intervensi, menjaga perbedaan mazhab dan sistem ketatanegaraan, serta menjadikan ilmu pengetahuan, spiritualitas, keadilan, dan pembelaan terhadap rakyat sebagai

landasan kerja sama bagi Indonesia, Iran, dunia Islam, dan umat manusia.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

Pernyataan Posisi
(Statement of Position)

Naskah ini disampaikan dari posisi Sekolah Negarawan sebagai ruang pemikiran independen yang berusaha membaca Indonesia melalui hubungan antara manusia, tata nilai, sejarah, kepemimpinan, rakyat, dan arsitektur negara. Sekolah Negarawan bukan lembaga negara, bukan partai politik, bukan organisasi oposisi, bukan lembaga pendidikan agama formal, dan bukan institusi akademik konvensional. Sekolah Negarawan merupakan ikhtiar intelektual untuk memahami mengapa Indonesia, meskipun telah memiliki kemerdekaan formal dan seluruh perangkat negara modern, belum sepenuhnya menemukan bentuk negara yang menempatkan rakyat sebagai pemilik struktur kekuasaan.

Seluruh analisis, interpretasi, tesis, dan rekomendasi dalam naskah ini merupakan tanggung jawab intelektual penulis dan Sekolah Negarawan. Naskah ini tidak mewakili sikap resmi Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Republik Islam Iran, lembaga negara, organisasi, kelompok keagamaan, ataupun institusi lain di kedua negara.

Posisi naskah ini bukan posisi anti-negara. Naskah ini mengakui Republik Indonesia sebagai negara yang sah, berdaulat, memiliki wilayah, pemerintahan, konstitusi, hubungan diplomatik, serta pengakuan internasional. Yang dikaji secara kritis bukan keberadaan Indonesia sebagai negara, melainkan

hubungan antara negara dan rakyatnya, apakah rakyat telah sungguh-sungguh ditempatkan sebagai pemilik kedaulatan, atau masih lebih sering diperlakukan sebagai sumber legitimasi periodik bagi struktur kekuasaan.

Atas dasar itu, naskah ini tidak disusun sebagai pamflet anti-pemerintah dan tidak diarahkan untuk menyerang pemerintahan tertentu. Pergantian pemerintahan tidak selalu menyelesaikan persoalan apabila desain kelembagaan, budaya pemerintahan, struktur ekonomi, sistem pendidikan, tata nilai, dan hubungan kekuasaan yang melahirkannya tidak berubah. Kajian ini karena itu diarahkan kepada struktur, bukan semata-mata kepada individu; kepada desain negara, bukan hanya kepada pergantian penguasa; serta kepada proses sejarah yang membentuk kepemimpinan, bukan hanya kepada perilaku pemimpin pada satu periode tertentu.

Naskah ini juga tidak disampaikan dari posisi anti-Barat, anti-Amerika Serikat, anti-China, anti-Rusia, anti-Arab, ataupun anti-kekuatan asing lainnya. Setiap bangsa dan jaringan peradaban memiliki kontribusi, kepentingan, keberhasilan, kesalahan, serta keterbatasannya masing-masing. Seluruh aktor dibaca secara proporsional berdasarkan bukti, konteks sejarah, dan bentuk hubungan nyatanya dengan Indonesia.

Belanda dibaca dalam konteks kolonialisme dan warisan institusional. Portugis dan Spanyol dibaca dalam konteks ekspansi maritim awal. Jepang dibaca dalam konteks pendudukan dan mobilisasi. Amerika Serikat dibaca terutama melalui konfigurasi Perang

Dingin, perkembangan tahun 1965, ekonomi sosial, teknologi, pendidikan, dan tatanan global. Republik Rakyat Tiongkok dibaca melalui perdagangan, industri, infrastruktur, pembiayaan, teknologi, mineral kritis, dan rantai pasok kontemporer. Federasi Rusia dibaca sejauh bukti menunjukkan peran nyata. Jaringan Arab, Persia, India, China, dan Timur Tengah dibaca melalui agama, perdagangan, kebudayaan, pendidikan, ilmu, otoritas sosial, dan kepentingan sejarah yang menyertainya.

Dalam membaca hubungan antara agama dan sejarah, naskah ini membedakan secara tegas antara Islam sebagai wahyu dan manusia sebagai pelaku sejarah. Islam ditempatkan sebagai tata nilai primer yang membawa tauhid, amanah, keadilan, ilmu, musyawarah, tanggung jawab, perlindungan terhadap kaum lemah, dan kemaslahatan. Adapun orang Arab, elite Arab, negara Arab, jaringan Timur Tengah, masyarakat Persia, maupun kelompok-kelompok Muslim lainnya tetap dipahami sebagai aktor sejarah yang dapat membawa ilmu dan manfaat, tetapi juga memiliki kepentingan, keterbatasan, serta kemungkinan menyimpang dari nilai Islam.

Karena itu, kritik terhadap tindakan orang Arab, elite Arab, negara Arab, atau jaringan Timur Tengah tertentu tidak dapat dianggap sebagai kritik terhadap Islam. Sebaliknya, penghormatan kepada Al-Qur'an dan bahasa Arab tidak mengharuskan pemujaan mutlak terhadap seluruh tindakan aktor Arab dalam sejarah. Pembedaan ini diperlukan untuk menjaga kemurnian

agama sekaligus mempertahankan kejujuran dalam membaca sejarah.

Posisi naskah ini juga bukan posisi yang mengajak Indonesia meniru Iran. Republik Indonesia dan Republik Islam Iran memiliki sejarah, masyarakat, konstitusi, mazhab, struktur sosial, serta pengalaman yang berbeda. Pengalaman Iran dapat dipelajari, tetapi tidak dapat dipindahkan begitu saja ke Indonesia. Sistem ketatanegaraan Iran bukan barang ekspor, sebagaimana pengalaman Indonesia juga tidak dapat dipaksakan kepada Iran.

Ayatollah Sayid Ali Khamenei ditempatkan dalam naskah ini sebagai cermin pengalaman Iran mengenai spiritualitas, ketahanan batin, tawakal, kepemimpinan nilai, pembelaan terhadap *mustad'afin*, kesadaran umat Islam, dan keteguhan menghadapi tekanan serta hegemoni global. Beliau tidak ditempatkan sebagai model kelembagaan yang harus diadopsi Indonesia.

Demikian pula Emha Ainun Nadjib atau Cak Nun ditempatkan sebagai alarm Indonesia yang membaca luka bangsa dari dalam kehidupan rakyat. Pemikirannya mengenai krisis kepemimpinan, rakyat yang diyatimkan, negara yang belum menjadi rumah rakyat, ketidaksiapan menghadapi globalisasi, serta pentingnya membaca Indonesia dari desa dan ruang hidup sehari-hari digunakan sebagai pintu masuk moral dan peradaban. Cak Nun tidak disamakan dengan Khamenei. Keduanya hadir sebagai dua cermin dari pengalaman sejarah dan ruang pengabdian yang berbeda.

Posisi ini penting agar dialog Indonesia–Iran tidak berubah menjadi kultus tokoh, ekspor sistem ketatanegaraan, persaingan mazhab, ataupun pencarian legitimasi ideologis. Naskah ini justru menghendaki dialog yang dewasa, yang mampu belajar dari pengalaman pihak lain tanpa kehilangan kedaulatan berpikir dan jati diri masing-masing bangsa.

Konsep kemerdekaan formal, kolonialisme struktural, hilangnya rakyat dari arsitektur negara, dan *Invited Colonialism* disampaikan sebagai tesis akademik, bukan sebagai tuduhan pidana atau penetapan kesalahan terhadap aktor tertentu. Istilah-istilah tersebut digunakan untuk membaca struktur hubungan kekuasaan yang memungkinkan kepentingan eksternal memperoleh pengaruh melalui ketergantungan ekonomi, konsesi sumber daya, utang, teknologi, data, pendidikan, media, pengetahuan, kontrak, dan keputusan elite domestik.

Invited Colonialism secara khusus tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa Indonesia dijajah kembali dalam pengertian hukum internasional. Istilah ini menunjuk pada situasi ketika dominasi atau ketergantungan memperoleh jalan melalui undangan, kebijakan, kompromi, konsesi, atau keputusan dari dalam negeri sendiri. Konsep tersebut harus diuji berdasarkan fakta dan tidak boleh digunakan untuk menggantikan penelitian dengan kecurigaan.

Naskah ini menolak teori konspirasi sebagai metode berpikir. Untuk klaim sensitif mengenai keterlibatan negara, lembaga, korporasi, jaringan keagamaan, intelijen, ataupun elite, pembuktian harus

bertumpu pada arsip, dokumen resmi, data empiris, sumber akademik, atau bukti lain yang dapat diverifikasi. Apabila suatu persoalan masih diperdebatkan, naskah harus menyatakannya sebagai perdebatan, bukan mengubah dugaan menjadi kepastian.

Naskah ini juga tidak mengajak pihak asing melakukan intervensi terhadap urusan dalam negeri Indonesia. Sekolah Negarawan menghormati kedaulatan Indonesia dan Iran, prinsip non-intervensi, hukum internasional, serta hak setiap bangsa menentukan jalan konstitusionalnya sendiri. Dialog yang ditawarkan tidak diarahkan untuk merekayasa kekuasaan, mendukung pergantian pemerintahan, membangun jaringan kekuasaan tersembunyi, ataupun memengaruhi proses pemerintahan domestik.

Kerja sama yang ditawarkan adalah kerja sama peradaban yang sah, terbuka, damai, bermartabat, dan berbasis ilmu. Kerja sama tersebut dapat berlangsung melalui dialog sejarah, pertukaran pemikiran, penelitian, pembacaan konstitusi, pengembangan teknologi, kajian kecerdasan buatan, ekonomi, pembangunan manusia, kepemimpinan, dan penguatan tata nilai yang berpihak kepada rakyat.

Sekolah Negarawan tidak menempatkan pesantren, hawzah, dan kampus sebagai program formal utama kerja sama. Lembaga-lembaga tersebut dapat menjadi bagian dari ekosistem pengetahuan dan kehidupan masyarakat yang dibaca, diajak berdialog, atau diuji keberpihakannya. Namun Sekolah Negarawan bukan lembaga yang hendak membentuk

kerja sama pendidikan agama formal atau jaringan akademik konvensional sebagai tujuan utamanya.

Orientasi yang dipilih adalah jalur rakyat. Jalur rakyat berarti menemukan, membaca, menghubungkan, dan memperkuat simpul-simpul yang benar-benar mengasuh rakyat, membela rakyat, mendidik rakyat, memenuhi hak rakyat, menjaga martabat rakyat, dan tidak ikut meyatimkan rakyat. Simpul tersebut dapat hadir dalam berbagai bentuk, seperti keluarga, desa, komunitas, ulama, budayawan, profesional, pelaku ekonomi, lembaga sosial, pusat pengetahuan, ataupun bagian dari institusi negara yang masih bekerja dengan amanah.

Sekolah Negarawan menempatkan manusia dan rakyat sebagai pusat, sedangkan negara sebagai instrumen peradaban. Negara tidak boleh dipuja sebagai tujuan akhir, tetapi juga tidak boleh dilemahkan hingga kehilangan kemampuan melindungi rakyat. Negara harus cukup kuat untuk menjaga kedaulatan, tetapi juga harus cukup terkendali agar tidak mengambil alih kedaulatan rakyat.

Dalam kerangka tersebut, alur perubahan yang ditawarkan bukan dimulai dari perebutan kekuasaan, melainkan dari penyelamatan tata nilai dan manusia:



Kebangkitan tata nilai Islam yang dimaksud bukanlah formalisasi simbol agama, ekspor mazhab, ataupun penggunaan agama untuk membenarkan dominasi pejabat. Kebangkitan tersebut berarti menghadirkan amanah dalam kepemimpinan, keadilan dalam hukum dan ekonomi, ilmu dalam pengambilan keputusan, musyawarah dalam kekuasaan, perlindungan bagi yang lemah, serta kemaslahatan dalam penyelenggaraan negara.

Dari posisi itulah tesis ini disampaikan. Bukan dari luar Indonesia untuk menghakimi Indonesia, melainkan dari dalam kegelisahan terhadap nasib rakyat Indonesia; bukan untuk meminta Iran menunjukkan jalan, melainkan untuk mengundang Iran berdialog sebagai bangsa yang juga memiliki pengalaman sejarah, ketahanan, spiritualitas, dan pergulatan melawan dominasi global. Bukan untuk membangun permusuhan terhadap dunia, melainkan untuk memastikan Indonesia mampu berhubungan dengan dunia secara berdaulat.

Pada akhirnya, posisi naskah ini sederhana dan tegas, yaitu manusia harus diselamatkan sebelum kekuasaan diperluas. Rakyat harus dikembalikan sebagai pemilik sebelum negara diperkuat. Tata nilai harus dibangkitkan sebelum sistem diperbarui. Sejarah harus dibaca dengan jujur sebelum masa depan dirancang. Dan kerja sama antarbangsa hanya layak dibangun apabila menghormati kedaulatan, menolak dominasi, serta berpihak pada keadilan dan kemaslahatan rakyat.

A. Paradigma dan Catatan Metodologis *(Paradigm and Methodological Note)*

Naskah ini dibangun dengan cara berpikir yang menempatkan manusia, tata nilai, rakyat, kepemimpinan, negara, sejarah, dan peradaban sebagai unsur-unsur yang saling berhubungan. Indonesia tidak dibaca hanya sebagai negara modern yang lahir pada 17 Agustus 1945, melainkan sebagai hasil perjalanan panjang manusia Nusantara dalam berinteraksi dengan agama, perdagangan, ilmu pengetahuan, kekuasaan, kolonialisme, teknologi, dan berbagai jaringan peradaban dunia.

Karena itu, naskah ini tidak menggunakan satu disiplin ilmu sebagai satu-satunya alat baca. Kajian ini memadukan analisis peradaban, sejarah, hukum tata negara, hubungan internasional, ekonomi, studi kelembagaan, kajian teknologi, pendidikan, agama, kebudayaan, dan kepemimpinan. Pendekatan multidisipliner digunakan karena persoalan Indonesia tidak dapat dijelaskan secara memadai hanya sebagai persoalan kekuasaan, ekonomi, hukum, agama, ataupun sejarah yang berdiri sendiri.

Paradigma dasar naskah ini dapat dirumuskan sebagai peradaban yang dibangun oleh manusia. Manusia dibentuk oleh tata nilai. Tata nilai berkembang melalui sejarah. Sejarah dibentuk oleh perjumpaan berbagai jaringan peradaban dunia. Dari manusia lahir kepemimpinan. Melalui kepemimpinan dibentuk negara. Melalui negara, suatu bangsa menentukan apakah rakyat menjadi pemilik kedaulatan atau hanya menjadi sumber legitimasi kekuasaan.

Kerangka tersebut tidak dimaksudkan sebagai hubungan sebab-akibat yang sepenuhnya linear. Dalam kenyataan, manusia, nilai, sejarah, kepemimpinan, negara, dan peradaban saling memengaruhi secara timbal balik. Negara dapat dibentuk oleh manusia, tetapi negara juga dapat membentuk manusia melalui pendidikan, hukum, ekonomi, media, teknologi, dan kebijakan publik. Tata nilai dapat membentuk kepemimpinan, tetapi kepemimpinan juga dapat memperkuat, mengubah, atau merusak tata nilai masyarakat.

Paradigma ini digunakan untuk menghindari kecenderungan menjelaskan seluruh persoalan bangsa hanya melalui kualitas individu. Naskah ini mengakui pentingnya moral dan kemampuan seorang pemimpin, tetapi tidak menganggap pemimpin lahir secara terpisah dari masyarakat dan sistemnya. Kepemimpinan dipahami sebagai hasil pertemuan antara kualitas pribadi, pendidikan, kebudayaan, struktur sosial, proses pemerintahan, desain konstitusi, kepentingan ekonomi, serta warisan sejarah.

Karena itu, pertanyaan metodologis naskah ini bukan hanya, "Siapa yang memimpin Indonesia?" Pertanyaan yang lebih penting adalah, "Manusia seperti apa yang dibentuk oleh masyarakat dan negara Indonesia, sistem seperti apa yang menyeleksi pemimpin, serta struktur apa yang menentukan batas tindakan mereka?"

1. Manusia sebagai Pusat Analisis

Naskah ini menempatkan manusia sebagai pusat, bukan negara. Negara dipahami sebagai instrumen yang dibentuk untuk menjaga kehidupan, martabat, keamanan, keadilan, dan kemaslahatan manusia. Negara diperlukan, tetapi negara bukan tujuan akhir peradaban.

Atas dasar itu, keberhasilan negara tidak hanya diukur melalui stabilitas pemerintahan, pertumbuhan ekonomi, keberadaan pemilu, kelengkapan lembaga, atau pengakuan internasional. Negara juga harus dinilai dari keadaan manusia dan rakyat yang hidup di dalamnya, yaitu apakah mereka memperoleh keadilan, pendidikan, penghidupan, perlindungan hukum, ruang bermusyawarah, akses terhadap ilmu, dan kemampuan menentukan arah kehidupan bersama.

Istilah "rakyat" dalam naskah ini tidak digunakan sekadar sebagai kategori statistik atau kumpulan pemilih. Rakyat dipahami sebagai manusia yang secara moral dan konstitusional menjadi pemilik kedaulatan. Karena itu, persoalan hilangnya rakyat dari arsitektur negara dibaca sebagai persoalan substantif yaitu rakyat tetap disebut dalam konstitusi dan dipanggil dalam pemilu, tetapi belum tentu memiliki kendali nyata atas struktur kekuasaan.

2. Islam sebagai Tata Nilai Primer

Naskah ini menggunakan Islam sebagai tata nilai primer, bukan sebagai identitas yang harus diformalisasikan secara seragam. Islam dibaca melalui nilai tauhid, amanah, keadilan, ilmu, musyawarah,

tanggung jawab, keseimbangan, perlindungan terhadap kaum lemah, pembelaan terhadap mereka yang tertindas, dan kemaslahatan umum.

Istilah "primer" menunjukkan bahwa tata nilai mendahului struktur. Lembaga negara, hukum, teknologi, ekonomi, pendidikan, dan kekuasaan harus dinilai berdasarkan nilai yang dilayaninya. Sebuah sistem dapat tampak modern dan efisien, tetapi belum tentu adil. Sebuah institusi dapat memakai simbol agama, tetapi belum tentu menjalankan amanah.

Karena itu, kebangkitan tata nilai Islam yang dibicarakan dalam naskah ini bukanlah pemindahan sistem ketatanegaraan Iran ke Indonesia, bukan ekspor mazhab, bukan simbolisasi agama, dan bukan penguasaan negara oleh kelompok keagamaan. Kebangkitan tersebut berarti menghadirkan nilai Islam dalam cara manusia mendidik, memimpin, mengelola kekuasaan, membangun ekonomi, mengembangkan ilmu, dan melindungi rakyat.

Alur perubahan yang digunakan adalah:



Alur tersebut menunjukkan bahwa pembaruan tidak dimulai dari perebutan negara. Pembaruan dimulai dari manusia, tata nilai, dan ruang hidup tempat manusia dibentuk.

3. Pembedaan antara Wahyu dan Aktor Sejarah

Salah satu prinsip metodologis utama naskah ini adalah membedakan antara agama sebagai sumber nilai dan manusia sebagai pelaku sejarah. Islam dipahami sebagai wahyu. Adapun masyarakat Arab, Persia, India, China, Eropa, Jepang, Amerika Serikat, Rusia, dan bangsa-bangsa lainnya dipahami sebagai aktor sejarah. Setiap aktor sejarah dapat membawa ilmu, perdagangan, teknologi, kebudayaan, dan manfaat.

Namun setiap aktor juga dapat membawa kepentingan, dominasi, hierarki sosial, pengaruh, dan keterbatasan manusiawi.

Dengan prinsip ini, kontribusi jaringan Arab terhadap dakwah, pendidikan, perdagangan, sanad keilmuan, dan pembentukan identitas Islam di Nusantara tetap diakui. Namun tindakan orang Arab, elite Arab, negara Arab, atau jaringan Timur Tengah tertentu tidak otomatis dipandang sebagai representasi Islam.

Sebaliknya, kritik terhadap aktor Arab tidak dapat diperlakukan sebagai kritik terhadap wahyu Islam. Bahasa Al-Qur'an adalah bahasa Arab, tetapi fakta tersebut tidak menjadikan seluruh kepentingan golongan, kebudayaan, ataupun ekonomi aktor Arab identik dengan kehendak Allah.

Prinsip yang sama digunakan terhadap Iran. Pengalaman Republik Islam Iran dan pemikiran Sayid Ali Khamenei dapat dipelajari sebagai pengalaman sejarah, spiritual, politik, dan peradaban. Namun pengalaman tersebut tidak diperlakukan sebagai

kebenaran kelembagaan yang harus disalin oleh Indonesia.

4. Pendekatan Historis-Struktural

Naskah ini menggunakan pendekatan historis-struktural. Sejarah tidak hanya dibaca sebagai rangkaian tanggal, tokoh, perang, dan pergantian kekuasaan. Sejarah dibaca sebagai proses pembentukan struktur yang dapat bertahan melampaui zamannya.

Kolonialisme, misalnya, tidak hanya dipahami sebagai pendudukan wilayah oleh bangsa asing. Kolonialisme juga dibaca melalui warisan hukum, birokrasi, ekonomi ekstraktif, pendidikan, klasifikasi sosial, mentalitas elite, serta cara negara memandang rakyat. Sebagian warisan tersebut dapat tetap hidup setelah penjajahan formal berakhir.

Dengan pendekatan ini, kemerdekaan formal dibedakan dari kemerdekaan substantif. Kemerdekaan formal ditandai oleh wilayah, pemerintahan, konstitusi, bendera, diplomasi, dan pengakuan dunia. Kemerdekaan substantif menuntut kemampuan rakyat dan negara untuk menentukan arah pembangunan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, menjaga sumber daya, melindungi data, serta mengendalikan struktur ekonomi dan ketatanegaraannya sendiri.

Istilah "kolonialisme struktural" digunakan untuk membaca hubungan dominasi yang bertahan atau tumbuh melalui struktur, bukan selalu melalui pendudukan langsung. Adapun *Invited Colonialism* digunakan untuk membaca keadaan ketika pengaruh eksternal memperoleh ruang melalui undangan,

konsesi, kebijakan, kompromi, ketergantungan, atau keputusan elite domestik.

Kedua konsep tersebut diperlakukan sebagai alat analisis, bukan slogan. Penggunaannya harus disertai bukti mengenai aktor, mekanisme, kepentingan, dampak, dan hubungan sebab-akibat yang dapat diuji.

5. Indonesia sebagai Hasil Perjumpaan Dunia

Indonesia tidak dibaca sebagai bangsa yang sepenuhnya dibentuk dari dalam dirinya sendiri. Nusantara telah lama terhubung dengan Arab, Persia, India, China, Afrika Timur, Asia Tenggara, dan jaringan Samudra Hindia sebelum kolonialisme Eropa hadir secara langsung.

Setelah itu, Portugis, Spanyol, VOC, Hindia Belanda, Jepang, Amerika Serikat, Republik Rakyat Tiongkok, dan berbagai kekuatan lain ikut memengaruhi perjalanan Indonesia melalui bentuk dan periode yang berbeda. Federasi Rusia dibahas hanya sejauh terdapat bukti mengenai peran nyata.

Selain negara, naskah ini juga membaca peran lembaga keuangan internasional, korporasi global, organisasi internasional, perusahaan konsultan, media, sistem pendidikan, jaringan keagamaan, teknologi digital, data, algoritma, kecerdasan buatan, dan elite domestik.

Metode ini tidak menganggap semua pengaruh luar sebagai kolonialisme. Pertukaran ilmu, perdagangan, diplomasi, teknologi, dan kerja sama internasional merupakan bagian wajar dari kehidupan bangsa.

Analisis kolonialisme hanya relevan apabila ditemukan hubungan dominasi, ketimpangan, ketergantungan, penghilangan kendali, atau pemindahan manfaat yang merugikan rakyat.

Karena itu, pertanyaan yang digunakan bukan sekadar, "Apakah suatu pengaruh berasal dari luar negeri?" Pertanyaannya adalah, "Bagaimana hubungan tersebut dibentuk, siapa yang mengendalikan keputusan, siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, dan apakah rakyat Indonesia tetap memiliki kedaulatan?"

6. Cak Nun sebagai Alarm, Bukan Sumber Tunggal Pembuktian



Pemikiran Emha Ainun Nadjib atau Cak Nun digunakan dalam naskah ini sebagai alarm moral, sosial, dan peradaban tentang Indonesia.

Pernyataannya mengenai krisis kepemimpinan, rakyat yang diyatimkan, negara yang belum menjadi rumah rakyat, pembacaan Indonesia dari desa, serta ketidaksiapan bangsa menghadapi globalisasi, modernisasi, perang pengetahuan, dan kecerdasan buatan menjadi pintu masuk untuk merumuskan pertanyaan penelitian.

Namun pemikiran Cak Nun tidak diperlakukan sebagai pengganti data historis, bukti hukum, atau penelitian akademik. Pernyataannya berfungsi sebagai intuisi kritis dan pembacaan kebudayaan yang kemudian harus diuji melalui sejarah, konstitusi, data, serta kenyataan sosial.

Dengan demikian, naskah ini membedakan antara tiga fungsi sumber:

- sumber yang memberi alarm atau pertanyaan;
- sumber yang memberikan bukti;
- sumber yang membantu membangun interpretasi.

Cak Nun terutama ditempatkan pada fungsi pertama dan ketiga. Klaim empiris tetap harus diperiksa melalui sumber yang dapat diverifikasi.

7. Sayid Ali Khamenei sebagai Cermin Pengalaman Iran

Sayid Ali Khamenei ditempatkan sebagai cermin pengalaman Iran mengenai spiritualitas, ketahanan, tawakal, kepemimpinan nilai, pembelaan terhadap *mustad'afin*, kesadaran umat Islam sebagai satu tubuh,

serta keteguhan menghadapi tekanan dan hegemoni global.

Pemikirannya tidak digunakan sebagai doktrin yang harus diterima Indonesia. Pemikiran tersebut dibaca dalam konteks sejarah Iran, Revolusi Islam, struktur konstitusional Iran, tekanan internasional, dan pergulatan bangsa Iran mempertahankan kedaulatannya.

Metodologi komparatif yang digunakan bukan "meniru Iran", melainkan "belajar melalui perbedaan". Pengalaman Iran digunakan untuk menimbulkan pertanyaan bagi Indonesia, misalnya bagaimana spiritualitas dipertahankan dalam kepemimpinan negara? Bagaimana bangsa menjaga martabat di tengah tekanan global? Bagaimana pembelaan terhadap kaum tertindas ditempatkan melampaui batas mazhab? Bagaimana ilmu, teknologi, ketahanan, dan kedaulatan dihubungkan?

Jawaban Iran tidak otomatis menjadi jawaban Indonesia. Setiap pelajaran harus diterjemahkan berdasarkan sejarah, masyarakat, konstitusi, dan kebutuhan rakyat Indonesia.

Cak Nun dan Khamenei tidak digunakan sebagai pasangan tokoh yang disamakan. Cak Nun membaca luka Indonesia dari ruang kebudayaan dan kehidupan rakyat. Khamenei mencerminkan pengalaman kepemimpinan negara dan ketahanan peradaban Iran. Keduanya merupakan dua sumber refleksi dari posisi sejarah yang berbeda.

8. Pendekatan Jalur Rakyat

Naskah ini menggunakan istilah "jalur rakyat", bukan sekadar "jalur masyarakat". Masyarakat dapat merujuk pada kumpulan sosial secara umum. Jalur rakyat mengandung ukuran keberpihakan yang lebih tegas.

Jalur rakyat berarti mencari dan membangun simpul-simpul yang benar-benar, yaitu mengasuh rakyat, membela hak rakyat, mendidik dan mencerdaskan rakyat, memenuhi kebutuhan dasar rakyat, menjaga martabat rakyat, serta tidak ikut meyatimkan rakyat.

Simpul tersebut dapat hadir dalam keluarga, desa, komunitas, organisasi sosial, kelompok kebudayaan, dunia profesional, lembaga ekonomi, pesantren, kampus, pusat pengetahuan, ataupun bagian dari institusi negara. Namun status kelembagaan tidak otomatis menjadikan suatu simpul sebagai jalur rakyat. Ukurannya adalah tindakan nyata dan keberpihakan kepada manusia.

Pesantren, hawzah, dan kampus tidak ditempatkan sebagai program kerja sama formal utama Sekolah Negarawan. Lembaga-lembaga tersebut dibaca sebagai bagian dari ekosistem yang dapat diajak berdialog dan diuji, apakah ia benar-benar mendidik, mengasuh, membela, serta memperkuat kedaulatan rakyat.

9. Tingkatan Klaim dan Kehati-hatian Akademik

Naskah ini membedakan secara tegas beberapa jenis pernyataan.



Pertama, fakta terverifikasi, yaitu pernyataan yang didukung oleh dokumen, arsip, data resmi, atau penelitian akademik yang dapat diperiksa.

Kedua, interpretasi, yaitu penjelasan mengenai makna, hubungan, atau dampak suatu fakta. Interpretasi harus disampaikan sebagai hasil analisis, bukan disamarkan sebagai fakta.

Ketiga, inferensi, yaitu kesimpulan yang ditarik dari sejumlah fakta meskipun hubungan langsungnya tidak selalu dinyatakan dalam sumber. Inferensi harus diberi batas dan tidak boleh disampaikan dengan kepastian yang melebihi bukti.

Keempat, tesis normatif, yaitu gagasan mengenai bagaimana negara, kepemimpinan, dan hubungan antarbangsa seharusnya dibangun. Tesis normatif merupakan tawaran Sekolah Negarawan yang terbuka untuk diperdebatkan.

Kelima, hipotesis penelitian, yaitu dugaan yang layak diuji lebih lanjut tetapi belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan.

Pembedaan ini penting terutama dalam pembahasan tahun 1965, jaringan intelijen, korporasi global, pengaruh lembaga keuangan internasional, jaringan Timur Tengah, teknologi, data, dan AI. Kekuatan bahasa harus selalu sebanding dengan kekuatan bukti.

10. Sumber dan Hierarki Pembuktian

Kajian ini menggunakan beberapa kelompok sumber.

Pertama, sumber primer berupa konstitusi, undang-undang, ketetapan lembaga negara, putusan pengadilan, perjanjian, arsip kolonial, dokumen diplomatik, dokumen deklasifikasi, pidato resmi, laporan pemerintahan, catatan organisasi, dan data statistik resmi.

Kedua, literatur akademik berupa buku, artikel jurnal, disertasi, laporan penelitian, dan publikasi pusat studi yang memiliki metodologi jelas.

Ketiga, publikasi organisasi internasional, lembaga keuangan, korporasi, perusahaan teknologi, serta lembaga kebijakan yang relevan. Sumber tersebut digunakan dengan memperhatikan kepentingan institusional pembuatnya.

Keempat, karya pemikiran, pidato, wawancara, dan pernyataan tokoh seperti Cak Nun dan Sayid Ali Khamenei. Sumber ini digunakan untuk memahami paradigma, nilai, diagnosis moral, dan pengalaman

peradaban, bukan otomatis sebagai bukti faktual atas seluruh klaim sejarah.

Kelima, data dan sumber terbuka kontemporer yang dapat membantu memetakan perkembangan ekonomi, teknologi, media, pendidikan, data, dan hubungan internasional. Sumber terbuka harus dibandingkan dengan sumber lain apabila klaimnya sensitif.

Apabila sumber bertentangan, naskah ini tidak memilih sumber hanya karena mendukung tesis. Perbedaan harus dinyatakan, kredibilitas sumber dinilai, dan kesimpulan disesuaikan dengan tingkat kepastian yang tersedia.

11. Penolakan terhadap Teori Konspirasi

Naskah ini menolak teori konspirasi sebagai pengganti penelitian. Fakta bahwa negara, korporasi, lembaga internasional, elite domestik, atau jaringan keagamaan memiliki kepentingan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya konspirasi terpadu.

Untuk menyatakan adanya koordinasi, intervensi, operasi, atau kepentingan tertentu, diperlukan bukti mengenai aktor, tujuan, mekanisme, waktu, hubungan, dan tindakan nyata. Kesamaan akibat tidak selalu membuktikan kesamaan rencana.

Pendekatan ini penting agar kritik terhadap kolonialisme struktural dan *Invited Colonialism* tidak berubah menjadi kecurigaan tanpa dasar. Ketajaman diagnosis harus berjalan bersama disiplin pembuktian.

12. Pendekatan terhadap Fakta Kontemporer

Untuk isu kontemporer seperti teknologi, kecerdasan buatan, data, kebijakan negara, kerja sama ekonomi, investasi, hubungan diplomatik, dan konflik geopolitik, naskah harus menggunakan sumber mutakhir.

Setiap klaim yang dapat berubah perlu diperiksa ulang pada saat bab ditulis atau diperbarui. Angka investasi, struktur kepemilikan, kebijakan teknologi, jabatan pejabat, aturan hukum, dan perkembangan konflik tidak boleh hanya mengandalkan pengetahuan lama.

Bahasa seperti "diduga", "menurut dokumen yang tersedia", "sejauh bukti menunjukkan", atau "masih diperdebatkan" digunakan apabila tingkat kepastian belum penuh. Kehati-hatian tersebut bukan kelemahan argumentasi, melainkan bagian dari integritas ilmiah.

13. Pendekatan Komparatif Indonesia–Iran

Perbandingan Indonesia dan Iran tidak dilakukan untuk menentukan negara mana yang lebih baik. Perbandingan digunakan untuk menemukan perbedaan pengalaman, pilihan, ketahanan, kegagalan, dan kemungkinan pelajaran.

Setiap perbandingan harus memperhatikan perbedaan sejarah pembentukan negara, tradisi mazhab dan keagamaan, struktur konstitusi, hubungan negara dan ulama, kondisi sosial, pengalaman kolonialisme dan revolusi, posisi geopolitik, serta susunan masyarakat masing-masing.

Karena itu, konsep atau institusi Iran tidak dapat dipindahkan secara mekanis ke Indonesia. Yang dapat dipertukarkan adalah ilmu, pengalaman, pertanyaan, prinsip, dan hasil refleksi.

14. Batasan Kajian

Naskah ini menyadari bahwa cakupan sejarah dan peradaban Indonesia sangat luas. Tidak semua kerajaan, komunitas, wilayah, mazhab, jaringan dagang, atau aktor internasional dapat dibahas secara mendalam.

Pemilihan aktor dilakukan berdasarkan relevansinya terhadap tesis tentang kemerdekaan formal, kolonialisme struktural, hilangnya rakyat dari arsitektur negara, *Invited Colonialism*, dan kebangkitan tata nilai Islam.

Naskah ini juga tidak mengklaim bahwa seluruh persoalan Indonesia berasal dari pengaruh asing. Elite domestik, pilihan kebijakan nasional, konflik internal, budaya kekuasaan, ketimpangan sosial, dan kegagalan kelembagaan memiliki peran yang sama pentingnya.

Pengaruh luar hanya menjadi kolonialisme struktural apabila bertemu dengan struktur dalam negeri yang memungkinkan dominasi berlangsung. Karena itu, pembahasan kekuatan eksternal selalu harus disandingkan dengan tanggung jawab aktor domestik.

15. Tujuan Metodologis

Tujuan metodologi ini bukan menghasilkan narasi yang sepenuhnya netral dalam arti tanpa nilai. Naskah ini memiliki keberpihakan yang dinyatakan

secara terbuka kepada manusia, rakyat, keadilan, ilmu pengetahuan, kedaulatan, dan kemaslahatan.

Namun keberpihakan tidak boleh menghilangkan kejujuran. Data yang tidak sesuai dengan tesis tetap harus diakui. Kontribusi aktor yang dikritik tetap harus disebut. Kelemahan pihak yang didukung tetap harus diperiksa.

Dengan demikian, objektivitas dalam naskah ini tidak dipahami sebagai ketiadaan nilai, melainkan sebagai kesediaan menggunakan ukuran pembuktian yang sama terhadap semua aktor.

Dari paradigma dan metode tersebut, tesis ini dibangun supaya Indonesia dibaca dari rakyatnya, rakyat dibaca dari manusia dan tata nilainya, tata nilai dibaca melalui sejarah, sejarah dibaca melalui jaringan peradaban dunia, sedangkan negara dinilai berdasarkan kemampuannya menjaga kedaulatan rakyat.

Metodologi ini pada akhirnya digunakan untuk memastikan bahwa dialog Indonesia–Iran tidak berdiri di atas romantisme, kecurigaan, kultus tokoh, propaganda, atau kepentingan kekuasaan jangka pendek. Dialog harus dibangun melalui ilmu, pembuktian, penghormatan terhadap perbedaan, dan keberanian membaca sejarah secara jujur.

Dengan cara berpikir itulah Sekolah Negarawan menyampaikan tesisnya. Bukan untuk menawarkan jawaban final, melainkan untuk menghadirkan kerangka yang dapat diuji dalam memahami bagaimana tata nilai membentuk manusia, manusia melahirkan kepemimpinan, kepemimpinan

membangun negara, dan negara menentukan apakah peradaban akan menjaga rakyatnya atau meninggalkan mereka.

B. Kerangka Pembacaan Naskah (Framework for Reading This Report)

Naskah ini disusun sebagai satu kesatuan argumentasi. Setiap bab bukanlah pembahasan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari sebuah tesis yang berkembang secara bertahap. Oleh karena itu, pembaca dianjurkan memahami keseluruhan naskah sebagai satu rangkaian pemikiran, bukan sebagai kumpulan esai mengenai sejarah, hukum tata negara, agama, atau hubungan internasional.

Apabila suatu bab dibaca secara terpisah, pembaca berpotensi memperoleh kesimpulan yang tidak utuh. Misalnya, pembahasan mengenai Arab tidak dimaksudkan sebagai pembahasan tentang Arab semata. Pembahasan mengenai Belanda bukan sekadar sejarah kolonialisme. Pembahasan mengenai Amerika Serikat, Republik Rakyat Tiongkok, Federasi Rusia, maupun Iran juga bukan analisis hubungan bilateral yang berdiri sendiri. Seluruhnya merupakan bagian dari upaya memahami bagaimana berbagai jaringan peradaban dunia membentuk manusia Indonesia, kepemimpinan Indonesia, serta arsitektur negara Indonesia.

Demikian pula pembahasan mengenai konstitusi, kolonialisme struktural, *Invited Colonialism*, hilangnya rakyat dari arsitektur negara, ataupun

kebangkitan tata nilai Islam tidak dimaksudkan sebagai isu-isu yang terpisah. Seluruh konsep tersebut saling berhubungan dan membentuk satu kerangka analisis mengenai perjalanan Indonesia sebagai bangsa.

Pembaca juga perlu memahami bahwa naskah ini tidak memulai analisis dari negara. Negara bukan titik awal argumentasi.

Kerangka berpikir yang digunakan adalah sebagai berikut:



Alur tersebut menunjukkan bahwa pembaruan suatu bangsa tidak dimulai dari perebutan kekuasaan ataupun perubahan kelembagaan semata. Negara merupakan hasil dari proses yang lebih panjang. Tata nilai membentuk manusia. Manusia membentuk masyarakat. Masyarakat melahirkan kepemimpinan. Kepemimpinan membangun negara. Negara kemudian menentukan apakah rakyat benar-benar menjadi pemilik kedaulatan atau hanya menjadi sumber legitimasi kekuasaan.

Karena itu, ketika naskah ini membahas negara, sesungguhnya yang sedang dibahas adalah manusia. Ketika membahas konstitusi, yang sedang diuji adalah keberpihakan kepada rakyat. Ketika membahas sejarah, yang dicari bukan sekadar kronologi peristiwa,

melainkan proses pembentukan tata nilai, kepemimpinan, dan struktur kekuasaan.

Pembaca juga diharapkan membedakan dengan jelas antara tiga lapisan pembahasan yang digunakan sepanjang naskah ini.

Lapisan pertama adalah lapisan historis, yaitu pembahasan mengenai fakta, dokumen, arsip, perkembangan kekuasaan, ekonomi, kolonialisme, diplomasi, dan hubungan internasional yang membentuk Indonesia sejak masa awal hingga kontemporer.

Lapisan kedua adalah lapisan analitis, yaitu pembahasan mengenai bagaimana fakta-fakta sejarah tersebut membentuk struktur negara, hubungan rakyat dengan kekuasaan, sistem pendidikan, ekonomi sosial, budaya birokrasi, serta berbagai bentuk kolonialisme struktural yang mungkin berkembang hingga masa kini.

Lapisan ketiga adalah lapisan normatif, yaitu tawaran Sekolah Negarawan mengenai arah pembaruan yang berpijak pada tata nilai Islam, penguatan manusia, pengembalian rakyat sebagai pemilik kedaulatan, dan pembangunan negara yang berpihak kepada kemaslahatan bersama.

Ketiga lapisan tersebut harus dibaca secara bersamaan. Pembaca tidak disarankan mengambil kesimpulan normatif tanpa memahami sejarahnya, ataupun menarik kesimpulan sejarah tanpa memahami tujuan normatif yang hendak dicapai.

Dalam membaca tokoh-tokoh yang dikutip, pembaca juga diharapkan memahami fungsi masing-masing tokoh dalam kerangka argumentasi.

Pemikiran Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) digunakan sebagai alarm moral dan sosial mengenai keadaan Indonesia. Pemikirannya mengenai rakyat, desa, kepemimpinan, globalisasi, negara, dan kemanusiaan menjadi pintu masuk untuk membaca persoalan Indonesia dari dalam pengalaman rakyat.

Sebaliknya, pemikiran Ayatollah Sayid Ali Khamenei digunakan sebagai cermin pengalaman Iran mengenai spiritualitas, ketahanan bangsa, kepemimpinan berbasis nilai, pembelaan terhadap *mustad'afin*, serta kemampuan mempertahankan martabat nasional di tengah tekanan geopolitik. Kehadiran beliau dalam naskah ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan agar Indonesia mengadopsi sistem ketatanegaraan Iran ataupun mengikuti mazhab tertentu.

Kedua tokoh tersebut tidak ditempatkan untuk dibandingkan ataupun disamakan. Mereka hadir sebagai dua cermin yang berasal dari dua pengalaman sejarah yang berbeda. Cak Nun membantu pembaca memahami luka Indonesia dari dalam kehidupan rakyat. Pengalaman Sayid Ali Khamenei membantu pembaca melihat bagaimana suatu bangsa berusaha mempertahankan nilai, identitas, dan kedaulatannya dalam menghadapi tantangan global. Keduanya memperkaya cara pandang, tetapi tidak menjadi sumber tunggal kebenaran.

Pembaca juga diharapkan memahami bahwa naskah ini tidak menggunakan istilah "dunia" hanya untuk menunjuk hubungan antarnegara. Dunia dalam naskah ini mencakup seluruh jaringan yang membentuk Indonesia, mulai dari Arab, Persia, India, China, Portugis, Spanyol, VOC, Hindia Belanda, Jepang, Amerika Serikat, Republik Rakyat Tiongkok, Federasi Rusia, lembaga keuangan internasional, korporasi global, teknologi digital, kecerdasan buatan, media, pendidikan, organisasi internasional, jaringan Timur Tengah, hingga elite domestik yang berinteraksi dengan seluruh kekuatan tersebut.

Dengan demikian, ketika naskah ini menyatakan bahwa *Iran tidak akan memahami Indonesia jika tidak memahami dunia*, yang dimaksud bukanlah dunia sebagai ruang geografis, melainkan dunia sebagai jaringan sejarah yang membentuk Indonesia.

Pembaca juga tidak dianjurkan memahami konsep kolonialisme struktural ataupun Invited Colonialism sebagai tuduhan terhadap negara tertentu. Kedua konsep tersebut merupakan perangkat analisis untuk memahami bagaimana hubungan ketergantungan, dominasi, atau pengaruh dapat berlangsung melalui hukum, ekonomi, pendidikan, teknologi, data, media, utang, kontrak, standar internasional, maupun keputusan elite domestik tanpa selalu disertai pendudukan militer.

Demikian pula istilah jalur rakyat tidak dimaksudkan sebagai slogan semata. Jalur rakyat merupakan cara membaca Indonesia melalui simpul-simpul yang benar-benar mengasuh rakyat, membela

rakyat, mendidik rakyat, memenuhi hak rakyat, menjaga martabat rakyat, serta tidak ikut meyatimkan rakyat. Jalur rakyat dapat ditemukan di desa, keluarga, komunitas, lembaga sosial, dunia usaha, ruang kebudayaan, institusi negara, maupun berbagai bentuk kehidupan masyarakat lainnya.

Naskah ini juga tidak mengajak pembaca mencari pihak yang harus dipersalahkan. Sejarah Indonesia dibentuk oleh interaksi yang kompleks antara faktor internal dan eksternal. Karena itu, pembaca diharapkan menghindari kecenderungan menyederhanakan persoalan menjadi pertentangan antara bangsa baik dan bangsa jahat, Timur dan Barat, Islam dan non-Islam, ataupun rakyat dan negara. Pendekatan semacam itu justru akan menghilangkan kompleksitas yang ingin dipahami oleh naskah ini.

Sebaliknya, pembaca diajak menilai setiap aktor dengan ukuran yang sama yaitu sejauh mana ia membawa ilmu, keadilan, kemaslahatan, dan penguatan kedaulatan rakyat sejauh mana ia membawa dominasi, ketergantungan, atau pelemahan terhadap kemampuan bangsa menentukan nasibnya sendiri.

Pada akhirnya, naskah ini tidak meminta pembaca untuk menerima seluruh argumentasi yang disampaikan. Sekolah Negarawan justru mengundang setiap pembaca untuk menguji, mengkritik, memperkaya, dan menyempurnakan seluruh tesis berdasarkan bukti sejarah, perkembangan ilmu pengetahuan, pengalaman masing-masing bangsa, serta tradisi intelektual yang dimilikinya.

Dialog yang diharapkan bukanlah dialog untuk mencari siapa yang menang, melainkan dialog yang mampu memperluas pemahaman mengenai bagaimana manusia, tata nilai, sejarah, kepemimpinan, dan negara saling membentuk perjalanan suatu peradaban.

Apabila pembaca mengikuti keseluruhan alur tersebut, maka tesis utama naskah ini akan tampak secara utuh.

Indonesia tidak dipahami hanya melalui pemerintahannya. Indonesia tidak dipahami hanya melalui konstitusinya. Indonesia tidak dipahami hanya melalui kolonialismenya. Indonesia tidak dipahami hanya melalui Islam sebagai agama mayoritasnya. Indonesia dipahami melalui manusia yang dibentuk oleh perjalanan panjang berbagai peradaban dunia.

Karena itu, memahami Indonesia berarti memahami dunia yang membentuk manusia Indonesia. Dari manusia lahir kepemimpinan. Dari kepemimpinan dibangun negara. Dan melalui negara, sebuah bangsa menentukan apakah rakyat benar-benar menjadi pemilik kedaulatannya.

Dengan kerangka pembacaan tersebut, Sekolah Negarawan mengundang para akademisi, ulama, pusat studi strategis, pembuat kebijakan, dan masyarakat sipil di Republik Islam Iran untuk memasuki dialog yang didasarkan pada ilmu pengetahuan, penghormatan terhadap kedaulatan masing-masing bangsa, keberanian membaca sejarah secara jujur, serta komitmen bersama membangun peradaban yang lebih adil, lebih manusiawi, dan lebih bermartabat.

Pendahuluan

A. Indonesia sebagai Negara Formal yang Tampak Lengkap



Indonesia secara formal adalah sebuah negara. Indonesia memiliki wilayah yang diakui, penduduk, pemerintahan, konstitusi, Presiden, parlemen, lembaga peradilan, angkatan bersenjata, kepolisian, birokrasi, pemilihan umum, hubungan diplomatik, bendera, mata uang, serta kedudukan sebagai subjek hukum internasional. Republik Indonesia diterima sebagai bagian dari masyarakat bangsa-bangsa dan menjalankan fungsi-fungsi yang secara umum dilekatkan kepada sebuah negara modern.

Tidak ada bagian dari naskah ini yang bermaksud menyangkal kenyataan tersebut. Indonesia bukan wilayah tanpa pemerintahan, bukan bangsa

tanpa konstitusi, dan bukan entitas yang kehilangan pengakuan internasional. Proklamasi 17 Agustus 1945 telah menandai berdirinya Republik Indonesia sebagai negara merdeka dan menjadi titik penting dalam perjuangan panjang membebaskan Nusantara dari kolonialisme.

Namun keberadaan negara secara formal belum otomatis menjawab pertanyaan yang lebih mendasar, yaitu untuk siapa negara itu dibentuk, siapa yang menjadi pemiliknya, dan bagaimana kekuasaan di dalamnya harus dijalankan?

Negara dapat mempunyai lembaga yang lengkap, tetapi kelengkapan lembaga belum tentu menunjukkan bahwa rakyat telah menjadi pemilik kekuasaan. Negara dapat menyelenggarakan pemilihan umum, tetapi pelaksanaan pemilu belum tentu menjamin bahwa rakyat mengendalikan arah negara setelah suara mereka diberikan. Negara dapat memiliki konstitusi yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, tetapi pernyataan tersebut belum tentu sepenuhnya diterjemahkan ke dalam arsitektur kelembagaan dan praktik kekuasaan.

Di sinilah perbedaan antara negara formal dan negara rakyat mulai memperoleh arti. Negara formal adalah negara yang memenuhi unsur-unsur hukum, administrasi, kelembagaan, dan pengakuan internasional. Adapun negara rakyat adalah negara yang sungguh-sungguh menjadikan rakyat sebagai pemilik kedaulatan, pemilik arah pembangunan, serta pihak yang kepentingannya menjadi ukuran utama dalam seluruh penyelenggaraan kekuasaan.



Negara rakyat bukan sekadar negara yang menyebut kata "rakyat" dalam konstitusinya. Negara rakyat adalah negara yang merancang seluruh struktur kekuasaannya untuk memastikan bahwa rakyat tidak

hanya memilih, tetapi juga mempunyai posisi nyata dalam menentukan, mengawasi, mengoreksi, dan mengendalikan jalannya negara.

Dari sudut pandang itulah naskah ini dimulai. Indonesia tidak dipertanyakan sebagai negara menurut hukum internasional. Yang dipertanyakan adalah apakah Indonesia telah selesai menemukan bentuk negara yang secara substantif dimiliki oleh rakyatnya.

Pertanyaan tersebut bukan penolakan terhadap Republik Indonesia. Sebaliknya, pertanyaan itu merupakan bagian dari tanggung jawab untuk memastikan agar kemerdekaan tidak berhenti pada perubahan bendera, pergantian penguasa, atau pengakuan diplomatik, tetapi benar-benar menghadirkan kemerdekaan bagi manusia yang hidup di dalamnya.

B. Cak Nun sebagai Alarm tentang Negara yang Belum Menjadi Rumah Rakyat

Dalam berbagai kesempatan, Emha Ainun Nadjib atau Cak Nun menyampaikan kalimat yang terdengar sederhana, tetapi mengandung kritik peradaban yang sangat mendalam, yaitu "Mudah-mudahan Anda suatu hari punya negara."

Kalimat tersebut tidak semestinya dibaca secara harfiah sebagai penyangkalan bahwa Republik Indonesia adalah negara. Cak Nun tidak sedang menyusun argumentasi hukum internasional, tidak sedang menolak Proklamasi 17 Agustus 1945, dan tidak

pula sedang menyatakan bahwa Indonesia tidak mempunyai pemerintahan.

Pernyataan itu lebih tepat dibaca sebagai alarm moral dan peradaban. Indonesia memang memiliki negara secara formal. Namun apakah rakyat Indonesia telah memiliki negara dalam pengertian yang sesungguhnya? Apakah rakyat mengalami negara sebagai rumah bersama yang melindungi, mengasuh, mendidik, memenuhi hak, menjaga martabat, dan memberikan ruang bagi mereka untuk menentukan masa depan? Ataukah negara lebih sering dirasakan sebagai struktur yang jauh, vertikal, administratif, dan hanya mendekat ketika membutuhkan legitimasi, kepatuhan, pajak, suara, atau pengorbanan rakyat?

Pertanyaan tersebut menjadi penting karena negara tidak hanya hidup dalam teks konstitusi dan struktur kelembagaan. Negara juga hidup dalam pengalaman sehari-hari rakyat.

Negara hadir ketika seorang anak memperoleh atau kehilangan hak atas pendidikan. Negara hadir ketika petani berhadapan dengan harga, tanah, pupuk, pasar, dan kebijakan impor. Negara hadir ketika buruh bekerja, ketika nelayan melaut, ketika masyarakat adat mempertahankan ruang hidup, ketika warga menghadapi hukum, ketika keluarga mengakses layanan kesehatan, dan ketika rakyat menanggung akibat dari keputusan ekonomi yang tidak pernah mereka rumuskan.

Karena itu, keberadaan negara tidak cukup dinilai dari megahnya gedung pemerintahan, tertibnya upacara, banyaknya regulasi, ataupun rutin

terselenggaranya pemilihan umum. Negara harus dinilai dari seberapa jauh rakyat merasakan bahwa kekuasaan bekerja untuk mereka, bukan sekadar bekerja atas nama mereka.

Bahkan sejak karya awalnya, *Indonesia Bagian dari Desa Saya*, Cak Nun telah memberi isyarat bahwa Indonesia tidak cukup dibaca dari pusat kekuasaan. Indonesia harus dibaca dari desa, dari manusia, dari rakyat, dan dari ruang hidup sehari-hari tempat nilai benar-benar diuji.

Cara membaca tersebut penting bagi naskah ini. Indonesia tidak boleh hanya dibaca dari Jakarta, istana, parlemen, kementerian, mahkamah, statistik nasional, atau pernyataan resmi. Indonesia juga harus dibaca dari tempat rakyat hidup, bekerja, beribadah, merawat keluarga, menanggung krisis, dan mempertahankan harapan.

Apabila negara hanya terlihat lengkap dari pusat, tetapi tidak terasa hadir di desa, rumah, pasar, sekolah, tempat kerja, dan ruang kehidupan rakyat, maka negara itu mungkin telah lengkap secara formal, tetapi belum selesai secara peradaban.

Sekolah Negarawan berangkat dari kegelisahan tersebut. Namun naskah ini tidak berhenti pada keluhan bahwa negara belum berpihak kepada rakyat. Naskah ini berusaha mencari akar persoalannya, yaitu apakah masalah itu disebabkan oleh perilaku pemimpin, sistem pemerintahan, desain konstitusi, warisan kolonial, struktur ekonomi, pengaruh global, tata nilai, atau hubungan kompleks antara seluruh unsur tersebut?

C. Krisis Kepemimpinan dan Keruntuhan Peradaban

Cak Nun mengingatkan bahwa salah satu penyebab kehancuran peradaban di Indonesia, dan mungkin juga di dunia, adalah kepemimpinan. Persoalan itu tidak hanya terjadi dalam pemerintahan. Krisis kepemimpinan juga dapat berlangsung dalam kehidupan sosial, ekonomi, kebudayaan, pendidikan, bahkan agama dan ibadah *mahdhah*.

Peringatan ini penting karena masyarakat sering menyempitkan kepemimpinan hanya pada jabatan. Padahal kepemimpinan hadir di setiap ruang kehidupan. Orang tua memimpin keluarga. Guru memimpin proses pendidikan. Ulama memimpin umat. Pengusaha memimpin organisasi ekonomi. Intelektual memimpin cara berpikir. Budayawan memimpin kepekaan sosial. Pejabat memimpin administrasi negara. Presiden dan lembaga-lembaga tinggi negara memimpin arah kehidupan kebangsaan.

Ketika kepemimpinan kehilangan nilai, kerusakannya tidak berhenti pada satu lembaga. Kerusakan tersebut menyebar ke dalam cara manusia melihat kekuasaan, kehormatan, kekayaan, ilmu, agama, dan rakyat.

Krisis kepemimpinan muncul ketika jabatan tidak lagi dipahami sebagai amanah, melainkan sebagai investasi kekuasaan. Krisis tersebut muncul ketika orang mengeluarkan biaya besar untuk menjadi pejabat, lalu menganggap jabatan sebagai sarana mengembalikan modal. Krisis itu juga muncul ketika

pemimpin berbicara atas nama rakyat, tetapi tidak mengenal penderitaan rakyat yang dipimpinnya.

Cak Nun mengkritik keadaan ketika pemimpin tidak pernah mengalami kemiskinan rakyat, tidak pernah sungguh-sungguh berpuasa dalam derita sosial, tidak mengalami ketidakpastian penghidupan, tidak merasakan kecemasan keluarga kecil, tetapi memiliki keberanian untuk mengambil keputusan yang menambah penderitaan mereka.

Kritik tersebut tidak berarti bahwa seseorang harus mengalami seluruh penderitaan rakyat sebelum boleh menjadi pemimpin. Yang dipersoalkan adalah hilangnya empati, kedalaman batin, dan kesanggupan memahami kenyataan hidup orang lain.

Pemimpin yang tidak pernah lapar tetap dapat membela orang lapar apabila mempunyai iman, ilmu, empati, dan tanggung jawab. Sebaliknya, seseorang yang pernah miskin dapat melupakan kemiskinan setelah memperoleh kekuasaan. Karena itu, pengalaman sosial penting, tetapi kualitas moral dan orientasi nilai jauh lebih menentukan.

Dari sinilah muncul tesis moral naskah ini yaitu krisis Indonesia bukan hanya krisis sistem, tetapi juga krisis kepemimpinan nilai.

Namun krisis kepemimpinan tidak boleh dijelaskan hanya sebagai kegagalan personal. Pemimpin dibentuk oleh sistem pendidikan, budaya, struktur ekonomi, mekanisme pencalonan, pembiayaan kekuasaan, desain kelembagaan, media, teknologi, jaringan sosial, serta tata nilai yang hidup dalam masyarakat.

Apabila biaya untuk memperoleh kekuasaan terlalu tinggi, kekuasaan akan mudah berubah menjadi transaksi. Apabila partai politik lebih mengutamakan kemenangan elektoral daripada pembentukan negarawan, negara akan menghasilkan pejabat tanpa kedalaman kenegaraan. Apabila pendidikan hanya membentuk tenaga kerja dan pemburu gelar, bangsa akan kekurangan manusia yang mampu memikul amanah peradaban.

Karena itu, mengganti pemimpin tanpa memperbaiki sistem yang membentuk dan menyeleksinya berisiko hanya mengganti wajah tanpa mengubah arah.

Sebaliknya, memperbaiki sistem tanpa membangun kualitas manusia juga tidak cukup. Konstitusi, lembaga, dan prosedur dapat dirancang dengan baik, tetapi semuanya tetap dijalankan oleh manusia. Sistem yang baik dapat dirusak oleh manusia yang kehilangan nilai. Manusia yang baik juga dapat dipatahkan oleh sistem yang memaksanya tunduk kepada kepentingan yang lebih kuat.

Naskah ini karena itu tidak memilih antara perbaikan manusia atau perbaikan sistem. Keduanya harus dikerjakan dalam satu rangkaian yaitu tata nilai membentuk manusia, manusia melahirkan kepemimpinan, kepemimpinan membangun negara, dan negara kembali memengaruhi manusia melalui hukum, pendidikan, ekonomi, teknologi, dan kebudayaan.

D. Dari Kerajaan-Kerajaan Nusantara menuju Republik Modern

Indonesia modern lahir dari ruang sejarah yang sangat kompleks. Sebelum menjadi republik, Nusantara terdiri atas kerajaan, kesultanan, komunitas adat, desa, wilayah perdagangan, pusat keagamaan, dan berbagai bentuk kehidupan sosial yang mempunyai aturan dan tata nilai masing-masing.

Menurut Cak Nun, ketika berbagai kerajaan dan komunitas Nusantara kemudian dipersatukan menjadi negara republik yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, Indonesia bukan hanya berubah secara administratif. Indonesia juga masuk ke dalam globalisasi nilai dan pemikiran.

Republik adalah bentuk negara modern yang lahir dari sejarah pemikiran tertentu. Demokrasi, parlemen, konstitusi tertulis, kewarganegaraan, birokrasi nasional, hukum positif, pemilihan umum, pembagian kekuasaan, dan sistem administrasi modern bukanlah konsep yang tumbuh secara seragam dari seluruh pengalaman lokal Nusantara.

Konsep-konsep tersebut tidak dengan sendirinya buruk. Sebagian merupakan hasil perkembangan panjang umat manusia dalam mengendalikan kekuasaan, melindungi hak, membatasi kesewenang-wenangan, dan mengatur kehidupan bersama. Namun pengadopsian sebuah bentuk negara selalu memerlukan kesiapan manusia, nilai, pengetahuan, institusi, dan kebudayaan.

Persoalannya, Indonesia memasuki bentuk republik modern di tengah tekanan sejarah yang sangat

besar. Kemerdekaan lahir setelah kolonialisme panjang dan pendudukan militer. Negara baru harus sekaligus mempertahankan wilayah, menyatukan masyarakat yang beragam, membangun birokrasi, menyelenggarakan ekonomi, menghadapi konflik internal, dan bertahan dalam konfigurasi dunia yang segera terbelah oleh Perang Dingin.

Dengan kata lain, Indonesia masuk ke dalam tatanan global ketika fondasi internalnya belum sepenuhnya siap.

Bangsa ini harus menjalankan demokrasi modern tanpa proses panjang membangun budaya kewargaan. Harus menjalankan birokrasi nasional dengan banyak warisan administrasi kolonial. Harus membangun ekonomi merdeka ketika struktur produksinya masih bergantung pada pola ekstraktif. Harus menyelenggarakan pendidikan nasional ketika sebagian besar rakyat belum memperoleh akses ilmu secara memadai.

Indonesia juga harus menggabungkan berbagai tata nilai lokal, agama, adat, sejarah kerajaan, warisan kolonial, nasionalisme, modernisme, dan perkembangan dunia ke dalam satu arsitektur negara.

Tantangan tersebut tidak berhenti setelah kemerdekaan. Globalisasi terus berkembang dan masuk ke lapisan kehidupan yang semakin dalam. Pada masa lalu, globalisasi hadir melalui perdagangan, pelayaran, agama, perang, kolonialisme, dan diplomasi. Pada masa kini, globalisasi hadir melalui teknologi, data, platform digital, kecerdasan buatan, sistem keuangan, rantai

pasok, media sosial, algoritma, pendidikan, bahasa, budaya populer, dan penguasaan pengetahuan.

Jika pada masa kolonial pengaruh asing dapat dikenali melalui tentara, kapal, perusahaan dagang, dan pemerintahan kolonial, maka pada masa kini pengaruh dapat bekerja melalui infrastruktur digital, standar teknologi, kontrak, utang, data, perangkat lunak, sistem pendidikan, konsultan, dan ketergantungan industri.

Karena itu, pertanyaan yang pernah diajukan Cak Nun menjadi semakin relevan yaitu apa sebenarnya yang dibutuhkan manusia, rakyat, pemerintah, dan negara?

Manusia membutuhkan tata nilai, ilmu, penghidupan, martabat, rasa aman, kebebasan yang bertanggung jawab, serta ruang untuk tumbuh. Rakyat membutuhkan negara yang melindungi, mendidik, mengasuh, memenuhi hak, dan membuka ruang partisipasi nyata. Pemerintah membutuhkan mandat, kapasitas, legitimasi, pengetahuan, dan mekanisme pertanggungjawaban. Negara membutuhkan konstitusi, institusi, tata kelola, kekuatan, dan arah peradaban.

Masalah muncul ketika kebutuhan-kebutuhan tersebut dicampuradukkan. Negara dapat mengklaim membutuhkan stabilitas, tetapi stabilitas dipakai untuk membatasi rakyat. Pemerintah dapat mengklaim membutuhkan kewenangan, tetapi kewenangan tidak diimbangi pertanggungjawaban. Pasar dapat mengklaim membutuhkan kebebasan, tetapi kebebasan ekonomi menghasilkan dominasi. Teknologi diklaim

sebagai alat kemajuan, tetapi manusia kehilangan kendali atas data, pekerjaan, dan cara berpikirnya.

Oleh sebab itu, negara tidak cukup dipahami sebagai kumpulan lembaga. Negara adalah konstitusi, algoritma kekuasaan, sistem pengelolaan, distribusi kewenangan, dan arsitektur hidup bersama.

Konstitusi menentukan dari mana kekuasaan berasal. Algoritma kekuasaan menentukan bagaimana kekuasaan diperoleh, didistribusikan, digunakan, dan dipertahankan. Sistem pengelolaan menentukan bagaimana sumber daya, pengetahuan, teknologi, dan pelayanan diatur. Arsitektur hidup bersama menentukan siapa yang dilindungi, siapa yang didengar, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang menanggung beban.

Dengan demikian, persoalan negara tidak hanya berada di dalam pasal-pasal konstitusi. Persoalan tersebut juga berada di dalam praktik, insentif, mekanisme seleksi pemimpin, pembiayaan kampanye, hubungan ekonomi, penguasaan teknologi, struktur informasi, dan budaya kekuasaan.

E. Globalisasi, Perang Modern, dan Kecerdasan Buatan

Indonesia hari ini tidak hanya menghadapi globalisasi ekonomi. Indonesia menghadapi perang pengetahuan, perang teknologi, perang narasi, perang data, dan persaingan kecerdasan buatan.

Perang modern tidak selalu ditandai oleh serangan militer secara langsung. Suatu bangsa dapat kehilangan kedaulatan tanpa kehilangan wilayah.

Bangsa tersebut dapat tetap memiliki pemerintahan, bendera, dan konstitusi, tetapi kehilangan kemampuan menentukan arah ekonomi, teknologi, pendidikan, informasi, dan kebudayaannya.

Bangsa dapat bergantung pada teknologi yang tidak dikuasainya, pada data yang disimpan oleh pihak lain, pada sistem pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan peradabannya, pada pembiayaan yang mengikat kebijakan, dan pada media yang membentuk persepsi rakyat melalui algoritma yang tidak transparan.

Kecerdasan buatan (AI) memperbesar seluruh tantangan tersebut. AI bukan hanya alat untuk mempercepat pekerjaan. AI mengubah cara pengetahuan diproduksi, keputusan diambil, informasi disebarkan, pekerjaan dibentuk, perang dijalankan, dan manusia memahami dirinya sendiri. Negara yang tidak memiliki kesiapan ilmu, regulasi, infrastruktur, data, etika, dan kapasitas manusia akan menjadi pengguna pasif dari teknologi yang arah dan nilainya ditentukan oleh pihak lain.

Karena itu, ketidaksiapan Indonesia menghadapi AI bukan sekadar persoalan kekurangan komputer, pusat data, atau ahli pemrograman. Persoalannya lebih dalam yaitu apakah Indonesia memiliki tata nilai untuk menentukan tujuan penggunaan AI? Apakah negara memahami data rakyat sebagai bagian dari kedaulatan?

Apakah sistem pendidikan membentuk manusia yang mampu berpikir, bukan hanya menggunakan alat? Apakah teknologi akan memperkuat rakyat atau justru memperbesar jarak antara rakyat dan pusat kekuasaan?

Tanpa jawaban terhadap pertanyaan tersebut, modernisasi dapat menghasilkan kemajuan teknis tanpa kemerdekaan peradaban.

Indonesia dapat menjadi pasar besar bagi teknologi dunia, tetapi bukan pencipta arah teknologi. Indonesia dapat memiliki jutaan pengguna digital, tetapi tidak memiliki kendali atas data dan algoritma. Indonesia dapat mempunyai infrastruktur modern, tetapi tetap bergantung pada pengetahuan, modal, perangkat, dan standar pihak lain.

Dalam keadaan demikian, kolonialisme tidak lagi selalu hadir dalam bentuk klasik. Kolonialisme dapat berkembang menjadi kolonialisme struktural, yaitu dominasi yang bekerja melalui sistem ekonomi, teknologi, hukum, pendidikan, data, media, dan pengetahuan.

Dominasi tersebut bahkan dapat memperoleh jalan melalui keputusan dari dalam negeri sendiri. Inilah yang dalam naskah ini disebut sebagai *Invited Colonialism*, yaitu keadaan ketika ketergantungan atau pengaruh eksternal memperoleh akses melalui kebijakan, konsesi, kontrak, kompromi, dan keputusan elite domestik.

Konsep tersebut bukan tuduhan kepada satu negara tertentu. Konsep tersebut merupakan alat untuk memeriksa hubungan apa pun: siapa yang menentukan, siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung risiko, dan apakah rakyat tetap memiliki kendali atas masa depannya.

F. Tesis Sekolah Negarawan: Negara Formal Belum Tentu Negara Rakyat

Sekolah Negarawan mengajukan tesis bahwa Indonesia telah mencapai kemerdekaan formal, tetapi secara ideal belum selesai menemukan bentuk negara rakyat.

Tesis ini tidak berarti seluruh institusi negara gagal, seluruh pemimpin tidak berpihak kepada rakyat, atau seluruh perjalanan kemerdekaan tidak memiliki hasil. Indonesia telah menghasilkan banyak kemajuan, membangun institusi, memperluas pendidikan, mengembangkan ekonomi, menjaga persatuan wilayah, dan melewati berbagai krisis. Namun keberhasilan tersebut tidak menghapus kebutuhan untuk memeriksa desain dasarnya.

Apakah rakyat hanya menjadi pemilih, atau benar-benar menjadi pemilik? Apakah kedaulatan rakyat berhenti setelah pemungutan suara, atau terus hadir dalam proses penyusunan hukum, pengawasan, pengelolaan kekayaan nasional, dan penentuan arah pembangunan?

Apakah partai politik berfungsi sebagai instrumen pendidikan dan artikulasi kehendak rakyat, atau lebih banyak menjadi pintu masuk perebutan kekuasaan? Apakah parlemen menjalankan mandat rakyat, atau mandat partai dan pembiayaan kampanye? Apakah birokrasi mengasuh rakyat, atau justru mempertahankan jarak antara penguasa dan masyarakat?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghasilkan penolakan terhadap negara. Tujuannya adalah menemukan bentuk negara yang lebih setia kepada prinsip kedaulatan rakyat.

Bagi Sekolah Negarawan, negara rakyat harus memenuhi sekurang-kurangnya tiga ukuran.

- Pertama, rakyat harus ditempatkan secara nyata sebagai sumber dan pemilik kedaulatan, bukan hanya sebagai sumber legitimasi periodik.
- Kedua, seluruh lembaga kekuasaan harus terikat kepada tujuan melindungi manusia, menghadirkan keadilan, mengembangkan ilmu, dan memenuhi kemaslahatan bersama.
- Ketiga, negara harus mempunyai kemampuan menjaga kedaulatan dari dominasi internal maupun eksternal tanpa berubah menjadi kekuasaan yang menindas rakyatnya sendiri.

Negara rakyat bukan negara yang lemah. Negara rakyat harus cukup kuat untuk menjaga wilayah, sumber daya, teknologi, data, keamanan, dan arah pembangunan. Namun kekuatan tersebut harus dikendalikan oleh konstitusi, nilai, ilmu, dan mekanisme pertanggungjawaban kepada rakyat.

Dalam kerangka ini, perubahan tidak dimulai dari perebutan kekuasaan. Perubahan dimulai dari tata nilai dan manusia.

Alur yang ditawarkan adalah:



Islam di sini bukan simbol pemerintah atau alat legitimasi kekuasaan. Islam ditempatkan sebagai sumber nilai tentang tauhid, amanah, keadilan, ilmu, musyawarah, pembelaan terhadap kaum lemah, serta kemaslahatan.

Negara rakyat hanya mungkin dibangun apabila manusia yang menjalankannya memiliki nilai. Sebaliknya, tata nilai hanya akan bertahan apabila negara melindungi ruang tempat manusia dibentuk, seperti keluarga, desa, pendidikan, kebudayaan, agama, ilmu pengetahuan, dan kehidupan sosial.

SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM



G. Khamenei sebagai Cermin Spiritualitas dan Ketahanan Iran

Dari Iran, naskah ini menghadirkan Ayatollah Sayid Ali Khamenei sebagai salah satu cermin pengalaman bangsa yang berusaha menghubungkan spiritualitas, kepemimpinan nilai, ketahanan nasional, dan kesadaran umat Islam.

Pembahasan tersebut tidak dimaksudkan untuk menempatkan Iran sebagai negara tanpa masalah, tidak pula untuk menyatakan bahwa seluruh pengalaman Iran dapat diterapkan di Indonesia. Indonesia dan Iran memiliki sejarah, masyarakat, konstitusi, mazhab, serta struktur ketatanegaraan yang berbeda.

Namun pengalaman Iran tetap penting dibaca. Iran telah menghadapi tekanan geopolitik, sanksi ekonomi, ancaman keamanan, perang narasi, isolasi teknologi, dan kompetisi kekuatan global. Dalam menghadapi keadaan tersebut, kepemimpinan Iran banyak menekankan ketahanan batin, spiritualitas, tawakal, ilmu pengetahuan, dan kemampuan berdiri secara mandiri.

Sayid Ali Khamenei menekankan bahwa pemuda hanya akan mampu berdiri menghadapi Fir'aun-Fir'aun masa kini apabila memiliki kekuatan batin, agama, keyakinan, tawakal, dan hubungan yang kokoh dengan Allah.

Gagasan tersebut mengandung satu pesan peradaban yaitu kekuatan material tanpa kekuatan batin mudah kehilangan arah, sedangkan kekuatan batin tanpa ilmu dan kemampuan material berisiko tidak mampu melindungi umat.

Spiritualitas dalam kerangka ini bukan pelarian dari dunia. Spiritualitas menjadi fondasi keberanian, ketahanan, disiplin, penguasaan ilmu, dan pembelaan kepada kaum tertindas.

Pengalaman tersebut relevan bagi Indonesia yang sedang menghadapi globalisasi, perang pengetahuan, teknologi digital, dan kecerdasan buatan.

Indonesia tidak cukup hanya mengejar ketertinggalan teknis. Bangsa ini membutuhkan manusia yang mampu menguasai teknologi tanpa dikuasai olehnya, menghadapi dunia tanpa kehilangan identitas, dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa menyerahkan kedaulatan.

Dalam naskah ini, Khamenei juga ditempatkan sebagai cermin kesadaran bahwa umat Islam merupakan satu tubuh dan bahwa pembelaan terhadap *mustad'afin* tidak semestinya dibatasi oleh sekat mazhab. Penderitaan manusia tidak kehilangan arti hanya karena korbannya berbeda mazhab, etnis, bangsa, atau wilayah.

Namun sekali lagi, pengalaman tersebut tidak disampaikan sebagai perintah agar Indonesia mengikuti sistem Iran. Yang dicari adalah nilai, pertanyaan, pengalaman, dan pelajaran yang dapat dipertemukan dengan kebutuhan rakyat Indonesia.

Cak Nun dan Khamenei tidak disamakan. Cak Nun membaca luka Indonesia dari ruang kebudayaan, desa, rakyat, dan spiritualitas sosial. Khamenei mencerminkan pengalaman kepemimpinan negara dan ketahanan peradaban Iran. Keduanya hadir sebagai dua cermin yang berbeda untuk membantu dialog Indonesia–Iran berlangsung lebih dalam daripada sekadar hubungan diplomatik.

H. Iran Tidak Akan Memahami Indonesia Jika Tidak Memahami Dunia

Judul naskah ini merupakan tesis sekaligus metode pembacaan. Iran tidak akan memahami Indonesia apabila Indonesia hanya dibaca dari pemerintahannya. Iran juga tidak akan memahami Indonesia hanya melalui hubungan diplomatik, perdagangan, statistik ekonomi, jumlah penduduk Muslim, pemilu, ataupun pergantian Presiden. Indonesia harus dibaca melalui dunia yang membentuknya.

Sebelum kolonialisme Eropa, Nusantara telah terhubung dengan Arab, Persia, India, China, Afrika Timur, Asia Tenggara, dan jaringan Samudra Hindia. Jaringan tersebut membawa perdagangan, agama, ilmu, bahasa, kebudayaan, sanad, otoritas sosial, dan kepentingan.

Kemudian Portugis dan Spanyol hadir melalui ekspansi maritim. VOC datang sebagai korporasi kolonial. Hindia Belanda membangun administrasi, hukum, birokrasi, ekonomi ekstraktif, pendidikan, dan klasifikasi sosial. Jepang hadir melalui pendudukan militer dan mobilisasi.

Setelah kemerdekaan, Indonesia masuk ke dalam konfigurasi Perang Dingin. Amerika Serikat, Uni Soviet, China, dan berbagai kekuatan lain mempunyai kepentingan terhadap arah Indonesia. Peristiwa 1965 harus dibaca dalam konteks domestik sekaligus geopolitik global, berdasarkan arsip, dokumen, dan bukti yang dapat diverifikasi.

Pada masa kontemporer, China hadir melalui ekonomi, teknologi, industri, pembiayaan, infrastruktur, mineral kritis, dan rantai pasok. Rusia dibahas sejauh bukti menunjukkan peran nyata. Negara-negara Arab dan jaringan Timur Tengah hadir melalui agama, pendidikan, filantropi, perdagangan, kebudayaan, dan pengaruh sosial.

Selain negara, Indonesia dibentuk oleh lembaga keuangan internasional, korporasi global, perusahaan teknologi, sistem data, media, pendidikan, konsultan, platform digital, kecerdasan buatan, serta elite domestik yang mengatur hubungan dengan seluruh jaringan tersebut.

Karena itu, sejarah Indonesia bukan hanya sejarah penjajahan asing. Sejarah tersebut juga merupakan sejarah tentang bagaimana aktor domestik menerima, menolak, mengolah, mengundang, atau memanfaatkan pengaruh dunia.

Di sinilah tanggung jawab internal tidak boleh disembunyikan. Tidak semua persoalan Indonesia dapat ditimpakan kepada kekuatan asing. Dominasi eksternal hanya dapat bekerja secara kuat apabila terdapat struktur, kebijakan, atau elite domestik yang membuka jalan.

Membaca dunia yang membentuk Indonesia berarti membaca perjumpaan antara faktor luar dan faktor dalam. Tanpa itu, analisis akan jatuh pada dua ekstrem yaitu menyalahkan dunia atas seluruh persoalan Indonesia, atau menganggap Indonesia sepenuhnya bebas dari pengaruh dunia. Keduanya tidak memadai.

I. Kerja Sama Indonesia–Iran Tidak Cukup melalui Pemerintah

Hubungan antarnegara pada umumnya dimulai dan dikelola melalui pemerintah. Diplomasi resmi, perjanjian, perdagangan, investasi, kerja sama keamanan, pendidikan, dan pertukaran budaya membutuhkan peran institusi negara. Namun kerja sama peradaban tidak cukup berjalan hanya melalui jalur pemerintah.

Pemerintah dapat berubah. Prioritas diplomatik dapat bergeser. Kepentingan ekonomi dapat naik dan turun. Hubungan peradaban memerlukan fondasi yang lebih dalam yaitu manusia, rakyat, ilmu pengetahuan, tata nilai, kebudayaan, dan simpul-simpul yang hidup dalam masyarakat.

Karena itu, naskah ini tidak hanya berbicara tentang hubungan Indonesia dengan Pemerintah Republik Islam Iran. Naskah ini berbicara tentang kemungkinan perjumpaan antara pengalaman rakyat Indonesia dan pengalaman bangsa Iran.

Namun jalur yang dimaksud bukan sekadar "jalur masyarakat" dalam pengertian umum. Sekolah Negarawan menggunakan istilah jalur rakyat.

Jalur rakyat berarti mencari dan membangun hubungan dengan simpul-simpul yang benar-benar mengasuh rakyat, membela rakyat, mendidik rakyat, memenuhi hak rakyat, menjaga martabat rakyat, dan tidak ikut meyatimkan rakyat.

Simpul tersebut dapat berada di dalam atau di luar institusi resmi. Selain itu, juga dapat hadir di desa, komunitas, keluarga, organisasi sosial, dunia profesional, ruang kebudayaan, pusat pengetahuan, lembaga ekonomi, institusi negara, pesantren, kampus, ataupun lembaga keagamaan. Namun nama dan bentuk kelembagaan tidak otomatis menunjukkan keberpihakan kepada rakyat. Ukurannya adalah pekerjaan nyata.

Sekolah Negarawan tidak menempatkan kerja sama pesantren, hawzah, dan kampus sebagai program formal utama. Ketiganya merupakan bagian dari ekosistem yang dapat diajak berdialog dan diuji keberpihakannya, tetapi tujuan utama naskah ini bukan membangun jaringan pendidikan agama formal ataupun kerja sama akademik konvensional.

Tujuan utamanya adalah menemukan landasan bagi kemitraan peradaban yang sah, terbuka, damai, bermartabat, dan berbasis ilmu.

Kemitraan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengekspor sistem ketatanegaraan Iran, menyebarkan mazhab, memengaruhi kekuasaan domestik Indonesia, atau mengundang intervensi. Iran tidak diminta menunjukkan jalan bagi Indonesia. Indonesia juga tidak datang untuk menggurui Iran.

Kedua bangsa diundang untuk saling membaca. Indonesia dapat belajar dari pengalaman Iran mengenai ketahanan, spiritualitas, kemandirian ilmu, pembelaan terhadap *mustad'afin*, dan keberanian menghadapi tekanan global. Iran dapat belajar dari keragaman Indonesia, tradisi Nusantara, pengalaman Islam yang

tumbuh melalui kebudayaan, serta pergulatan membangun negara di tengah masyarakat yang plural. Namun seluruh proses belajar tersebut harus dijalankan tanpa kehilangan kedaulatan berpikir.

Kerja sama peradaban hanya sehat apabila masing-masing pihak mampu belajar tanpa meniru secara buta, menghormati tanpa mengkultuskan, mengkritik tanpa merendahkan, serta bekerja sama tanpa menguasai.

J. Penutup Bab

Naskah ini dimulai dari sebuah paradoks. Indonesia secara formal adalah negara yang lengkap. Namun kelengkapan formal itu belum otomatis menjadikan rakyat sebagai pemilik nyata kekuasaan. Indonesia telah merdeka, tetapi masih menghadapi warisan kolonial, ketergantungan struktural, krisis kepemimpinan, ketidaksiapan menghadapi teknologi, serta hilangnya rakyat dari sebagian arsitektur negara.

Dari dalam Indonesia, Cak Nun menjadi alarm bahwa negara belum sepenuhnya menjadi rumah rakyat dan bahwa kerusakan peradaban tidak dapat dipisahkan dari krisis kepemimpinan nilai.

Dari Iran, pengalaman kepemimpinan Sayid Ali Khamenei memberikan cermin mengenai hubungan antara spiritualitas, ketahanan batin, kedaulatan, keberanian menghadapi hegemoni, dan pembelaan terhadap kaum tertindas.

Kedua cermin tersebut tidak disamakan. Keduanya digunakan untuk membuka dialog yang

lebih dalam mengenai manusia, rakyat, kepemimpinan, negara, dan peradaban.

Dari titik inilah tesis besar naskah ini bergerak. Iran tidak akan memahami Indonesia jika tidak memahami dunia yang membentuk manusia Indonesia, rakyat Indonesia, kepemimpinan Indonesia, dan arsitektur negara Indonesia.

Namun memahami dunia bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah menemukan jalan agar Indonesia mampu berhubungan dengan dunia secara berdaulat, membangun manusia melalui tata nilai, mengembalikan rakyat sebagai pemilik kekuasaan, dan menemukan bentuk negara yang benar-benar menjadi rumah bersama.

Naskah ini karena itu bukan ajakan untuk membenci dunia. Naskah ini merupakan ajakan agar Indonesia memahami dunia tanpa kehilangan dirinya, bekerja sama tanpa menyerahkan kedaulatan, menyerap ilmu tanpa menjadi pengikut, serta membangun negara tanpa menghilangkan rakyat dari pusat kehidupan berbangsa.

Dari sanalah kerja sama Indonesia–Iran hendak dimulai. Bukan dari ambisi menguasai negara lain, melainkan dari keberanian membaca sejarah secara jujur, memperkuat manusia, menghidupkan tata nilai, dan membangun jalur rakyat menuju kemitraan peradaban yang adil dan bermartabat.

SEKOLAH
NEGARAWAN
X
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

Bab I
Kesalahan Dunia Membaca Indonesia

A. Indonesia sebagai Statistik Global

Dunia mengenal Indonesia melalui sejumlah gambaran besar yang pada dasarnya benar. Indonesia dipandang sebagai negara berpenduduk sangat besar, negara kepulauan, negara dengan populasi Muslim terbesar, demokrasi elektoral yang penting, anggota G20, kekuatan utama Asia Tenggara, pasar yang luas, serta salah satu negara yang semakin diperhitungkan dalam konfigurasi Indo-Pasifik.



Gambaran tersebut bukan rekaan. Indonesia memang merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, terdiri atas lebih dari 17.000 pulau, dan menjadi perekonomian terbesar di Asia Tenggara. Indonesia juga merupakan bagian dari G20, forum yang mempertemukan berbagai perekonomian

maju dan berkembang utama dunia. Dengan ukuran tersebut, Indonesia terlihat sebagai negara yang sulit diabaikan.

Jumlah penduduknya menunjukkan besarnya tenaga kerja, konsumen, dan potensi pasar. Letak geografisnya menjadikan Indonesia penting bagi jalur perdagangan, keamanan maritim, energi, dan konektivitas kawasan. Kekayaan sumber daya alamnya menempatkan Indonesia dalam rantai pasok pangan, energi, mineral, industri, dan teknologi global. Jumlah penduduk Muslimnya membuat Indonesia sering dipandang sebagai representasi penting dunia Islam. Namun statistik mempunyai keterbatasan.

Statistik dapat menunjukkan berapa banyak manusia hidup di suatu negara, tetapi tidak selalu menjelaskan bagaimana manusia tersebut diperlakukan oleh negaranya. Statistik dapat menunjukkan pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak otomatis menjelaskan siapa yang menguasai hasil pertumbuhan. Statistik dapat menunjukkan jumlah pemilih, tetapi tidak menjelaskan sejauh mana pemilih mengendalikan kekuasaan setelah pemilihan umum selesai.

Statistik juga dapat menunjukkan banyaknya lembaga negara, banyaknya undang-undang, luas wilayah, cadangan mineral, tingkat konsumsi digital, jumlah pengguna internet, atau besarnya produk domestik bruto. Namun angka-angka tersebut tidak dengan sendirinya menjelaskan apakah rakyat menjadi pemilik nyata dari struktur yang menghasilkan seluruh angka itu. Di sinilah kesalahan pertama dunia dalam membaca Indonesia terjadi.

Dunia sering mengira bahwa ukuran suatu negara dengan sendirinya menjelaskan kedalaman negara tersebut. Indonesia menjadi penting karena besar, bukan karena dipahami. Indonesia dihitung, tetapi belum tentu dibaca.

Indonesia hadir dalam tabel-tabel ekonomi, proyeksi pasar, analisis demografi, kajian keamanan, dan laporan investasi. Namun manusia Indonesia kerap direduksi menjadi konsumen, pekerja, pemilih, pengguna platform, pemilik data, atau penerima kebijakan.

Ketika Indonesia dipahami terutama sebagai statistik, pertanyaan tentang rakyat sebagai pemilik negara cenderung menghilang. Yang muncul adalah pertanyaan lain yaitu seberapa besar pasarnya, seberapa stabil pemerintahannya, seberapa terbuka investasinya, seberapa aman jalur perdagangannya, seberapa besar sumber dayanya, dan seberapa strategis posisinya.

Semua pertanyaan itu sah. Akan tetapi, semuanya adalah pertanyaan tentang kegunaan Indonesia bagi dunia. Naskah ini mengajukan pertanyaan yang berbeda yaitu apa kegunaan negara Indonesia bagi rakyat Indonesia sendiri?

B. Indonesia sebagai Pasar dan Mitra Diplomatik

Dalam hubungan internasional, Indonesia sering dipandang sebagai mitra yang diperlukan. Negara-negara besar membutuhkan Indonesia karena posisi geografis, jumlah penduduk, sumber daya alam, pengaruhnya di Asia Tenggara, serta kemampuannya menjaga hubungan dengan berbagai blok kekuatan.

Indonesia memiliki tradisi pemerintahan luar negeri yang berusaha mempertahankan ruang gerak di antara kekuatan-kekuatan besar. Indonesia juga aktif dalam berbagai forum internasional dan regional. Karena itu, banyak negara melihat Indonesia sebagai mitra yang relatif terbuka, pragmatis, dan penting bagi stabilitas kawasan.

Di bidang ekonomi, Indonesia dipandang sebagai pasar besar. Pasar tidak hanya berarti tempat menjual barang. Dalam ekonomi modern, pasar juga berarti tenaga kerja, data, perhatian manusia, kebiasaan konsumsi, kebutuhan pembiayaan, sumber bahan mentah, ruang pembangunan infrastruktur, dan tempat penerapan teknologi.

Ketika sebuah negara dipandang terutama sebagai pasar, manusia yang hidup di dalamnya mudah dibaca berdasarkan daya belinya. Rakyat berubah menjadi konsumen. Desa berubah menjadi wilayah distribusi. Pendidikan berubah menjadi pencetak tenaga kerja. Data berubah menjadi bahan baku. Kebudayaan berubah menjadi preferensi pasar. Negara berubah menjadi pengelola iklim investasi.

Pembacaan seperti itu tidak selalu lahir dari niat buruk. Negara membutuhkan perdagangan, investasi, teknologi, dan kerja sama ekonomi. Tidak ada bangsa modern yang dapat sepenuhnya memisahkan diri dari hubungan dunia.

Persoalannya bukan apakah Indonesia harus bekerja sama dengan dunia. Persoalannya adalah dari posisi apa kerja sama itu dilakukan.

Apakah Indonesia hadir sebagai bangsa yang memahami kebutuhan rakyatnya, menguasai pengetahuan, menjaga data, mengendalikan sumber daya, serta menentukan arah industrinya? Ataukah Indonesia hadir terutama sebagai pasar yang terbuka bagi barang, modal, teknologi, pengetahuan, dan standar yang dirumuskan di luar dirinya?

Perbedaan antara kedua posisi tersebut sangat menentukan. Kerja sama yang dilakukan oleh bangsa berdaulat dapat memperkuat kemampuan rakyat. Kerja sama yang dilakukan oleh bangsa yang tidak mempunyai arah dapat memperbesar ketergantungan.

Investasi dapat membangun industri, tetapi dapat pula mengunci suatu negara pada lapisan terbawah rantai nilai. Teknologi dapat mempercepat pelayanan, tetapi dapat pula menyerahkan data dan pengetahuan strategis kepada pihak lain. Pendidikan internasional dapat memperluas ilmu, tetapi dapat pula membentuk manusia yang lebih memahami kebutuhan sistem global daripada kebutuhan rakyatnya sendiri.

Dunia biasanya mengukur keberhasilan hubungan dengan Indonesia melalui nilai perdagangan, jumlah investasi, banyaknya kesepakatan, proyek yang dibangun, atau kestabilan hubungan diplomatik. Sekolah Negarawan mengusulkan ukuran tambahan, yaitu apakah hubungan tersebut membuat rakyat Indonesia semakin berdaulat atau justru semakin bergantung?

C. Kekeliruan Membaca Indonesia Hanya sebagai Negara Muslim Terbesar

Indonesia sering disebut sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Sebutan tersebut benar secara demografis dan mempunyai arti penting.

Islam hidup dalam sejarah, kebudayaan, bahasa, pendidikan, keluarga, organisasi sosial, dan kehidupan sehari-hari sebagian besar rakyat Indonesia.

Sumber-sumber internasional juga telah lama mencatat Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar. Namun sebutan "negara Muslim terbesar" juga dapat menyesatkan apabila tidak dijelaskan.

Secara data demografis dalam infografis tersebut memperlihatkan mengapa Indonesia berada di peringkat pertama.

Berdasarkan data yang ditampilkan, Indonesia memiliki sekitar 247,3 juta penduduk Muslim, lebih banyak dibandingkan Pakistan yang berada di peringkat kedua dengan sekitar 246,05 juta Muslim, India sekitar 226,06 juta, dan Bangladesh sekitar 161,8 juta.

Dengan demikian, Indonesia bukan hanya negara dengan mayoritas penduduk Muslim, tetapi juga negara dengan jumlah Muslim absolut terbesar di dunia.

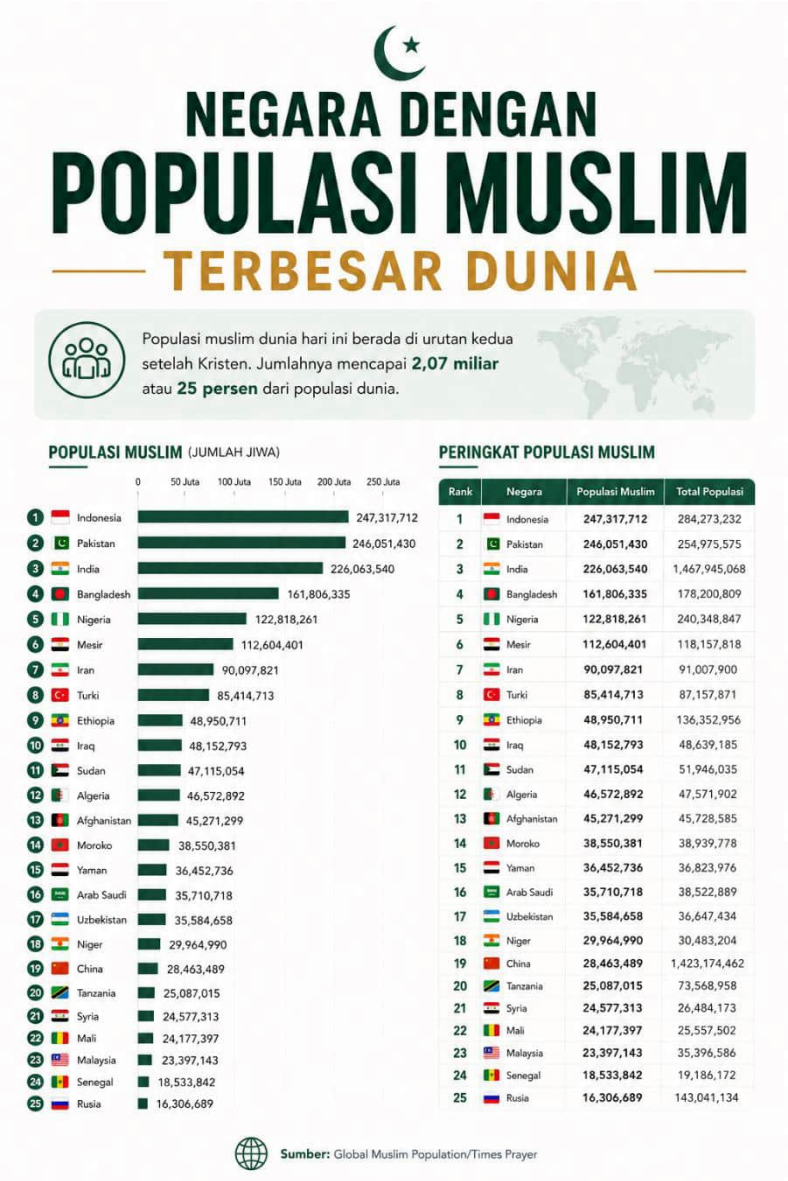

Posisi nomor satu ini mempunyai konsekuensi moral dan peradaban. Indonesia memiliki jumlah umat Islam yang sangat besar, sumber daya manusia yang luas, tradisi keilmuan Islam yang panjang, serta

organisasi-organisasi sosial keagamaan yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pertanyaan tentang Indonesia tidak berhenti pada kebanggaan bahwa "Muslim Indonesia adalah yang terbanyak di dunia." Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apa yang dihasilkan oleh jumlah yang besar itu?

Jika Indonesia memiliki sekitar seperdelapan dari seluruh Muslim dunia, maka Indonesia juga memiliki tanggung jawab yang besar untuk menunjukkan bagaimana jumlah umat yang besar dapat diterjemahkan menjadi kualitas manusia, keadilan sosial, pendidikan yang kuat, ekonomi yang mandiri, pemerintahan yang amanah, ilmu pengetahuan yang maju, dan perlindungan terhadap kelompok yang lemah. Jumlah yang besar seharusnya menjadi potensi peradaban, bukan sekadar statistik demografis.

Namun, banyaknya penduduk Muslim ternyata tidak otomatis berarti Islam telah menjadi tata nilai utama dalam penyelenggaraan negara. Mayoritas identitas keagamaan tidak dengan sendirinya menghasilkan keadilan, amanah, musyawarah, perlindungan terhadap kaum lemah, pemerataan ilmu, ataupun kepemimpinan yang berempati kepada rakyat.

Islam dapat hadir sebagai identitas penduduk, simbol sosial, kalender, pakaian, bahasa pemerintahan, ritual, dan legitimasi moral. Akan tetapi, kehadiran simbol tidak selalu sama dengan berfungsinya nilai.

Suatu bangsa dapat sangat religius dalam kehidupan personal, tetapi tidak cukup adil dalam

hukum. Bangsa tersebut dapat memiliki banyak rumah ibadah, tetapi membiarkan ketimpangan ekonomi.

Bangsa tersebut dapat memuliakan ulama, tetapi tidak membangun tradisi ilmu yang membebaskan rakyat. Bangsa tersebut dapat menggunakan bahasa agama dalam perebutan kekuasaan, tetapi memperlakukan kekuasaan sebagai transaksi.

Karena itu, dunia akan keliru apabila menganggap bahwa jumlah Muslim dengan sendirinya menjelaskan arah peradaban Indonesia.

Kekeliruan lain muncul ketika Islam Indonesia hanya dibaca sebagai versi "moderat", "toleran", "tradisional", "modernis", atau kategori lain yang diperlukan oleh wacana geopolitik. Kategori-kategori tersebut mungkin berguna dalam batas tertentu, tetapi sering kali menjadikan Islam Indonesia sekadar objek klasifikasi.

Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah Islam mampu menjadi tata nilai yang menyelamatkan manusia, memperkuat rakyat, mengendalikan kekuasaan, membentuk kepemimpinan, dan menghadirkan keadilan.

Di dalam naskah ini, Islam tidak ditempatkan sebagai tanda statistik bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Islam ditempatkan sebagai sumber nilai primer yang dapat digunakan untuk menilai manusia, kepemimpinan, ekonomi, hukum, teknologi, dan negara.

Dengan ukuran tersebut, Indonesia tidak cukup dipuji sebagai negara Muslim terbesar. Indonesia juga harus berani bertanya apakah umat Islamnya telah

mempunyai kekuatan ilmu, kemandirian ekonomi, kepemimpinan nilai, solidaritas terhadap yang tertindas, dan kemampuan membentuk negara yang menjadi rumah bagi seluruh rakyat.

D. Penjajahan yang Terlihat dan Penjajahan yang Tidak Terlihat



Dunia lebih mudah mengenali penjajahan ketika penjajahan hadir dalam bentuk kasatmata. Pendudukan

wilayah, agresi militer, blokade, pengeboman, pasukan asing, penghancuran infrastruktur, pengungsian, kelaparan, penahanan, dan terbunuhnya warga sipil menghasilkan gambaran yang sulit disembunyikan. Karena itu, penderitaan Palestina, Lebanon, Yaman, Suriah, Irak, dan Libya lebih mudah dibaca dalam kerangka konflik, intervensi, perang, krisis kemanusiaan, atau perebutan geopolitik. Namun negara-negara tersebut tidak boleh disamakan seolah-olah mengalami status hukum dan sejarah yang identik.

Palestina menghadapi persoalan pendudukan yang diakui secara khusus dalam terminologi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, secara resmi terus disebut sebagai Wilayah Palestina yang Diduduki. Sementara Lebanon, Yaman, Suriah, Irak, dan Libya mempunyai sejarah serta konfigurasi berbeda yang mencakup perang saudara, intervensi eksternal, serangan lintas batas, pendudukan pada periode tertentu, konflik proksi, keruntuhan institusi, atau transisi pemerintahan.

Perbedaan tersebut penting agar penderitaan manusia tidak dipakai secara retoris tanpa ketelitian. Indonesia tidak sedang mengalami keadaan yang sama.

Tidak ada tentara asing yang secara terbuka menduduki keseluruhan wilayah Indonesia. Indonesia tidak hidup dalam perang saudara berskala nasional. Kota-kota utamanya tidak mengalami pengeboman harian. Pemerintahannya tidak runtuh. Pelabuhan, bandara, sekolah, universitas, lembaga peradilan, pasar, industri, dan administrasi negara tetap berjalan. Karena

itu, dari luar Indonesia tampak normal. Justru kenormalan tersebut dapat menutupi persoalan yang lebih dalam.

Bentuk dominasi terhadap suatu bangsa tidak selalu bekerja melalui penguasaan wilayah. Tetapi, juga dapat bekerja melalui penguasaan arah. Suatu negara dapat tetap mempunyai bendera, pemerintahan, pemilu, parlemen, dan tentara, tetapi kehilangan kemampuan menentukan apa yang harus dipelajari, teknologi apa yang harus dibangun, bagaimana sumber daya dikelola, siapa yang menguasai data, nilai apa yang membentuk manusia, dan untuk kepentingan siapa ekonomi dijalankan.

Penjajahan yang terlihat merampas wilayah secara langsung. Penjajahan yang tidak terlihat dapat mengurangi kemampuan sebuah bangsa mengendalikan kehidupannya sendiri.

Penjajahan yang terlihat memakai senjata. Penjajahan yang tidak terlihat dapat bekerja melalui kontrak, utang, konsesi, standar, kurikulum, regulasi, teknologi, data, media, budaya konsumsi, pembiayaan kampanye, serta ketergantungan pengetahuan.

Penjajahan yang terlihat melahirkan perlawanan karena musuh dapat dikenali. Penjajahan yang tidak terlihat lebih sulit dilawan karena ia dapat hadir sebagai modernisasi, efisiensi, investasi, bantuan, inovasi, kemajuan, atau kebutuhan pasar.

Namun tidak setiap kontrak adalah kolonialisme. Tidak setiap utang adalah penjajahan. Tidak setiap teknologi asing adalah dominasi. Tidak setiap investasi merugikan rakyat. Tidak setiap standar internasional

menghilangkan kedaulatan. Ukuran yang diperlukan adalah hubungan kekuasaan di dalamnya.

Siapa yang merumuskan aturan? Siapa yang memiliki pengetahuan? Siapa yang menguasai aset? Siapa yang menyimpan data? Siapa yang menentukan harga? Siapa yang memperoleh nilai tambah? Siapa yang menanggung risiko sosial dan ekologis? Dapatkah Indonesia mengubah atau mengakhiri hubungan tersebut secara berdaulat?

Jika sebuah hubungan memperkuat ilmu, industri, teknologi, kapasitas, dan kesejahteraan rakyat, hubungan itu dapat menjadi kerja sama yang sehat. Jika hubungan tersebut menciptakan ketergantungan, menghilangkan kendali, memindahkan manfaat, dan meninggalkan beban kepada rakyat, maka hubungan itu perlu diperiksa sebagai kemungkinan kolonialisme struktural.

E. Struktur Terdalam yang Jarang Dibaca

Dunia melihat pemerintahan Indonesia, tetapi jarang membaca algoritma kekuasaannya. Dunia melihat pemilu, tetapi tidak selalu membaca mekanisme pencalonan, biaya kampanye, hubungan pemodal, partai, media, birokrasi, dan elite. Dunia melihat parlemen, tetapi belum tentu memeriksa siapa yang menentukan agenda legislasi. Dunia melihat pertumbuhan ekonomi, tetapi belum tentu membaca struktur kepemilikan, penguasaan rantai nilai, ketergantungan teknologi, dan distribusi manfaat.

Dunia melihat bahwa konstitusi Indonesia menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat.

Namun dunia jarang menanyakan bagaimana kedaulatan tersebut diterjemahkan setelah rakyat memberikan suara.

Apakah rakyat mempunyai mekanisme untuk menentukan arah strategis negara? Apakah mereka mampu mengoreksi kekuasaan selain menunggu pemilihan umum berikutnya? Apakah lembaga perwakilan benar-benar mewakili rakyat atau lebih tunduk kepada struktur partai? Apakah kekayaan alam dikelola sebagai milik rakyat atau sebagai objek negosiasi antara negara, korporasi, dan elite?

Inilah struktur terdalam yang jarang dibaca. Secara formal, rakyat berada di dalam konstitusi. Secara praktis, rakyat dapat berada di luar pusat pengambilan keputusan.

Secara formal, kekuasaan berasal dari rakyat. Secara praktis, jalan menuju kekuasaan dapat lebih ditentukan oleh partai, modal, jaringan elite, popularitas, media, dan teknologi.

Secara formal, negara menguasai sumber daya untuk kemakmuran rakyat. Secara praktis, rakyat dapat menjadi pihak terakhir yang menikmati manfaat dan pihak pertama yang menanggung kerusakan.

Keadaan ini tidak selalu lahir dari rencana tunggal. Keadaan tersebut dapat muncul dari pertemuan berbagai sistem, yaitu warisan kolonial, kelemahan konstitusional, biaya kampanye, ketimpangan pengetahuan, struktur ekonomi, budaya birokrasi, pengaruh global, dan kepentingan domestik.

Karena itu, kolonialisme struktural tidak boleh dipahami hanya sebagai tindakan asing terhadap

Indonesia. Kolonialisme struktural merupakan hubungan antara kekuatan luar dan struktur dalam negeri yang memungkinkan dominasi berlangsung.

Pihak luar dapat menawarkan modal, teknologi, pasar, atau pengetahuan. Namun keputusan menerima, mengatur, membatasi, dan mendistribusikan manfaatnya tetap melibatkan aktor domestik. Di sinilah konsep *Invited Colonialism* memperoleh arti.

Dominasi dapat memperoleh jalan karena pintu dibuka dari dalam. Elite domestik dapat mengundang ketergantungan melalui kebijakan yang tidak memiliki strategi jangka panjang, konsesi yang tidak seimbang, penyerahan data, pengabaian transfer teknologi, ketergantungan pada konsultan, atau pembentukan regulasi yang lebih melindungi kepentingan modal daripada rakyat.

Kekuatan asing tidak selalu harus menaklukkan negara apabila sebagian kepentingannya dapat dijalankan melalui manusia, hukum, dan institusi di dalam negara itu sendiri.

F. Krisis Kepemimpinan yang Tidak Tampak dalam Statistik

Statistik dapat mencatat jumlah pemilu, jumlah calon, tingkat partisipasi, jumlah partai, komposisi parlemen, dan pergantian pemerintahan. Namun, statistik sulit mengukur amanah. Statistik dapat mencatat jumlah sekolah, tetapi tidak mudah mengukur keberanian moral seorang guru. Statistik dapat mencatat jumlah rumah ibadah, tetapi tidak mudah mengukur kedalaman spiritual pemimpinnya. Statistik

dapat mencatat belanja negara, tetapi tidak mudah mengukur empati pejabat terhadap rakyat yang menanggung akibat kebijakannya. Di sinilah kritik Cak Nun mengenai kepemimpinan menjadi relevan.

Krisis kepemimpinan tidak selalu muncul dalam bentuk kudeta, korupsi besar, atau keruntuhan pemerintahan. Krisis tersebut dapat hadir melalui ketidakpekaan yang menjadi kebiasaan. Pemimpin tetap berbicara tentang rakyat, tetapi tidak mengalami kehidupan rakyat. Kebijakan tetap dibuat, tetapi penderitaan sosial hanya hadir sebagai data dan bahan presentasi.

Dalam keadaan demikian, rakyat tidak selalu ditindas melalui kekerasan. Mereka dapat diyatimkan melalui ketidakpedulian.

Rakyat diyatimkan ketika tidak mempunyai tempat untuk mengadu. Mereka diyatimkan ketika hukum terlalu mahal. Mereka diyatimkan ketika pendidikan tidak membentuk masa depan. Mereka diyatimkan ketika tanah, pekerjaan, data, dan ruang hidupnya berubah menjadi objek kebijakan tanpa keterlibatan yang berarti.

Rakyat juga diyatimkan ketika pemimpin agama kehilangan kemampuan membimbing umat melampaui ritual. Ketika agama hanya dipakai untuk membenarkan kelompok, jabatan, dan kepentingan, kepemimpinan agama ikut kehilangan fungsi peradabannya. Karena itu, krisis kepemimpinan Indonesia tidak cukup dijawab dengan pendidikan

teknis, pelatihan manajemen, atau pergantian generasi. Indonesia membutuhkan kepemimpinan nilai.

Kepemimpinan nilai bukan kepemimpinan yang hanya pandai mengutip agama. Dia adalah kepemimpinan yang menggabungkan spiritualitas, ilmu, empati, keberanian, keadilan, dan tanggung jawab.

Pemimpin nilai memahami bahwa kekuasaan bukan hadiah, melainkan beban. Pemimpin tidak memandang rakyat sebagai angka elektoral. Pemimpin tidak memandang negara sebagai perusahaan. Pemimpin tidak memandang teknologi sebagai tujuan. Pemimpin menempatkan seluruh instrumen tersebut untuk melindungi manusia.

Krisis semacam ini tidak tampak dalam peringkat ekonomi atau indeks diplomasi. Sebuah negara dapat dihormati dunia, diterima pasar, dan aktif dalam forum global, tetapi mengalami kekosongan kepemimpinan di dalam dirinya.

G. Globalisasi dan AI sebagai Medan Perang Baru

Globalisasi pernah dipahami terutama sebagai meningkatnya perdagangan, mobilitas modal, arus barang, perjalanan manusia, dan pertukaran informasi. Kini globalisasi telah memasuki lapisan yang lebih dalam.

Globalisasi membentuk bahasa, pengetahuan, keinginan, perhatian, budaya, selera, persepsi, dan cara manusia memahami kenyataan.

Teknologi digital mempercepat proses tersebut. Platform global tidak hanya menjadi alat komunikasi,

tetapi juga menentukan informasi apa yang terlihat, siapa yang didengar, perilaku apa yang dihargai, dan perhatian manusia diarahkan ke mana. Kecerdasan buatan memperluasnya lagi.

AI dapat membantu pendidikan, kesehatan, pemerintahan, industri, penelitian, pertahanan, dan pelayanan masyarakat. Namun AI juga memusatkan kekuatan pada pihak yang memiliki data, komputasi, modal, model, infrastruktur, dan kemampuan teknis. Persoalan AI karena itu bukan hanya persoalan kecanggihan perangkat tetapi juga persoalan kedaulatan.

UNESCO telah menempatkan kedaulatan data, hak, integritas, kesetaraan, privasi, dan kedaulatan budaya sebagai bagian penting dari pembahasan etika serta tata kelola AI. Kekhawatiran tersebut menunjukkan bahwa AI dapat memengaruhi bukan hanya efisiensi, tetapi juga agensi manusia, kebudayaan, dan kemampuan komunitas mengendalikan data serta nilai mereka sendiri.

Bangsa yang tidak memiliki data akan bergantung pada pihak yang memilikinya. Bangsa yang mempunyai data tetapi tidak memiliki komputasi akan bergantung pada penyedia infrastruktur. Bangsa yang memiliki infrastruktur tetapi tidak memiliki model dan pengetahuan akan tetap menjadi pengguna. Bangsa yang mempunyai seluruh perangkat itu tetapi tidak memiliki tata nilai dapat menciptakan teknologi yang justru merusak manusia.

Karena itu, perang AI bukan hanya persaingan membuat model paling besar. Perang AI adalah

persaingan menentukan nilai siapa yang ditanamkan ke dalam sistem, bahasa siapa yang dipahami, sejarah siapa yang dijadikan data, kepentingan siapa yang dioptimalkan, serta manusia seperti apa yang hendak dibentuk.

Indonesia menghadapi risiko menjadi pasar AI yang sangat besar tanpa menjadi salah satu penentu arah AI.

Ratusan juta manusia Indonesia menghasilkan bahasa, gambar, suara, perilaku, pilihan, lokasi, hubungan sosial, dan data ekonomi. Data tersebut mempunyai nilai strategis. Namun apabila Indonesia tidak memiliki arsitektur hukum, teknologi, etika, dan kelembagaan yang matang, rakyat Indonesia dapat menjadi penghasil bahan mentah digital tanpa menguasai nilai tambahnya.

Pola ini menyerupai ekonomi ekstraktif lama yaitu bahan mentah keluar, nilai tambah dibentuk di luar, kemudian produk akhir dijual kembali kepada masyarakat yang menghasilkan bahan mentah tersebut.

Perbedaannya, bahan mentah masa kini bukan hanya mineral dan hasil bumi. Tetapi juga perbedaan pikiran, bahasa, budaya, perhatian, perilaku, dan data manusia. Di sinilah globalisasi dan AI menjadi medan perang baru.

Perangnya tidak selalu memakai senjata, tetapi memperebutkan kendali atas pengetahuan, keputusan, narasi, data, dan masa depan manusia.

Indonesia tidak dapat menghadapi medan tersebut hanya dengan menambah jaringan internet atau mengimpor teknologi.

Indonesia memerlukan kepemimpinan nilai dan arsitektur negara yang mampu menjawab siapa yang memiliki data rakyat, untuk tujuan apa AI digunakan, siapa yang bertanggung jawab ketika keputusan algoritmik merugikan manusia, bagaimana bahasa, sejarah, dan kebudayaan Indonesia dilindungi, rakyat memperoleh manfaat ekonomi dari data dan pengetahuan yang mereka hasilkan, negara menggunakan teknologi tanpa mengubah rakyat menjadi objek pengawasan.

Pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab oleh pasar sendirian. Tetapi, juga memerlukan konstitusi, kebijakan, ilmu, etika, dan kepemimpinan peradaban.

H. Mengapa Iran Perlu Membaca Indonesia Lebih Dalam

Iran dapat dengan mudah membaca Indonesia sebagai negara sahabat berpenduduk Muslim besar, mitra ekonomi, kekuatan Asia Tenggara, dan negara penting dalam berbagai forum internasional. Semua pembacaan tersebut berguna, tetapi belum cukup.

Apabila Iran hanya membaca pemerintah Indonesia, Iran akan memahami struktur diplomatik, tetapi belum memahami rakyatnya. Apabila Iran hanya membaca organisasi keagamaan, Iran mungkin memahami institusi sosial, tetapi belum tentu memahami luka manusia Indonesia. Apabila Iran hanya membaca pasar, Iran akan melihat peluang ekonomi, tetapi belum tentu melihat kolonialisme struktural yang sedang dipersoalkan oleh naskah ini.

Iran perlu memahami bahwa Indonesia tidak hidup dalam perang terbuka, tetapi bukan berarti seluruh dimensi kedaulatannya telah selesai.

Indonesia tidak menghadapi pendudukan militer, tetapi menghadapi perebutan nilai, pengetahuan, teknologi, data, sumber daya, pendidikan, dan arah pembangunan. Indonesia tidak mengalami blokade fisik, tetapi dapat mengalami ketergantungan teknologi dan industri. Indonesia tidak kehilangan pemerintahan, tetapi masih menghadapi pertanyaan mengenai siapa yang sesungguhnya mengendalikan prioritas negara.

Iran juga perlu membaca bahwa Indonesia bukan ruang kosong yang menunggu diajari dari luar. Indonesia mempunyai sejarah Islam, kerajaan, kesultanan, pesantren, kebudayaan, ulama, intelektual, gerakan rakyat, dan pengalaman kenegaraan sendiri. Karena itu, Iran tidak datang sebagai model yang harus disalin.

Pengalaman Iran menjadi relevan sebagai cermin, terutama dalam hubungan antara spiritualitas, ketahanan bangsa, kemandirian ilmu, pembelaan terhadap *mustad'afin*, dan keberanian menghadapi hegemoni. Namun cermin bukan cetak biru. Indonesia harus menemukan bentuknya sendiri.

Dialog Indonesia–Iran akan bernilai apabila membantu Indonesia memperkuat kemampuan membaca dirinya, bukan menggantikan satu ketergantungan dengan ketergantungan lain. Iran juga harus bersedia membaca Indonesia melalui desa,

rakyat, manusia, dan luka sosialnya, bukan hanya melalui elite, seremoni, dan hubungan resmi.

Karena itu, kerja sama Indonesia–Iran tidak cukup diletakkan pada diplomasi pemerintah. Kerj asama memerlukan jalur rakyat yaitu hubungan dengan simpul-simpul yang benar-benar mengasuh, mendidik, membela, memenuhi hak, dan tidak ikut meyatimkan rakyat.

Jalur tersebut bukan alat untuk mencampuri kekuasaan domestik. Kerja sama tersebut merupakan ruang dialog peradaban yang sah, terbuka, damai, dan berbasis ilmu.

I. Penutup Bab

Kesalahan dunia membaca Indonesia bukan karena seluruh label yang digunakan salah. Indonesia memang negara Muslim terbesar, demokrasi penting, anggota G20, negara kepulauan, pasar besar, dan mitra strategis.

Kesalahannya terletak pada anggapan bahwa seluruh label tersebut sudah cukup. Label-label itu menjelaskan ukuran Indonesia, tetapi belum menjelaskan kedalaman masalahnya. Label-label tersebut menjelaskan posisi Indonesia di dunia, tetapi belum menjelaskan posisi rakyat di dalam negaranya.

Dunia melihat negara yang stabil, tetapi jarang melihat rakyat yang dapat kehilangan kendali atas kekuasaan. Dunia melihat pasar yang tumbuh, tetapi jarang melihat ketergantungan yang menyertainya. Dunia melihat kemajuan teknologi, tetapi belum tentu melihat penyerahan data dan pengetahuan. Dunia

melihat pemilu, tetapi tidak selalu membaca biaya dan algoritma kekuasaan yang bekerja di belakangnya.

Indonesia tidak sedang dijajah melalui bentuk yang sama dengan penderitaan bangsa-bangsa yang menghadapi pendudukan, serangan militer, perang saudara, atau keruntuhan institusi. Penderitaan mereka nyata dan tidak boleh direduksi menjadi perumpamaan. Namun ketiadaan perang terbuka tidak berarti ketiadaan dominasi.

Dominasi terhadap Indonesia dapat bekerja melalui nilai, moral, kebudayaan, ekonomi, hukum, regulasi, pendidikan, teknologi, data, elite domestik, serta kepemimpinan yang kehilangan orientasi nilai. Karena itu, kemerdekaan Indonesia tidak cukup dijaga hanya dengan tentara, perbatasan, dan diplomasi. Kemerdekaan juga harus dijaga melalui ilmu pengetahuan, tata nilai, kedaulatan data, kepemimpinan, konstitusi, teknologi, ekonomi, dan arsitektur negara yang menempatkan rakyat sebagai pemilik.

Di era globalisasi dan kecerdasan buatan, sebuah bangsa dapat tetap memiliki wilayah tetapi kehilangan masa depan. Bangsa tersebut dapat tetap mempunyai pemerintahan tetapi tidak menguasai keputusan. Bangsa tersebut dapat tetap disebut merdeka tetapi hidup di dalam sistem yang arah dan nilainya ditentukan oleh pihak lain. Inilah Indonesia yang jarang dibaca dunia. Dan inilah alasan Iran tidak akan memahami Indonesia apabila tidak memahami dunia yang membentuk manusia, nilai, kepemimpinan, dan negara Indonesia.

Bab II
Indonesia Belum Pernah Menemukan Bentuk Negara

A. Negara Formal dan Negara Substantif

Indonesia adalah negara yang sah. Pernyataan tersebut tidak menjadi objek perdebatan dalam naskah ini. Republik Indonesia memiliki wilayah, penduduk, pemerintahan, konstitusi, lembaga negara, angkatan bersenjata, kepolisian, hubungan diplomatik, dan pengakuan internasional. Indonesia menjadi anggota masyarakat dunia, menandatangani perjanjian, menjalankan pemerintahan, memungut pajak, membentuk hukum, serta mempertahankan wilayahnya. Dalam pengertian hukum internasional, Indonesia memenuhi unsur-unsur sebuah negara.

Namun negara tidak hanya mempunyai dimensi formal. Negara juga mempunyai dimensi substantif. Dimensi formal menjelaskan apakah suatu entitas mempunyai wilayah, penduduk, pemerintahan, kedaulatan, dan kemampuan berhubungan dengan negara lain. Dimensi substantif menjawab pertanyaan yang berbeda yaitu untuk siapa negara itu dibentuk, dari mana kekuasaan memperoleh legitimasi, siapa yang mengendalikan struktur kekuasaan, dan nilai apa yang menjadi arah penyelenggaraan negara.

Di sinilah Sekolah Negarawan membedakan antara negara formal, negara substantif, dan negara rakyat.

Negara formal adalah negara yang memiliki perangkat hukum, pemerintahan, institusi, simbol, dan pengakuan. Negara substantif adalah negara yang tidak hanya berdiri secara hukum, tetapi juga mempunyai arah, tata nilai, kemampuan, serta struktur yang konsisten dengan tujuan pembentukannya. Adapun negara rakyat adalah negara substantif yang secara nyata menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan dan pemilik arsitektur kekuasaan.

Perbedaan tersebut penting karena sebuah negara dapat lengkap secara formal, tetapi belum selesai secara substantif. Negara dapat mempunyai pemilu, parlemen, Presiden, kementerian, pengadilan, dan aparat keamanan, tetapi seluruh kelengkapan itu belum otomatis menjadikan rakyat sebagai pemilik negara.

Rakyat dapat disebut sebagai pemegang kedaulatan, tetapi hanya dilibatkan pada saat pemilihan umum. Setelah suara diberikan, arah negara lebih banyak ditentukan oleh partai politik, pejabat, birokrasi, pemilik modal, kelompok kepentingan, jaringan media, dan berbagai pusat kekuasaan lain yang tidak selalu dapat dikendalikan oleh rakyat.

Dengan demikian, persoalan yang diajukan Sekolah Negarawan bukan apakah Indonesia mempunyai negara. Persoalannya adalah apakah Indonesia telah menemukan bentuk negara yang memungkinkan rakyat benar-benar memiliki negara.

Negara rakyat tidak cukup dibangun melalui deklarasi bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Kedaulatan harus mempunyai tubuh, struktur, mekanisme, dan saluran yang hidup. Rakyat harus

hadir bukan hanya sebagai kata dalam konstitusi, melainkan sebagai pemilik mandat, pemilik kekayaan nasional, sumber arah pembangunan, pengawas kekuasaan, dan pihak yang dapat mengoreksi negara.

Tanpa struktur yang mewujudkan kedudukan tersebut, kedaulatan rakyat berisiko tinggal sebagai prinsip abstrak. Rakyat diakui, tetapi tidak mempunyai alat. Kekuasaan dimuliakan, tetapi tidak diberi bentuk.

B. Mengapa Pengakuan Internasional Tidak Cukup

Pengakuan internasional diperlukan bagi keberadaan suatu negara dalam sistem dunia. Tanpa pengakuan dan kemampuan menjalankan hubungan luar negeri, sebuah bangsa akan mengalami kesulitan mempertahankan wilayah, melakukan perdagangan, menandatangani perjanjian, melindungi warga negaranya, dan menjalankan berbagai fungsi internasional lainnya. Namun pengakuan internasional hanya menjawab pertanyaan apakah suatu negara ada dalam pergaulan dunia. Pengakuan tersebut tidak menjawab apakah rakyat benar-benar memiliki negara itu.

Dunia dapat mengakui sebuah pemerintahan tanpa mengetahui seberapa dalam rakyat berpartisipasi dalam struktur kekuasaannya. Dunia dapat melihat berlangsungnya pemilu tanpa memeriksa biaya pencalonan, ketergantungan partai kepada modal, kualitas representasi, atau keterbatasan rakyat dalam mengoreksi kekuasaan setelah pemilu selesai.

Pengakuan internasional juga tidak menjamin bahwa sebuah negara telah bebas dari ketergantungan

struktural. Negara dapat mempunyai kursi di berbagai organisasi internasional, tetapi tetap bergantung pada teknologi, pembiayaan, industri, pengetahuan, pangan, energi, data, dan standar yang ditentukan oleh pihak lain.

Sebuah negara bahkan dapat menjalankan diplomasi yang aktif, tetapi tidak mempunyai arah pembangunan yang benar-benar dirumuskan berdasarkan kebutuhan rakyatnya. Karena itu, kemerdekaan tidak cukup diukur dari ada atau tidaknya tentara asing. Kemerdekaan juga harus diukur dari kemampuan bangsa menentukan tujuan, menguasai ilmu, membangun teknologi, mengelola sumber daya, menjaga data, mendidik manusia, dan menyusun hubungan luar negeri secara berdaulat.

Sekolah Negarawan tidak menolak kerja sama internasional. Tidak ada bangsa modern yang dapat hidup terpisah dari dunia. Yang dipersoalkan adalah posisi Indonesia dalam kerja sama tersebut.

Apakah Indonesia hadir sebagai bangsa yang mengetahui kebutuhan dan arah peradabannya? Apakah Indonesia mempunyai kemampuan menilai manfaat, risiko, dan ketergantungan dari setiap hubungan? Apakah negara memastikan bahwa kerja sama dengan dunia memperkuat rakyat, bukan hanya memperbesar keuntungan elite?

Negara yang diakui dunia belum tentu menjadi negara yang dimiliki rakyat. Bahkan negara dapat lebih dikenal dan dihormati di luar negeri daripada dirasakan kehadirannya oleh rakyat sendiri.

Di sinilah pengakuan formal harus dilanjutkan dengan penemuan bentuk negara substantif. Indonesia tidak cukup diakui oleh dunia. Indonesia harus dikenali oleh rakyatnya sebagai rumah yang melindungi, mendidik, mengasuh, menyejahterakan, dan memberi mereka kedudukan nyata sebagai pemilik.

C. Rakyat sebagai Penduduk, Bukan Pemilik Negara

Salah satu persoalan terdalam Indonesia adalah perubahan rakyat menjadi sekadar penduduk, pemilih, wajib pajak, konsumen, tenaga kerja, dan penerima kebijakan.

Penduduk adalah manusia yang tinggal di dalam wilayah negara. Pemilih adalah manusia yang memberikan suara. Wajib pajak adalah pihak yang memenuhi kewajiban fiskal. Konsumen adalah orang yang membeli barang dan jasa. Tenaga kerja adalah manusia yang menyediakan kemampuan produktif.

Semua kategori tersebut penting. Namun tidak satu pun dengan sendirinya menjadikan manusia sebagai pemilik negara.

Rakyat adalah sumber kedaulatan. Negara dibentuk atas nama mereka, memperoleh sumber daya dari mereka, menggunakan kekuasaan untuk melindungi mereka, dan seharusnya mempertanggungjawabkan seluruh tindakannya kepada mereka.

Namun dalam praktik negara modern, rakyat dapat kehilangan kedudukan tersebut. Mereka tetap disebut rakyat, tetapi diperlakukan terutama sebagai penduduk yang harus diatur. Mereka diminta menaati

hukum, membayar pajak, mengikuti prosedur, memberikan suara, dan menerima keputusan.



Rakyat dapat memilih wakilnya, tetapi tidak selalu mempunyai kendali atas apa yang dilakukan wakil tersebut. Mereka dapat memilih Presiden, tetapi tidak dengan sendirinya menentukan siapa saja yang mengelilingi Presiden, kepentingan apa yang memengaruhi kebijakan, atau bagaimana kontrak strategis negara dirumuskan.

Mereka dapat mengajukan kritik, tetapi tidak selalu mempunyai mekanisme efektif untuk mengubah arah kekuasaan sebelum pemilihan berikutnya. Mereka dapat menggugat melalui hukum, tetapi akses terhadap keadilan sering memerlukan biaya, waktu, pengetahuan, dan daya tahan yang tidak dimiliki setiap orang.

Dalam keadaan demikian, rakyat hadir sebagai sumber legitimasi, tetapi tidak sungguh-sungguh hadir sebagai struktur hidup.

Rakyat menjadi penting ketika suara dibutuhkan, tetapi mudah dilupakan setelah kekuasaan terbentuk. Rakyat dipuji sebagai pemilik kedaulatan dalam pidato, tetapi tidak selalu dilibatkan dalam penentuan kebijakan yang mengubah tanah, pekerjaan, pendidikan, data, dan masa depan anak-anak mereka.

Cak Nun menggambarkan keadaan semacam ini melalui gagasan rakyat yang diyatimkan. Rakyat mempunyai negara, tetapi tidak merasakan pengasuhan negara. Mereka mempunyai pemimpin, tetapi tidak merasa dipahami. Mereka mempunyai hukum, tetapi belum tentu memperoleh keadilan.

Anak yatim bukan hanya anak yang kehilangan orang tua secara biologis. Dalam pengertian sosial, rakyat dapat diyatimkan ketika pihak yang seharusnya mengasuh justru menjauh, mengabaikan, atau memanfaatkan mereka.

Karena itu, negara rakyat harus dibangun melalui perubahan kedudukan rakyat yaitu dari objek kebijakan menjadi pemilik arah negara; dari konsumen program menjadi penyusun kebutuhan; dari pemberi suara menjadi pemegang kendali konstitusional; dari penduduk yang dikelola menjadi rakyat yang berdaulat.

D. Dari Kerajaan-Kerajaan Nusantara Menuju Republik Modern

Indonesia tidak lahir dari satu kerajaan, satu bangsa lokal, satu sistem sosial, ataupun satu pengalaman nenek moyang. Nusantara sebelum

republik merupakan ruang yang dihuni oleh kerajaan, kesultanan, komunitas adat, desa, pusat perdagangan, jaringan ulama, dan berbagai bentuk kepemimpinan yang berkembang sesuai sejarah masing-masing.

Masing-masing wilayah mempunyai hubungan yang berbeda antara pemimpin, rakyat, agama, tanah, adat, perdagangan, dan dunia luar. Sebagian kerajaan membangun kekuasaan maritim. Sebagian bertumpu pada pertanian. Sebagian berkembang sebagai pusat perdagangan dan keilmuan Islam. Sebagian mempunyai struktur adat yang lebih kolektif.

Ketika Republik Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, berbagai dunia sosial tersebut dipersatukan ke dalam bentuk negara modern.

Penyatuan tersebut merupakan pencapaian sejarah yang besar. Tanpa kemampuan membangun identitas kebangsaan bersama, Nusantara dapat terpecah menjadi wilayah-wilayah kecil yang lebih mudah dikuasai kekuatan luar.

Namun penyatuan ke dalam republik juga menimbulkan persoalan konseptual yang belum sepenuhnya diselesaikan.

Republik Indonesia lahir dari masyarakat yang sejarah pemerintahannya sebagian besar tidak dibentuk oleh sistem republik modern. Konsep kewarganegaraan, parlemen nasional, pemilihan umum, partai politik, birokrasi terpusat, hukum nasional, dan pembagian kekuasaan modern masuk ke masyarakat yang selama berabad-abad hidup dalam struktur kerajaan, kesultanan, adat, desa, dan komunitas keagamaan.

Cak Nun mengingatkan bahwa ketika menjadi republik, Indonesia sekaligus memasuki globalisasi nilai dan pemikiran. Indonesia tidak hanya mengganti penguasa kolonial dengan pemerintahan nasional. Indonesia masuk ke dalam sistem konsep yang berkembang dari pengalaman dunia modern.

Republik, demokrasi, parlemen, nasionalisme, negara hukum, pembangunan ekonomi, administrasi modern, dan pendidikan nasional membawa banyak kemungkinan bagi kemerdekaan. Namun konsep-konsep tersebut tidak otomatis berakar dalam kehidupan rakyat.

Indonesia menerima bentuk negara modern lebih cepat daripada kemampuannya membangun manusia dan kebudayaan yang dapat menjalankannya secara utuh.

Akibatnya, banyak institusi modern berdiri di atas mentalitas kekuasaan lama. Pemilu modern dapat dijalankan dengan hubungan patronase. Partai politik dapat bekerja seperti kerajaan kecil. Birokrasi modern dapat mempertahankan jarak feodal. Hukum republik dapat digunakan dengan mentalitas kolonial.

Demokrasi dapat mempunyai prosedur modern, tetapi tetap dioperasikan melalui hubungan aristokrasi, oligarki, konglomerasi, dan birokrasi. Dengan demikian, persoalan Indonesia bukan sekadar pilihan antara monarki dan republik. Persoalannya adalah apakah bentuk negara yang dipilih benar-benar sesuai dengan tujuan kemerdekaan, kebutuhan rakyat, dan tantangan dunia.

Republik tidak boleh dipertahankan hanya sebagai nama. Republik harus terus diuji, apakah *res publica*, urusan bersama, benar-benar berada dalam kendali rakyat atau telah dikuasai oleh persekutuan elite.

E. Negara, Globalisasi, Modernisasi, Perang Modern, dan AI

Ketika Republik Indonesia lahir, dunia sedang memasuki perubahan besar. Perang Dunia Kedua baru berakhir. Kolonialisme klasik mulai digugat. Perang Dingin segera membagi dunia ke dalam berbagai blok ideologi dan kepentingan.

Indonesia yang baru merdeka harus mempertahankan wilayah, membangun pemerintahan, menyatukan masyarakat, mengatasi kemiskinan, dan sekaligus menentukan posisi dalam konfigurasi global.

Indonesia tidak memperoleh kemewahan sejarah untuk membangun negaranya dalam keadaan tenang. Republik lahir langsung ke dalam persaingan dunia.

Keadaan tersebut terus berlangsung dalam bentuk yang berubah. Globalisasi ekonomi menghubungkan Indonesia dengan pasar, modal, teknologi, dan rantai pasok dunia. Modernisasi mengubah desa, keluarga, pekerjaan, pendidikan, dan cara manusia memandang kehidupan.

Perang modern juga tidak lagi hanya berlangsung melalui pertempuran fisik. Perang dapat berlangsung melalui ekonomi, informasi, teknologi,

budaya, mata uang, pembiayaan, data, media, sanksi, dan penguasaan pengetahuan.

Pada masa kini, kecerdasan buatan memperluas medan tersebut. AI memengaruhi produksi pengetahuan, pekerjaan, pendidikan, pelayanan publik, pertahanan, industri, media, dan proses pengambilan keputusan.

Dalam menghadapi perubahan tersebut, negara tidak cukup mempunyai lembaga. Negara memerlukan kecerdasan arsitektural.

Negara harus memahami siapa yang menguasai teknologi, siapa yang memiliki data, dari mana algoritma memperoleh nilai, bagaimana keputusan otomatis memengaruhi rakyat, dan apakah Indonesia hanya menjadi pasar atau mampu menjadi pencipta.

Tanpa kesiapan, Indonesia dapat memasuki globalisasi dan AI sebagai konsumen besar, tetapi bukan sebagai bangsa berdaulat.

Indonesia dapat memiliki jutaan pengguna teknologi, tetapi tidak memiliki kendali atas infrastruktur, model, dan data. Indonesia dapat mengembangkan layanan digital, tetapi menggantungkan sistem kritisnya kepada perusahaan asing. Indonesia dapat memanfaatkan AI, tetapi tidak memahami nilai dan kepentingan yang ditanamkan ke dalamnya.

Karena itu, bentuk negara harus mampu menjawab tantangan yang bahkan tidak dibayangkan oleh para pendiri republik.

Konstitusi tidak boleh hanya mengatur hubungan antar-lembaga. Konstitusi juga harus

memberikan arah terhadap penguasaan data, teknologi, pengetahuan, lingkungan, sumber daya, dan perlindungan manusia.

Negara yang tidak mampu beradaptasi akan kehilangan kedaulatan tanpa kehilangan wilayah. Negara tersebut tetap ada secara formal, tetapi keputusan strategisnya bergantung pada sistem yang dirancang pihak lain. Inilah sebabnya pertanyaan tentang bentuk negara bukan nostalgia sejarah. Pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan masa depan.

F. Apa yang Dibutuhkan Manusia, Rakyat, Pemerintah, dan Negara?

Cak Nun mengajukan pertanyaan mendasar tentang kebutuhan manusia, rakyat, pemerintah, dan negara. Keempatnya tidak boleh dicampuradukkan.

Manusia membutuhkan kehidupan yang bermartabat. Manusia membutuhkan ilmu, penghidupan, kebebasan, keamanan, keluarga, ruang spiritual, kesempatan berkembang, dan perlindungan dari kesewenang-wenangan.

Rakyat membutuhkan struktur bersama yang menjamin bahwa kebutuhan manusia tidak dihancurkan oleh kekuasaan, pasar, kelompok dominan, atau kepentingan asing. Rakyat membutuhkan hukum yang adil, pendidikan yang mencerdaskan, ekonomi yang melindungi, teknologi yang memerdekakan, dan kepemimpinan yang mengasuh.

Pemerintah membutuhkan kewenangan untuk menjalankan pelayanan, mengelola sumber daya, membentuk kebijakan, menjaga ketertiban, dan melaksanakan mandat rakyat. Namun kewenangan pemerintah harus dibatasi, diarahkan, dan dipertanggungjawabkan.

Negara membutuhkan konstitusi, institusi, kapasitas, pertahanan, pembiayaan, pengetahuan, dan strategi jangka panjang. Negara harus cukup kuat menghadapi tekanan internal dan eksternal, tetapi tidak boleh menjadi kekuatan yang berdiri di atas rakyat.

Kekeliruan terjadi ketika kebutuhan pemerintah dianggap sama dengan kebutuhan negara, lalu kebutuhan negara dianggap otomatis sama dengan kebutuhan rakyat.

Pemerintah dapat membutuhkan stabilitas untuk bekerja, tetapi stabilitas tidak boleh dijadikan alasan membungkam rakyat. Negara dapat membutuhkan investasi, tetapi investasi tidak boleh mengorbankan kedaulatan, lingkungan, dan hak hidup masyarakat. Pemerintah dapat membutuhkan data, tetapi kebutuhan itu tidak membenarkan pengawasan tanpa batas.

Negara juga tidak cukup dipahami sebagai lembaga. Negara adalah konstitusi, algoritma kekuasaan, sistem pengelolaan, dan arsitektur hidup bersama.

Konstitusi menentukan siapa pemilik kekuasaan. Algoritma kekuasaan menjelaskan bagaimana kekuasaan diperoleh, dibagi, dipertahankan, dan dikoreksi. Sistem pengelolaan menentukan bagaimana

sumber daya dan pelayanan diselenggarakan. Arsitektur hidup bersama menentukan kedudukan manusia, rakyat, pemerintah, pasar, aparat, dan lembaga-lembaga kekuasaan. Bentuk negara yang baik harus mampu menyelaraskan seluruh kebutuhan tersebut.

Salah satu penyimpangan arah negara terjadi ketika tujuan keadilan digeser menjadi sekadar kemakmuran. Kemakmuran tentu penting. Tidak ada negara yang dapat mengabaikan kesejahteraan, produksi, pendapatan, pekerjaan, dan kemampuan ekonomi rakyat.

Namun kemakmuran yang dipisahkan dari keadilan dapat berubah menjadi pertumbuhan bagi sebagian orang, kemewahan bagi elite, serta statistik ekonomi yang tidak menyelamatkan rakyat.

Sebuah negara dapat mencatat pertumbuhan tinggi, tetapi membiarkan ketimpangan. Negara tersebut dapat membangun infrastruktur besar, tetapi menggusur manusia tanpa keadilan. Negara tersebut dapat meningkatkan investasi, tetapi menempatkan rakyat hanya sebagai buruh murah atau penonton di tanah sendiri.

Dalam tata nilai Islam, kemakmuran tidak boleh berdiri sendiri. Kemakmuran harus lahir dari keadilan, amanah, perlindungan harta, perlindungan martabat, tanggung jawab sosial, dan pembelaan terhadap yang lemah.

Keadilan bukan musuh kemakmuran. Keadilan adalah fondasi yang membuat kemakmuran mempunyai arti peradaban.

Tanpa keadilan, kemakmuran hanya menunjukkan bahwa kekayaan bertambah. Dengan keadilan, kemakmuran menunjukkan bahwa kehidupan manusia benar-benar diselamatkan.

G. Tata Nilai Lebih Dahulu daripada Konstitusi

Konstitusi penting, tetapi konstitusi bukan titik awal kehidupan bernegara. Sebelum manusia menyusun konstitusi, manusia telah membawa nilai, kepentingan, keyakinan, ketakutan, harapan, dan cara pandang terhadap kekuasaan.

Konstitusi lahir dari manusia. Konstitusi mencerminkan bagaimana manusia memahami negara, rakyat, keadilan, kebebasan, kekuasaan, dan tujuan hidup bersama.

Karena itu, perubahan konstitusi tidak akan menyelesaikan seluruh persoalan apabila manusia yang menyusunnya masih membawa tata nilai yang sama dengan sistem yang hendak diperbaiki.

Konstitusi dapat membatasi masa jabatan, tetapi tidak dengan sendirinya menghilangkan kerakusan. Konstitusi dapat membagi kekuasaan, tetapi tidak otomatis melahirkan amanah. Konstitusi dapat menjamin hak, tetapi tidak serta-merta menghadirkan keberanian untuk menegakkannya. Konstitusi dapat menyatakan kedaulatan rakyat, tetapi tidak otomatis membuat penguasa bersedia tunduk kepada rakyat. Di sinilah tata nilai mendahului struktur.

Sekolah Negarawan menempatkan Islam sebagai tata nilai primer. Istilah primer tidak berarti bahwa Islam dijadikan alat untuk memaksakan identitas atau

membentuk dominasi kelompok keagamaan. Islam ditempatkan sebagai sumber nilai yang mendahului desain lembaga, di antaranya tauhid, amanah, keadilan, ilmu, musyawarah, tanggung jawab, perlindungan terhadap yang lemah, dan kemaslahatan.

Islam sebagai tata nilai tidak dimulai dari penambahan simbol. Islam sebagai tata nilai dimulai dari cara manusia memandang kekuasaan sebagai amanah, harta sebagai titipan, ilmu sebagai tanggung jawab, rakyat sebagai pihak yang harus diasuh, serta negara sebagai alat untuk menegakkan keadilan.

Sebagai bangsa dengan penduduk Muslim yang sangat besar, Indonesia mengenal Nabi Muhammad SAW, memuliakan nama beliau, membaca shalawat, merayakan kelahiran beliau, mempelajari hadis, dan mengakui kerasulan beliau. Namun pengakuan tersebut masih sering berhenti pada wilayah teknis, ritual, simbol, dan identitas keagamaan.

Nubuwwah Nabi Muhammad SAW belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi dasar akhlak publik dan arsitektur kenegaraan.

Amanah belum sungguh menjadi ukuran utama kepemimpinan. Keadilan belum menjadi dasar kemakmuran. Musyawarah belum sepenuhnya menjadi jiwa pengambilan keputusan. Perlindungan terhadap yang lemah belum menjadi ukuran keberhasilan negara. Ilmu belum selalu ditempatkan di atas kepentingan kekuasaan. Harta, teknologi, data, hukum, dan ekonomi belum seluruhnya dikelola sebagai amanah bagi kemaslahatan rakyat.

Pernyataan ini tidak berarti bahwa Islam tidak hidup di Indonesia. Islam hidup dalam keluarga, masjid, pesantren, tradisi, kebudayaan, organisasi, dan kehidupan pribadi jutaan manusia. Banyak ulama, guru, pemimpin, dan rakyat yang berusaha menjalankan nilai Islam dengan sungguh-sungguh.

Namun kehidupan Islam sebagai agama masyarakat belum otomatis menjadikan Islam sebagai tata nilai negara dan peradaban.

Di sinilah letak persoalan terdalam Indonesia. Islam sering diakui sebagai identitas, tetapi belum sepenuhnya digunakan sebagai ukuran untuk menilai kekuasaan. Nabi Muhammad SAW diakui sebagai Rasul, tetapi keteladanan nubuwwah beliau belum menjadi algoritma kepemimpinan, hukum, ekonomi, teknologi, pendidikan, dan perlindungan rakyat.

Karena itu, kebangkitan tata nilai Islam tidak boleh dipersempit menjadi penambahan simbol agama, perluasan formalisasi hukum, atau perebutan jabatan oleh kelompok yang mengatasnamakan Islam. Kebangkitan yang dimaksud adalah perubahan cara manusia memandang amanah, keadilan, ilmu, kekuasaan, harta, rakyat, dan masa depan.

Tata nilai tidak menggantikan konstitusi. Tata nilai memberikan arah kepada konstitusi. Konstitusi kemudian memberi bentuk, batas, mekanisme, dan pertanggungjawaban kepada nilai yang hendak diwujudkan.

Karena itu, negara rakyat hanya dapat ditemukan apabila nilai dan struktur dibangun bersama. Tata nilai tanpa struktur berisiko tinggal

sebagai nasihat. Struktur tanpa tata nilai berisiko menjadi mesin kekuasaan yang efisien tetapi kehilangan tujuan.

H. Sebelum Amandemen: MPR Ada, tetapi Rakyat Belum Menjadi Struktur Hidup

Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat ditempatkan sebagai lembaga tertinggi negara. MPR dipahami sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia dan mempunyai kewenangan menetapkan Undang-Undang Dasar, menetapkan garis-garis besar haluan negara, serta memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Secara teoritis, struktur ini memberikan tempat tinggi kepada konsep kedaulatan rakyat. Presiden menerima mandat dari MPR dan menjalankan haluan yang ditetapkan oleh MPR. Namun keberadaan MPR belum otomatis menjadikan rakyat sebagai struktur hidup.

Pertanyaan utamanya adalah bagaimana kehendak rakyat dibentuk, disalurkan, dan dikendalikan. Siapa yang mengisi MPR? Melalui mekanisme apa mereka memperoleh mandat? Seberapa bebas MPR dari dominasi pemerintah, partai, militer, birokrasi, atau kelompok elite?

Sebuah lembaga dapat disebut sebagai penjelmaan rakyat, tetapi tetap tidak berfungsi sebagai milik rakyat apabila proses pembentukannya tidak memberikan kedaulatan yang nyata.

Dalam praktik sebelum Reformasi, posisi tinggi MPR tidak selalu diikuti kemampuan rakyat mengendalikan MPR. Kekuasaan eksekutif, birokrasi, struktur kekuasaan, dan konfigurasi pemerintahan dapat mengurangi fungsi MPR sebagai ruang musyawarah rakyat.

Artinya, persoalannya bukan sekadar ada atau tidak adanya lembaga tertinggi negara. Persoalannya adalah apakah lembaga tersebut benar-benar hidup sebagai struktur kedaulatan rakyat.

Rakyat tidak cukup diwakili. Rakyat harus mempunyai hubungan konstitusional yang nyata dengan wakil, keputusan, dan pertanggungjawaban.

Jika wakil tidak dapat dikoreksi, mandat tidak dapat dievaluasi, dan keputusan besar negara tidak mempunyai hubungan hidup dengan kehendak rakyat, maka lembaga perwakilan berisiko berubah menjadi simbol.

Karena itu, Sekolah Negarawan tidak menawarkan pengembalian sederhana kepada struktur sebelum amandemen. Yang dicari bukan nostalgia terhadap MPR lama, tetapi penemuan bentuk baru agar rakyat mempunyai struktur hidup dalam negara.

I. Setelah Amandemen Keempat: Lembaga Bertambah, Rakyat Makin Hilang

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 setelah Reformasi dilakukan untuk membatasi kekuasaan, memperkuat demokrasi, memperjelas pembagian

kewenangan, mengembangkan perlindungan hak, dan menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih baik.

Perubahan tersebut melahirkan berbagai perkembangan penting. Presiden dipilih langsung. Masa jabatan dibatasi. Mahkamah Konstitusi dibentuk. Dewan Perwakilan Daerah dihadirkan. Kekuasaan lembaga-lembaga negara ditata ulang. Jaminan hak asasi manusia diperluas.

Semua itu merupakan capaian konstitusional yang tidak boleh diabaikan. Namun perubahan kelembagaan juga menghasilkan persoalan baru. MPR tidak lagi ditempatkan sebagai lembaga tertinggi negara. Hubungan mandat antara MPR dan Presiden berubah. Haluan negara tidak lagi mempunyai bentuk konstitusional yang sama. Kekuasaan tersebar di antara berbagai lembaga, tetapi tidak muncul satu struktur yang secara hidup menempatkan rakyat sebagai pemilik dan pemberi arah.

Lembaga bertambah, prosedur bertambah, mekanisme hukum bertambah, tetapi rakyat dapat semakin sulit melihat di mana kedaulatannya berada.

Presiden memperoleh legitimasi langsung dari pemilu, tetapi pencalonannya bergantung pada partai politik. DPR memperoleh legitimasi pemilu, tetapi anggotanya bekerja dalam disiplin partai. DPD hadir untuk mewakili daerah, tetapi kewenangannya terbatas. Mahkamah Konstitusi menjaga konstitusi, tetapi bekerja melalui perkara yang diajukan dan batas kewenangan yang ditentukan.

Tidak ada satu pun lembaga yang dapat dengan mudah disebut sebagai rumah hidup kedaulatan rakyat.

Kedaulatan seolah-olah tersebar, tetapi dalam penyebaran itu rakyat justru kehilangan tempat untuk memegangnya.

Kedaulatan rakyat kemudian disederhanakan menjadi pemilihan langsung. Seolah-olah ketika rakyat telah memilih Presiden dan wakil-wakilnya, seluruh persoalan kedaulatan selesai.

Padahal pemilu hanyalah salah satu instrumen. Pemilu menentukan siapa yang memperoleh jabatan, tetapi tidak selalu menentukan bagaimana kekuasaan dijalankan, kepentingan apa yang memengaruhinya, dan bagaimana rakyat mengoreksi keputusan strategis.

Setelah amandemen, Indonesia mempunyai sistem yang lebih demokratis secara prosedural, tetapi belum tentu lebih jelas dalam menempatkan rakyat sebagai struktur konstitusional.

Demokrasi dapat berkembang menjadi kompetisi elektoral yang sangat mahal. Kebutuhan biaya memperkuat hubungan antara kekuasaan dan modal. Partai menjadi pintu utama pencalonan. Media dan teknologi menentukan persepsi. Birokrasi mempertahankan kemampuan administratif. Pemilik modal mempunyai pengaruh ekonomi.

Dari pertemuan itulah demokrasi dapat berubah menjadi persekutuan oligarki, aristokrasi, konglomerasi, dan birokrasi.

Oligarki menguasai sumber daya dan akses kekuasaan. Aristokrasi baru terbentuk melalui keluarga, dinasti, jaringan, dan pewarisan pengaruh. Konglomerasi mempunyai kemampuan membentuk pasar, media, pembiayaan, dan kebijakan. Birokrasi

menguasai administrasi, data, izin, serta pelaksanaan keputusan.

Partai politik menjadi penghubung di antara kekuatan-kekuatan tersebut, tetapi tidak selalu menjadi alat rakyat. Akibatnya, rakyat tetap mempunyai hak pilih, tetapi pilihan yang tersedia telah melalui penyaringan oleh struktur yang tidak sepenuhnya mereka kuasai.

J. Negara, Pemerintah, Aparat, dan Rakyat

Salah satu sumber kebingungan dalam kehidupan bernegara adalah tidak dibedakannya negara, pemerintah, aparat, dan rakyat.

Negara adalah keseluruhan arsitektur hukum, wilayah, institusi, rakyat, dan kedaulatan. Pemerintah adalah pihak yang untuk waktu tertentu memperoleh kewenangan menjalankan fungsi eksekutif dan administrasi. Aparat adalah instrumen negara yang menjalankan fungsi pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan pelayanan. Rakyat adalah pemilik kedaulatan yang menjadi alasan keberadaan negara.

Pemerintah bukan negara secara keseluruhan. Kritik terhadap pemerintah tidak sama dengan serangan terhadap negara. Pergantian pemerintah juga tidak berarti pergantian negara.

Aparat bukan pemilik negara. Aparat memegang kewenangan yang besar karena tugasnya menjaga hukum, keamanan, dan kedaulatan. Namun kewenangan tersebut berasal dari konstitusi dan pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Rakyat juga bukan pihak di luar negara. Negara bukan pemerintah di satu sisi dan rakyat di sisi lain. Rakyat merupakan unsur utama dan pemilik moral negara.

Ketika pemerintah menganggap dirinya sebagai negara, kritik mudah diperlakukan sebagai ancaman. Ketika aparat menganggap kepatuhan kepada pemerintah sama dengan kepatuhan kepada negara, batas konstitusional dapat kabur. Ketika rakyat dianggap hanya sebagai pihak yang harus diatur, kedaulatan berubah menjadi administrasi.

Negara rakyat membutuhkan pembedaan yang jelas. Pemerintah harus kuat menjalankan mandat, tetapi tidak boleh mengambil alih kepemilikan negara. Aparat harus tegas menjaga hukum, tetapi tidak boleh menjadi alat kepentingan kekuasaan. Rakyat harus taat pada aturan yang adil, tetapi tetap mempunyai hak mengoreksi negara.

Hubungan tersebut membutuhkan konstitusi yang tidak hanya membagi kewenangan, tetapi juga menentukan arah moral setiap kewenangan.

Negara tidak boleh menjadi milik pemerintah. Pemerintah harus menjadi pelaksana negara. Negara tidak boleh menjadi milik aparat. Aparat harus menjadi penjaga rakyat dan konstitusi. Rakyat tidak boleh hanya menjadi objek. Rakyat harus menjadi pemilik mandat dan tujuan penyelenggaraan negara.

K. Kepemimpinan Administratif dan Kehilangan Arah Negara

Negara modern membutuhkan administrator. Pemerintahan tidak dapat berjalan tanpa kemampuan menyusun anggaran, mengelola birokrasi, membangun infrastruktur, mengatur pelayanan, dan melaksanakan hukum. Namun negara tidak cukup dipimpin oleh administrator.

Administrator memastikan sistem berjalan. Pemimpin peradaban menentukan ke mana sistem harus berjalan. Administrator bertanya bagaimana program dilaksanakan. Pemimpin peradaban bertanya mengapa program diperlukan, nilai apa yang dilayani, dan manusia seperti apa yang hendak dibentuk.

Ketika kepemimpinan direduksi menjadi administrasi, negara dapat bekerja sangat sibuk tanpa mengetahui arah. Anggaran terserap, proyek selesai, aplikasi dibangun, indikator tercapai, tetapi rakyat tidak semakin berdaulat.

Indonesia memerlukan pemimpin yang memahami manusia, rakyat, pemerintah, negara, konstitusi, algoritma kekuasaan, sejarah, teknologi, dan masa depan dunia.

Dalam salah satu kemungkinan berpikir yang dibuka Cak Nun, istilah "raja" tidak harus dipahami sebagai penguasa berdasarkan nasab. Raja dapat dibaca sebagai gambaran tentang seseorang yang mempunyai kedalaman pengetahuan, keluasan tanggung jawab, dan kemampuan memahami persoalan dunia agar bangsa mampu mengantisipasi globalisasi. Gagasan

tersebut tidak harus dibaca sebagai ajakan kembali kepada monarki.

Pertanyaan yang terkandung di dalamnya jauh lebih penting, yaitu apakah demokrasi elektoral menghasilkan manusia yang paling memahami negara dan masa depan, atau hanya manusia yang paling mampu memenangkan kompetisi kekuasaan?

Demokrasi menjanjikan pemerintahan berdasarkan kehendak rakyat. Namun apabila pilihan rakyat dibentuk oleh modal, media, popularitas, manipulasi data, dinasti, dan transaksi partai, demokrasi dapat kehilangan substansinya.

Dalam keadaan demikian, pemimpin tidak dipilih karena paling memahami masalah dunia, melainkan karena paling mampu melewati algoritma elektoral.

Kritik terhadap demokrasi bukan alasan untuk meninggalkan demokrasi. Kritik tersebut harus digunakan untuk memperbaiki demokrasi agar mampu melahirkan negarawan.

Bangsa tidak cukup mempunyai pejabat yang memenangkan pemilu. Bangsa memerlukan pemimpin peradaban yang memahami bahwa setiap keputusan hari ini akan membentuk manusia dan negara beberapa generasi mendatang.

Pemimpin peradaban tidak hanya mengurus masa jabatan. Pemimpin tersebut memikirkan sejarah panjang bangsa. Sosok tersebut tidak hanya menjaga popularitas, tetapi menjaga arah. Pemimpin tersebut tidak hanya mengelola pertumbuhan, tetapi menegakkan keadilan. Pemimpin tersebut tidak hanya

menggunakan teknologi, tetapi menentukan nilai yang harus dilayani teknologi.

L. Amandemen Kelima Sekolah Negarawan sebagai Pencarian Bentuk Negara Rakyat

Gagasan Amandemen Kelima yang dikembangkan Sekolah Negarawan tidak dimaksudkan sebagai penolakan terhadap seluruh hasil Reformasi. Gagasan tersebut juga bukan usaha mengembalikan Indonesia secara mekanis kepada struktur sebelum amandemen. Amandemen Kelima harus dipahami sebagai pencarian bentuk negara rakyat.

Pertanyaan utamanya bukan lembaga apa yang harus ditambah, melainkan bagaimana rakyat dikembalikan ke dalam arsitektur negara. Apakah rakyat memerlukan struktur yang mampu merumuskan kehendak jangka panjang? Bagaimana mandat rakyat diterjemahkan ke dalam haluan negara? Bagaimana lembaga-lembaga tinggi negara dipertanggungjawabkan? Bagaimana kekuasaan dikendalikan tanpa melemahkan negara?

Amandemen Kelima juga harus menjawab perubahan dunia. Konstitusi tidak cukup mengatur pembagian kekuasaan klasik. Konstitusi harus mampu memberi arah terhadap kedaulatan data, penguasaan teknologi, kecerdasan buatan, lingkungan, sumber daya strategis, ekonomi digital, dan perlindungan generasi mendatang.

Sekolah Negarawan mengajukan bahwa rakyat harus kembali ditempatkan bukan hanya sebagai

pemilih, tetapi sebagai pemilik. Negara memerlukan struktur yang menghubungkan kehendak rakyat dengan arah jangka panjang bangsa.

Haluan negara tidak boleh berubah hanya karena pergantian pemerintah. Pembangunan ilmu, teknologi, industri, pendidikan, pertahanan, dan kebudayaan memerlukan kesinambungan. Namun kesinambungan tidak boleh berubah menjadi kekuasaan tanpa kontrol.

Karena itu, bentuk negara rakyat harus menggabungkan kedaulatan rakyat, musyawarah, pembagian kekuasaan, kesinambungan haluan, perlindungan hak, dan pertanggungjawaban yang nyata.

Amandemen Kelima bukan tujuan akhir. Amandemen Kelima merupakan instrumen untuk membangun negara yang lebih sesuai dengan tujuan kemerdekaan.

Konstitusi tidak dapat menyelamatkan bangsa tanpa manusia yang berintegritas. Namun manusia yang berintegritas juga memerlukan konstitusi yang tidak memaksa mereka tunduk kepada sistem yang rusak.

Amandemen karena itu harus berjalan bersama pembaruan tata nilai, pendidikan, kebudayaan, ekonomi, dan kepemimpinan.

Alur perubahan tetap dimulai dari nilai:



Dalam kerangka tersebut, Amandemen Kelima bukan proyek elite hukum. Amandemen Kelima merupakan bagian dari pencarian bagaimana tata nilai, manusia, rakyat, kepemimpinan, dan negara dihubungkan kembali.

M. Pelajaran dari Imam Khomeini: Perubahan Peradaban Memerlukan Fondasi Konstitusional

Dalam perspektif sejarah ketatanegaraan modern, pengalaman Republik Islam Iran memberikan salah satu contoh bahwa perubahan besar suatu bangsa tidak berhenti pada keberhasilan revolusi atau pergantian pemerintahan. Imam Khomeini memandang bahwa perubahan yang bersifat mendasar harus memperoleh legitimasi konstitusional agar mampu membentuk tata kehidupan bernegara secara berkelanjutan. Karena itu, setelah Revolusi Islam tahun 1979, Iran tidak hanya membentuk pemerintahan baru, tetapi juga menyusun Konstitusi Republik Islam Iran yang kemudian disahkan melalui referendum rakyat. Konstitusi tersebut menjadi fondasi bagi penyelenggaraan negara sekaligus menjadi instrumen

untuk menerjemahkan cita-cita revolusi ke dalam sistem kelembagaan.

Bagi penulis, pelajaran terpenting dari pengalaman tersebut bukanlah bentuk sistem ketatanegaraan Iran, melainkan kesadaran bahwa perubahan peradaban memerlukan bangunan konstitusional. Sebuah bangsa tidak cukup hanya memiliki semangat perubahan, tetapi juga memerlukan konstitusi yang mampu menjaga kesinambungan arah bangsa, mengatur hubungan antara rakyat dan negara, membatasi kekuasaan, serta memastikan bahwa nilai-nilai yang diperjuangkan tidak berhenti sebagai slogan.

Dalam kerangka itulah pengalaman Imam Khomeini memiliki relevansi akademik bagi Indonesia. Relevansi tersebut bukan terletak pada substansi konstitusinya yang tentu lahir dari sejarah, budaya, dan sistem ketatanegaraan Iran, melainkan pada keberanian menjadikan konstitusi sebagai instrumen pembaruan bangsa. Setiap negara memiliki hak dan kewajiban untuk menemukan bentuk konstitusinya sendiri sesuai dengan sejarah, falsafah, dan kebutuhan masyarakatnya.

Pandangan tersebut sejalan dengan gagasan Sekolah Negarawan mengenai Amandemen Kelima. Amandemen Kelima tidak dimaksudkan untuk meniru Konstitusi Republik Islam Iran ataupun mengadopsi sistem ketatanegaraan negara lain. Amandemen Kelima merupakan ikhtiar konstitusional untuk menyempurnakan penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia agar semakin mendekati cita-cita kemerdekaan sebagaimana termaktub dalam

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Apabila Imam Khomeini melihat konstitusi sebagai sarana untuk membangun tatanan negara pascarevolusi, maka Sekolah Negarawan memandang konstitusi sebagai sarana untuk menyempurnakan perjalanan demokrasi Indonesia pascareformasi. Keduanya berangkat dari konteks sejarah yang berbeda, tetapi memperlihatkan satu kesamaan prinsip, yaitu bahwa perubahan besar suatu bangsa memerlukan keberanian untuk menata kembali hubungan antara tata nilai, rakyat, kepemimpinan, dan negara melalui instrumen konstitusi.

Dengan demikian, Amandemen Kelima tidak dipahami sebagai agenda jangka pendek, melainkan sebagai bagian dari pencarian bentuk negara rakyat yang mampu menjawab tantangan abad ke-21 tanpa meninggalkan jati diri bangsa Indonesia. Pelajaran dari Iran menunjukkan bahwa konstitusi dapat menjadi instrumen pembangunan peradaban apabila dibangun di atas nilai-nilai yang diyakini masyarakatnya. Pelajaran tersebut menjadi inspirasi bahwa Indonesia pun berhak terus menyempurnakan bangunan konstitusinya sendiri berdasarkan Pancasila, sejarah kemerdekaan, budaya Nusantara, serta aspirasi rakyat Indonesia.

N. Penutup Bab

Indonesia telah menjadi negara secara formal, tetapi belum selesai menemukan bentuk negara substantif yang benar-benar dimiliki rakyat.

Sebelum amandemen, MPR ditempatkan sebagai lembaga tertinggi negara, tetapi rakyat belum tentu hidup di dalam struktur MPR. Setelah amandemen, lembaga dan mekanisme bertambah, tetapi rakyat justru semakin sulit menemukan tempat nyata kedaulatannya.

Pemilu berkembang, tetapi biaya kampanye meningkat. Partai menjadi pintu kekuasaan, tetapi belum selalu menjadi alat rakyat. Pemerintah memperoleh legitimasi langsung, tetapi kebijakan tetap dapat dipengaruhi oleh persekutuan oligarki, aristokrasi, konglomerasi, dan birokrasi.

Indonesia juga memasuki globalisasi, modernisasi, perang pengetahuan, teknologi digital, dan kecerdasan buatan tanpa terlebih dahulu menyelesaikan pertanyaan dasar mengenai manusia, rakyat, pemerintah, dan negara.

Karena itu, persoalan bentuk negara bukan persoalan nama lembaga. Tetapi, merupakan persoalan arsitektur.

Siapa pemilik negara? Dari mana kekuasaan berasal? Bagaimana mandat diberikan? Bagaimana arah jangka panjang ditentukan? Siapa yang mengendalikan teknologi dan data? Bagaimana rakyat mengoreksi kekuasaan? Nilai apa yang menjadi tujuan pembangunan?

Namun pada lapisan yang lebih dalam, persoalan Indonesia bukan hanya karena konstitusinya belum sempurna, lembaganya belum seimbang, atau sistem ketatanegaraannya belum menghasilkan kepemimpinan yang tepat. Indonesia belum menemukan bentuk negara rakyat karena tata nilai yang

seharusnya membentuk manusia, kepemimpinan, dan negara belum sungguh-sungguh diwujudkan dalam kehidupan bersama.

Sebagai bangsa dengan penduduk Muslim yang sangat besar, Indonesia mengenal Nabi Muhammad SAW, memuliakan nama beliau, membaca shalawat, merayakan kelahiran beliau, mempelajari hadis, dan mengakui kerasulan beliau. Namun pengakuan tersebut masih sering berhenti pada wilayah teknis, ritual, simbol, dan identitas keagamaan.

Nubuwwah Nabi Muhammad SAW belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi dasar akhlak publik dan arsitektur kenegaraan.

Amanah belum sungguh menjadi ukuran utama kepemimpinan. Keadilan belum menjadi dasar kemakmuran. Musyawarah belum sepenuhnya menjadi jiwa pengambilan keputusan. Perlindungan terhadap yang lemah belum menjadi ukuran keberhasilan negara. Ilmu belum selalu ditempatkan di atas kepentingan kekuasaan. Harta, teknologi, data, hukum, dan ekonomi belum seluruhnya dikelola sebagai amanah bagi kemaslahatan rakyat.

Pernyataan ini tidak berarti bahwa Islam tidak hidup di Indonesia. Islam hidup dalam keluarga, masjid, pesantren, tradisi, kebudayaan, organisasi, dan kehidupan pribadi jutaan manusia. Banyak ulama, guru, pemimpin, dan rakyat yang berusaha menjalankan nilai Islam dengan sungguh-sungguh.

Namun kehidupan Islam sebagai agama masyarakat belum otomatis menjadikan Islam sebagai tata nilai negara dan peradaban.

Di sinilah letak persoalan terdalam Indonesia. Islam sering diakui sebagai identitas, tetapi belum sepenuhnya digunakan sebagai ukuran untuk menilai kekuasaan. Nabi Muhammad SAW diakui sebagai Rasul, tetapi keteladanan nubuwwah beliau belum menjadi algoritma kepemimpinan, hukum, ekonomi, teknologi, pendidikan, dan perlindungan rakyat.

Karena itu, kebangkitan tata nilai Islam tidak boleh dipersempit menjadi penambahan simbol agama, perluasan formalisasi hukum, atau perebutan jabatan oleh kelompok yang mengatasnamakan Islam. Kebangkitan yang dimaksud adalah perubahan cara manusia memandang amanah, keadilan, ilmu, kekuasaan, harta, rakyat, dan masa depan.

Indonesia juga harus mengoreksi penyimpangan ketika keadilan digeser menjadi sekadar kemakmuran. Kemakmuran penting, tetapi kemakmuran yang tidak dilahirkan oleh keadilan dapat berubah menjadi kekayaan bagi sebagian kecil manusia, kemewahan bagi elite, dan statistik pertumbuhan yang tidak menyelamatkan rakyat.

Negara rakyat tidak memilih antara adil dan makmur. Kemakmuran harus menjadi buah dari keadilan. Dalam tata nilai Islam, pembangunan ekonomi harus berdiri di atas amanah, perlindungan harta, perlindungan martabat, keseimbangan, tanggung jawab, dan pembelaan terhadap yang lemah. Negara tidak boleh sekadar menghasilkan kekayaan. Negara harus memastikan kekayaan bekerja untuk kemaslahatan manusia.

Indonesia tidak memerlukan kembalinya monarki berdasarkan nasab. Namun kritik Cak Nun mengenai kemungkinan "raja" yang paling memahami masalah dunia mengandung pertanyaan yang tidak boleh diabaikan yaitu apakah sistem yang ada mampu menghasilkan pemimpin peradaban?

Bangsa ini membutuhkan lebih dari pejabat administratif. Indonesia membutuhkan manusia yang memahami sejarah, dunia, tata nilai, rakyat, konstitusi, algoritma kekuasaan, globalisasi, dan AI yaitu manusia yang tidak hanya mampu menjalankan negara, tetapi juga mengetahui ke mana negara harus diarahkan.

Dari kebutuhan itulah Amandemen Kelima Sekolah Negarawan memperoleh makna. Amandemen Kelima bukan sekadar perubahan pasal, melainkan pencarian bentuk negara yang mengembalikan rakyat sebagai pemilik, menempatkan keadilan sebagai dasar kemakmuran, mengendalikan kekuasaan, dan mempersiapkan Indonesia menghadapi perubahan dunia.

Namun Amandemen Kelima sekalipun tidak akan cukup apabila hanya mengubah lembaga tanpa mengubah tata nilai. Konstitusi dapat mengatur kekuasaan, tetapi tidak dapat dengan sendirinya melahirkan amanah. Lembaga dapat membatasi pejabat, tetapi tidak otomatis membentuk manusia yang adil. Teknologi dapat mempercepat pemerintahan, tetapi tidak mampu menentukan untuk siapa pemerintahan dijalankan.

Karena itu, pencarian bentuk negara rakyat harus dimulai dari penghidupan kembali Islam sebagai tata

nilai, dilanjutkan dengan penyelamatan manusia dan umat, pembenahan desa serta ruang hidup rakyat, kebangkitan bangsa, dan akhirnya penemuan kembali bentuk kedaulatan rakyat dalam negara.

Indonesia belum selesai menemukan bentuk negaranya karena Indonesia belum selesai membentuk manusianya. Indonesia belum selesai membentuk manusianya karena Islam belum sungguh-sungguh dihidupkan sebagai tata nilai yang mengarahkan akhlak publik, kepemimpinan, keadilan, hukum, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlindungan rakyat.

Inilah pekerjaan sejarah yang belum selesai. Bukan sekadar membangun lembaga negara, melainkan menghadirkan nilai kenabian ke dalam kehidupan publik tanpa mengubah agama menjadi alat kekuasaan, bukan sekadar menyebut rakyat sebagai pemilik kedaulatan, melainkan membentuk struktur yang benar-benar mengasuh dan melindungi mereka. Bukan sekadar mengejar kemakmuran, melainkan menegakkan keadilan agar kemakmuran menjadi milik bersama.

Indonesia belum pernah selesai menemukan bentuk negaranya. Ketidakselesaian tersebut pada akhirnya merupakan cermin bahwa bangsa ini belum selesai menjadikan Islam sebagai tata nilai peradaban.

Bab III
Iran Pernah Menemukan Bentuk Negara: Spiritualitas, Kepemimpinan, dan Ketahanan Peradaban



Indonesia dan Iran menempuh perjalanan sejarah yang berbeda. Indonesia lahir sebagai republik dari pertemuan kerajaan, kesultanan, desa, komunitas adat, kolonialisme Eropa, pendudukan Jepang, dan revolusi kemerdekaan. Iran tumbuh dari peradaban Persia yang panjang, mengalami pemerintahan dinasti, revolusi konstitusional, monarki Pahlavi, intervensi kekuatan asing, dan Revolusi Islam 1979.

Perbedaan tersebut menyebabkan keduanya tidak dapat dibandingkan secara mekanis. Lembaga yang tumbuh dalam sejarah Iran tidak dapat dipindahkan begitu saja ke Indonesia. Sebaliknya,

pengalaman Indonesia juga tidak dapat dijadikan ukuran tunggal untuk menilai Iran. Namun perbedaan tidak menghilangkan kemungkinan belajar.

Iran penting bagi naskah ini karena bangsa tersebut pernah melakukan pencarian yang serius mengenai bentuk negara. Pencarian itu berlangsung melalui perdebatan tentang kekuasaan raja, kedudukan rakyat, peran ulama, hukum, konstitusi, kedaulatan, kemerdekaan nasional, dan hubungan antara agama dengan pemerintahan.

Pada awal abad ke-20, Iran mulai membatasi monarki melalui konstitusi dan lembaga perwakilan. Pada 1979, Iran kembali mengubah bentuk negaranya melalui Revolusi Islam. Republik Islam yang lahir kemudian berusaha mempertemukan kedaulatan Ilahi, hak rakyat menentukan nasib sosial, kepemimpinan keagamaan, pemilihan umum, lembaga perwakilan, dan pembagian kekuasaan.

Pengalaman tersebut tidak berarti Iran telah menemukan bentuk negara yang sempurna dan selesai untuk selamanya. Setiap sistem tetap menghadapi ketegangan, kritik, perubahan sosial, serta jarak antara cita-cita konstitusional dan pelaksanaannya. Namun Iran menunjukkan kesungguhan untuk tidak sekadar mengganti penguasa, melainkan merumuskan kembali dasar negara, sumber legitimasi, kedudukan rakyat, arah hukum, dan tujuan peradabannya.

Dalam pengertian itulah judul bab ini menyatakan bahwa Iran pernah menemukan bentuk

negara. "Menemukan" tidak berarti mencapai kesempurnaan final. Istilah tersebut berarti berani merumuskan bentuk yang dianggap sesuai dengan pengalaman sejarah, tata nilai, dan cita-cita peradabannya sendiri.

A. Persia dan Monarki Konstitusional

Sebelum terbentuknya Republik Islam, Iran yang dalam banyak literatur internasional masih disebut Persia, berada di bawah pemerintahan monarki. Pada masa Dinasti Qajar, kekuasaan raja berhadapan dengan tekanan ekonomi, campur tangan kekuatan asing, konsesi kepada kepentingan luar, kelemahan administrasi, ketidakpuasan pedagang, ulama, intelektual, serta berbagai kelompok masyarakat.

Dari keadaan tersebut lahir Revolusi Konstitusional Persia pada awal abad ke-20. Revolusi ini bukan sekadar pemberontakan untuk mengganti seorang raja. Revolusi ini merupakan perjuangan untuk mengubah hubungan antara kekuasaan, hukum, dan rakyat.

Konstitusi 1906 membentuk Majelis Permusyawaratan Nasional atau *Majles-e Shorā-ye Melli*. Pasal 2 konstitusi tersebut menyatakan bahwa majelis mewakili seluruh rakyat Persia dan melalui majelis itu rakyat berpartisipasi dalam urusan kekuasaan serta ekonomi negara. Para anggotanya dipilih dari Tehran dan provinsi-provinsi. Dengan demikian, rakyat mulai

memperoleh kedudukan konstitusional dalam struktur negara, meskipun raja tetap dipertahankan.

Perubahan ini penting. Sebelumnya, kekuasaan monarki bertumpu terutama pada kedudukan dinasti dan kewenangan raja. Dengan hadirnya konstitusi dan majelis, kekuasaan mulai diikat oleh hukum, proses legislasi, perwakilan, dan mekanisme yang tidak sepenuhnya berada di bawah kehendak pribadi raja.

Monarki Persia tidak langsung berubah menjadi demokrasi penuh. Kekuasaan raja, istana, elite, kekuatan asing, serta berbagai kelompok sosial tetap memainkan peranan besar. Namun konstitusionalisme memperkenalkan prinsip bahwa negara tidak boleh hanya bergantung pada kehendak penguasa.

Raja masih ada, tetapi kekuasaan tidak lagi dapat dipahami sebagai hak pribadi tanpa batas.

Inilah tahap penting dalam pencarian bentuk negara Iran yaitu bangsa tersebut tidak langsung menghapus seluruh warisan monarki, tetapi mulai membangun struktur yang memungkinkan rakyat, hukum, majelis, dan kelompok-kelompok sosial memasuki proses kenegaraan.

Pengalaman tersebut memberikan pelajaran bahwa perubahan bentuk negara tidak selalu harus dimulai dengan menghapus seluruh struktur lama. Perubahan dapat dimulai dengan membatasi kekuasaan, membangun perwakilan, mengubah sumber legitimasi, dan memaksa pemerintahan tunduk pada konstitusi.

Namun pengalaman Iran juga menunjukkan bahwa konstitusi di atas kertas tidak otomatis menjamin kekuasaan dapat dikendalikan. Konstitusi tetap membutuhkan manusia, lembaga, kekuatan sosial, dan kepemimpinan yang bersedia mempertahankannya.

B. Rakyat dalam Struktur Konstitusional Persia

Arti penting Revolusi Konstitusional Persia bukan hanya terletak pada lahirnya dokumen hukum. Revolusi tersebut memperkenalkan rakyat sebagai unsur yang mempunyai kedudukan dalam negara.

Pasal 2 Konstitusi 1906 secara tegas menempatkan Majelis sebagai wakil seluruh rakyat Persia. Rumusan tersebut belum identik dengan konsep kedaulatan rakyat modern dalam seluruh perkembangannya, tetapi ia menunjukkan pergeseran besar yaitu rakyat tidak lagi hanya menjadi penduduk yang diperintah oleh raja, melainkan mulai diakui sebagai pihak yang harus hadir dalam pengambilan keputusan negara.

Pembentukan Majelis juga mengubah cara kekuasaan dibayangkan. Negara tidak lagi hanya terdiri atas raja, istana, menteri, tentara, dan aparat. Negara mulai mempunyai ruang tempat wakil-wakil rakyat membahas hukum, anggaran, kebijakan, dan kepentingan umum.

Dalam desain konstitusional berikutnya, Iran juga mengenal Senat sebagai majelis kedua yang

dimaksudkan melengkapi Majelis Permusyawaratan Nasional. Sebagian anggota Senat dipilih dan sebagian lainnya ditunjuk oleh raja. Struktur ini memperlihatkan kompromi antara kekuasaan monarki dan unsur perwakilan.

Kompromi tersebut dapat dikritik karena rakyat belum menguasai seluruh struktur. Namun secara historis, ia memperlihatkan bahwa Iran telah mulai mencari jawaban terhadap pertanyaan yang juga dihadapi Indonesia yaitu bagaimana rakyat dimasukkan ke dalam arsitektur negara?

Iran tidak langsung menemukan jawaban yang sempurna. Persaingan antara raja, majelis, ulama, elite, dan kekuatan asing terus berlangsung. Namun rakyat telah memasuki bahasa konstitusi dan lembaga negara. Ini berbeda dengan sekadar mengatakan bahwa pemerintahan bekerja demi rakyat. Konstitusionalisme menuntut agar rakyat diberi bentuk institusional yaitu wakil, majelis, hak, proses legislasi, serta kemampuan memengaruhi jalannya negara.

Pelajaran bagi Indonesia bukan bahwa struktur Persia 1906 harus ditiru. Pelajarannya adalah bahwa rakyat tidak cukup dimuliakan dalam pidato. Rakyat membutuhkan struktur.

Iran pada masa monarki konstitusional mulai membangun struktur tersebut, meskipun masih terbatas dan penuh pertentangan. Indonesia, yang telah lama menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat,

tetap harus menguji apakah rakyat telah mempunyai struktur hidup atau hanya hadir melalui pemilu.

C. Revolusi Islam sebagai Perubahan Bentuk Negara

Revolusi Islam 1979 tidak hanya menjatuhkan Shah Mohammad Reza Pahlavi. Revolusi tersebut mengakhiri bentuk monarki dan membangun bentuk negara baru yaitu Republik Islam Iran.

Perubahan ini mempunyai arti yang lebih besar daripada pergantian dinasti. Monarki dihapus. Sebuah konstitusi baru disusun. Hubungan antara rakyat, agama, kepemimpinan, hukum, dan negara dirumuskan ulang.

Konstitusi Republik Islam Iran menyatakan bahwa bentuk pemerintahan Iran adalah Republik Islam. Konstitusi itu juga menempatkan prinsip-prinsip Islam sebagai dasar lembaga sosial, budaya, dan ekonomi. Pada saat yang sama, ia mengatur pemilu untuk Presiden, parlemen, dan dewan-dewan lokal, serta memungkinkan referendum pada persoalan-persoalan tertentu.

Salah satu rumusan terpenting terdapat dalam Pasal 56. Pasal tersebut menyatakan bahwa kedaulatan mutlak atas dunia dan manusia berada pada Allah, tetapi Allah telah menjadikan manusia menguasai nasib sosialnya sendiri. Tidak seorang pun boleh mencabut hak Ilahi tersebut atau menundukkannya kepada kepentingan seseorang maupun kelompok tertentu.

Rakyat kemudian menjalankan hak tersebut melalui mekanisme yang diatur dalam konstitusi.

Rumusan ini memperlihatkan cara Iran mempertemukan dua gagasan yang sering dianggap bertentangan yaitu kedaulatan Allah dan hak rakyat menentukan nasib sosial.

Kedaulatan Allah tidak dirumuskan untuk menghapus manusia dari ketatanegaraan. Sebaliknya, hak manusia menentukan nasib sosial dipandang sebagai hak yang berasal dari Allah. Karena itu, tidak ada individu atau kelompok yang secara sah boleh merampasnya.

Pada tingkat kelembagaan, Konstitusi Iran membagi kekuasaan menjadi legislatif, eksekutif, dan yudisial yang bekerja dalam kerangka kepemimpinan *wilāyat al-amr*. Parlemen terdiri atas wakil-wakil rakyat yang dipilih secara langsung dan rahasia. Presiden dipilih melalui suara rakyat. Konstitusi juga menegaskan bahwa urusan negara diselenggarakan berdasarkan pendapat umum melalui pemilu dan referendum.

Struktur tersebut menunjukkan bahwa Republik Islam tidak didefinisikan hanya melalui keberadaan pemimpin agama. Republik Islam juga mengandung lembaga perwakilan, pemilu, Presiden, parlemen, dewan, peradilan, dan berbagai mekanisme konstitusional lainnya.

Namun sistem ini juga mempunyai ketegangan internal yang tidak boleh disembunyikan.

Kepemimpinan tertinggi memiliki kewenangan yang luas. Dewan Wali menguji kesesuaian undang-undang dengan Islam dan konstitusi serta berperan dalam penyaringan kandidat. Berbagai lembaga yang dipilih rakyat bekerja bersama lembaga yang memperoleh legitimasi melalui mekanisme keagamaan dan konstitusional.

Karena itu, Iran tidak tepat digambarkan hanya sebagai demokrasi elektoral ataupun hanya sebagai pemerintahan ulama. Bentuknya merupakan susunan khas yang berusaha mempertemukan republik, Islam, partisipasi rakyat, dan kepemimpinan keagamaan.

Penting pula ditekankan bahwa cita-cita konstitusional tidak selalu identik dengan seluruh praktik kekuasaan. Sebagaimana negara lain, Iran menghadapi perdebatan mengenai partisipasi, kebebasan, representasi, akuntabilitas, dan batas kewenangan lembaga-lembaga negara. Namun, perdebatan tersebut justru menunjukkan bahwa bentuk negara bukan benda mati. Bentuk negara terus diuji oleh masyarakat dan sejarah.

Bagi Sekolah Negarawan, bagian terpenting dari pengalaman Iran bukanlah rincian lembaganya, melainkan keseriusan bangsa Iran merumuskan dasar negara setelah revolusi.

Iran tidak berhenti pada penggantian Shah. Iran menyusun pertanyaan lebih mendalam yaitu nilai apa yang menjadi dasar negara, siapa pemilik nasib sosial, bagaimana rakyat berpartisipasi, bagaimana hukum

Islam ditempatkan, dan bagaimana kepemimpinan menjaga arah peradaban.

Indonesia tidak harus menyetujui seluruh jawaban Iran. Namun Indonesia perlu belajar dari keseriusan mengajukan pertanyaan tersebut.

D. Khamenei dan Spiritualitas sebagai Dasar Ketahanan Pemuda

Dalam pengalaman Iran setelah revolusi, Sayid Ali Khamenei menempatkan spiritualitas bukan sebagai unsur tambahan, melainkan sebagai sumber kekuatan peradaban.

Dalam berbagai pidato dan pernyataannya kepada pemuda serta mahasiswa, ia menekankan iman, keikhlasan, pengorbanan, kepercayaan diri, dan tawakal kepada Allah sebagai sumber daya batin yang diperlukan untuk menghadapi tantangan zaman. Dalam Pernyataan "Fase Kedua Revolusi", spiritualitas dijelaskan melalui nilai seperti keikhlasan, pengorbanan, tawakal, serta keyakinan kepada diri sendiri dan masyarakat.

Dalam cara pandang tersebut, pemuda bukan hanya tenaga produktif atau kelompok usia yang harus dipersiapkan untuk pasar kerja. Pemuda adalah pembawa masa depan peradaban. Mereka membutuhkan ilmu, kemampuan teknis, disiplin, dan keberanian. Namun seluruh kemampuan tersebut tidak cukup apabila tidak disertai kekuatan batin.

Teknologi dapat memberikan alat. Pengetahuan dapat memberikan kemampuan. Organisasi dapat memberikan daya. Tetapi spiritualitas menentukan untuk apa seluruh kemampuan itu digunakan.

Khamenei menggunakan gambaran Fir'aun-Fir'aun masa kini untuk menjelaskan kekuatan-kekuatan yang menindas manusia, menguasai bangsa, merampas sumber daya, atau memaksakan kehendak.

Menurut kerangka pemikirannya, manusia muda tidak akan mampu berdiri menghadapi kekuatan sebesar itu hanya dengan kemarahan atau kemampuan teknis. Manusia muda membutuhkan keyakinan, tawakal, hubungan dengan Allah, dan keteguhan batin. Situs resminya berulang kali menghubungkan kemampuan menghadapi kekuatan tiranik dengan spiritualitas dan kebergantungan kepada Allah.

Pernyataan tersebut relevan bagi Indonesia. Indonesia sedang memasuki zaman ketika pemuda berhadapan dengan globalisasi, kecerdasan buatan, ketergantungan teknologi, perang narasi, perubahan lapangan kerja, kerusakan lingkungan, dan konsentrasi kekuasaan ekonomi.

Apabila pemuda hanya dibentuk untuk menjadi pengguna teknologi dan pekerja sistem, mereka mungkin mempunyai keterampilan, tetapi tidak mempunyai arah.

Apabila pemuda hanya diberi semangat agama tanpa ilmu, mereka dapat memiliki keberanian tetapi tidak mempunyai kemampuan mengubah kenyataan.

Karena itu, ketahanan peradaban memerlukan pertemuan antara spiritualitas, ilmu, teknologi, organisasi, dan pengabdian kepada rakyat.

Inilah salah satu pelajaran yang dapat dipetik Indonesia dari pengalaman Iran yaitu bangsa yang berada di bawah tekanan tidak hanya membutuhkan peralatan, tetapi juga manusia yang memiliki alasan moral untuk bertahan.

E. Khamenei dan Kritik terhadap Konsesi kepada Hegemoni Amerika

Salah satu tema penting dalam pemikiran Khamenei adalah kritik terhadap anggapan bahwa permasalahan Iran dengan Amerika Serikat dapat diselesaikan melalui konsesi sepihak.

Menurut pandangannya, perundingan tidak selalu salah. Diplomasi merupakan bagian dari hubungan antarnegara. Namun perundingan menjadi berbahaya apabila salah satu pihak memberikan konsesi nyata, sementara pihak yang lebih kuat hanya menawarkan janji yang tidak seimbang atau terus menambah tuntutan.

Dalam penjelasan mengenai logika Iran menghadapi pemerintah Amerika Serikat, situs resmi Khamenei memuat kritik bahwa pihak Amerika dapat menerima konsesi yang bersifat langsung tetapi tidak memenuhi imbalan yang dijanjikan. Dalam pidato lain, ia menyatakan bahwa permasalahan Iran dengan

Amerika tidak akan selesai hanya melalui perundingan apabila tuntutan terus berkembang dari satu persoalan menuju persoalan berikutnya.

Kritik tersebut tidak harus diterima sebagai kebenaran universal dalam setiap situasi diplomatik. Kritik tersebut lahir dari pengalaman sejarah Iran sendiri, yang mencakup konsesi ekonomi pada masa monarki, campur tangan asing, kudeta 1953, dukungan eksternal terhadap pemerintahan Shah, perang Iran–Irak, sanksi, dan persaingan geopolitik yang panjang. Namun sebagai cermin, gagasan itu penting bagi Indonesia.

Bangsa yang tidak mempunyai arah dapat menganggap setiap kompromi sebagai pragmatisme. Padahal tidak semua kompromi menghasilkan perdamaian dan manfaat yang adil.

Konsesi dapat dibutuhkan dalam diplomasi. Tidak ada hubungan internasional yang berjalan tanpa pertukaran kepentingan. Namun konsesi harus diberikan dari posisi sadar, terukur, dan berdaulat.

Sebuah bangsa harus mengetahui apa yang dapat dinegosiasikan dan apa yang tidak boleh diserahkan. Wilayah, martabat rakyat, kedaulatan data, kemampuan menentukan hukum, sumber daya strategis, kemandirian ilmu, dan masa depan generasi berikutnya tidak boleh diperlakukan sebagai barang dagangan jangka pendek.

Pengalaman Iran mengajarkan bahwa kekuatan hegemonik tidak selalu puas setelah menerima satu

konsesi. Ketergantungan dapat menciptakan tuntutan baru karena pihak yang lebih kuat mengetahui bahwa pihak yang lebih lemah tidak mempunyai pilihan.

Bagi Indonesia, pelajaran ini tidak boleh diterjemahkan sebagai permusuhan otomatis terhadap Amerika Serikat atau negara besar mana pun. Indonesia membutuhkan hubungan baik dan kerja sama luas.

Pelajarannya ialah bahwa kerja sama harus ditopang oleh kecerdasan negara, kemampuan nasional, dan batas yang jelas. Tanpa itu, diplomasi dapat berubah menjadi penyesuaian terus-menerus kepada kehendak pihak yang lebih kuat.

Ketahanan bukan berarti menolak seluruh kompromi. Ketahanan berarti tidak kehilangan diri ketika berkompromi.

F. Membela Kaum Tertindas Tanpa Melihat Mazhab

Salah satu aspek penting lain dalam pemikiran Khamenei adalah penolakannya terhadap pembatasan solidaritas berdasarkan mazhab.

Dalam pernyataannya kepada Majelis Dunia Ahlulbait, ia menyatakan bahwa dalam membela kaum tertindas, Iran tidak melihat agama atau mazhab pihak yang dibela. Dalam berbagai pidatonya, ia menunjukkan Palestina sebagai contoh rakyat Palestina mayoritas Sunni, tetapi Iran tetap memandang pembelaan terhadap mereka sebagai kewajiban moral.

Majelis Dunia Ahlulbait juga menyatakan bahwa dukungan Iran terhadap Hezbollah di Lebanon yang berakar pada komunitas Syiah tidak berbeda secara prinsip dengan dukungan terhadap Hamas dan Jihad Islam Palestina yang berakar pada masyarakat Sunni. Dalam kerangka tersebut, ukuran pembelaan bukan kesamaan mazhab, melainkan posisi terhadap penindasan.

Prinsip ini sejalan dengan rumusan konstitusional Iran. Pasal 154 menyatakan bahwa Republik Islam mendukung perjuangan yang adil dari kaum tertindas melawan kaum penindas di seluruh dunia sambil menyatakan tidak mencampuri urusan dalam negeri bangsa lain. Konstitusi juga menempatkan dukungan terhadap *mustad'afin* sebagai salah satu arah kebijakan luar negeri.

Tentu terdapat perdebatan internasional mengenai bagaimana prinsip tersebut diwujudkan, aktor mana yang didukung, serta dampaknya terhadap konflik regional. Naskah ini tidak perlu menerima seluruh kebijakan luar negeri Iran tanpa kritik.

Yang menjadi perhatian adalah landasan nilainya bahwa penderitaan manusia tidak kehilangan arti hanya karena korban berasal dari mazhab yang berbeda.

Bagi dunia Islam, prinsip ini sangat penting. Perpecahan Sunni–Syiah telah berkali-kali digunakan untuk mengalihkan perhatian umat dari persoalan penjajahan, ketidakadilan, kemiskinan, dan dominasi.

Ketika setiap kelompok hanya membela penderitaan kelompoknya sendiri, kaum tertindas akan terus dipisahkan dan dilemahkan.

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Sunni perlu membaca pengalaman ini tanpa ketakutan mazhab. Membaca Iran tidak berarti menjadi Syiah. Mengakui pembelaan Iran terhadap Palestina tidak berarti menerima seluruh kebijakan Iran.

Sebaliknya, Iran juga harus memahami bahwa Indonesia mempunyai tradisi, struktur sosial, dan sensitivitas mazhabnya sendiri. Dialog hanya dapat berlangsung apabila kedua pihak tidak menggunakan solidaritas sebagai jalan untuk memaksakan identitas.

Pembelaan terhadap *mustad'afin* harus mempertemukan umat, bukan menjadi pintu baru untuk persaingan pengaruh.

G. Umat Islam sebagai Satu Identitas Peradaban

Konstitusi Iran menyatakan bahwa seluruh Muslim membentuk satu umat dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk memperkuat persaudaraan serta mengusahakan persatuan kekuasaan, ekonomi, dan kebudayaan dunia Islam.

Khamenei juga berulang kali menyerukan agar umat Islam melampaui perselisihan yang tidak mendasar dan membangun kesatuan umat. Khamenei menggambarkan persoalan-persoalan di Palestina,

Yaman, Bahrain, dan wilayah lain sebagai luka dalam tubuh dunia Islam.

Gagasan umat sebagai satu tubuh tidak berarti menghapus bangsa, negara, bahasa, budaya, atau mazhab. Gagasan tersebut berarti bahwa batas kekuasaan dan perbedaan fikih tidak boleh menghilangkan tanggung jawab moral.

Seorang Muslim di Indonesia tidak harus kehilangan identitas Indonesianya untuk peduli kepada Palestina. Seorang Muslim Iran tidak harus meninggalkan identitas Persianya untuk membela rakyat Yaman. Persatuan peradaban tidak berarti keseragaman.

Persatuan berarti memiliki kesadaran bahwa umat menghadapi beberapa tantangan bersama seperti kemiskinan, ketertinggalan ilmu, perang, dominasi ekonomi, kehancuran lingkungan, islamofobia, konflik mazhab, dan ketergantungan teknologi. Namun konsep satu umat juga harus dijaga agar tidak berubah menjadi alat geopolitik.

Negara dapat menggunakan bahasa persatuan Islam untuk memperluas pengaruhnya. Kelompok dapat memakai penderitaan umat untuk mengumpulkan legitimasi. Karena itu, solidaritas harus selalu diuji melalui keberpihakan nyata kepada manusia, kejujuran, dan penghormatan terhadap kedaulatan bangsa lain.

Bagi Sekolah Negarawan, kesadaran umat harus dibangun melalui jalur rakyat. Artinya, solidaritas tidak

hanya diumumkan oleh pemerintah, tetapi diwujudkan melalui simpul-simpul yang mendidik, mengasuh, melindungi, dan memperkuat rakyat.

Umat sebagai satu identitas peradaban bukan proyek perluasan kekuasaan satu negara. Umat sebagai satu identitas peradaban merupakan kesadaran bahwa kemajuan satu bagian umat seharusnya memperkuat bagian lainnya, sedangkan penderitaan satu bagian tidak boleh diperlakukan sebagai persoalan yang jauh.

H. Perbedaan Pemimpin Peradaban dan Pemimpin Administratif

Pengalaman Iran menampilkan perbedaan antara kepemimpinan administratif dan kepemimpinan peradaban.

Pemimpin administratif mengelola pemerintahan, anggaran, lembaga, proyek, dan pelayanan. Fungsi tersebut penting. Negara tidak dapat berjalan tanpa administrasi yang tertib.

Namun, pemimpin peradaban mempunyai cakupan yang berbeda. Pemimpin peradaban menjaga arah jangka panjang, tata nilai, identitas, ketahanan bangsa, dan hubungan antara generasi sekarang dengan masa depan.

Dalam struktur Iran, Presiden menjalankan kekuasaan eksekutif pada wilayah yang ditentukan konstitusi. Parlemen membentuk undang-undang. Pengadilan menjalankan fungsi yudisial. Adapun

Pemimpin Tertinggi mempunyai peran dalam menentukan kebijakan umum, mengawasi pelaksanaannya, memegang komando tertinggi angkatan bersenjata, serta menjalankan berbagai kewenangan konstitusional lainnya.

Struktur tersebut dapat diperdebatkan. Pertanyaan mengenai konsentrasi kekuasaan, pengawasan, representasi, dan pertanggungjawaban tetap relevan. Namun tujuan yang hendak dibangun dapat dibaca sebagai urusan negara tidak hanya dikelola berdasarkan masa jabatan pemerintahan, tetapi juga dijaga melalui kepemimpinan yang dimaksudkan memelihara arah ideologis dan peradaban.

Indonesia tidak perlu membentuk jabatan yang sama. Namun Indonesia perlu menjawab persoalan yang sama yaitu siapa yang menjaga arah negara melampaui masa jabatan lima tahunan?

Presiden mempunyai mandat pemerintahan. Parlemen mempunyai masa kerja. Partai politik bergerak dalam kompetisi elektoral. Birokrasi menjalankan administrasi. Namun siapa yang memastikan bahwa pembangunan ilmu, teknologi, pendidikan, kebudayaan, pertahanan, dan karakter bangsa mempunyai kesinambungan beberapa generasi?

Pemimpin administratif cenderung bekerja berdasarkan target yang dapat dicapai selama masa jabatan. Pemimpin peradaban harus memikirkan akibat keputusan hingga beberapa dekade.

Pemimpin administratif bertanya apakah proyek selesai. Pemimpin peradaban bertanya apakah proyek tersebut memperkuat rakyat.

Pemimpin administratif menghitung pertumbuhan. Pemimpin peradaban memastikan pertumbuhan lahir dari keadilan.

Pemimpin administratif mengadopsi teknologi. Pemimpin peradaban menentukan nilai yang harus dilayani teknologi.

Indonesia memerlukan pemimpin yang tidak hanya menguasai pemerintahan, tetapi memahami manusia, sejarah dunia, konstitusi, teknologi, geopolitik, ekonomi, agama, dan masa depan rakyat.

I. Indonesia Tidak Perlu Meniru Iran, tetapi Perlu Belajar dari Keseriusannya

Pelajaran terbesar dari Iran bukan bahwa Indonesia harus membentuk Republik Islam dengan desain yang sama. Indonesia tidak perlu mengadopsi *wilāyat al-faqih*, Dewan Wali, Majelis Ahli, ataupun susunan konstitusional Iran.

Indonesia mempunyai sejarah sendiri. Indonesia lahir dari masyarakat yang sangat plural, pengalaman kolonial yang berbeda, tradisi Sunni yang dominan, kerajaan dan kesultanan yang beragam, Pancasila, serta kompromi konstitusional yang khas.

Menerapkan sistem Iran secara mekanis di Indonesia bukan hanya tidak realistis, tetapi juga

bertentangan dengan prinsip bahwa setiap bangsa harus menemukan bentuk negaranya berdasarkan sejarah dan kebutuhan rakyatnya. Namun menolak peniruan tidak berarti menolak pembelajaran.

Iran dapat dipelajari setidaknya dalam empat hal.



Pertama, Iran menunjukkan bahwa perubahan penguasa tidak cukup tanpa perubahan arsitektur negara. Revolusi 1979 tidak berhenti pada jatuhnya Shah. Konstitusi baru disusun dan sumber legitimasi dirumuskan ulang.

Kedua, Iran menunjukkan bahwa negara memerlukan tata nilai yang dinyatakan secara jelas. Nilai tidak boleh hanya menjadi ornamen. Tata nilai harus mempunyai hubungan dengan hukum, lembaga, pendidikan, ekonomi, dan arah kebijakan.

Ketiga, Iran menunjukkan pentingnya kepemimpinan yang memikirkan peradaban, bukan hanya administrasi. Kepemimpinan harus menjaga arah, spiritualitas, kemandirian, ilmu, dan ketahanan jangka panjang.

Keempat, Iran menunjukkan bahwa bangsa yang berada di bawah tekanan global membutuhkan kekuatan batin. Kemandirian tidak dapat dibangun hanya melalui senjata atau industri. Kemandirian membutuhkan manusia yang memiliki keyakinan, disiplin, ilmu, keberanian, dan kesediaan berkorban.

Indonesia dapat belajar dari keseriusan itu tanpa menerima seluruh jawabannya. Indonesia harus membangun bentuk negara rakyatnya sendiri. Tata nilai Islam dapat menjadi sumber pembentukan manusia dan kepemimpinan, tetapi tidak boleh dipakai sebagai alat dominasi mazhab atau kelompok.

Indonesia juga harus menjaga agar pembelajaran dari Iran tidak mengubah ketergantungan arah. Tujuan kerja sama peradaban bukan menggantikan orientasi Barat dengan orientasi Iran. Tujuannya adalah memperkuat kemampuan Indonesia berpikir dan menentukan jalannya sendiri.

Iran harus hadir sebagai cermin, bukan sebagai penguasa baru atas imajinasi Indonesia.

J. Penutup Bab

Iran dan Indonesia sama-sama menghadapi pertanyaan tentang bentuk negara, tetapi keduanya menjawab melalui jalan sejarah yang berbeda.

Iran memulai pencarian konstitusionalnya pada masa monarki. Konstitusi 1906 membatasi sebagian kekuasaan raja dan menghadirkan Majelis yang mewakili rakyat. Revolusi Islam 1979 kemudian menghapus monarki dan membangun Republik Islam yang berusaha mempertemukan kedaulatan Allah, hak manusia menentukan nasib sosial, partisipasi rakyat, kepemimpinan agama, dan lembaga-lembaga republik.

Bentuk tersebut tidak bebas dari persoalan. Tidak ada negara yang sepenuhnya identik dengan cita-cita konstitusinya. Namun Iran telah menunjukkan keberanian untuk merumuskan dasar negaranya sendiri dan menempatkan tata nilai, kepemimpinan, serta arah peradaban sebagai bagian dari arsitektur konstitusi.

Sayid Ali Khamenei menjadi salah satu cermin dari pengalaman tersebut. Khamenei menekankan spiritualitas, kekuatan batin, tawakal, ilmu, dan hubungan dengan Allah sebagai dasar ketahanan pemuda. Khamenei memperingatkan bahwa konsesi kepada kekuatan hegemonik tidak selalu menyelesaikan masalah apabila tuntutan terus bertambah. Khamenei juga menempatkan pembelaan terhadap kaum tertindas di atas perbedaan mazhab

serta menyerukan kesadaran umat Islam sebagai satu tubuh.

Indonesia tidak perlu meniru Iran. Indonesia tidak perlu menyalin susunan lembaganya, mengikuti mazhabnya, atau mengadopsi seluruh strategi geopolitiknya.

Namun Indonesia perlu belajar dari keseriusan Iran memahami bahwa perubahan pemerintahan tidak cukup tanpa perubahan bentuk negara, perubahan bentuk negara tidak cukup tanpa kepemimpinan nilai, dan kepemimpinan nilai tidak akan bertahan tanpa manusia yang mempunyai spiritualitas, ilmu, dan kekuatan batin.

Iran telah berusaha menjawab pertanyaan bagaimana agama, rakyat, kepemimpinan, dan negara dipertemukan dalam satu arsitektur?

Indonesia harus menemukan jawabannya sendiri. Pelajaran dari Iran bukan jawaban siap pakai, melainkan keberanian untuk tidak menyerahkan desain negara kepada sejarah yang berjalan tanpa arah.

Indonesia harus bertanya dengan keseriusan yang sama yaitu nilai apa yang menjadi dasar negara, bagaimana rakyat ditempatkan sebagai pemilik, siapa yang menjaga arah jangka panjang, bagaimana teknologi dan kekuasaan dikendalikan, serta manusia seperti apa yang harus dibentuk agar bangsa mampu menghadapi dunia.

Jika Indonesia hanya meniru Iran, Indonesia akan kehilangan dirinya. Namun jika Indonesia

menolak belajar hanya karena takut terhadap perbedaan mazhab dan sistem, Indonesia juga akan kehilangan kesempatan memahami pengalaman penting dunia Islam.

Kerja sama peradaban menuntut kedewasaan untuk belajar tanpa menyalin, menghormati tanpa mengkultuskan, mengkritik tanpa merendahkan, dan bekerja sama tanpa kehilangan kedaulatan.

Iran pernah menemukan bentuk negara yang diyakininya sesuai dengan tata nilai dan pengalaman sejarahnya. Indonesia belum selesai menemukan bentuk negara rakyatnya.

Perbedaan tersebut bukan alasan bagi Iran untuk menggurui Indonesia. Perbedaan tersebut justru menjadi alasan bagi kedua bangsa untuk berdialog agar Indonesia belajar dari keseriusan Iran, dan agar Iran memahami bahwa Indonesia harus membangun jalannya sendiri.

Bab IV
Kemerdekaan Formal dan Kolonialisme Struktural

A. Kemerdekaan Indonesia dan Dekolonisasi Struktural

Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Indonesia. Melalui proklamasi tersebut, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, menolak kelanjutan pemerintahan kolonial, dan mendirikan Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat.

Makna peristiwa tersebut tidak boleh direndahkan. Kemerdekaan Indonesia bukan peristiwa administratif biasa dan bukan sekadar pergantian penguasa. Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan panjang, pengorbanan rakyat, perlawanan, diplomasi, peperangan, pendidikan, kebudayaan, dan kebangkitan kesadaran kebangsaan.

Dengan proklamasi, manusia Indonesia menyatakan bahwa mereka bukan lagi penduduk jajahan, melainkan bangsa yang berhak menentukan nasibnya sendiri.

Karena itu, naskah ini tidak mempertanyakan kemerdekaan Indonesia. Republik Indonesia adalah negara yang sah. Pemerintahan kolonial secara langsung telah berakhir. Indonesia mempunyai wilayah, konstitusi, pemerintahan nasional, angkatan bersenjata, kepolisian, lembaga peradilan, hubungan diplomatik, serta pengakuan internasional.

Namun pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia tidak menutup ruang bagi pertanyaan yang lebih mendasar, yaitu apakah berakhirnya pemerintahan kolonial secara otomatis berarti berakhirnya seluruh struktur kolonial?

Pertanyaan tersebut penting karena kolonialisme tidak hanya hadir melalui tentara asing, pendudukan wilayah, dan pemerintahan kolonial. Kolonialisme juga membangun hukum, birokrasi, administrasi, pendidikan, ekonomi, kebudayaan, cara berpikir, hierarki sosial, serta hubungan tertentu antara penguasa dengan rakyat.

Ketika penjajah pergi, struktur yang dibangunnya tidak selalu ikut pergi. Di sinilah Sekolah Negarawan membedakan antara kemerdekaan formal dan dekolonisasi struktural.

Kemerdekaan formal menandai berakhirnya penguasaan kolonial secara langsung dan lahirnya negara nasional. Dekolonisasi struktural adalah proses yang jauh lebih panjang untuk membongkar, menilai kembali, mengubah, dan membangun ulang seluruh sistem yang sebelumnya dibentuk berdasarkan kebutuhan penjajahan.

Dekolonisasi struktural mencakup hukum, birokrasi, administrasi, ekonomi, pendidikan, teknologi, ilmu pengetahuan, kebudayaan, tata nilai, kepemimpinan, dan hubungan antara negara dengan rakyat.

Kemerdekaan formal menjawab pertanyaan tentang siapa yang memerintah. Dekolonisasi struktural menjawab pertanyaan yang lebih dalam yaitu untuk

siapa pemerintahan dijalankan, nilai apa yang menjadi arahnya, dan apakah struktur negara sungguh-sungguh telah berubah dari alat penguasaan menjadi alat pengasuhan rakyat.

Sebuah bangsa dapat merdeka tetapi tetap menggunakan hukum yang dirancang untuk mengendalikan penduduk jajahan. Negara dapat mempunyai birokrasi nasional, tetapi mempertahankan budaya administrasi yang berjarak dari rakyat. Pemerintah dapat dipimpin oleh warga negaranya sendiri, tetapi orientasi ekonomi dan pengetahuannya tetap bergantung kepada kebutuhan pihak lain.

Dengan demikian, Proklamasi adalah pintu masuk kemerdekaan, bukan akhir seluruh pekerjaan dekolonisasi. Kemerdekaan harus terus diwujudkan melalui perubahan struktur agar rakyat tidak hanya berpindah status dari penduduk jajahan menjadi warga negara, tetapi juga benar-benar menjadi pemilik kedaulatan.

B. Penjajah Pergi, Struktur Bertahan

Kolonialisme tidak dibangun hanya untuk menduduki wilayah. Kolonialisme dibangun untuk menguasai manusia, mengendalikan sumber daya, mengatur produksi, menjaga arus keuntungan, dan mempertahankan stabilitas pemerintahan kolonial. Untuk mencapai tujuan tersebut, kolonialisme membentuk sistem yang luas, yaitu hukum, pajak, birokrasi, keamanan, administrasi wilayah, pendidikan, perdagangan, kepemilikan tanah, klasifikasi sosial, serta struktur hubungan antara penguasa dan masyarakat.

Dalam sistem kolonial, rakyat tidak ditempatkan sebagai pemilik negara. Mereka dipandang sebagai penduduk yang harus diatur, tenaga yang dapat digunakan, pembayar pajak, pemasok komoditas, konsumen, dan objek pengawasan.

Negara kolonial tidak dibangun untuk mengasuh rakyat. Negara kolonial dibangun untuk mengelola wilayah dan manusia agar kepentingan penguasa dapat berjalan.

Ketika Indonesia merdeka, negara baru menghadapi keadaan yang sulit. Republik membutuhkan hukum, kantor, pegawai, aparat, sistem pencatatan, perpajakan, administrasi, dan berbagai alat pemerintahan. Dalam kondisi revolusi dan keterbatasan sumber daya, sebagian struktur kolonial tetap digunakan.

Penggunaan struktur lama pada masa transisi dapat dipahami. Negara yang baru berdiri tidak mungkin membangun seluruh institusinya dari awal dalam waktu singkat. Namun persoalan muncul ketika struktur yang seharusnya bersifat sementara tidak pernah diperiksa secara mendasar.

Pejabat asing dapat digantikan oleh pejabat nasional, tetapi cara memandang rakyat tetap sama. Bahasa kolonial dapat diganti dengan bahasa Indonesia, tetapi hubungan kekuasaan tetap vertikal. Pemerintahan dapat dijalankan oleh anak bangsa sendiri, tetapi rakyat tetap diperlakukan sebagai objek administrasi. Di sinilah terdapat perbedaan antara nasionalisasi pengelola dan dekolonisasi struktur.

Nasionalisasi pengelola berarti jabatan dan institusi yang sebelumnya dikendalikan bangsa asing kemudian dipegang oleh bangsa sendiri. Dekolonisasi struktur berarti mengubah tujuan, tata nilai, hubungan kekuasaan, dan mekanisme kerja agar seluruh institusi benar-benar melayani rakyat.

Tanpa dekolonisasi, orang Indonesia dapat menjalankan logika kolonial terhadap sesama orang Indonesia. Keadaan tersebut tidak selalu lahir dari niat jahat. Keadaan tersebut dapat berkembang melalui kebiasaan, pendidikan, budaya organisasi, kepentingan, insentif, atau ketidakmampuan membayangkan bentuk negara yang berbeda.

Namun akibatnya tetap serius. Rakyat masih berhadapan dengan negara sebagai pihak yang harus memohon, menaati, menunggu, dan membuktikan diri. Pemerintah tetap melihat masyarakat dari atas. Birokrasi lebih bertanggung jawab kepada atasannya daripada kepada rakyat yang dilayaninya.

Penjajah pergi, tetapi jarak antara negara dan rakyat dapat terus bertahan. Inilah salah satu sebab mengapa kemerdekaan formal belum otomatis melahirkan negara rakyat. Struktur yang diwarisi dari kolonialisme tidak hanya bertahan dalam hukum dan lembaga, tetapi juga dalam mentalitas manusia yang menjalankannya.

C. Penjajahan yang Terlihat dan Penjajahan yang Tidak Terlihat

Penjajahan yang terlihat relatif mudah dikenali. Datang dengan nama, bendera, tentara, kapal perang, benteng, perusahaan kolonial, pemerintahan asing, dan administrasi yang terang-terangan membedakan antara penguasa dengan penduduk jajahan. Dalam penjajahan klasik, rakyat mengetahui siapa yang menguasai mereka. Kekuasaan mempunyai wajah yang berbeda, bahasa yang berbeda, dan kepentingan yang lebih mudah dibaca.

Penjajahan yang terlihat merampas wilayah. Penjajahan tersebut menguasai tanah, pelabuhan, perkebunan, tambang, tenaga kerja, dan jalur perdagangan. Penjajahan tersebut menggunakan kekerasan untuk memastikan kepatuhan dan menjaga kepentingan kolonial. Namun, penjajahan yang tidak terlihat bekerja melalui cara yang berbeda.

Penjajahan tidak selalu membutuhkan tentara asing. Penjajahan tidak selalu datang dengan bendera. Penjajahan bahkan tidak selalu menyatakan dirinya sebagai penjajahan. Penjajahan yang tidak terlihat dapat bekerja melalui nilai, moral, etika, budaya, pendidikan, hukum, regulasi, ekonomi, teknologi, data, media, algoritma, gaya hidup, standar pengetahuan, dan cara manusia memahami kemajuan.

Kolonialisme klasik menguasai tanah. Kolonialisme struktural dapat menguasai cara suatu bangsa memahami tanahnya. Kolonialisme klasik mengambil bahan mentah secara langsung.

Kolonialisme struktural dapat membentuk sistem yang membuat bangsa mengekspor bahan mentah, mengimpor nilai tambah, dan menerima ketergantungan itu sebagai sesuatu yang wajar.

Kolonialisme klasik memaksakan kebudayaan penguasa. Kolonialisme struktural dapat menanamkan rasa rendah diri sehingga bangsa yang dijajah secara sukarela menganggap nilai, pengetahuan, bahasa, dan gaya hidup pihak lain selalu lebih tinggi daripada miliknya sendiri.

Dalam konteks inilah pernyataan Cak Nun mengenai penjajahan masa kini perlu dibaca. Ketika Cak Nun menyebut Indonesia dijajah oleh Amerika "seratus kali lipat" dibandingkan pada zaman Belanda, pernyataan tersebut tidak perlu diperlakukan sebagai angka statistik atau kesimpulan historis yang bersifat kuantitatif. Pernyataan tersebut merupakan bahasa budaya untuk menggambarkan kedalaman penjajahan yang tidak terlihat.

Dahulu penjajah datang dengan nama, bendera, tentara, dan administrasi kolonial. Hari ini dominasi dapat bekerja melalui sistem nilai, pasar, regulasi, pendidikan, teknologi, data, gaya hidup, kepalsuan sosial, media, budaya konsumsi, dan elite domestik.

Lebih berbahaya lagi, tidak selalu ada pihak yang secara terbuka mengaku menjajah. Rakyat sendiri bahkan dapat tidak merasa sedang kehilangan kedaulatannya.

Manusia dapat merasa bebas karena mempunyai banyak pilihan barang, hiburan, dan informasi, padahal keinginan dan pilihannya dibentuk oleh sistem yang

tidak ia pahami. Negara dapat merasa merdeka karena mempunyai pemerintahan nasional, padahal kebijakan ekonomi, teknologi, dan pendidikannya bergantung pada standar yang ditentukan di luar dirinya.

Rakyat dapat merasa berdaulat karena memilih pemimpin, padahal pilihan, persepsi, dan pengetahuannya dipengaruhi oleh modal, media, teknologi, serta algoritma yang tidak transparan.

Penjajahan klasik melahirkan perlawanan karena musuhnya dapat dikenali. Penjajahan struktural lebih sulit dilawan karena ia dapat hadir sebagai kemajuan, efisiensi, modernisasi, investasi, inovasi, reformasi, atau kebutuhan global.

Namun kehati-hatian tetap diperlukan. Tidak setiap pengaruh asing adalah kolonialisme. Tidak setiap investasi, teknologi, regulasi, pendidikan, atau pertukaran budaya merupakan penjajahan.

Sebuah hubungan dapat disebut mengarah pada kolonialisme struktural apabila ia membentuk dominasi, ketergantungan, hilangnya kendali, pemindahan manfaat, dan ketidakmampuan bangsa menentukan arah kehidupannya sendiri.

Pertanyaannya bukan hanya dari mana suatu sistem berasal. Pertanyaannya adalah siapa yang menguasainya, siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung risiko, dan apakah rakyat tetap mempunyai kemampuan untuk menentukan masa depannya.

D. Hukum, Birokrasi, dan Administrasi Kolonial

Hukum kolonial dibangun untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan jajahan. Tujuannya bukan terutama menghadirkan keadilan bagi penduduk, melainkan menjaga ketertiban, melindungi kepentingan penguasa, memungut pajak, mengatur tenaga kerja, mengendalikan perdagangan, dan mencegah perlawanan. Dalam sistem semacam itu, hukum bekerja secara vertikal.

Negara berada di atas, sementara rakyat berada di bawah. Aparat mempunyai kewenangan luas, sedangkan penduduk menghadapi keterbatasan dalam membela haknya.

Setelah kemerdekaan, sebagian hukum kolonial tetap digunakan untuk mencegah kekosongan hukum. Keputusan tersebut dapat dipahami sebagai kebutuhan awal negara baru.

Namun persoalan dekolonisasi hukum tidak cukup diselesaikan dengan mengganti undang-undang lama dengan undang-undang baru. Cara berpikir kolonial dapat tetap hidup dalam hukum nasional.

Sebuah hukum dapat disusun setelah kemerdekaan, tetapi tetap menggunakan logika bahwa warga adalah pihak yang harus dicurigai, diatur, dan dikendalikan. Negara diberikan kewenangan yang luas, sementara rakyat harus membuktikan bahwa dirinya berhak memperoleh perlindungan.

Dalam negara rakyat, hukum seharusnya menjadi alat keadilan. Hukum harus melindungi manusia dari kesewenang-wenangan, termasuk kesewenang-wenangan negara.

Namun dalam praktik, hukum dapat menjadi sangat mahal, rumit, lambat, dan jauh dari rakyat. Orang yang mempunyai modal, akses, hubungan, dan pengetahuan dapat menggunakan hukum secara lebih efektif daripada rakyat biasa.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa persoalan hukum bukan hanya terdapat dalam teks, tetapi juga dalam arsitektur akses dan pelaksanaannya.

Birokrasi kolonial juga dibangun berdasarkan hubungan vertikal. Pegawai bertanggung jawab kepada atasannya. Informasi dikendalikan dari pusat. Masyarakat harus mendatangi kantor kekuasaan, mengisi berbagai persyaratan, menunggu, dan memohon.

Apabila pola tersebut bertahan, birokrasi nasional dapat tetap berjarak dari rakyat. Pelayanan publik dipandang sebagai pemberian pemerintah, bukan sebagai hak rakyat.

Dokumen, izin, data, dan prosedur dapat berubah menjadi sumber kekuasaan aparat. Rakyat yang seharusnya menjadi pemilik negara justru ditempatkan sebagai pihak yang harus meminta izin kepada negara untuk menjalani kehidupannya. Dekolonisasi birokrasi berarti mengubah orientasi tersebut.

Birokrasi harus bergerak dari pengendalian menuju pelayanan, dari kerahasiaan menuju keterbukaan, dari kepatuhan kepada atasan menuju pertanggungjawaban kepada rakyat, dan dari prosedur menuju penyelesaian kebutuhan manusia.

Digitalisasi tidak otomatis menghasilkan dekolonisasi. Birokrasi kolonial yang dipindahkan ke dalam aplikasi tetap merupakan birokrasi kolonial.

Rakyat dapat tidak lagi mengantre di kantor, tetapi harus menghadapi sistem digital yang tidak transparan, sulit dikoreksi, dan tidak menyediakan manusia yang bertanggung jawab. Antrean fisik hanya berubah menjadi antrean algoritmik.

Karena itu, pembaruan hukum dan administrasi harus selalu kembali kepada satu pertanyaan yaitu apakah struktur tersebut membuat rakyat semakin terlindungi, semakin berdaya, dan semakin dekat dengan keadilan?

E. Rakyat sebagai Objek Pengaturan

Salah satu ciri utama negara kolonial adalah penempatan rakyat sebagai objek. Rakyat dihitung, dipetakan, diklasifikasikan, dipungut pajak, diarahkan tenaganya, dan diatur ruang hidupnya. Mereka tidak diposisikan sebagai pemilik kekuasaan, melainkan sebagai manusia yang harus dikelola agar pemerintahan dapat berjalan. Bahasa administrasi kolonial masih dapat bertahan dalam negara modern.

Rakyat disebut sebagai target program, penerima manfaat, objek pembangunan, sasaran kebijakan, basis data, wajib pajak, pemilih, tenaga kerja, konsumen, atau pengguna layanan.

Semua kategori tersebut mungkin diperlukan untuk tujuan administrasi. Namun ketika seluruh hubungan negara dengan rakyat hanya dibangun

melalui kategori-kategori itu, rakyat kehilangan kedudukan dan moralnya.

Rakyat bukan hanya penerima program. Rakyat adalah pihak yang seharusnya menentukan program apa yang dibutuhkan. Rakyat bukan hanya sumber pajak. Rakyat adalah pemilik tujuan penggunaan pajak.

Rakyat bukan hanya pemilih. Rakyat adalah pemilik mandat yang harus mempunyai kemampuan mengawasi, mengevaluasi, dan mengoreksi pihak yang dipilihnya.

Rakyat bukan hanya pemasok data. Rakyat adalah pemilik martabat, privasi, hak, dan kepentingan atas data yang dihasilkan dari kehidupannya.

Ketika negara hanya melihat rakyat sebagai objek pengaturan, seluruh institusi akan bekerja dari atas ke bawah. Kebijakan disusun untuk rakyat, tetapi tidak selalu bersama rakyat.

Dalam keadaan demikian, rakyat dapat mengalami apa yang disebut Cak Nun sebagai proses diyatimkan.

Rakyat mempunyai pemerintahan, tetapi tidak merasa diasuh. Mereka mempunyai hukum, tetapi tidak selalu memperoleh keadilan. Mereka mempunyai aparat, tetapi tidak selalu merasa dilindungi. Mereka mempunyai wakil, tetapi tidak merasa diwakili.

Rakyat diminta memenuhi kewajiban, tetapi hak mereka dapat tertunda, dipersulit, atau dinegosiasikan. Negara rakyat harus membalik hubungan tersebut.

Rakyat tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan. Rakyat harus menjadi pemilik arah pembangunan. Rakyat tidak cukup dikonsultasikan

setelah kebijakan hampir selesai. Mereka harus mempunyai struktur konstitusional dan sosial yang memungkinkan kehendaknya hadir sejak awal.

Dekolonisasi hubungan rakyat dan negara berarti mengubah rakyat dari penduduk yang dikelola menjadi pemilik yang dilayani.

F. Krisis Kepemimpinan sebagai Warisan Struktural

Kolonialisme tidak hanya mewariskan hukum dan birokrasi. Kolonialisme juga membentuk tipe kepemimpinan. Dalam struktur kolonial, pemimpin lokal sering digunakan sebagai perantara antara penguasa dan masyarakat. Tugasnya bukan terutama mewakili rakyat, melainkan memastikan perintah berjalan, pajak terkumpul, tenaga tersedia, dan ketertiban terjaga.

Hubungan semacam itu membentuk kepemimpinan yang bertanggung jawab ke atas, bukan ke bawah.

Apabila warisan ini tidak dibongkar, pejabat nasional dapat tetap lebih takut kepada atasannya daripada kepada penderitaan rakyat. Ukuran keberhasilannya adalah kepatuhan, stabilitas, penyerapan anggaran, penyelesaian proyek, dan tercapainya indikator administratif.

Rakyat tetap hadir, tetapi sebagai sasaran. Krisis kepemimpinan Indonesia karena itu tidak cukup dijelaskan sebagai kelemahan moral pribadi. Krisis tersebut juga merupakan hasil dari struktur yang membentuk pemimpin administratif tanpa arah peradaban.

Pemimpin administratif mampu menjalankan perintah dan program. Namun ia belum tentu mampu menentukan apakah perintah dan program tersebut sesuai dengan keadilan, kedaulatan, dan kebutuhan rakyat.

Pemimpin dapat sangat sibuk membangun, tetapi tidak bertanya siapa yang menikmati pembangunan. Pemimpin tersebut dapat mendorong investasi, tetapi tidak memeriksa siapa yang kehilangan tanah dan ruang hidup. Pemimpin tersebut dapat mengadopsi teknologi, tetapi tidak mempertanyakan siapa yang menguasai data dan algoritmanya.

Dalam keadaan demikian, kepemimpinan kehilangan kendali terhadap arah bangsa. Di sinilah kritik Cak Nun tentang krisis kepemimpinan memperoleh makna struktural.

Cak Nun mengingatkan bahwa kerusakan peradaban dapat terjadi ketika kepemimpinan dalam sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, bahkan agama kehilangan nilai dan pengendalian.

Krisis tersebut tidak selalu berarti negara berhenti bekerja. Negara dapat tetap bekerja, tetapi bekerja tanpa arah moral.

Pemimpin dapat tampil sederhana, arif, religius, dan dekat dengan rakyat, tetapi kebijakannya tetap tidak mempunyai empati terhadap penderitaan manusia.

Kepalsuan sosial menjadi bagian dari kolonialisme struktural ketika penampilan moral digunakan untuk menutupi ketidakadilan yang terus berlangsung.

Dekolonisasi kepemimpinan berarti mengubah arah pertanggungjawaban. Pemimpin tidak cukup bertanggung jawab kepada Presiden, partai, atasan, pemodal, atau struktur birokrasi. Dia harus bertanggung jawab kepada rakyat, konstitusi, kebenaran, dan Allah.

Bangsa merdeka membutuhkan pemimpin yang tidak hanya mampu mengelola administrasi, tetapi memahami manusia, sejarah, tata nilai, dunia, teknologi, dan masa depan peradaban.

G. Mengapa Kolonialisme Struktural Lebih Sulit Dikenali

Kolonialisme struktural lebih sulit dikenali karena tidak selalu mempunyai satu pelaku, satu pusat komando, atau satu rencana besar. Hal ini dapat muncul dari pertemuan berbagai hukum, kebijakan, kepentingan ekonomi, teknologi, kebiasaan, pendidikan, media, budaya, dan keputusan elite.

Setiap bagian dapat terlihat normal apabila dibaca secara terpisah. Utang dipandang sebagai pembiayaan. Investasi dipandang sebagai pembangunan. Teknologi dipandang sebagai kemajuan. Regulasi dipandang sebagai tertib hukum. Pendidikan dipandang sebagai peningkatan keterampilan. Media dipandang sebagai kebebasan informasi.

Semua itu memang dapat membawa manfaat. Namun ketika seluruhnya bekerja dalam hubungan yang tidak seimbang, hasil akhirnya dapat berupa ketergantungan, hilangnya kendali, pemindahan

kekayaan, dan melemahnya kemampuan bangsa menentukan arah.

Kolonialisme struktural juga sulit dikenali karena pelakunya dapat berasal dari dalam negeri sendiri.

Elite domestik dapat memperoleh keuntungan dari sistem yang ada. Birokrasi memperoleh kekuasaan melalui prosedur. Konglomerasi memperoleh konsesi dan akses. Partai memperoleh pembiayaan. Media memperoleh pasar. Intelektual memperoleh kedudukan dengan membenarkan arah yang ditentukan pusat kekuasaan.

Dalam keadaan seperti ini, kekuatan luar tidak perlu mengendalikan semuanya secara langsung. Kepentingannya dapat dijalankan melalui hukum, kontrak, kebijakan, dan manusia di dalam negeri.

Kolonialisme struktural juga tidak selalu melahirkan penderitaan yang langsung terlihat. Sebagian masyarakat dapat mengalami peningkatan konsumsi. Infrastruktur dapat berkembang. Kota dapat tumbuh. Teknologi tersedia. Produk semakin beragam.

Namun di balik kemajuan tersebut, kemampuan produksi nasional dapat melemah, data berpindah, ruang hidup menyempit, ketimpangan membesar, dan masa depan bergantung kepada sistem yang tidak dikendalikan bangsa sendiri.

Karena itu, kolonialisme struktural tidak dapat diukur hanya melalui pertumbuhan ekonomi atau banyaknya pembangunan.

Ia harus dibaca melalui distribusi kekuasaan.

Siapa yang menentukan arah?

Siapa yang menguasai pengetahuan?
Siapa yang mempunyai teknologi?
Siapa yang memperoleh nilai tambah?
Siapa yang menanggung kerusakan?

Apakah rakyat mempunyai kemampuan untuk mengoreksi dan mengubah hubungan tersebut? Kolonialisme struktural juga tidak dapat dilawan hanya dengan nasionalisme simbolik.

Pengibaran bendera, slogan cinta tanah air, dan kebanggaan nasional penting. Namun sebuah bangsa dapat sangat nasionalistis dalam simbol sambil tetap bergantung dalam teknologi, data, ekonomi, pendidikan, hukum, dan pengetahuan.

Dekolonisasi membutuhkan kemampuan nyata. Hal ini membutuhkan manusia yang mampu berpikir, hukum yang adil, ekonomi yang berdaulat, teknologi yang dikuasai, data yang dilindungi, birokrasi yang mengasuh, dan kepemimpinan yang mempunyai arah.

H. Penutup Bab

Proklamasi 17 Agustus 1945 telah membebaskan Indonesia dari pemerintahan kolonial secara formal. Makna peristiwa tersebut sah, besar, dan tidak boleh direndahkan. Namun kemerdekaan Indonesia belum otomatis menyelesaikan dekolonisasi.

Penjajah dapat pergi, sementara hukum, birokrasi, administrasi, ekonomi, pendidikan, cara berpikir, dan hubungan kekuasaan yang dibangunnya tetap bertahan.

Orang asing dapat meninggalkan jabatan, tetapi negara tetap memperlakukan rakyat sebagai objek.

Pemerintahan dapat dijalankan oleh anak bangsa sendiri, tetapi struktur kekuasaannya masih bekerja dengan logika pengendalian.

Penjajahan masa kini juga tidak selalu tampak melalui tentara dan bendera asing. Penjajahan tersebut dapat bekerja melalui nilai, moral, etika, kebudayaan, pasar, regulasi, pendidikan, teknologi, data, media, algoritma, gaya hidup, kepalsuan sosial, dan kepemimpinan yang kehilangan kontrol atas arah bangsa.

Dalam pengertian itulah pernyataan Cak Nun bahwa Indonesia dijajah oleh Amerika "seratus kali lipat" dibandingkan zaman Belanda perlu dibaca. Pernyataan tersebut bukan angka statistik dan bukan perbandingan kuantitatif atas penderitaan sejarah.

Pernyataan itu merupakan alarm budaya yaitu dahulu penjajah mempunyai nama, bendera, tentara, dan administrasi. Hari ini dominasi dapat bekerja tanpa mengakui dirinya sebagai penjajahan, sementara rakyat sendiri tidak selalu menyadari bahwa nilai, pilihan, pengetahuan, dan masa depannya sedang dibentuk oleh kekuatan yang tidak mereka kendalikan. Namun kolonialisme struktural tidak dapat seluruhnya ditimpakan kepada bangsa asing.

Kolonialisme struktural dapat diteruskan, disesuaikan, dan diperkuat oleh elite domestik yang memperoleh manfaat dari sistem tersebut. Kolonialisme struktural dapat dijalankan oleh pejabat nasional, birokrasi nasional, perusahaan nasional, media nasional, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan manusia Indonesia sendiri.

Karena itu, dekolonisasi bukan proyek kebencian terhadap bangsa lain. Dekolonisasi juga bukan sekadar mengganti orang asing dengan orang Indonesia.

Dekolonisasi adalah perubahan tujuan, tata nilai, hubungan kekuasaan, dan struktur agar seluruhnya benar-benar berpihak kepada rakyat.

Hukum harus diubah agar keadilan lebih tinggi daripada ketertiban kekuasaan. Birokrasi harus diubah agar pelayanan menjadi pengasuhan. Administrasi harus diubah agar rakyat tidak diperlakukan sebagai objek. Kepemimpinan harus diubah agar pejabat tidak hanya patuh ke atas, tetapi bertanggung jawab kepada rakyat dan Allah.

Indonesia belum selesai menemukan bentuk negara rakyat karena proses dekolonisasi struktural belum selesai.

Rakyat telah berpindah dari penduduk jajahan menjadi warga negara secara formal. Namun mereka belum selalu menjadi pemilik arsitektur kekuasaan. Negara telah menjadi nasional, tetapi belum seluruh hukum, birokrasi, pendidikan, ekonomi, teknologi, tata nilai, dan kepemimpinannya sungguh-sungguh diarahkan kepada kemerdekaan rakyat.

Pekerjaan kemerdekaan karena itu harus dilanjutkan. Kemerdekaan tidak cukup dipertahankan melalui wilayah, bendera, tentara, dan diplomasi. Kemerdekaan harus diwujudkan dalam kemampuan bangsa menguasai nilai, ilmu, hukum, ekonomi, teknologi, data, budaya, dan arah kepemimpinannya sendiri.

Kemerdekaan formal telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Dekolonisasi struktural adalah pekerjaan peradaban yang harus diselesaikan oleh setiap generasi Indonesia.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

Bab V
Invited Colonialism: Ketika Kolonialisme Diundang oleh Elite Domestik

A. Dari Kolonialisme Paksa ke Kolonialisme yang Diundang

Dulu, kolonialisme datang dengan wajah yang mudah dikenali. Mereka hadir melalui kapal, senjata, tentara, perusahaan dagang, administratur asing, monopoli, konsesi paksa, penguasaan pelabuhan, pengambilalihan tanah, dan pendudukan wilayah.

Rakyat dapat melihat siapa yang datang, siapa yang memerintah, dan siapa yang mengambil hasil tanah mereka. Penjajah mempunyai nama, bendera, bahasa, pasukan, serta struktur pemerintahan yang berbeda dari masyarakat yang dikuasainya.

Dalam bentuk tersebut, kolonialisme bekerja terutama melalui pemaksaan dari luar. Kekuasaan asing memasuki wilayah suatu bangsa, menundukkan perlawanan, lalu membangun hukum, administrasi, dan ekonomi untuk melayani kepentingannya. Namun kolonialisme modern tidak selalu datang dengan cara yang sama.

Kolonialisme modern tidak selalu memerlukan perang terbuka. Kolonialisme modern tidak harus menurunkan bendera suatu negara atau mengganti pemerintahannya. Kolonialisme modern bahkan tidak selalu harus memaksakan pintu masuk karena pintu tersebut dapat dibukakan dari dalam.

Kolonialisme dapat memperoleh akses melalui regulasi, investasi, kontrak, konsesi, pembiayaan, utang, teknologi, platform digital, pengelolaan data, lembaga keuangan, perusahaan konsultan, standar internasional, dan kebijakan pembangunan yang disusun oleh elite domestik. Dalam keadaan seperti itulah Sekolah Negarawan menggunakan istilah *Invited Colonialism*.

Invited Colonialism adalah keadaan ketika dominasi atau ketergantungan memperoleh jalan bukan hanya karena tekanan eksternal, tetapi juga karena undangan, keputusan, kompromi, konsesi, atau pembukaan akses dari dalam negeri sendiri.

Kekuatan luar tetap membawa kepentingannya. Namun, kepentingan tersebut tidak bekerja sendirian. Kepentingan tersebut membutuhkan aktor domestik yang memberikan legalitas, fasilitas, perlindungan, informasi, akses, dan pembenaran.

Kolonialisme lama merobohkan pintu negara. *Invited Colonialism* memasuki pintu yang telah dibuka oleh pemilik rumah.

Perbedaan ini penting karena tanggung jawab tidak lagi dapat diletakkan sepenuhnya pada pihak luar. Ketika dominasi terjadi melalui kebijakan nasional, kontrak resmi, undang-undang, izin, atau keputusan pejabat, maka persoalannya bukan hanya tentang siapa yang datang, tetapi juga tentang siapa yang mengundang dan untuk kepentingan siapa pintu itu dibuka. Namun istilah ini harus digunakan secara hati-hati.

Tidak setiap investasi merupakan kolonialisme. Tidak setiap utang berarti penjajahan. Tidak setiap kerja sama teknologi, penggunaan konsultan asing, kontrak internasional, atau keterlibatan lembaga keuangan global merupakan bentuk dominasi.

Bangsa modern membutuhkan modal, ilmu, pasar, teknologi, pembiayaan, dan kerja sama. Menutup diri dari dunia bukan kedaulatan, melainkan dapat berubah menjadi ketertinggalan. Persoalannya adalah struktur hubungan yang dibentuk.

Apakah Indonesia tetap mempunyai kendali atas keputusan? Apakah manfaatnya diterima rakyat? Apakah risiko ditanggung secara adil? Apakah pengetahuan dan teknologi dipindahkan? Apakah negara dapat mengubah atau mengakhiri hubungan tersebut? Apakah rakyat mengetahui isi dan akibat kebijakan yang dibuat atas nama mereka?

Apabila sebuah hubungan memperkuat kemampuan nasional, membangun ilmu, meningkatkan kesejahteraan, dan menjaga kedaulatan, hubungan itu merupakan kerja sama yang sehat.

Namun apabila hubungan tersebut menghilangkan kendali, menciptakan ketergantungan, memindahkan manfaat kepada kelompok terbatas, serta membebankan risiko kepada rakyat, maka hubungan itu layak diperiksa sebagai bentuk *Invited Colonialism*.

B. Elite Domestik sebagai Pintu Masuk Kekuasaan Luar

Kekuatan asing tidak selalu memahami secara langsung seluruh struktur sosial, hukum, dan ekonomi suatu negara. Untuk memperoleh akses yang efektif, mereka membutuhkan perantara.

Dalam sejarah kolonialisme klasik, perantara tersebut dapat berupa penguasa lokal, pedagang, bangsawan, birokrat, atau kelompok masyarakat yang memperoleh keuntungan dari hubungan dengan kekuatan kolonial.

Pada masa modern, bentuknya dapat berubah. Perantara dapat hadir sebagai pejabat, politisi, partai, birokrat, pengusaha, konsultan, intelektual, media, profesional, ataupun lembaga yang mempunyai kemampuan membentuk kebijakan dan opini publik.

Elite domestik mempunyai kedudukan strategis karena mereka memahami bahasa, hukum, budaya, struktur kekuasaan, dan kebutuhan masyarakatnya sendiri. Mereka juga mempunyai akses kepada negara, informasi, sumber daya, dan proses pengambilan keputusan.

Jika elite tersebut mempunyai integritas dan orientasi kebangsaan, hubungan internasional dapat digunakan untuk memperkuat negara. Mereka dapat menegosiasikan transfer teknologi, perlindungan tenaga kerja, pembagian manfaat, pengembangan industri, peningkatan kapasitas, dan penguasaan pengetahuan.

Namun jika elite kehilangan arah, hubungan dengan kekuatan luar dapat berubah menjadi pintu masuk dominasi.

Kebijakan dapat disusun agar sesuai dengan kebutuhan investor, bukan kebutuhan rakyat. Regulasi dapat dilonggarkan tanpa perlindungan yang memadai. Konsesi dapat diberikan dalam waktu sangat panjang. Kontrak dapat mengikat negara dalam kondisi yang sulit diubah. Data dapat dibuka tanpa perlindungan kedaulatan. Utang dapat diambil tanpa strategi produktif.

Dalam keadaan tersebut, elite domestik tidak selalu merasa sedang mengundang kolonialisme. Mereka dapat meyakini bahwa tindakan tersebut merupakan pembangunan, modernisasi, efisiensi, atau pragmatisme. Justru di situlah letak bahayanya.

Invited Colonialism tidak selalu berlangsung melalui pengkhianatan yang disadari. *Invited Colonialism* dapat terjadi melalui ketidaktahuan, ketergesa-gesaan, ketidakmampuan, orientasi jangka pendek, konflik kepentingan, atau keyakinan bahwa tidak ada pilihan lain.

Elite juga dapat menggunakan kebutuhan rakyat sebagai alasan. Atas nama penciptaan lapangan kerja, negara memberikan konsesi yang tidak seimbang. Atas nama investasi, perlindungan lingkungan dilemahkan. Atas nama digitalisasi, data rakyat diserahkan kepada sistem yang tidak dikuasai. Atas nama percepatan, proses pengawasan dipangkas.

Pembangunan akhirnya diukur dari seberapa cepat proyek berjalan, bukan dari seberapa besar kedaulatan rakyat diperkuat.

Elite domestik menjadi pintu masuk kekuasaan luar ketika mereka lebih memahami kebutuhan modal daripada penderitaan rakyat, lebih cepat merespons permintaan investor daripada keluhan warga, serta lebih takut kehilangan kepercayaan pasar daripada kehilangan kepercayaan rakyat.

Dalam kondisi demikian, kekuatan eksternal tidak perlu memerintah Indonesia secara langsung. Kekuatan eksternal cukup memengaruhi manusia dan institusi yang mempunyai kewenangan membuat keputusan.

C. Investasi, Utang, Konsesi, dan Hilangnya Kedaulatan Rakyat

Investasi adalah bagian penting dari pembangunan. Negara membutuhkan modal untuk membangun industri, infrastruktur, energi, teknologi, lapangan kerja, dan berbagai kebutuhan ekonomi lainnya.

Utang juga tidak selalu buruk. Pembiayaan dapat membantu negara mempercepat pembangunan, menghadapi krisis, atau membangun kapasitas produktif yang manfaatnya melebihi biaya.

Konsesi pun dapat diperlukan untuk mengatur penggunaan sumber daya, pembangunan fasilitas, atau pemberian hak pengelolaan dalam batas dan tujuan tertentu.

Persoalan tidak terletak pada instrumennya, melainkan pada hubungan kekuasaan yang dibentuk melalui instrumen tersebut.

Investasi dapat memperkuat negara apabila menciptakan industri, lapangan kerja berkualitas, transfer teknologi, pengembangan sumber daya manusia, dan nilai tambah di dalam negeri.

Namun investasi juga dapat menciptakan ketergantungan apabila Indonesia hanya menyediakan tanah, bahan mentah, tenaga murah, fasilitas pajak, dan perlindungan hukum, sementara teknologi, keputusan, keuntungan, dan pengetahuan tetap dikuasai pihak lain.

Utang dapat menjadi alat pembangunan apabila digunakan secara produktif dan dikelola secara bertanggung jawab. Namun utang dapat menjadi alat pengendalian apabila membatasi ruang kebijakan, menciptakan ketergantungan pembiayaan, atau memaksa negara menyesuaikan prioritasnya dengan kepentingan pemberi dana.

Konsesi dapat memberikan kepastian pengelolaan, tetapi dapat pula memindahkan kendali atas sumber daya publik kepada kelompok terbatas untuk waktu yang sangat panjang.

Dalam semua keadaan tersebut, rakyat sering menjadi pihak yang paling jauh dari proses pengambilan keputusan.

Kontrak disusun oleh pemerintah, korporasi, bank, ahli hukum, dan konsultan. Rakyat menerima akibatnya dalam bentuk perubahan ruang hidup, harga, pekerjaan, lingkungan, pajak, atau kualitas pelayanan.

Atas nama rakyat, negara membuat perjanjian. Namun rakyat tidak selalu mengetahui isi, risiko, dan distribusi manfaatnya. Di sinilah kedaulatan rakyat dapat hilang secara perlahan.

Kedaulatan tidak hanya hilang ketika negara kehilangan wilayah. Kedaulatan juga dapat berkurang ketika keputusan strategis dikunci oleh kontrak yang sulit diubah, sumber daya dikelola tanpa kendali publik, atau kebijakan ekonomi ditentukan oleh kebutuhan pembiayaan.

Sebuah negara dapat tetap mempunyai parlemen dan pemerintah, tetapi ruang pilihan kebijakannya menyempit karena komitmen ekonomi yang telah dibuat.

Dalam keadaan tersebut, pemerintah berikutnya memperoleh jabatan, tetapi tidak sepenuhnya memperoleh kebebasan menentukan arah. Pemerintah tersebut mewarisi kontrak, utang, konsesi, serta kewajiban yang dibuat sebelumnya.

Rakyat memilih pemerintahan baru, tetapi sebagian kebijakan strategis telah terikat oleh keputusan yang tidak mereka pahami. Karena itu, setiap investasi, utang, dan konsesi harus diuji melalui beberapa pertanyaan mendasar.

Apakah hubungan tersebut memperbesar kemampuan bangsa atau justru ketergantungan? Apakah terdapat transfer ilmu dan teknologi? Siapa yang memperoleh keuntungan utama? Siapa yang menanggung risiko ekonomi, sosial, dan ekologis? Apakah negara tetap mempunyai kewenangan mengoreksi hubungan tersebut?

Pembangunan tidak boleh diukur hanya dari besarnya modal yang masuk. Pembangunan harus diukur dari bertambahnya kemampuan rakyat dan negara untuk menentukan masa depannya sendiri.

D. Data, Teknologi, dan Platform sebagai Kolonialisme Baru

Pada masa kolonialisme klasik, sumber daya yang diperebutkan terutama berupa tanah, hasil bumi, mineral, tenaga kerja, dan jalur perdagangan. Pada masa digital, data menjadi salah satu sumber daya paling penting.

Rakyat menghasilkan data setiap hari. Data tersebut berasal dari komunikasi, transaksi, lokasi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, konsumsi, perjalanan, hubungan sosial, hiburan, dan keterlibatan partisipasi.

Dalam keadaan tersebut, pemerintah berikutnya memperoleh jabatan, tetapi tidak sepenuhnya memperoleh kebebasan menentukan arah karena mewarisi kontrak, utang, konsesi, serta kewajiban yang dibuat sebelumnya.

Pihak yang menguasai data mempunyai kemampuan besar untuk memahami masyarakat. Pihak yang menguasai algoritma dapat menentukan bagaimana data tersebut diolah. Pihak yang menguasai platform dapat menentukan aturan interaksi, informasi yang terlihat, serta perilaku yang diberikan penghargaan. Karena itu, teknologi dan platform digital

bukan sekadar alat ekonomi. Keduanya merupakan struktur kekuasaan.

Kolonialisme digital dapat berlangsung ketika masyarakat suatu negara menjadi sumber data, pasar, pengguna, dan objek pengaruh, tetapi tidak mempunyai kendali terhadap infrastruktur, algoritma, dan tujuan penggunaannya.

Rakyat menghasilkan bahan mentah digital. Pihak lain mengolahnya menjadi pengetahuan, keuntungan, dan kekuasaan.

Pola tersebut menyerupai kolonialisme ekonomi lama, di mana bahan mentah diambil dari wilayah jajahan, diproses menjadi barang bernilai tinggi, kemudian dijual kembali kepada masyarakat yang menghasilkan bahan mentah tersebut. Perbedaannya, bahan mentah digital berasal dari kehidupan manusia itu sendiri.

Bahasa, wajah, suara, kebiasaan, lokasi, hubungan sosial, dan pilihan rakyat dapat menjadi bahan pengembangan teknologi. Namun rakyat tidak selalu memperoleh manfaat yang seimbang dan tidak mengetahui bagaimana data tersebut digunakan.

Invited Colonialism terjadi ketika negara membuka akses tersebut tanpa membangun perlindungan, kemampuan teknis, dan kedaulatan data.

Atas nama kemudahan, pemerintah menggunakan platform yang tidak dikuasai. Atas nama efisiensi, data publik ditempatkan dalam sistem eksternal. Atas nama inovasi, teknologi diadopsi tanpa memahami cara kerja dan risikonya.

Ketergantungan teknologi kemudian dianggap sebagai keadaan yang tidak dapat dihindari. Padahal teknologi selalu membawa nilai dan kepentingan. Desain sistem menentukan siapa yang mempunyai kendali, siapa yang dapat melihat, siapa yang dapat mengubah, dan siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi kerugian.

Kecerdasan buatan memperluas persoalan tersebut. AI dapat membantu negara meningkatkan pelayanan, penelitian, keamanan, kesehatan, dan pendidikan. Namun AI juga dapat memperbesar pengawasan, diskriminasi, manipulasi informasi, dan ketergantungan pada model yang dibangun berdasarkan bahasa serta nilai peradaban lain.

Negara yang tidak memiliki kapasitas teknis akan sulit mengaudit keputusan algoritmik. Negara yang tidak mempunyai infrastruktur akan bergantung pada penyedia luar. Negara yang tidak mempunyai data berkualitas akan menggunakan sistem yang tidak memahami masyarakatnya.

Karena itu, kedaulatan digital tidak berarti menolak teknologi luar. Kedaulatan digital berarti memiliki kemampuan memilih, menilai, mengaudit, mengubah, dan menentukan batas penggunaannya. Teknologi harus menjadi alat rakyat. Rakyat tidak boleh berubah menjadi bahan baku teknologi.

E. Krisis Kepemimpinan Domestik yang Mengundang Kekuasaan Luar

Invited Colonialism pada akhirnya tidak hanya merupakan persoalan kebijakan ekonomi atau teknologi. *Invited Colonialism* merupakan persoalan kepemimpinan.

Bangsa yang mempunyai pemimpin dengan pengetahuan, keberanian, dan orientasi nilai dapat bekerja sama dengan dunia tanpa kehilangan kendali. Sebaliknya, bangsa yang kepemimpinannya lemah mudah menganggap setiap tawaran sebagai kesempatan yang tidak boleh ditolak.

Krisis kepemimpinan muncul ketika pejabat tidak memahami sejarah, tidak mengenali struktur dunia, tidak menguasai persoalan teknologi, dan tidak mempunyai kepekaan terhadap penderitaan rakyat.

Pemimpin semacam itu dapat melihat pembangunan hanya sebagai angka investasi, pertumbuhan ekonomi, jumlah proyek, dan pengakuan internasional.

Pemimpin tidak memeriksa apakah pembangunan tersebut memperkuat atau melemahkan rakyat. Pemimpin tidak menanyakan siapa yang menguasai pengetahuan, data, dan keuntungan. Pemimpin tidak melihat bahwa konsesi jangka pendek dapat menghasilkan ketergantungan jangka panjang.

Cak Nun memberikan kritik yang keras terhadap kepemimpinan yang tidak mengalami penderitaan rakyat. Pemimpin dapat membayar mahal untuk

memperoleh jabatan, tetapi tidak memahami kehidupan manusia yang harus menanggung akibat kebijakannya.

Ketika jabatan diperoleh melalui biaya yang besar, kekuasaan dapat dipandang sebagai investasi yang harus dikembalikan. Jabatan tidak lagi dipahami sebagai amanah, melainkan sebagai jalan akumulasi.

Dalam keadaan demikian, kepentingan luar mudah memperoleh akses karena mempunyai modal, teknologi, jaringan, dan kemampuan memberikan keuntungan kepada elite.

Pintu negara dibuka bukan karena rakyat memerlukannya, tetapi karena struktur kekuasaan membutuhkan pembiayaan, dukungan, proyek, dan legitimasi keberhasilan.

Dalam bahasa Cak Nun yang keras, apabila arah ini dibiarkan, rakyat hanya akan didorong menjadi dua golongan yaitu mereka yang mempunyai akses jabatan akan tergoda menjadi perampok, sedangkan mereka yang tidak mempunyai akses kekuasaan akan dipaksa menjadi pengemis.

Pernyataan tersebut bukan klasifikasi sosiologis yang kaku. Pernyataan tersebut merupakan kritik moral terhadap sistem yang membuat jabatan menjadi jalan mengambil, sementara rakyat menjadi pihak yang terus-menerus meminta.

Mereka yang berada di dalam kekuasaan memiliki akses terhadap anggaran, izin, proyek, konsesi, informasi, dan jaringan. Kekuasaan memberi kesempatan untuk mengambil lebih banyak daripada haknya.

Sementara rakyat yang berada di luar kekuasaan dipaksa bergantung kepada bantuan, subsidi, proyek, belas kasihan, perantara, atau hubungan dengan elite.

Bantuan sosial tentu diperlukan dalam keadaan tertentu. Negara wajib melindungi rakyat yang lemah. Namun persoalan muncul ketika rakyat terus-menerus dipelihara dalam ketergantungan, sementara struktur yang menciptakan kemiskinan tidak diubah.

Rakyat diberi bantuan, tetapi tidak diberi kedaulatan. Mereka diberi proyek, tetapi tidak diberi kemampuan. Mereka diberi akses sementara, tetapi tidak diberi struktur kepemilikan.

Dalam keadaan semacam itu, elite mengambil atas nama pembangunan, sedangkan rakyat meminta agar tetap dapat bertahan hidup.

Invited Colonialism tumbuh subur dalam sistem seperti ini karena elite dan kekuatan luar mempunyai kepentingan yang dapat dipertemukan. Elite memperoleh investasi, proyek, pembiayaan, dan legitimasi. Kekuatan luar memperoleh akses, pasar, data, sumber daya, atau pengaruh.

Rakyat memperoleh janji, pekerjaan terbatas, kompensasi, atau bantuan, tetapi tidak selalu memperoleh kedaulatan.

Karena itu, melawan *Invited Colonialism* membutuhkan pembaruan kepemimpinan. Pemimpin harus mampu menolak keuntungan jangka pendek apabila merusak masa depan bangsa.

Pemimpin harus memahami bahwa tidak semua yang disebut pembangunan merupakan kemajuan, tidak semua modernisasi merupakan kemerdekaan, dan

tidak semua kerja sama membawa kedudukan yang setara.

F. Mengapa *Invited Colonialism* Lebih Berbahaya daripada Kolonialisme Lama

Kolonialisme lama sangat kejam, tetapi relatif lebih mudah dikenali. Rakyat mengetahui bahwa kekuasaan asing sedang menguasai wilayah dan mengambil hasilnya.

Invited Colonialism lebih sulit dikenali karena hadir melalui struktur legal dan bahasa pembangunan. Kontrak ditandatangani secara resmi. Undang-undang dibentuk oleh lembaga nasional. Izin diberikan oleh pejabat Indonesia. Proyek diresmikan atas nama kepentingan rakyat. Secara formal, seluruh proses dapat tampak sah.

Namun legalitas tidak selalu identik dengan keadilan. Sebuah keputusan dapat sesuai dengan prosedur, tetapi menghasilkan ketergantungan, ketimpangan, dan pemindahan kendali.

Bahaya lain terletak pada kaburnya batas antara pihak luar dan pihak dalam. Dalam kolonialisme klasik, penjajah dan yang dijajah mudah dibedakan. Dalam *Invited Colonialism*, elite domestik menjadi bagian dari struktur dominasi.

Rakyat kemudian kesulitan menentukan kepada siapa perlawanan harus diarahkan. Apakah masalahnya terdapat pada investor, pemerintah, undang-undang, konsultan, bank, korporasi, atau seluruh hubungan yang dibentuk di antara mereka?

Invited Colonialism juga lebih berbahaya karena dapat diterima sebagai pilihan rasional. Masyarakat diberitahu bahwa tidak ada alternatif selain investasi tertentu, utang tertentu, teknologi tertentu, atau model pembangunan tertentu.

Ketergantungan kemudian disajikan sebagai kebutuhan. Ketiadaan kapasitas nasional digunakan sebagai alasan untuk terus tidak membangun kapasitas nasional.

Setiap kali negara bergantung, ketergantungan tersebut dijadikan pembenaran untuk ketergantungan berikutnya.

Bahaya berikutnya adalah hilangnya kesadaran. Rakyat dapat merasa sedang menikmati kemajuan ketika menggunakan teknologi, infrastruktur, dan produk baru. Mereka tidak melihat bahwa data, keuntungan, keputusan, dan pengetahuan berpindah ke pusat kekuasaan yang tidak mereka kendalikan.

Kolonialisme lama menghasilkan kemarahan karena penderitaan tampak. *Invited Colonialism* dapat menghasilkan kenyamanan sementara yang menutupi hilangnya kedaulatan.

Namun menyatakan *Invited Colonialism* lebih berbahaya tidak berarti menyatakan kolonialisme lama lebih ringan. Kolonialisme klasik membawa kekerasan, eksploitasi, penghinaan, dan penderitaan besar.

Yang dimaksud adalah bahwa kolonialisme yang diundang lebih sulit dikenali, dibuktikan, dan dilawan karena bekerja melalui sistem yang sah, elite sendiri, serta keinginan masyarakat terhadap kemajuan.

Musuh tidak berada sepenuhnya di luar. Sebagian hidup di dalam cara berpikir, kepentingan, dan struktur bangsa sendiri.

G. Indonesia sebagai Negara Merdeka Formal yang Rentan Mengundang Kolonialisme Baru

Indonesia telah merdeka secara formal. Tidak ada pemerintahan kolonial asing yang secara langsung menguasai seluruh wilayah dan administrasi negara. Namun kemerdekaan formal tidak otomatis membuat Indonesia kebal terhadap dominasi baru.

Kerentanan muncul ketika negara belum menyelesaikan bentuknya, rakyat belum menjadi pemilik struktur kekuasaan, dekolonisasi belum tuntas, dan kepemimpinan kehilangan arah.

Indonesia memiliki sumber daya alam yang besar, pasar yang luas, penduduk yang banyak, lokasi strategis, serta data yang bernilai tinggi. Semua itu menjadikan Indonesia penting bagi kekuatan ekonomi dan dunia.

Kepentingan luar terhadap Indonesia merupakan keadaan yang wajar. Setiap negara dan korporasi mempunyai strategi untuk memperoleh pasar, bahan baku, teknologi, dan pengaruh.

Tugas negara bukan menuntut pihak luar agar tidak mempunyai kepentingan. Tugas negara adalah memastikan bahwa kepentingan tersebut tidak mengalahkan kepentingan rakyat.

Namun Indonesia rentan apabila arah pembangunan tidak dirumuskan secara mandiri. Negara dapat menerima setiap tawaran karena tidak

mempunyai prioritas sendiri. Proyek ditentukan oleh ketersediaan pembiayaan, bukan oleh kebutuhan manusia.

Indonesia juga rentan apabila sistem kekuasaan membutuhkan biaya sangat besar. Ketergantungan elite terhadap modal dapat memengaruhi kebijakan setelah kekuasaan diperoleh.

Kerentanan berikutnya terdapat pada kelemahan ilmu dan teknologi. Negara yang tidak memiliki kemampuan teknis akan sulit bernegosiasi secara setara. Negara tersebut bergantung kepada konsultan untuk memahami kontrak, kepada vendor untuk memahami sistem, dan kepada pihak luar untuk menjalankan infrastruktur strategis.

Dalam keadaan demikian, Indonesia mempunyai pemerintahan, tetapi tidak sepenuhnya mempunyai pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengendalikan keputusan.

Indonesia juga rentan ketika rakyat dipisahkan dari proses pengambilan keputusan. Kebijakan strategis disusun sebagai urusan elite, sedangkan rakyat hanya menerima penjelasan setelah keputusan dibuat.

Ketiadaan partisipasi membuat elite lebih mudah membuka pintu karena tidak ada struktur hidup yang memungkinkan rakyat mengoreksi mereka.

Karena itu, *Invited Colonialism* bukan sekadar persoalan hubungan Indonesia dengan negara atau korporasi asing. Konsep tersebut merupakan akibat dari bentuk negara yang belum selesai.

Jika rakyat benar-benar menjadi pemilik, setiap kontrak strategis harus dapat dipertanggungjawabkan

kepada mereka. Jika negara mempunyai arah, investasi harus mengikuti kebutuhan nasional. Jika kepemimpinan mempunyai nilai, kepentingan jangka pendek tidak boleh mengorbankan generasi mendatang.

Dengan demikian, penutupan pintu *Invited Colonialism* tidak dilakukan dengan isolasi, melainkan dengan memperkuat manusia, ilmu, konstitusi, teknologi, kepemimpinan, dan kedaulatan rakyat.

H. Penutup Bab

Kolonialisme lama datang melalui pemaksaan. Kolonialisme baru dapat masuk melalui undangan. Kolonialisme baru memperoleh akses melalui regulasi, investasi, utang, konsesi, kontrak, teknologi, data, platform digital, lembaga keuangan, dan konsultan. Namun seluruh instrumen tersebut tidak akan menjadi jalan dominasi tanpa adanya pintu yang dibuka dari dalam.

Karena itu, *Invited Colonialism* bukan hanya cerita tentang kekuatan asing. Konsep tersebut adalah cerita tentang krisis kepemimpinan domestik.

Ketika elite tidak memahami penderitaan rakyat, jabatan berubah menjadi jalan akumulasi. Ketika negara tidak mempunyai arah, setiap tawaran disebut pembangunan. Ketika ilmu dan teknologi tidak dikuasai, ketergantungan dianggap sebagai kenyataan yang tidak dapat diubah.

Dalam bahasa moral Cak Nun, sistem semacam itu dapat mendorong manusia yang mempunyai akses kekuasaan untuk menjadi perampok, sementara rakyat

yang tidak mempunyai akses dipaksa menjadi pengemis.

Metafora tersebut tidak membagi masyarakat secara kaku menjadi dua golongan. Metafora tersebut mengingatkan bahwa sistem yang rusak dapat mengubah jabatan menjadi kesempatan mengambil dan rakyat menjadi pihak yang terus meminta.

Rakyat tidak cukup diberi bantuan. Mereka harus diberi kedaulatan. Rakyat tidak cukup dijadikan tenaga kerja. Mereka harus memperoleh kepemilikan, ilmu, dan nilai tambah.

Rakyat tidak cukup dianggap sebagai pengguna teknologi. Mereka harus mempunyai hak atas data, pengetahuan, dan masa depan digitalnya.

Investasi, utang, konsesi, dan teknologi tidak harus ditolak. Namun semuanya harus ditempatkan di bawah kepentingan rakyat dan arah peradaban Indonesia.

Kedaulatan bukan kemampuan menutup diri dari dunia. Kedaulatan adalah kemampuan bekerja sama tanpa kehilangan kendali, menerima ilmu tanpa kehilangan arah, menggunakan modal tanpa menyerahkan masa depan, serta memanfaatkan teknologi tanpa menjadikan rakyat sebagai bahan bakunya.

Indonesia rentan terhadap *Invited Colonialism* karena negara formalnya belum sepenuhnya menjadi negara rakyat. Pintu kekuasaan masih lebih mudah diakses elite, pemodal, dan jaringan kepentingan daripada rakyat sebagai pemilik kedaulatan.

Karena itu, mengatasi *Invited Colonialism* tidak cukup dilakukan melalui nasionalisme, pembatasan investasi, atau perubahan kontrak. Yang harus diubah adalah arsitektur yang memungkinkan kepentingan terbatas berbicara atas nama seluruh bangsa.

Indonesia membutuhkan kepemimpinan peradaban yang mampu membedakan antara pembangunan dan ketergantungan, antara kerja sama dan dominasi, antara modernisasi dan penyerahan kedaulatan.

Pemimpin semacam itu hanya dapat lahir dari manusia yang dibentuk oleh tata nilai. Dalam tata nilai Islam, jabatan adalah amanah, bukan investasi. Kekayaan adalah titipan, bukan alat dominasi. Ilmu adalah tanggung jawab, bukan pembenaran kekuasaan. Rakyat adalah pihak yang harus diasuh, bukan pasar, objek kebijakan, atau sumber legitimasi.

Maka jalan keluar dari *Invited Colonialism* tidak dimulai dari kebencian kepada pihak luar. Jalan keluar tersebut dimulai dari pembenahan ke dalam, yaitu membangun manusia, melahirkan kepemimpinan yang amanah, mengembalikan rakyat sebagai pemilik negara, menguasai ilmu dan teknologi, serta memastikan setiap hubungan dengan dunia menghasilkan keadilan dan kemaslahatan.

Kolonialisme yang diundang hanya dapat dihentikan oleh bangsa yang tidak lagi bersedia membuka pintu kedaulatannya untuk ditukar dengan keuntungan jangka pendek.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

Bab VI
Dari Jaringan Dunia Awal ke Kolonialisme Maritim

A. Nusantara dalam Jaringan Samudra Hindia

Nusantara tidak mulai berhubungan dengan dunia ketika bangsa-bangsa Eropa tiba. Jauh sebelum Portugis, Spanyol, dan Belanda memasuki kepulauan ini, masyarakat Nusantara telah hidup di dalam jaringan perdagangan, agama, pengetahuan, dan kebudayaan yang menghubungkan berbagai kawasan dunia.

Laut bukan batas yang mengasingkan pulau-pulau Nusantara. Laut justru menjadi jalan yang mempertemukan mereka dengan masyarakat lain.

Jalur perdagangan Samudra Hindia menghubungkan Afrika Timur, Semenanjung Arab, Persia, India, Asia Tenggara, dan China. Jalur tersebut tidak berbentuk satu garis perjalanan tunggal. Jalur tersebut terdiri atas pelabuhan, pusat perdagangan, kerajaan maritim, musim angin, komunitas pedagang, kapal, bahasa perantara, dan hubungan sosial yang terbentuk selama berabad-abad.

Melalui jalur tersebut, barang bergerak dari satu wilayah ke wilayah lain. Rempah-rempah, kapur barus, kayu aromatik, hasil hutan, emas, tekstil, keramik, logam, dan berbagai komoditas diperdagangkan melintasi lautan. Namun yang berpindah tidak hanya barang.

Bersama perdagangan bergerak pula agama, gagasan, bahasa, teknologi pelayaran, pengetahuan tentang bintang dan angin, bentuk seni, sastra, hukum dagang, sistem pembayaran, tata kota pelabuhan, dan cara manusia memahami dunia.

Jaringan laut yang menghubungkan Asia Timur dengan Timur Tengah melalui India dan Asia Tenggara telah menjadi ruang pertukaran kebudayaan dan agama dalam waktu yang panjang. UNESCO menggambarkan jalur-jalur maritim sebagai bagian dari jaringan yang bukan hanya memperdagangkan barang, tetapi juga menyebarkan pengetahuan, keyakinan, bahasa, dan kebudayaan antarmasyarakat.

Karena itu, Nusantara pra-Eropa tidak dapat digambarkan sebagai wilayah tertutup yang menunggu ditemukan dunia. Masyarakatnya telah mengetahui perdagangan jarak jauh, membangun pelabuhan, menerima pendatang, mengembangkan kerajaan maritim, dan menempatkan diri dalam persilangan kepentingan internasional.

Istilah "ditemukan" yang sering digunakan dalam sejarah ekspansi Eropa harus diperiksa secara kritis. Eropa mungkin baru memperoleh pengetahuan yang lebih sistematis mengenai wilayah Nusantara pada masa tertentu, tetapi Nusantara telah lebih dahulu hadir sebagai bagian dari dunia yang saling terhubung.

Para pedagang Arab, Persia, India, China, dan masyarakat Asia Tenggara telah bergerak melalui jaringan laut tersebut sebelum armada Eropa mampu menguasai jalur samudra secara langsung.

Dengan demikian, hubungan Nusantara dengan dunia pada fase awal tidak tepat disebut sebagai kolonialisme. Hubungan tersebut terutama berbentuk perdagangan, migrasi, perkawinan, penyebaran agama, pembentukan komunitas, dan pertukaran pengetahuan.

Namun hubungan yang tidak bersifat kolonial bukan berarti sepenuhnya bebas dari kepentingan dan kekuasaan.

Setiap jaringan perdagangan mempunyai pusat dan pinggiran. Setiap pelabuhan mempunyai kelompok yang lebih berpengaruh. Setiap komunitas membawa nilai, kepentingan, serta cara pandangnya sendiri. Jaringan dunia awal dapat memperkaya Nusantara, tetapi juga dapat membentuk hierarki sosial, otoritas budaya, dan ketergantungan tertentu. Karena itu, sejarah keterhubungan Nusantara harus dibaca tanpa dua kecenderungan ekstrem.

Pertama, kecenderungan menganggap seluruh pengaruh luar sebagai penjajahan. Cara baca tersebut mengabaikan kenyataan bahwa masyarakat Nusantara aktif memilih, mengolah, dan mengubah berbagai pengaruh yang datang.

Kedua, kecenderungan meromantisasi seluruh jaringan pra-Eropa sebagai hubungan yang sepenuhnya setara dan damai. Perdagangan juga membawa persaingan, monopoli, konflik, pembentukan elite, serta perebutan akses terhadap pelabuhan dan komoditas.

Nusantara sejak awal bukan objek pasif. Nusantara merupakan pelaku dalam jaringan dunia, tetapi sekaligus medan tempat berbagai kepentingan bertemu.

B. Arab, Persia, India, dan China sebagai Jaringan Dagang, Agama, dan Budaya

Hubungan antara Nusantara dan dunia Arab berkembang melalui perdagangan laut yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan Timur Tengah dengan India, Asia Tenggara, dan China.

Pedagang Arab tidak selalu berlayar langsung dari Jazirah Arab menuju setiap wilayah Nusantara. Banyak hubungan berlangsung melalui jaringan berantai yang melibatkan pelabuhan India, Sri Lanka, Selat Malaka, Sumatra, Jawa, dan kawasan lain.

Dalam jaringan tersebut, identitas pedagang juga tidak selalu mudah dipisahkan secara kaku. Seorang pedagang dapat berasal dari wilayah Persia tetapi menggunakan bahasa Arab. Komunitas Muslim dari India dapat membawa tradisi yang telah dipengaruhi Arab dan Persia. Hubungan perdagangan, agama, dan kebudayaan saling bertumpang tindih.

Kajian sejarah Islam Asia Tenggara menunjukkan bahwa penyebaran Islam berlangsung melalui jalur maritim yang menghubungkan Timur Tengah, India selatan, Asia Tenggara, dan China. Jalur tersebut memungkinkan pengaruh Islam mencapai kawasan ini melalui berbagai arah dan komunitas, bukan dari satu sumber tunggal.

Jaringan Arab membawa kontribusi besar dalam sejarah Nusantara. Melalui jaringan tersebut berkembang perdagangan, bahasa keagamaan, pendidikan Islam, perjalanan haji, sanad keilmuan,

kitab, dan hubungan dengan pusat-pusat keilmuan dunia Islam.

Dalam perkembangan berikutnya, hubungan dengan Hijaz, Yaman, dan berbagai wilayah Arab ikut membentuk genealogi ulama, lembaga pendidikan, otoritas agama, serta identitas sosial sebagian masyarakat Nusantara. Namun naskah ini tidak menyamakan jaringan Arab dengan Islam sebagai wahyu.

Arab adalah aktor sejarah. Islam adalah sumber nilai. Pembedaan tersebut penting karena tindakan pedagang, elite, kerajaan, negara, atau jaringan Arab tertentu tidak otomatis mewakili ajaran Islam. Sebaliknya, kontribusi besar masyarakat Arab dalam sejarah Islam Nusantara tidak boleh dihapus hanya karena setiap aktor sejarah juga mempunyai kepentingan.

Hubungan dengan Persia juga penting, meskipun jejaknya sering hadir melalui jalur yang lebih kompleks. Pengaruh Persia dapat dibaca dalam sastra, bahasa, tradisi istana, tasawuf, konsep keagamaan, dan jaringan intelektual yang bergerak melalui India dan pusat-pusat perdagangan Muslim.

Persia bukan hanya wilayah geografis. Dalam sejarah dunia Islam, Persia merupakan ruang produksi ilmu, filsafat, sastra, administrasi, seni, dan pemikiran keagamaan. Sebagian unsur tersebut mencapai Nusantara secara langsung, sedangkan sebagian lainnya datang setelah berinteraksi dengan kebudayaan India atau dunia Arab.

Karena itu, tidak seluruh pengaruh yang disebut Arab sebenarnya sepenuhnya berasal dari masyarakat Arab. Dunia Islam telah lama menjadi ruang percampuran Arab, Persia, Turki, India, Afrika, Asia Tengah, dan berbagai masyarakat lainnya.

India mempunyai kedudukan yang sangat besar dalam jaringan Nusantara. Hubungan India–Nusantara telah terbentuk sebelum kedatangan Islam dan meninggalkan jejak dalam agama, kerajaan, bahasa, sastra, seni, arsitektur, hukum, dan konsep kekuasaan.

Ketika jaringan Islam berkembang, pelabuhan-pelabuhan India kembali memainkan peran penting sebagai penghubung perdagangan, penyebaran agama, tekstil, dan perpindahan manusia. Pedagang dan ulama dari Gujarat, Coromandel, Bengal, dan wilayah lain berinteraksi dengan masyarakat Sumatra, Jawa, dan kepulauan lainnya.

Hubungan dengan India memperlihatkan bahwa pengaruh dunia tidak selalu datang dalam bentuk murni. Islam yang sampai ke Nusantara telah berinteraksi dengan tradisi Persia, India, dan masyarakat pesisir. Kebudayaan yang tumbuh kemudian bukan salinan dari satu pusat, melainkan hasil pengolahan oleh manusia Nusantara.

China juga mempunyai sejarah hubungan yang panjang dengan Asia Tenggara. Perdagangan maritim menghubungkan pelabuhan China dengan wilayah Asia Tenggara dan Samudra Hindia. Quanzhou, misalnya, berkembang sebagai pusat penting jaringan perdagangan laut Asia Timur dan Asia Tenggara pada abad ke-10 hingga ke-14.

Dari China datang keramik, tekstil, logam, teknologi, pedagang, dan komunitas perantauan. Dari Nusantara bergerak rempah, hasil hutan, bahan aromatik, dan komoditas lain yang dibutuhkan pasar internasional.

Hubungan tersebut membentuk komunitas-komunitas China di berbagai kota pelabuhan. Melalui perkawinan, perdagangan, dan kehidupan sosial, sebagian komunitas tersebut menjadi bagian dari masyarakat lokal.

Seperti jaringan Arab, Persia, dan India, jaringan China juga membawa manfaat sekaligus kepentingan. Jaringan tersebut membuka perdagangan dan pertukaran teknologi, tetapi juga dapat membentuk persaingan ekonomi, konsentrasi akses, dan hubungan khusus dengan elite penguasa. Karena itu, seluruh jaringan dunia awal harus dibaca dengan ukuran yang sama.

Pertanyaannya bukan hanya apa yang dibawa oleh suatu bangsa, tetapi bagaimana masyarakat Nusantara menerima, menolak, menyesuaikan, dan mengubahnya.

Pengaruh luar tidak pernah masuk ke ruang kosong. Pengaruh tersebut bertemu dengan tata nilai, kepentingan, konflik, dan kecerdasan masyarakat lokal.

Nusantara bukan sekadar tempat persinggahan orang asing. Nusantara merupakan ruang penciptaan kebudayaan baru.

C. Abad ke-13 dan ke-14: Nusantara dalam Catatan Musafir Eropa

Sebelum kekuatan Eropa mampu memasuki dan menguasai jalur perdagangan Asia secara langsung, pengetahuan Eropa tentang wilayah Nusantara tumbuh melalui cerita pedagang, musafir, peta, dan naskah perjalanan.

Pada abad ke-13, Marco Polo melakukan perjalanan pulang dari Asia Timur dan singgah di wilayah Sumatra. Catatan yang dikaitkan dengannya menjadi salah satu sumber yang memperkenalkan beberapa bagian kepulauan Asia Tenggara kepada pembaca Eropa.

Catatan perjalanan semacam itu tidak dapat diperlakukan sebagai gambaran yang sepenuhnya objektif. Musafir melihat masyarakat lain melalui bahasa, kepentingan, pengetahuan, dan prasangka zamannya. Nama tempat dapat berubah dalam penyalinan. Cerita yang didengar dapat bercampur dengan pengamatan langsung. Perbedaan agama dan kebudayaan dapat menghasilkan penilaian yang tidak tepat.

Namun catatan tersebut tetap penting karena menunjukkan bahwa Nusantara telah masuk ke dalam imajinasi geografis Eropa sebelum kedatangan kekuatan kolonial secara langsung.

Pada abad ke-14, Ibn Battuta—seorang musafir Muslim dari Maroko—mengunjungi Samudra Pasai dalam perjalanannya menuju China. Meskipun ia bukan musafir Eropa, catatannya sangat penting untuk

memahami bahwa Nusantara pada masa itu telah terhubung dengan dunia Islam yang luas.

Kehadiran musafir dari berbagai wilayah menunjukkan bahwa pelabuhan-pelabuhan Nusantara bukan wilayah terpencil. Mereka merupakan bagian dari jalur perjalanan internasional, pusat perdagangan, dan ruang pertemuan orang dengan latar belakang berbeda.

Catatan musafir membantu membentuk pengetahuan dunia mengenai kekayaan, letak, agama, kerajaan, dan komoditas Nusantara. Namun pengetahuan bukan kegiatan yang sepenuhnya netral.

Pengetahuan geografis dapat membuka perdagangan. Pengetahuan dapat memperluas hubungan. Tetapi ia juga dapat menjadi dasar ekspansi.

Ketika wilayah, pelabuhan, komoditas, arah angin, dan struktur kekuasaan semakin diketahui, kekuatan yang mempunyai kemampuan militer dapat menggunakan pengetahuan tersebut untuk mengendalikan jalur perdagangan. Di sinilah terdapat hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan.

Sebelum penjajahan berlangsung, wilayah yang akan dikuasai harus lebih dahulu dipetakan, diceritakan, diklasifikasikan, dan dimasukkan ke dalam sistem pengetahuan pihak yang hendak datang.

Musafir tidak otomatis menjadi penjajah. Catatan perjalanan juga bukan dengan sendirinya dokumen kolonial. Namun akumulasi pengetahuan mengenai Asia membantu Eropa membangun imajinasi tentang Timur sebagai ruang perdagangan, kekayaan, penyebaran agama, dan ekspansi.

Pada tahap ini, Nusantara masih terutama dipahami sebagai bagian dari jaringan perdagangan Asia. Kekuatan Eropa belum menguasai laut dan pelabuhan-pelabuhan utama.

Perubahan besar terjadi ketika pengetahuan tersebut bertemu dengan kemampuan navigasi, persenjataan, kapal samudra, modal kerajaan, dan ambisi menguasai perdagangan.

D. Portugis dan Pintu Masuk Kolonialisme Maritim

Kedatangan Portugis menandai perubahan penting dalam hubungan Nusantara dengan dunia Eropa. Portugis tidak datang ke Asia hanya untuk ikut berdagang dalam aturan yang telah dibangun pedagang Asia. Mereka datang dengan tujuan mencari jalur laut langsung, mengurangi ketergantungan pada jaringan perantara, menyebarkan agama, dan memperoleh kendali atas perdagangan bernilai tinggi.

Setelah armada Portugis mencapai India, kekuatan tersebut mulai membangun jaringan benteng, pelabuhan, dan pangkalan militer. Strateginya bukan selalu menguasai seluruh wilayah daratan. Penguasaan titik-titik maritim yang strategis dipandang cukup untuk mengendalikan perdagangan.

Penaklukan Malaka oleh Portugis pada 1511 merupakan titik balik yang sangat penting. Malaka bukan sekadar kota. Malaka merupakan salah satu simpul utama yang menghubungkan Samudra Hindia, Laut China Selatan, kepulauan rempah, India, Timur Tengah, dan China.

Dengan menguasai Malaka, Portugis berusaha memperoleh kendali atas salah satu jalur perdagangan terpenting di Asia Tenggara.

Namun penguasaan Malaka tidak berarti Portugis langsung menguasai seluruh jaringan Asia. Pedagang Muslim, India, China, Jawa, Melayu, dan komunitas lain dapat mengalihkan jalur perdagangan ke pelabuhan berbeda. Jaringan perdagangan Asia mempunyai kemampuan beradaptasi dan tidak mudah dikendalikan oleh satu kekuatan.

Portugis kemudian bergerak menuju Maluku, wilayah yang menjadi sumber utama cengkih dan bagian penting perdagangan rempah dunia. Di sinilah perdagangan mulai berubah menjadi kolonialisme maritim.

Pedagang biasa harus menyesuaikan diri dengan aturan pelabuhan dan kekuatan penguasa setempat. Portugis membawa kapal bersenjata, benteng, perjanjian, dan kemampuan menggunakan kekerasan untuk memaksakan kepentingannya.

Perdagangan tidak lagi hanya dilakukan melalui tawar-menawar antarpedagang. Pedagang juga ditopang oleh meriam, armada, dan kekuasaan negara.

Namun Portugis tidak selalu bertindak hanya melalui penaklukan. Mereka juga membangun persekutuan dengan kerajaan lokal, memanfaatkan konflik yang telah ada, dan menawarkan bantuan militer kepada satu pihak untuk menghadapi pihak lain. Pola tersebut kelak menjadi salah satu ciri penting kolonialisme di Nusantara.

Kekuatan luar jarang mampu menguasai wilayah yang luas hanya dengan kekuatannya sendiri. Kekuatan tersebut memerlukan informasi, persekutuan, penerjemah, pemasok, elite lokal, dan pihak yang bersedia membuka pintu. Karena itu, kolonialisme maritim sejak awal mempertemukan paksaan dari luar dan konflik dari dalam.

Portugis tidak menciptakan seluruh persaingan di Nusantara, tetapi mampu memanfaatkan persaingan tersebut untuk membangun pengaruh.

Kehadiran Portugis juga membawa misi keagamaan Katolik. Hubungan antara perdagangan, kerajaan, dan penyebaran agama tidak dapat dipisahkan sepenuhnya.

Namun sebagaimana telah ditegaskan mengenai jaringan Islam, agama harus dibedakan dari perilaku negara dan kekuatan sejarah.

Kekerasan, monopoli, dan ambisi kekuasaan Portugis tidak dapat dengan sederhana diperlakukan sebagai keseluruhan ajaran Kristen. Tindakan tersebut merupakan tindakan pejabat dan kolonial yang menggunakan agama sebagai salah satu unsur legitimasi dan identitas.

E. Spanyol dan Perebutan Maluku

Spanyol memasuki Asia melalui jalur yang berbeda dari Portugis. Jika Portugis bergerak ke timur melalui Afrika dan Samudra Hindia, Spanyol bergerak ke barat melintasi Samudra Atlantik dan kemudian Pasifik. Persaingan dua kerajaan Iberia tersebut tidak

hanya berlangsung di Eropa dan Amerika, tetapi juga mencapai kepulauan Asia.

Setelah ekspedisi Magellan dan pelayaran lanjutan, Spanyol memperoleh hubungan dengan kawasan Maluku. Persaingan kemudian terhubung dengan konflik antara kerajaan-kerajaan lokal, terutama Ternate dan Tidore.

Portugis membangun hubungan dengan satu kekuatan, sedangkan Spanyol mendekati kekuatan lain. Konflik lokal memperoleh dimensi global, sementara persaingan global masuk ke dalam kekuasaan lokal.

Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa kolonialisme tidak selalu datang sebagai kekuatan tunggal yang berhadapan dengan seluruh masyarakat setempat.

Kekuatan asing dapat memasuki masyarakat melalui persekutuan. Kekuatan tersebut menawarkan senjata, perdagangan, perlindungan, atau dukungan kekuasaan kepada satu pihak. Sebagai imbalannya, kekuatan tersebut memperoleh akses, benteng, monopoli, dan pengaruh.

Hubungan semacam ini tidak boleh dibaca secara sederhana sebagai pengkhianatan elite lokal. Kerajaan-kerajaan Nusantara mempunyai kepentingan, ancaman, serta perhitungannya sendiri. Mereka berusaha menggunakan kekuatan asing untuk menghadapi lawan.

Namun ketika persekutuan dibangun dengan pihak yang mempunyai teknologi militer, jaringan global, dan ambisi monopoli yang lebih besar, keseimbangan kekuasaan dapat berubah.

Pihak lokal mungkin bermaksud menggunakan kekuatan asing untuk kepentingan jangka pendek. Namun kekuatan asing juga menggunakan konflik lokal untuk membangun kedudukan jangka panjang.

Pengalaman tersebut menjadi bentuk awal dari pola yang kemudian dalam naskah ini disebut *Invited Colonialism*.

Kolonialisme tidak selalu memasuki pintu yang dirusak dengan kekerasan. Kadang-kadang pintu dibuka melalui perjanjian, permintaan bantuan, dan persekutuan.

Tentu konsep modern tersebut tidak dapat diterapkan secara mekanis kepada setiap peristiwa abad ke-16. Konteks kerajaan, hukum, dan kedaulatan pada masa itu berbeda dari negara modern.

Namun pola dasarnya dapat dikenali, di mana kekuatan luar memperoleh pengaruh melalui kebutuhan dan konflik elite domestik.

Persaingan Portugis dan Spanyol di Maluku juga menunjukkan bahwa rempah-rempah telah mengubah wilayah kepulauan menjadi objek perebutan dunia.

Komoditas yang bagi masyarakat setempat merupakan bagian dari ekonomi dan kehidupan sehari-hari berubah menjadi sumber keuntungan besar dalam pasar global.

Jarak antara tempat produksi dan pasar konsumsi menghasilkan nilai yang sangat tinggi. Kekuatan yang mengendalikan sumber dan jalur distribusi dapat memperoleh keuntungan besar. Karena itu, penguasaan rempah bukan sekadar urusan

perdagangan. Penguasaan rempah menjadi persoalan geopolitik.

F. VOC sebagai Korporasi Kolonial

Pada awal abad ke-17, Belanda membentuk Vereenigde Oostindische Compagnie atau VOC. Perusahaan ini didirikan pada 1602 melalui penggabungan beberapa perusahaan dagang Belanda.

Arsip VOC yang diakui UNESCO mencatat perusahaan tersebut sebagai organisasi yang berdiri pada tahun itu dan kemudian membangun jaringan perdagangan serta administrasi yang sangat luas.

VOC bukan perusahaan biasa. VOC dibentuk untuk mengatasi persaingan antarpedagang Belanda, mengumpulkan modal, memperkuat posisi menghadapi Portugis dan kekuatan Eropa lain, serta menguasai perdagangan Asia.

Namun VOC memperoleh kewenangan yang melampaui kegiatan dagang biasa. VOC dapat membuat perjanjian, membangun benteng, memelihara tentara, menjalankan peperangan, mengangkat pejabat, dan melakukan fungsi-fungsi yang pada umumnya dimiliki negara. Dengan demikian, VOC adalah korporasi sekaligus kekuatan penguasa dan militer.

Keberadaan VOC memperlihatkan salah satu bentuk awal pertemuan antara modal dan kedaulatan. Perusahaan tidak hanya mengikuti kebijakan negara. Perusahaan diberi kemampuan menjalankan kekuasaan atas nama kepentingan dagang dan negara Belanda.

Perdagangan rempah menjadi dasar bagi pembentukan administrasi, kekerasan, monopoli, dan penguasaan wilayah.

VOC berusaha mengendalikan produksi dan harga rempah. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan membangun kontrak monopoli, menghancurkan tanaman yang dianggap berlebihan, menghukum pelanggaran, menggunakan armada bersenjata, dan menundukkan pusat-pusat kekuasaan lokal. Namun VOC juga tidak menguasai Nusantara sekaligus.

Kekuasaannya berkembang secara bertahap melalui benteng, pelabuhan, perjanjian, perang, utang, konflik suksesi, dan keterlibatan dalam kerajaan lokal. Sekali lagi, kekuatan luar menggunakan struktur dalam negeri.

Ketika terjadi perselisihan takhta, konflik antarkerajaan, atau kebutuhan pembiayaan, VOC dapat menawarkan bantuan. Bantuan tersebut kemudian dibayar melalui wilayah, monopoli, hak perdagangan, atau ketergantungan kekuasaan.

Dari sini terlihat bahwa kekuasaan kolonial tidak hanya dibangun oleh senjata. Kekuasaan kolonial juga dibangun oleh kontrak.

Senjata memaksa pihak yang melawan. Kontrak mengikat pihak yang bekerja sama. VOC menunjukkan bahwa perusahaan dapat menjadi alat kolonialisme ketika kepentingan modal didukung kewenangan, hukum, dan militer. Pengalaman ini mempunyai relevansi besar bagi dunia modern.

Korporasi masa kini memang tidak identik dengan VOC. Sebagian besar tidak memiliki tentara sendiri atau hak resmi untuk berperang. Namun korporasi global tetap dapat mempunyai kekuatan besar melalui modal, teknologi, data, pasar, kekayaan intelektual, dan kemampuan memengaruhi regulasi.

Karena itu, sejarah VOC bukan hanya sejarah masa lalu. Sejarah tersebut menjadi peringatan bahwa kekuasaan ekonomi dapat berubah menjadi kekuasaan apabila negara kehilangan kendali dan elite domestik membuka ruang tanpa perlindungan yang memadai.

G. Dari Perdagangan Rempah ke Penguasaan Wilayah

Perdagangan pada awalnya tidak harus menghasilkan penjajahan. Pedagang dapat datang, membeli, menjual, tinggal sementara, membentuk komunitas, dan tunduk kepada aturan kekuasaan setempat. Hubungan semacam itu telah berlangsung lama di Nusantara.

Perubahan terjadi ketika pedagang berusaha menentukan siapa yang boleh menjual, kepada siapa barang boleh diberikan, berapa jumlah yang boleh diproduksi, dan harga apa yang harus diterima.

Ketika perdagangan didukung kekuatan militer, hubungan ekonomi berubah menjadi hubungan kekuasaan.

Monopoli membutuhkan pengawasan. Pengawasan membutuhkan aparat. Aparat membutuhkan pangkalan. Pangkalan membutuhkan wilayah. Wilayah membutuhkan administrasi. Dari

sinilah perdagangan rempah secara bertahap bergerak menuju penguasaan wilayah.

Kekuatan Eropa tidak datang sejak awal dengan kemampuan menguasai seluruh Nusantara. Mereka membangun kekuasaan dari titik-titik strategis, lalu memperluas pengaruhnya melalui hubungan dagang, perjanjian, konflik, dan administrasi.

Pelabuhan menjadi benteng. Gudang menjadi pusat kekuasaan. Kontrak menjadi sumber hak penguasa. Utang menjadi alat ketergantungan. Perusahaan dagang berubah menjadi pemerintahan. Namun transformasi tersebut tidak berlangsung tanpa perlawanan.

Kerajaan, masyarakat, pedagang, ulama, dan berbagai kelompok di Nusantara melakukan penolakan, perundingan, pemindahan jalur perdagangan, dan perang.

Kenyataan bahwa kolonialisme akhirnya berkembang bukan berarti masyarakat lokal menerimanya secara pasif. Kolonialisme memerlukan kekerasan yang panjang karena terus berhadapan dengan perlawanan.

Meskipun demikian, kekuatan kolonial mempunyai keunggulan tertentu, seperti jaringan modal internasional, kapal bersenjata, organisasi perusahaan, kemampuan membuat perjanjian, dan pengalaman menghubungkan perdagangan dengan peperangan.

Mereka juga mempunyai kemampuan mengubah konflik lokal menjadi kesempatan ekspansi. Dari fase inilah Nusantara berubah semakin jelas dari

ruang perdagangan dunia menjadi ruang perebutan global. Rempah tidak lagi hanya menjadi komoditas. Nusantara menjadi dasar pembentukan kekuasaan. Laut tidak lagi hanya menjadi jalan pertukaran. Nusantara menjadi medan perang dan pengawasan.

Kerajaan lokal tidak lagi hanya berhubungan dengan pedagang. Mereka berhadapan dengan korporasi yang mempunyai kewenangan negara. Perubahan tersebut menjadi fondasi bagi kolonialisme yang kemudian berkembang lebih luas di bawah Hindia Belanda.

H. Penutup Bab

Sebelum kolonialisme Eropa hadir secara langsung, Nusantara telah menjadi bagian dari dunia. Arab, Persia, India, China, Afrika Timur, dan berbagai masyarakat Asia Tenggara terhubung melalui jalur Samudra Hindia dan Laut China Selatan.

Jaringan tersebut membawa barang, agama, bahasa, ilmu, teknologi, kebudayaan, sanad keilmuan, dan pertukaran sosial. Karena itu, sejarah Nusantara tidak boleh dimulai dari kedatangan Eropa.

Nusantara bukan wilayah kosong yang ditemukan. Nusantara merupakan ruang peradaban yang telah mempunyai kerajaan, pelabuhan, perdagangan, pengetahuan, agama, serta hubungan internasionalnya sendiri. Namun jaringan dunia awal juga tidak boleh dibaca secara romantis.

Setiap jaringan membawa manfaat dan kepentingan. Perdagangan dapat membangun kemakmuran, tetapi juga menciptakan hierarki dan

persaingan. Agama dapat membawa nilai dan ilmu, tetapi manusia yang membawanya tetap dapat mempunyai kepentingan sosial serta kekuasaan.

Arab, Persia, India, dan China harus dibaca sebagai aktor sejarah. Kontribusinya diakui, kepentingannya diperiksa, dan pengaruhnya dinilai secara proporsional.

Pada abad ke-13 dan ke-14, catatan para musafir menunjukkan bahwa Nusantara semakin masuk ke dalam pengetahuan dunia. Pengetahuan tersebut membuka hubungan, tetapi kemudian juga menjadi bagian dari persiapan ekspansi.

Pada abad ke-16, Portugis memasuki jalur perdagangan Asia dengan kekuatan maritim dan militer. Penaklukan Malaka mengubah keseimbangan kawasan. Spanyol kemudian ikut memasuki perebutan Maluku dan menghubungkan konflik lokal dengan persaingan global.

Kehadiran Portugis dan Spanyol menunjukkan perubahan penting, yaitu perdagangan mulai ditopang oleh benteng, meriam, persekutuan, dan ambisi monopoli.

VOC membawa perubahan tersebut ke tingkat yang lebih terorganisasi. VOC merupakan perusahaan dagang yang diberi kewenangan dan militer. Melalui kontrak, perang, monopoli, utang, dan campur tangan dalam konflik lokal, VOC mengubah perdagangan menjadi kekuasaan kolonial.

Dari sinilah jalannya terlihat jelas:



Namun jalur tersebut tidak boleh dipahami sebagai proses yang sepenuhnya dipaksakan dari luar. Kekuatan Eropa juga memperoleh ruang melalui persaingan, kebutuhan, dan persekutuan dengan elite lokal.

Sejarah kolonialisme maritim karena itu mempertemukan dua unsur yaitu ambisi kekuatan global dan kerentanan struktur domestik.

Pelajaran tersebut tetap relevan hingga masa kini. Dunia selalu membawa peluang dan kepentingan. Keterhubungan tidak harus menghasilkan kolonialisme. Perdagangan, ilmu, teknologi, dan kerja sama dapat memperkuat bangsa.

Namun ketika suatu bangsa kehilangan arah, tidak menguasai pengetahuan, membiarkan elite membuka pintu tanpa pertanggungjawaban, dan menyerahkan kendali atas sumber daya strategis, keterhubungan dapat berubah menjadi dominasi.

Nusantara pernah menjadi ruang perdagangan dunia sebelum menjadi wilayah kolonial. Perubahan tersebut tidak terjadi dalam satu hari. Perubahan

tersebut berlangsung ketika perdagangan berubah menjadi monopoli, monopoli dilindungi oleh kekerasan, dan kekerasan menghasilkan penguasaan pemerintahan.

Karena itu, memahami kolonialisme Indonesia harus dimulai sebelum Hindia Belanda. Pemahaman tersebut harus dimulai dari perubahan dunia maritim yang membawa Nusantara dari ruang perjumpaan peradaban menuju ruang perebutan kekuasaan global.

SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

Bab VII
Hindia Belanda dan Warisan Institusi Kolonial

A. Dari VOC Menuju Hindia Belanda

Kekuasaan Belanda di Nusantara tidak bermula sebagai pemerintahan kolonial yang menguasai seluruh wilayah Indonesia dalam satu waktu. Kekuasaan tersebut tumbuh secara bertahap melalui perdagangan, monopoli, benteng, perang, perjanjian, utang, intervensi dalam konflik kerajaan, dan penguasaan atas pusat-pusat ekonomi strategis.

VOC menjadi fondasi awal proses tersebut. Perusahaan ini bukan sekadar badan usaha yang membeli dan menjual komoditas. VOC memperoleh kewenangan untuk membuat perjanjian, memelihara tentara, membangun benteng, menjalankan peperangan, mengangkat pejabat, dan mengelola wilayah. Arsip VOC memperlihatkan terbentuknya pemerintahan pusat di Batavia, administrasi daerah, lembaga peradilan, pencatatan perdagangan, korespondensi berjenjang, kontrak dengan penguasa lokal, serta sistem pelaporan yang menempatkan Batavia dan para direktur di Belanda sebagai pusat kendali.

Struktur tersebut mempertemukan kepentingan dagang dengan kekuasaan. Perdagangan membutuhkan monopoli. Monopoli memerlukan pengawasan. Pengawasan memerlukan aparat dan administrasi. Administrasi membutuhkan wilayah,

penduduk, informasi, hukum, dan rantai komando. Dari sinilah perusahaan dagang secara perlahan berubah menjadi negara kolonial dalam praktik.

Ketika VOC dibubarkan pada akhir abad ke-18, aset, utang, wilayah, kontrak, arsip, dan jaringan kekuasaannya tidak hilang. Sebagian besar warisan itu diambil alih oleh negara Belanda. Peralihan tersebut menandai perubahan dari kolonialisme korporasi menuju kolonialisme negara.

Hindia Belanda kemudian dibangun sebagai pemerintahan kolonial yang semakin terpusat, luas, dan administratif. Pemerintah kolonial tidak hanya menguasai pelabuhan atau perdagangan tertentu. Pemerintah kolonial berusaha mengatur wilayah, penduduk, tanah, produksi, perpajakan, hukum, keamanan, pendidikan, dan birokrasi.

Perubahan dari VOC menuju Hindia Belanda penting karena menunjukkan bahwa kolonialisme tidak berhenti pada pengambilan komoditas. Kolonialisme berkembang menjadi sistem yang mengatur keseluruhan kehidupan masyarakat.

VOC membutuhkan keuntungan. Hindia Belanda membutuhkan negara administrasi yang mampu memastikan keuntungan, stabilitas, dan kepatuhan dalam jangka panjang.

Negara administrasi kolonial tidak dibentuk untuk menjadikan rakyat Nusantara sebagai pemilik kekuasaan. Negara tersebut dibangun untuk menjadikan wilayah dapat dibaca, penduduk dapat dihitung, tanah dapat dipetakan, hasil dapat dipungut,

perlawanan dapat diawasi, dan keputusan pusat dapat dijalankan sampai ke tingkat lokal.

Dari sudut pandang kolonial, rakyat bukan pemilik negara. Mereka adalah penduduk yang harus diklasifikasikan dan dikelola.

Warisan terpenting Hindia Belanda karena itu bukan hanya jalan, gedung, rel kereta, perkebunan, atau kumpulan undang-undang. Warisan terpentingnya adalah bentuk hubungan antara negara dan manusia. Negara berada di atas sebagai pengatur, sedangkan rakyat berada di bawah sebagai objek administrasi.

Setelah Indonesia merdeka, banyak nama lembaga, hukum, pejabat, dan tujuan negara berubah. Namun hubungan vertikal tersebut tidak otomatis ikut berakhir.

B. Hukum Kolonial dan Administrasi Penduduk

Hukum kolonial dibangun dalam masyarakat yang dibagi-bagi berdasarkan status, asal-usul, ras, komunitas, dan kepentingan pemerintahan. Hindia Belanda mengenal sistem hukum yang plural dan terfragmentasi. Kelompok penduduk yang berbeda dapat ditempatkan di bawah aturan, pengadilan, dan perlakuan hukum yang berbeda. Kajian mengenai praktik hukum kolonial menunjukkan bahwa pluralisme hukum Hindia Belanda tidak hanya mencerminkan keragaman masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari cara pemerintahan kolonial mengklasifikasikan dan mengatur penduduk.

Pembagian tersebut membantu kekuasaan kolonial menjalankan strategi administrasi. Penduduk

tidak diperlakukan sebagai satu rakyat yang setara, melainkan sebagai kelompok-kelompok hukum yang mempunyai kedudukan berbeda.

Orang Eropa ditempatkan dalam struktur hukum tertentu. Kelompok yang diklasifikasikan sebagai Timur Asing dapat dikenai aturan yang berbeda. Penduduk pribumi ditempatkan dalam rezim hukum dan pengadilan yang berkaitan dengan hukum adat, kebijakan pemerintah kolonial, dan kebutuhan administrasi setempat.

Hukum dalam keadaan tersebut bukan hanya alat penyelesaian sengketa. Hukum menjadi alat klasifikasi kekuasaan.

Dengan menentukan siapa termasuk kelompok apa, hukum menentukan pengadilan mana yang berwenang, hak apa yang dapat diperoleh, bukti apa yang diterima, serta kedudukan seseorang dalam struktur masyarakat kolonial.

Administrasi penduduk karena itu mempunyai arti yang lebih luas daripada pencatatan identitas. Administrasi penduduk menjadi cara negara kolonial menciptakan kategori-kategori yang dibutuhkan untuk memerintah.

Penduduk dicatat agar dapat dipungut hasilnya, diatur mobilitasnya, diketahui pekerjaannya, ditentukan kewajibannya, dan diawasi hubungannya dengan kekuasaan.

Negara kolonial berusaha membuat masyarakat yang kompleks menjadi terbaca oleh administrasi. Kerajaan, desa, komunitas adat, jaringan agama, dan hubungan sosial yang mempunyai logikanya sendiri

diterjemahkan ke dalam kategori birokrasi. Kepala wilayah, pemimpin adat, bangsawan, dan elite lokal ditempatkan dalam rantai pemerintahan kolonial.

Proses tersebut tidak selalu menghapus institusi lokal. Pemerintah kolonial justru sering mempertahankan dan menggunakan institusi tertentu sepanjang dapat membantu pengendalian.

Di berbagai wilayah, Belanda menggunakan kombinasi pemerintahan langsung dan tidak langsung. Dalam pemerintahan tidak langsung, elite atau penguasa lokal dipertahankan, tetapi ditempatkan di dalam struktur kolonial dan diarahkan untuk melaksanakan kepentingan pemerintahan.

Cara ini memungkinkan kolonialisme bekerja dengan jumlah pejabat Eropa yang terbatas. Negara kolonial tidak perlu mengatur setiap desa melalui orang Belanda. Negara kolonial menggunakan bupati, kepala lokal, bangsawan, dan perantara domestik untuk menjalankan perintah, memungut pajak, mengorganisasi tenaga, dan menjaga ketertiban.

Akibatnya, rakyat sering tidak berhadapan langsung dengan pejabat Belanda. Mereka berhadapan dengan elite lokal yang menjalankan kebijakan kolonial. Inilah salah satu akar penting kolonialisme struktural. Kekuasaan asing bekerja melalui wajah domestik.

Dalam keadaan demikian, rakyat dapat mengalami penindasan dari orang yang berasal dari masyarakatnya sendiri, tetapi struktur yang memberikan kewenangan dan menentukan tujuannya berasal dari pemerintahan kolonial.

Hubungan ini juga membentuk pola pertanggungjawaban. Pejabat lokal lebih bertanggung jawab kepada atasannya dalam rantai kolonial daripada kepada masyarakat yang dipimpinnya.

Keberhasilan diukur dari terlaksananya perintah, terkumpulnya hasil, terjaganya ketertiban, dan tidak munculnya perlawanan.

Rakyat tidak diperlakukan sebagai sumber mandat. Mereka diperlakukan sebagai populasi yang harus dikelola.

Warisan cara berpikir tersebut dapat terus hidup setelah kemerdekaan apabila administrasi penduduk masih terutama digunakan untuk mengawasi, membatasi, memungut, dan memerintah, bukan untuk memenuhi hak rakyat.

Negara modern tentu membutuhkan data kependudukan. Tanpa data, pemerintah sulit menyediakan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pelayanan publik. Namun pertanyaannya adalah apakah rakyat dicatat agar negara lebih mampu mengasuh mereka, atau agar negara lebih mudah mengendalikan mereka?

Administrasi dalam negara rakyat harus membalik tujuan kolonial. Data penduduk bukan alat untuk menempatkan manusia di bawah kekuasaan, melainkan dasar agar negara dapat mempertanggungjawabkan pemenuhan hak setiap orang.

C. Pajak, Tanah, dan Perkebunan

Bagi pemerintahan kolonial, tanah bukan hanya ruang hidup masyarakat. Tanah merupakan sumber produksi, pendapatan, komoditas, dan kekuasaan.

Masyarakat Nusantara mempunyai beragam hubungan dengan tanah. Tanah dapat dikelola melalui keluarga, desa, kerajaan, komunitas adat, hak ulayat, atau berbagai bentuk penguasaan lain yang tidak selalu sama dengan konsep kepemilikan individual modern.

Pemerintahan kolonial menerjemahkan keragaman tersebut ke dalam kategori yang sesuai dengan kebutuhan administrasi dan ekonomi.

Tanah harus dapat diidentifikasi, diklasifikasikan, dialokasikan, dipajaki, disewakan, atau digunakan bagi produksi komoditas. Dalam proses itu, hubungan sosial dan spiritual masyarakat dengan tanah dapat direduksi menjadi persoalan hak administratif dan nilai ekonomi.

Salah satu fase paling terkenal adalah pelaksanaan Sistem Tanam Paksa atau *Cultuurstelsel* pada abad ke-19. Melalui sistem tersebut, desa dan petani diwajibkan menyediakan tanah, tenaga, atau hasil tertentu bagi tanaman ekspor. Sistem itu membantu menghasilkan pemasukan besar bagi pemerintah Belanda, tetapi membebankan kewajiban dan risiko kepada masyarakat lokal.

Negara kolonial menggunakan birokrasi dan elite setempat untuk memastikan produksi berjalan. Kepala-kepala lokal menjadi penghubung antara tuntutan pemerintah dengan petani.

Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi kolonial tidak bekerja terpisah dari administrasi. Pajak, tanah, tenaga, dan produksi disatukan dalam satu rantai kekuasaan.

Pemerintah membutuhkan data tentang desa, jumlah penduduk, luas tanah, hasil pertanian, dan kemampuan produksi. Informasi tersebut menjadi dasar penetapan kewajiban.

Rakyat tidak mempunyai kedudukan yang setara dalam menentukan tanaman apa yang harus ditanam, berapa besar kewajiban, harga apa yang diterima, dan bagaimana risiko dibagi.

Dalam sistem seperti itu, tanah yang menjadi dasar kehidupan rakyat berubah menjadi instrumen pemasukan kolonial.

Perkebunan-perkebunan besar kemudian berkembang dan terhubung dengan modal, perdagangan, infrastruktur, serta pasar internasional. Jalan, rel, pelabuhan, dan jaringan komunikasi dibangun untuk mendukung pergerakan komoditas dan kepentingan pemerintahan kolonial.

Pembangunan infrastruktur tersebut sering dipandang sebagai salah satu warisan kemajuan kolonial. Memang benar bahwa Hindia Belanda membangun jalan, rel, irigasi, pelabuhan, kota, dan berbagai fasilitas ekonomi. Namun pembangunan tersebut harus dibaca berdasarkan tujuan utamanya.

Infrastruktur kolonial tidak dibangun pertama-tama agar rakyat menjadi pemilik ekonomi. Infrastruktur kolonial dibangun untuk memastikan wilayah dapat diakses, hasil dapat diangkut, produksi

dapat dikendalikan, dan kekuasaan dapat bergerak lebih cepat.

Sebuah jalan dapat bermanfaat bagi masyarakat sekaligus dibangun berdasarkan kepentingan ekstraksi. Kedua kenyataan itu dapat hadir bersamaan.

Karena itu, pembacaan warisan kolonial tidak boleh jatuh pada dua ekstrem. Tidak tepat menyangkal seluruh pembangunan fisik yang terjadi. Namun juga tidak tepat menganggap pembangunan tersebut sebagai bukti bahwa kolonialisme hadir untuk menyejahterakan masyarakat.

Pertanyaan yang harus diajukan adalah siapa yang menentukan pembangunan, untuk kepentingan siapa ia dirancang, siapa yang memperoleh nilai tambah, dan siapa yang menanggung bebannya?

Persoalan tanah pada masa kolonial juga meninggalkan warisan kelembagaan yang panjang. Penelitian mengenai sistem penguasaan tanah kolonial di wilayah perkotaan menunjukkan bahwa rezim formal dan informal yang berkembang pada masa Hindia Belanda membentuk perbedaan struktural dalam kepemilikan yang jejaknya dapat bertahan pada masa pascakolonial.

Tanah kemudian menjadi salah satu wilayah tempat negara modern terus berhadapan dengan rakyat. Negara membawa peta, sertifikat, izin, konsesi, dan klaim kepentingan pembangunan. Rakyat membawa sejarah penguasaan, adat, kehidupan, makam leluhur, hubungan sosial, dan ketergantungan ekonomi.

Apabila negara hanya mengakui apa yang dapat dibuktikan melalui dokumen administratif, masyarakat yang hidup dalam sistem hak tradisional dapat kehilangan kedudukan.

Di sinilah hukum tanah dapat melanjutkan logika kolonial yaitu yang dianggap nyata adalah apa yang dapat dibaca negara, sedangkan pengalaman rakyat harus menyesuaikan diri dengan kategori administrasi.

Pajak juga mempunyai dua wajah. Dalam negara rakyat, pajak merupakan kontribusi warga untuk membiayai kepentingan bersama. Pajak memperoleh legitimasi karena rakyat adalah pemilik negara dan berhak mengetahui serta menentukan bagaimana penerimaan digunakan.

Dalam negara kolonial, pajak adalah instrumen untuk membiayai pemerintahan dan kepentingan penguasa atas penduduk yang tidak mempunyai kendali sebanding.

Persoalan utama bukan kewajiban membayar, melainkan hubungan antara pajak, kepemilikan negara, dan pertanggungjawaban.

Jika rakyat diminta membayar tetapi tidak mempunyai kendali yang nyata atas anggaran dan kebijakan, hubungan fiskal dapat tetap terasa vertikal.

Negara memungut dari rakyat, tetapi rakyat harus meminta agar haknya dipenuhi. Dekolonisasi pajak berarti mengubah hubungan tersebut. Pajak tidak boleh dipahami sebagai upeti modern kepada kekuasaan. Pajak harus menjadi amanah publik yang

seluruh penggunaannya dapat diperiksa dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

D. Birokrasi Kolonial

Birokrasi merupakan salah satu warisan institusional paling kuat dari Hindia Belanda. Wilayah yang luas, masyarakat yang beragam, serta jumlah pejabat Eropa yang terbatas membuat pemerintahan kolonial membutuhkan rantai administrasi yang teratur. Perintah dari pusat harus dapat diteruskan ke daerah. Informasi dari desa harus dapat dikumpulkan dan dikirim ke atas.

Arsip VOC dan pemerintahan kolonial menunjukkan pentingnya korespondensi dengan atasan, resolusi, laporan harian, pencatatan keuangan, dokumen peradilan, kontrak, serta administrasi lokal. Struktur arsip itu mencerminkan pemerintahan yang sangat berorientasi pada pelaporan dan deference kepada kewenangan yang lebih tinggi.

Dari sistem semacam ini tumbuh budaya birokrasi yang menempatkan atasan sebagai pusat pertanggungjawaban.

Pejabat dinilai berdasarkan kemampuannya menjalankan instruksi, menjaga wilayah tetap tenang, mengumpulkan penerimaan, mengatur penduduk, dan melaporkan keadaan.

Rakyat bukan pihak yang memberikan mandat. Karena itu, birokrasi kolonial tidak mempunyai alasan untuk menempatkan kepuasan dan kedaulatan rakyat sebagai ukuran utama.

Dalam rantai pemerintahan, pejabat Eropa bekerja bersama pejabat pribumi. Bupati, wedana, camat, kepala desa, serta berbagai struktur lokal ditempatkan dalam susunan administratif.

Pemerintah kolonial memanfaatkan kewibawaan tradisional elite setempat untuk menjalankan fungsi negara. Namun ketika elite lokal masuk ke dalam struktur kolonial, orientasi kepemimpinannya berubah.

Pemimpin yang sebelumnya mempunyai hubungan sosial dan moral dengan masyarakat dapat berubah menjadi pejabat yang harus memenuhi target pemerintah.

Kedudukan mereka bergantung pada pengakuan dan penilaian atasan. Akibatnya, loyalitas ke atas dapat menjadi lebih menentukan daripada tanggung jawab ke bawah. Inilah salah satu akar kepemimpinan birokratis di Indonesia.

Pemimpin birokratis tidak selalu jahat atau tidak kompeten. Pemimpin birokratis dapat bekerja keras, disiplin, dan menguasai prosedur. Namun struktur membentuknya untuk bertanya yaitu apa instruksi atasan, apa targetnya, dan bagaimana laporan harus disusun?

Pertanyaan tentang apa yang dibutuhkan rakyat dapat menjadi urusan kedua. Birokrasi kolonial juga mengembangkan jarak simbolik antara pejabat dan masyarakat. Jabatan membawa status, pakaian, gelar, ruang, protokol, dan kewibawaan.

Jarak tersebut berguna bagi kekuasaan karena membuat perintah lebih mudah dijalankan. Rakyat belajar menghormati jabatan, takut pada administrasi,

dan menempatkan pejabat sebagai pihak yang mempunyai kuasa memberikan atau menolak akses.

Setelah kemerdekaan, simbol-simbolnya dapat berubah, tetapi penghormatan berlebihan kepada jabatan tetap hidup.

Pejabat lebih mudah dilayani daripada melayani. Ruang kerja, protokol, kendaraan, pengawalan, dan berbagai fasilitas menjadi tanda kedudukan.

Masyarakat yang datang ke kantor pemerintah dapat merasa memasuki ruang milik pejabat, bukan rumah pelayanan yang dibangun dari uang rakyat.

Bahasa birokrasi juga mencerminkan hubungan tersebut. Rakyat harus mengajukan permohonan, memperoleh izin, memenuhi syarat, menunggu disposisi, dan mendapatkan persetujuan.

Sebagian prosedur memang diperlukan. Negara harus memastikan keteraturan, keamanan, dan keadilan. Namun ketika prosedur menjadi tujuan, birokrasi kehilangan fungsi pengasuhannya.

Rakyat dipaksa menyesuaikan diri dengan sistem, sedangkan sistem tidak merasa wajib menyesuaikan diri dengan kebutuhan manusia.

Negara administrasi kemudian mengukur keberhasilan melalui kelengkapan dokumen, bukan terselesaikannya persoalan rakyat.

Laporan dapat dinyatakan selesai meskipun masalah tetap ada. Anggaran dapat dianggap berhasil karena terserap meskipun manfaatnya tidak dirasakan. Program dapat memenuhi indikator meskipun manusia yang menjadi sasaran tidak mengalami perubahan. Di sinilah administrasi dapat menggantikan kenyataan.

Bagi Sekolah Negarawan, birokrasi bukan sekadar mesin netral. Desain birokrasi mencerminkan cara negara memandang manusia. Jika rakyat dipandang sebagai objek, birokrasi akan membangun sistem pengendalian. Jika rakyat dipandang sebagai pemilik, birokrasi akan dibangun sebagai sistem pelayanan, pengasuhan, dan pertanggungjawaban.

E. Warisan Negara Administrasi dalam Indonesia Modern

Indonesia modern mewarisi kebutuhan akan negara administrasi. Negara dengan wilayah luas dan penduduk besar memang tidak dapat berjalan tanpa birokrasi, hukum, data, anggaran, dan sistem pemerintahan. Masalahnya bukan keberadaan administrasi. Masalahnya adalah ketika administrasi menjadi pusat negara, sedangkan rakyat ditempatkan di pinggir.

Negara kemudian didefinisikan berdasarkan kemampuannya mengatur, bukan kemampuannya memenuhi hak. Keberhasilan diukur melalui jumlah regulasi, program, lembaga, aplikasi, dokumen, rapat, dan anggaran. Semakin banyak negara mengatur, semakin kuat ia merasa hadir.

Namun bagi rakyat, banyaknya aturan belum tentu berarti hadirnya perlindungan. Banyaknya aplikasi belum tentu membuat pelayanan lebih mudah. Banyaknya lembaga belum tentu membuat tanggung jawab lebih jelas.

Negara administrasi cenderung melihat persoalan manusia sebagai persoalan kategori. Kemiskinan menjadi angka. Pengangguran menjadi persentase. Tanah menjadi bidang. Rakyat menjadi nomor identitas. Penderitaan menjadi entri dalam basis data.

Data sangat penting. Tanpa data, negara tidak dapat membuat kebijakan yang tepat. Namun ketika data menggantikan perjumpaan dengan manusia, negara dapat mengetahui jumlah penderitaan tanpa memahami maknanya.

Pejabat melihat kemiskinan dari layar, tabel, dan presentasi. Pejabat tersebut tidak mencium rumah yang lembap, tidak merasakan ketidakpastian penghasilan, dan tidak memahami rasa malu manusia yang harus terus meminta bantuan.

Administrasi menciptakan jarak yang membuat penderitaan tampak objektif dan dapat dikelola. Namun jarak itu juga dapat menghilangkan empati.

Warisan lain adalah sentralitas izin. Dalam logika kolonial, negara harus mengetahui dan mengendalikan berbagai kegiatan penduduk. Setelah kemerdekaan, sistem perizinan tetap diperlukan untuk melindungi keselamatan, lingkungan, tata ruang, dan kepentingan publik.

Namun izin dapat berubah menjadi alat dominasi apabila negara menganggap seluruh kehidupan rakyat hanya sah setelah memperoleh persetujuan birokrasi.

Negara kemudian mempunyai kemampuan sangat besar untuk menentukan siapa boleh bekerja,

menggunakan tanah, menjalankan usaha, membangun, bergerak, atau memperoleh akses.

Jika kewenangan tersebut tidak transparan dan tidak dapat dikoreksi, izin menjadi sumber rente, diskriminasi, dan ketergantungan.

Rakyat harus mencari kedekatan dengan pejabat agar memperoleh apa yang seharusnya menjadi hak atau kesempatan yang adil.

Keadaan ini memperkuat patronase. Negara tidak lagi dirasakan sebagai sistem yang bekerja berdasarkan hak, tetapi sebagai jaringan manusia yang harus didekati.

Warisan negara administrasi juga tampak dalam kecenderungan bahwa pemerintah dianggap identik dengan negara.

Kritik terhadap pejabat dapat dianggap sebagai serangan terhadap institusi. Ketidakpatuhan terhadap kebijakan dapat dipandang sebagai ketidaksetiaan kepada negara.

Padahal pemerintah adalah pelaksana sementara, sedangkan negara merupakan rumah bersama yang dimiliki rakyat.

Jika pemerintah menguasai definisi negara, rakyat akan kehilangan ruang untuk mengoreksi kekuasaan atas nama kecintaan kepada negaranya sendiri. Negara administrasi juga dapat berkembang melalui digitalisasi.

Teknologi menjanjikan pelayanan cepat, transparansi, integrasi data, dan efisiensi. Namun digitalisasi tidak otomatis mengubah mentalitas kolonial.

Jika sistem digital dirancang dari perspektif birokrasi, rakyat tetap harus menyesuaikan diri dengan kategori dan alur yang ditetapkan negara.

Keputusan bahkan dapat menjadi lebih sulit dikoreksi karena dibuat oleh algoritma atau sistem yang tidak transparan.

Dahulu rakyat berhadapan dengan meja dan pejabat. Kini rakyat dapat berhadapan dengan layar yang menolak permohonannya tanpa penjelasan. Administrasi kolonial berubah menjadi administrasi algoritmik.

Karena itu, dekolonisasi negara administrasi tidak cukup dilakukan dengan mengganti formulir kertas menjadi aplikasi. Yang harus diubah adalah posisi manusia di dalam sistem.

Teknologi harus mempermudah rakyat memperoleh hak, bukan memperkuat kemampuan negara mengawasi dan mengendalikan.

F. Kepemimpinan Birokratis dan Jarak dengan Rakyat

Warisan negara administrasi melahirkan tipe kepemimpinan birokratis. Pemimpin birokratis memandang tugas utamanya sebagai pelaksanaan aturan, program, dan target. Pemimpin tersebut menguasai prosedur, memahami rantai komando, dan mampu menjaga organisasi tetap berjalan. Kemampuan tersebut diperlukan. Tanpa administrator, pemerintahan akan kacau. Namun kepemimpinan birokratis menjadi masalah ketika seluruh pengertian

tentang kepemimpinan direduksi menjadi kemampuan administrasi.

Pemimpin kemudian tidak lagi menentukan arah. Pemimpin tersebut hanya mengelola sistem yang diwarisinya. Pemimpin tersebut bertanya apakah anggaran terserap, bukan apakah keadilan hadir. Pemimpin tersebut bertanya apakah proyek selesai, bukan apakah rakyat semakin berdaulat. Pemimpin tersebut bertanya apakah aturan dipatuhi, bukan apakah aturan tersebut melindungi manusia.

Cak Nun mengingatkan tentang krisis kepemimpinan yang tidak hanya terjadi dalam kekuasaan, tetapi juga dalam sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, bahkan agama. Dalam konteks warisan kolonial, krisis tersebut dapat dibaca sebagai terputusnya hubungan antara pemimpin dan penderitaan rakyat.

Pejabat hidup dalam ruang administrasi. Rakyat hidup dalam kenyataan. Pejabat menerima laporan bahwa pelayanan telah berjalan. Rakyat mengalami penolakan. Pejabat membaca angka pertumbuhan. Rakyat merasakan harga dan kesulitan mencari kerja. Pejabat melihat peta tanah. Rakyat melihat rumah, sawah, makam, dan sejarah keluarganya.

Ketika pemimpin lebih percaya kepada laporan daripada pengalaman rakyat, administrasi mengalahkan kenyataan. Jarak tersebut tidak hanya bersifat fisik. Jarak tersebut bersifat moral dan pengetahuan.

Pemimpin dapat mengunjungi desa, masuk pasar, atau berbicara dengan masyarakat, tetapi tetap

tidak memahami mereka apabila perjumpaan hanya dijadikan seremoni dan pencitraan.

Kedekatan kepada rakyat bukan soal sering tampil bersama rakyat. Kedekatan adalah kemampuan membiarkan penderitaan rakyat mengubah cara mengambil keputusan.

Kepemimpinan kolonial berorientasi ke atas. Kepemimpinan tersebut mencari pengakuan dari pusat kekuasaan. Kepemimpinan rakyat harus berorientasi kepada amanah. Kepemimpinan tersebut bertanggung jawab kepada manusia yang dipimpinnya, kepada konstitusi, dan kepada Allah.

Dalam tata nilai Islam, jabatan tidak meninggikan manusia di atas rakyat. Jabatan justru memperbesar beban pertanggungjawaban.

Pemimpin tidak berhak meminta pelayanan karena kedudukannya. Kedudukannya diberikan agar ia mampu melayani lebih luas. Namun mentalitas birokratis dapat membalik hubungan tersebut. Semakin tinggi jabatan, semakin banyak pelayanan yang diterima.

Rakyat berdiri menunggu, sementara pejabat mempunyai jalur khusus. Rakyat harus menjelaskan kebutuhannya, sementara pejabat tidak harus menjelaskan keputusan. Rakyat diminta transparan, sedangkan kekuasaan mempertahankan kerahasiaan. Inilah bentuk negara yang lebih sering minta dilayani daripada melayani.

Keadaan tersebut bukan hanya persoalan perilaku pejabat tertentu. Keadaan tersebut merupakan

hasil struktur, protokol, budaya organisasi, dan cara masyarakat sendiri memandang jabatan.

Masyarakat dapat ikut mempertahankan mentalitas kolonial ketika memuja pejabat, mencari kedekatan, memberikan perlakuan istimewa, dan menganggap akses personal lebih efektif daripada hak. Dekolonisasi kepemimpinan karena itu membutuhkan perubahan dari dua arah.

Pejabat harus meninggalkan mentalitas penguasa. Rakyat harus meninggalkan mentalitas kawula. Rakyat bukan bawahan pemerintah. Rakyat adalah pemilik mandat. Pemimpin bukan pemilik negara. Pemimpin adalah pelaksana amanah.

G. Dari Negara Pengatur Menuju Negara Pengasuh

Warisan Hindia Belanda tidak dapat dihapus hanya dengan mengganti istilah atau mencabut beberapa undang-undang. Yang harus diubah adalah paradigma dasar hubungan negara dengan rakyat.

Negara kolonial mengatur agar kekuasaan dan ekstraksi berjalan. Negara rakyat mengatur agar keadilan dan kemaslahatan terwujud.

Perbedaannya bukan pada ada atau tidaknya aturan. Negara rakyat tetap membutuhkan hukum, birokrasi, pajak, administrasi penduduk, dan pengelolaan tanah. Perbedaannya terletak pada tujuan dan kepemilikan.

Dalam negara kolonial, hukum melindungi struktur kekuasaan. Dalam negara rakyat, hukum harus melindungi manusia, termasuk dari penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam negara kolonial, pajak dikumpulkan dari penduduk. Dalam negara rakyat, pajak dikelola sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada pemilik negara.

Dalam negara kolonial, tanah dipetakan agar dapat dikuasai dan dieksploitasi. Dalam negara rakyat, administrasi tanah harus menjaga kehidupan, keadilan, produktivitas, lingkungan, dan hak antargenerasi.

Dalam negara kolonial, data digunakan agar penduduk dapat dikendalikan. Dalam negara rakyat, data digunakan agar hak manusia dapat dipenuhi dan kebijakan dapat dipertanggungjawabkan.

Negara pengasuh bukan negara yang memanjakan rakyat atau menghilangkan tanggung jawab pribadi. Pengasuhan berarti memastikan bahwa kekuasaan bekerja untuk membangun kemampuan manusia, melindungi yang lemah, membuka kesempatan, menegakkan keadilan, dan mencegah dominasi.

Negara pengasuh tidak menjadikan rakyat bergantung terus-menerus kepada bantuan. Negara pengasuh membangun struktur agar rakyat mampu berdiri. Negara pengasuh tidak hanya membagikan program. Negara pengasuh memastikan rakyat mempunyai ilmu, alat, kepemilikan, pekerjaan, akses hukum, dan posisi tawar. Dengan demikian, negara pengasuh berbeda dari negara paternalistik.

Negara paternalistik menganggap rakyat sebagai anak yang tidak mampu berpikir dan harus diarahkan dari atas. Negara pengasuh mengakui rakyat sebagai pemilik, lalu menggunakan kekuasaan untuk

memperkuat kemampuan mereka menjalankan kedaulatannya.

Pengasuhan tidak menghapus kebebasan. Pengasuhan menciptakan syarat agar kebebasan tidak hanya dimiliki oleh mereka yang kaya, berpendidikan, dan mempunyai akses. Dalam tata nilai Islam, negara pengasuh harus berdiri di atas amanah dan keadilan. Kekuasaan tidak digunakan untuk memuliakan pejabat, tetapi untuk menjaga manusia.

Perubahan dari negara pengatur menuju negara pengasuh membutuhkan konstitusi, pembaruan hukum, reformasi birokrasi, teknologi yang berpihak kepada rakyat, dan kepemimpinan nilai. Namun seluruh perubahan tersebut tidak akan berjalan apabila rakyat tetap ditempatkan sebagai objek.

Rakyat harus masuk ke dalam struktur hidup negara. Mereka harus mempunyai kemampuan menentukan arah, mengawasi anggaran, mengoreksi kebijakan, menguji tindakan aparat, dan meminta pertanggungjawaban pejabat. Dekolonisasi institusi pada akhirnya adalah demokratisasi kepemilikan negara.

H. Penutup Bab

Hindia Belanda membangun sebuah negara administrasi. Negara tersebut mempunyai hukum, birokrasi, pajak, pencatatan penduduk, pengelolaan tanah, perkebunan, aparat, pengadilan, dan rantai komando. Namun seluruh struktur itu tidak dibangun untuk menjadikan rakyat sebagai pemilik negara. Sebuah struktur dibangun untuk menguasai wilayah,

mengatur penduduk, memungut hasil, menjaga stabilitas, dan memastikan keuntungan kolonial.

VOC memulai fondasinya melalui perdagangan, kontrak, benteng, dan pemerintahan korporasi. Hindia Belanda kemudian memperluasnya menjadi kekuasaan negara yang lebih terpusat dan administratif.

Rakyat dipetakan agar dapat diatur. Tanah dicatat agar dapat dialokasikan dan dieksploitasi. Pajak dipungut untuk membiayai pemerintahan kolonial. Birokrasi disusun agar perintah pusat berjalan. Elite lokal digunakan untuk menjembatani kekuasaan dengan masyarakat.

Warisan terpenting dari struktur tersebut adalah penempatan rakyat sebagai objek pengaturan. Setelah Indonesia merdeka, banyak hukum, nama lembaga, dan pejabat berubah. Negara mempunyai tujuan konstitusional yang berbeda. Rakyat diakui sebagai pemegang kedaulatan. Namun mentalitas negara administrasi dapat tetap hidup.

Pemerintah masih dapat merasa berada di atas rakyat. Birokrasi masih dapat lebih bertanggung jawab kepada atasan daripada kepada manusia yang dilayaninya. Hukum masih dapat lebih mudah digunakan oleh mereka yang mempunyai modal dan akses. Pajak masih dapat terasa seperti kewajiban vertikal ketika rakyat tidak mempunyai kendali yang memadai atas penggunaannya.

Tanah masih dapat dibaca terutama melalui peta, izin, dan konsesi, sementara sejarah hidup masyarakat diposisikan sebagai hambatan pembangunan.

Administrasi penduduk masih dapat memperlakukan manusia sebagai nomor, kategori, dan sasaran kebijakan. Digitalisasi bahkan dapat memperkuat pola tersebut apabila rakyat hanya dipindahkan dari meja birokrasi menuju sistem algoritmik yang tidak transparan. Krisis kepemimpinan birokratis juga merupakan bagian dari warisan ini.

Pemimpin dibentuk untuk patuh ke atas, memenuhi target, menjaga stabilitas, dan menyusun laporan. Pemimpin dibentuk agar mampu menjalankan administrasi, tetapi kehilangan kemampuan memahami arah peradaban dan penderitaan rakyat.

Negara kemudian bekerja sangat sibuk, tetapi tidak selalu mengetahui untuk siapa kesibukan itu dijalankan. Karena itu, dekolonisasi Indonesia harus menyentuh institusi paling dalam.

Hukum harus diubah dari alat ketertiban kekuasaan menjadi jalan keadilan. Birokrasi harus diubah dari mesin pengendalian menjadi sistem pelayanan dan pengasuhan. Pajak harus dikembalikan sebagai amanah rakyat. Tanah harus dikelola sebagai ruang hidup dan sumber kemaslahatan, bukan semata-mata objek konsesi.

Administrasi penduduk harus digunakan untuk memenuhi hak, bukan memperluas pengawasan. Teknologi harus memudahkan rakyat memperoleh keadilan, bukan membuat keputusan kekuasaan semakin sulit dikoreksi.

Kepemimpinan juga harus didekolonisasi. Pemimpin tidak boleh menempatkan jabatan sebagai sumber kehormatan yang membuatnya harus dilayani.

Kehormatan pemimpin hanya lahir dari kesanggupannya memikul amanah dan melayani rakyat.

Dalam negara rakyat, pejabat bukan penguasa atas penduduk. Pejabat adalah pelaksana mandat pemilik negara. Indonesia belum selesai menemukan bentuk negara rakyat karena sebagian warisan negara administrasi kolonial masih hidup dalam hukum, birokrasi, pajak, tanah, teknologi, dan kepemimpinannya.

Pekerjaan sejarah yang harus dilakukan bukan menghapus seluruh institusi yang diwarisi, melainkan mengubah arah, nilai, dan hubungan kekuasaannya.

Dari negara yang mengatur rakyat menuju negara yang diatur oleh mandat rakyat. Dari birokrasi yang meminta dilayani menuju birokrasi yang mengasuh. Dari kepemimpinan yang bertanggung jawab ke atas menuju kepemimpinan yang bertanggung jawab kepada rakyat, konstitusi, dan Allah.

Hanya melalui perubahan itulah kemerdekaan tidak berhenti pada berakhirnya Hindia Belanda, tetapi berkembang menjadi kelahiran negara yang benar-benar dimiliki oleh rakyat Indonesia.

Bab VIII
Jepang: Pendudukan, Mobilisasi, dan Militerisasi Masyarakat

A. Pendudukan Militer Jepang

Pendudukan Jepang di Indonesia berlangsung jauh lebih singkat daripada kolonialisme Belanda. Namun singkatnya waktu tidak berarti kecilnya pengaruh. Dalam beberapa tahun, Jepang mengubah cara masyarakat diatur, digerakkan, didisiplinkan, dan ditempatkan dalam hubungan dengan kekuasaan.

Jika pemerintahan Hindia Belanda membangun negara administrasi secara bertahap melalui hukum, birokrasi, pajak, pencatatan penduduk, perkebunan, dan pemerintahan wilayah, Jepang datang dalam suasana perang. Tujuan utamanya bukan membangun pemerintahan kolonial jangka panjang yang stabil, melainkan menguasai wilayah, mengamankan sumber daya, mengendalikan masyarakat, dan mendukung kebutuhan perang. Karena itu, corak kekuasaannya berbeda.

Pemerintahan Belanda cenderung bekerja melalui administrasi yang panjang, klasifikasi sosial, hukum, dan rantai birokrasi. Jepang bekerja melalui komando militer, mobilisasi cepat, disiplin ketat, propaganda, pengaturan tenaga, dan pengorbanan masyarakat bagi tujuan perang.

Pendudukan Jepang menunjukkan bagaimana negara dapat memasuki hampir seluruh ruang kehidupan masyarakat dalam waktu singkat.

Kekuasaan tidak hanya mengatur pemerintahan dan ekonomi. Kekuasaan juga mengatur bahasa, informasi, pendidikan, organisasi, kerja, produksi, pergerakan manusia, serta cara masyarakat menampilkan kesetiaannya.

Dalam sistem seperti itu, rakyat tidak dipandang sebagai pemilik kedaulatan. Mereka dipandang sebagai sumber tenaga, bahan mobilisasi, penyedia produksi, pengikut organisasi, dan massa yang harus diarahkan.

Pendudukan militer membutuhkan kepatuhan yang cepat. Perdebatan, musyawarah, keberatan, dan hak individu dianggap dapat menghambat tujuan perang. Karena itu, hubungan antara penguasa dan rakyat dibangun melalui perintah.

Kekuasaan menentukan tujuan. Aparat menyampaikan instruksi. Organisasi masyarakat menjalankan mobilisasi. Rakyat mengikuti, menyerahkan tenaga, memenuhi target, dan menanggung akibatnya.

Dalam keadaan perang, seluruh kehidupan dapat ditempatkan di bawah satu tujuan besar yang ditentukan dari atas. Tujuan tersebut disampaikan sebagai kepentingan bersama, tetapi rakyat tidak mempunyai kedudukan setara dalam merumuskannya.

Jepang datang dengan bahasa pembebasan Asia dari kolonialisme Barat. Namun pembebasan yang dijanjikan tidak otomatis menghasilkan kedaulatan rakyat. Penguasa kolonial berganti, tetapi masyarakat tetap ditempatkan sebagai objek kekuasaan.

Pengalaman tersebut menjadi penting bagi naskah ini karena memperlihatkan bahwa penolakan

terhadap kolonialisme Barat tidak dengan sendirinya melahirkan negara rakyat. Kekuatan yang datang atas nama pembebasan dapat membangun dominasi baru apabila rakyat tetap tidak menjadi pemilik struktur kekuasaan.

Dengan demikian, persoalan utama tidak hanya terletak pada asal-usul penguasa. Persoalannya adalah bagaimana kekuasaan dibentuk, nilai apa yang dilayaninya, serta di mana rakyat ditempatkan.

B. Propaganda dan Mobilisasi Massa

Kekuasaan militer tidak dapat bergantung pada paksaan fisik semata. Kekuasaan militer juga membutuhkan narasi yang membuat masyarakat memahami, menerima, atau sekurang-kurangnya menyesuaikan diri dengan tujuan penguasa. Karena itu, propaganda menjadi bagian penting dari pendudukan Jepang.

Jepang berusaha menampilkan dirinya bukan sebagai penjajah baru, melainkan sebagai pemimpin kebangkitan Asia. Kolonialisme Barat digambarkan sebagai kekuatan yang harus disingkirkan, sedangkan Jepang diposisikan sebagai saudara tua yang memimpin bangsa-bangsa Asia menuju tatanan baru.

Bahasa persaudaraan tersebut mempunyai kekuatan persatuan. Masyarakat Indonesia memang telah mengalami kolonialisme Belanda dan mempunyai keinginan kuat untuk merdeka. Jepang berusaha menghubungkan kepentingan perangnya dengan harapan tersebut.

Propaganda bekerja dengan mengubah makna. Pendudukan disebut pembebasan. Mobilisasi disebut pengabdian. Pengorbanan disebut kehormatan. Kepatuhan disebut kesetiaan. Kekurangan dan penderitaan ditempatkan sebagai bagian dari perjuangan besar.

Dalam keadaan seperti itu, bahasa tidak hanya menjelaskan kenyataan. Bahasa membentuk kenyataan yang boleh dilihat oleh rakyat.

Propaganda mengajarkan bahwa tujuan negara lebih tinggi daripada pengalaman individu. Apabila seseorang menderita, penderitaan tersebut harus dipahami sebagai pengorbanan. Apabila masyarakat kehilangan kebebasan, pembatasan itu dibenarkan oleh kepentingan yang lebih besar. Pola ini mempunyai relevansi panjang.

Kekuasaan modern juga dapat menggunakan bahasa pembangunan, stabilitas, persatuan, keamanan, kemajuan, atau kepentingan nasional untuk meminta rakyat menerima kebijakan yang tidak mereka rumuskan.

Tidak berarti seluruh penggunaan bahasa tersebut merupakan propaganda. Negara memang membutuhkan pembangunan, persatuan, keamanan, dan stabilitas. Namun istilah-istilah besar dapat menjadi alat dominasi apabila dipakai untuk menutup penderitaan, menghilangkan kritik, atau membenarkan pengorbanan yang tidak dibagi secara adil.

Jepang memperlihatkan bahwa massa dapat digerakkan bukan hanya melalui ancaman, tetapi juga melalui penciptaan identitas, musuh bersama, tujuan

besar, simbol, upacara, semboyan, dan pengulangan pesan.

Rakyat diajak merasa menjadi bagian dari proyek sejarah. Namun proyek itu tetap ditentukan oleh kekuasaan.

Mobilisasi massa mengubah manusia dari pribadi yang mempunyai kebutuhan, pertimbangan, dan kehendak menjadi bagian dari barisan. Nilai manusia diukur dari kesediaannya mengikuti arah bersama.

Dalam keadaan tersebut, perbedaan pendapat mudah dipandang sebagai ketidaksetiaan. Keraguan dapat dianggap sebagai kelemahan. Kritik diperlakukan sebagai ancaman terhadap tujuan besar.

Warisan propaganda bukan hanya kemampuan negara menyebarkan informasi. Warisan yang lebih dalam adalah keyakinan bahwa rakyat dapat diarahkan melalui narasi yang dibentuk dari pusat.

Negara tidak lagi merasa wajib menjelaskan seluruh kenyataan. Negara cukup membentuk persepsi yang diperlukan agar kebijakan dapat dijalankan.

Di sinilah propaganda bertemu dengan kepemimpinan administratif dan komando. Pemimpin tidak perlu mendengar rakyat apabila merasa telah mengetahui tujuan besar. Rakyat cukup diberi narasi agar bersedia bergerak.

C. Organisasi Rakyat dan Disiplin Komando

Pendudukan Jepang membentuk dan menggunakan berbagai organisasi untuk

menghubungkan pemerintahan militer dengan masyarakat.

Organisasi menjadi alat penting karena aparat Jepang tidak mungkin mengatur seluruh penduduk secara langsung. Kekuasaan membutuhkan struktur perantara yang mampu menyampaikan perintah, mengumpulkan manusia, mengatur tenaga, menyebarkan propaganda, serta memastikan disiplin.

Dalam organisasi tersebut, rakyat memperoleh pengalaman baru mengenai mobilisasi dan sosial. Mereka mengikuti rapat, latihan, barisan, kegiatan kolektif, pengumpulan sumber daya, dan berbagai bentuk pengabdian yang diarahkan oleh pemerintahan militer.

Sebagian pengalaman organisasi tersebut kemudian menjadi penting dalam proses kemerdekaan. Masyarakat memperoleh keterampilan berorganisasi, berpidato, memimpin kelompok, menyusun jaringan, dan mengenal disiplin kolektif.

Tokoh-tokoh Indonesia juga memperoleh ruang tertentu untuk berkomunikasi dengan masyarakat yang lebih luas. Dalam batas yang diawasi, organisasi pendudukan dapat digunakan sebagai tempat tumbuhnya kesadaran, pengalaman administrasi, dan jaringan penguasa. Namun manfaat tersebut tidak boleh menutupi tujuan utama pembentukannya.

Organisasi rakyat pada masa Jepang bukan dibangun agar masyarakat menjadi pemilik kekuasaan. Organisasi rakyat dibangun agar masyarakat lebih mudah digerakkan oleh kekuasaan.

Struktur organisasi mengikuti logika komando. Perintah bergerak dari atas ke bawah. Anggota menerima tugas. Target harus dipenuhi. Disiplin dinilai melalui ketaatan dan kesediaan berkorban.

Rakyat memperoleh organisasi, tetapi belum tentu memperoleh kedaulatan. Perbedaan ini penting. Keberadaan organisasi tidak otomatis berarti partisipasi yang demokratis. Sebuah organisasi dapat sangat luas, mempunyai banyak anggota, dan melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan, tetapi tetap berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan kehendak pusat.

Partisipasi dalam keadaan demikian bukan kemampuan menentukan arah. Partisipasi berarti ikut menjalankan arah yang telah ditentukan.

Pengalaman ini dapat bertahan dalam negara modern ketika organisasi masyarakat, lembaga sosial, atau struktur pemerintahan dibentuk bukan untuk menyerap kehendak rakyat, melainkan untuk memobilisasi dukungan terhadap kebijakan.

Rakyat dikumpulkan, diberi arahan, diminta berpartisipasi, dan ditampilkan sebagai bukti dukungan. Namun mereka tidak sungguh-sungguh memperoleh ruang untuk menentukan tujuan.

Disiplin komando juga dapat memasuki cara kepemimpinan dipahami. Pemimpin dianggap berhasil apabila mampu membuat semua orang bergerak seragam, cepat, dan tanpa banyak pertanyaan.

Musyawarah kemudian dipandang sebagai kelambanan. Kritik dianggap mengganggu kesatuan.

Keragaman pendapat dilihat sebagai kelemahan organisasi.

Padahal negara rakyat membutuhkan bentuk disiplin yang berbeda. Disiplin tidak boleh berarti kepatuhan buta. Disiplin harus lahir dari kesadaran, tanggung jawab, dan pemahaman terhadap tujuan bersama.

Rakyat dapat bergerak cepat dalam keadaan darurat, tetapi keadaan darurat tidak boleh menjadi alasan permanen untuk menghilangkan kedaulatan mereka.

Negara membutuhkan kemampuan komando dalam bidang tertentu, terutama pertahanan, keamanan, penanganan bencana, dan situasi krisis. Namun logika komando tidak boleh menguasai seluruh kehidupan masyarakat.

Apabila seluruh negara dijalankan seperti barak, manusia akan kehilangan ruang untuk berpikir, berbeda, dan mengoreksi kekuasaan.

D. Militerisasi Sosial

Militerisasi tidak hanya berarti bertambahnya jumlah tentara atau senjata. Militerisasi sosial adalah masuknya cara berpikir, disiplin, simbol, struktur komando, dan logika perang ke dalam kehidupan masyarakat.

Pada masa pendudukan Jepang, masyarakat diperkenalkan secara luas kepada latihan, barisan, penghormatan, perintah, pengorganisasian berdasarkan kelompok, serta pembentukan kesiapan untuk menjalankan tujuan militer.

Tubuh manusia menjadi bagian dari kekuasaan. Cara berdiri, berjalan, memberi hormat, mengikuti latihan, bekerja, dan berkumpul diatur. Disiplin tidak hanya berada dalam pikiran, tetapi ditanamkan melalui kebiasaan tubuh.

Militerisasi sosial membentuk pandangan bahwa masyarakat yang baik adalah masyarakat yang tertib, seragam, patuh, dan siap digerakkan.

Keteraturan tentu diperlukan. Negara tidak dapat hidup dalam kekacauan. Namun keteraturan yang dibangun hanya melalui ketakutan dan komando akan menghasilkan manusia yang taat tanpa kesadaran. Masyarakat dapat terlihat disiplin, tetapi kehilangan kemampuan mengambil keputusan moral.

Dalam sistem militer, perintah mempunyai kedudukan penting karena situasi sering membutuhkan tindakan cepat. Namun apabila logika ini diperluas ke seluruh kehidupan sipil, tanggung jawab pribadi dapat menghilang.

Manusia merasa tidak perlu menilai benar atau salah karena hanya menjalankan perintah. Di sinilah terdapat bahaya besar militerisasi sosial.

Kejahatan dapat dijalankan oleh banyak orang biasa ketika setiap orang hanya menganggap dirinya bagian kecil dari rantai komando. Tidak ada yang merasa bertanggung jawab atas keseluruhan akibat.

Penguasa memberi perintah. Pejabat menerjemahkan. Aparat menjalankan. Organisasi menggerakkan. Rakyat mengikuti. Setiap tingkatan merasa hanya melaksanakan tugas. Dalam keadaan tersebut, kekuasaan dapat menghasilkan penderitaan

besar tanpa satu pun pelaksana di tingkat bawah merasa sebagai pemilik keputusan.

Pengalaman kerja paksa dan mobilisasi tenaga memperlihatkan bahaya ketika manusia dipandang terutama berdasarkan kegunaannya bagi negara.

Tubuh rakyat menjadi sumber tenaga. Waktu mereka menjadi milik kekuasaan. Keselamatan dan kehidupan manusia dapat dikorbankan bagi tujuan yang ditentukan dari atas.

Militerisasi juga mengubah ukuran kepemimpinan. Pemimpin dianggap kuat apabila keras, tegas, cepat, dan mampu memaksa kepatuhan. Keraguan, empati, serta kesediaan mendengar dapat dipandang sebagai kelemahan.

Padahal ketegasan tanpa keadilan dapat berubah menjadi kekejaman. Kecepatan tanpa ilmu dapat menghasilkan kesalahan besar. Ketaatan tanpa nilai dapat melahirkan penghancuran.

Kepemimpinan peradaban membutuhkan keberanian dan ketegasan, tetapi keduanya harus tunduk kepada amanah, keadilan, ilmu, dan perlindungan terhadap manusia.

E. Warisan Jepang dalam Cara Negara Memandang Rakyat

Warisan pendudukan Jepang tidak seluruhnya berbentuk lembaga yang bertahan secara langsung. Sebagian warisannya hidup dalam pengalaman dan imajinasi kekuasaan.

Jepang menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia dapat dimobilisasi dalam skala besar.

Penduduk dapat diorganisasi, dibagi ke dalam kelompok, diberi target, diarahkan tenaganya, serta diminta mengorbankan kepentingan pribadi bagi tujuan negara.

Pengalaman tersebut dapat memengaruhi cara negara pascakemerdekaan memandang rakyat. Rakyat tidak hanya dilihat sebagai penduduk yang harus diatur, sebagaimana dalam warisan negara administrasi Belanda. Rakyat juga dapat dilihat sebagai massa yang dapat digerakkan. Di sinilah warisan Jepang bertemu dengan warisan Belanda.

Belanda meninggalkan birokrasi yang mengatur rakyat. Jepang meninggalkan pengalaman aparat dan organisasi yang memobilisasi rakyat.

Perpaduan keduanya dapat membentuk negara yang mempunyai kemampuan administratif untuk mencatat, mengklasifikasikan, memungut, dan mengatur, sekaligus kemampuan birokrasi untuk menggerakkan, menyeragamkan, dan meminta pengorbanan.

Rakyat kemudian berada di antara dua posisi yang sama-sama tidak menempatkan mereka sebagai pemilik. Sebagai objek administrasi, rakyat diatur. Sebagai massa pemerintahan, rakyat digerakkan. Dalam kedua keadaan tersebut, arah tetap ditentukan dari atas.

Negara dapat mengumpulkan rakyat dalam kampanye pembangunan, gerakan nasional, program sosial, atau agenda kekuasaan. Masyarakat diminta berpartisipasi, bergotong royong, berkorban, dan menunjukkan kesetiaan.

Gotong royong merupakan nilai penting dalam masyarakat Indonesia. Namun gotong royong kehilangan maknanya apabila berubah menjadi pengerahan tenaga tanpa musyawarah dan pembagian manfaat yang adil.

Pengorbanan juga dapat menjadi kebajikan. Namun negara tidak boleh terus-menerus meminta rakyat berkorban sementara elite menikmati perlindungan dan keuntungan.

Dalam negara rakyat, pengorbanan harus lahir dari kesadaran dan keadilan. Pihak yang mempunyai kekuasaan dan sumber daya lebih besar harus memikul beban lebih besar.

Warisan mobilisasi menjadi berbahaya apabila rakyat hanya dipanggil ketika negara membutuhkan dukungan, tenaga, suara, pajak, atau pengorbanan. Setelah tujuan tercapai, rakyat kembali dijauhkan dari pengambilan keputusan.

Mereka digerakkan, tetapi tidak diberi kepemilikan. Mereka diminta mempertahankan negara, tetapi tidak diberi kendali atas arah negara. Mereka diminta bekerja untuk pembangunan, tetapi tidak selalu menjadi pihak utama yang menikmati hasil pembangunan.

Di sinilah rakyat kembali diyatimkan. Negara mengingat mereka ketika membutuhkan tenaga, tetapi tidak selalu mengasuh mereka ketika menghadapi penderitaan.

F. Kepemimpinan Komando dan Bahaya Rakyat sebagai Massa yang Digerakkan

Kepemimpinan komando mempunyai tempat dalam keadaan tertentu. Perang, bencana, krisis kesehatan, ancaman keamanan, dan keadaan darurat membutuhkan keputusan cepat serta koordinasi yang jelas. Namun kepemimpinan komando menjadi berbahaya ketika diubah menjadi model umum penyelenggaraan negara.

Dalam model ini, pemimpin merasa mempunyai pengetahuan paling benar mengenai tujuan bangsa. Masyarakat dipandang belum cukup memahami keadaan dan karena itu hanya perlu mengikuti arahan.

Kritik dianggap menghambat. Musyawarah dipandang memperlambat. Perbedaan dianggap mengancam kesatuan. Ketaatan menjadi ukuran nasionalisme.

Kepemimpinan semacam itu dapat tampil efektif. Program berjalan cepat. Masyarakat bergerak seragam. Target administratif tercapai. Namun efektivitas tidak selalu sama dengan kebenaran.

Sebuah kereta dapat bergerak sangat cepat ke arah yang salah. Pemimpin administratif dan komando dapat menggerakkan negara, tetapi pemimpin peradaban harus menentukan apakah arah gerak tersebut melindungi manusia, memperkuat rakyat, dan menegakkan keadilan.

Bahaya terbesar muncul ketika rakyat dipandang sebagai massa. Massa tidak mempunyai wajah individual. Penderitaan seseorang dianggap kecil

dibandingkan tujuan besar. Hak manusia dapat dikorbankan karena negara mengklaim mewakili kepentingan jutaan orang.

Dalam bahasa statistik, kehilangan beberapa orang dapat dianggap sebagai biaya. Dalam bahasa peradaban, setiap manusia mempunyai martabat yang tidak boleh diabaikan.

Negara rakyat tidak boleh meniadakan individu atas nama massa. Namun negara juga tidak boleh membiarkan individualisme menghancurkan kepentingan bersama.

Tantangannya adalah membangun hubungan yang menempatkan manusia sebagai pribadi bermartabat sekaligus bagian dari rakyat yang mempunyai tanggung jawab sosial.

Kepemimpinan komando cenderung menganggap rakyat sebagai alat. Kepemimpinan rakyat memandang mereka sebagai pemilik.

Pemilik dapat diajak berkorban, tetapi harus mengetahui tujuan, memperoleh ruang musyawarah, serta mempunyai kemampuan mengoreksi keputusan. Alat tidak perlu diberi penjelasan. Pemilik harus diberi pertanggungjawaban.

Dalam konteks ini, kritik Cak Nun mengenai kepemimpinan menjadi penting. Peradaban dapat rusak ketika pemimpin kehilangan kemampuan merasakan penderitaan rakyat. Kekuasaan komando membuat pemimpin mudah melihat manusia dari jarak jauh. Rakyat hadir sebagai jumlah yang dapat dipindahkan, diarahkan, dan dikorbankan.

Pemimpin peradaban harus melawan kecenderungan tersebut. Pemimpin peradaban harus tetap melihat wajah manusia di balik angka, keluarga di balik kebijakan, serta kehidupan di balik target.

Kepemimpinan bukan kemampuan membuat rakyat patuh. Kepemimpinan adalah kemampuan membangun kesadaran, menanggung amanah, dan mengarahkan kekuatan bersama tanpa menghilangkan martabat manusia.

G. Dari Mobilisasi menuju Partisipasi Rakyat

Pengalaman mobilisasi pada masa Jepang memberikan pelajaran bahwa rakyat Indonesia mempunyai kemampuan besar untuk bergerak bersama. Dalam keadaan tertentu, masyarakat dapat menunjukkan disiplin, solidaritas, keberanian, dan pengorbanan yang luar biasa.

Kemampuan tersebut kemudian memainkan peranan dalam perjuangan kemerdekaan. Pengalaman organisasi, latihan, jaringan, dan mobilisasi membantu pembentukan kekuatan sosial serta militer Indonesia. Namun negara merdeka tidak boleh berhenti pada kemampuan memobilisasi.

Mobilisasi berbeda dari partisipasi. Mobilisasi bergerak dari pusat menuju rakyat. Partisipasi bergerak dari rakyat ke dalam proses penentuan keputusan. Dalam mobilisasi, tujuan telah ditetapkan. Rakyat diminta membantu mencapainya.

Dalam partisipasi, rakyat ikut menentukan tujuan, cara, pembagian beban, dan ukuran keberhasilan. Mobilisasi dapat diperlukan dalam

keadaan darurat. Namun kehidupan negara dalam jangka panjang harus dibangun melalui partisipasi.

Rakyat tidak boleh terus-menerus diposisikan sebagai pasukan pembangunan, massa pemilih, peserta program, atau penerima instruksi.

Mereka harus menjadi pemilik pengetahuan, pemilik arah, dan pemilik struktur. Perubahan dari mobilisasi menuju partisipasi memerlukan pembaruan kelembagaan.

Musyawarah tidak boleh hanya menjadi acara formal. Musyawarah harus mempunyai akibat terhadap keputusan. Perwakilan tidak boleh berhenti pada pemilu. Wakil harus dapat dikoreksi dan diminta pertanggungjawaban.

Organisasi rakyat tidak boleh dijadikan alat untuk memobilisasi dukungan. Organisasi rakyat harus mempunyai kemandirian untuk mengkritik dan mengawasi negara. Negara juga harus membedakan antara kedisiplinan dan ketundukan.

Rakyat yang disiplin adalah rakyat yang memahami tanggung jawabnya. Rakyat yang tunduk adalah rakyat yang tidak mempunyai ruang menilai perintah.

Negara rakyat membutuhkan kedisiplinan yang lahir dari ilmu dan kesadaran, bukan dari ketakutan. Dalam tata nilai Islam, ketaatan kepada pemimpin tidak dapat dipisahkan dari ketaatan kepada kebenaran dan keadilan. Jabatan tidak memberikan hak mutlak untuk menggerakkan manusia.

Pemimpin harus bermusyawarah, menjaga amanah, menghindari kezaliman, serta

mempertanggungjawabkan setiap pengorbanan yang diminta dari rakyat. Karena itu, pengalaman mobilisasi Jepang harus diolah menjadi pelajaran, bukan diwarisi sebagai model.

Kemampuan bergerak bersama harus dipertahankan. Namun arah gerak harus dimiliki rakyat.

H. Penutup Bab

Pendudukan Jepang berlangsung singkat, tetapi meninggalkan pengalaman kekuasaan yang sangat intens. Jepang datang sebagai pemerintahan militer dalam suasana perang. Masyarakat diatur melalui komando, propaganda, organisasi, disiplin, mobilisasi tenaga, dan pengorbanan.

Rakyat tidak hanya menjadi penduduk yang diadministrasikan. Mereka menjadi massa yang digerakkan. Propaganda membentuk tujuan besar. Organisasi menerjemahkan tujuan tersebut ke dalam tindakan. Struktur komando memastikan perintah berjalan. Militerisasi sosial mendisiplinkan tubuh dan pikiran manusia.

Sebagian pengalaman organisasi dan pelatihan kemudian membantu perjuangan kemerdekaan. Masyarakat memperoleh jaringan, keterampilan, kedisiplinan, dan pengalaman mengelola kelompok. Namun warisan tersebut juga membawa bahaya.

Negara dapat belajar bahwa rakyat mudah digerakkan melalui narasi, simbol, organisasi, ketakutan, dan tujuan besar. Kekuasaan dapat

menganggap bahwa partisipasi berarti kesediaan mengikuti perintah.

Di sinilah warisan Jepang bertemu dengan warisan Hindia Belanda. Belanda membangun birokrasi yang mengatur rakyat. Jepang memperluas pengalaman aparat dan organisasi dalam memobilisasi rakyat.

Perpaduan keduanya dapat menghasilkan negara yang sangat mampu mencatat, mengklasifikasikan, memerintah, dan menggerakkan, tetapi belum mampu menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan.

Rakyat dipanggil ketika tenaganya dibutuhkan. Mereka dimobilisasi ketika dukungan diperlukan. Mereka diminta berkorban ketika negara menghadapi krisis.

Namun mereka tidak selalu diberi kedudukan yang sebanding dalam menentukan arah, membagi beban, dan menikmati hasil.

Krisis kepemimpinan muncul ketika pemimpin menganggap kemampuannya menggerakkan massa sebagai bukti bahwa ia mewakili rakyat. Padahal rakyat yang bergerak belum tentu rakyat yang berdaulat.

Kepatuhan belum tentu persetujuan. Keseragaman belum tentu persatuan. Kecepatan belum tentu kebenaran. Pengorbanan belum tentu adil.

Indonesia membutuhkan kemampuan mobilisasi dalam keadaan darurat, tetapi negara tidak boleh dibangun sebagai keadaan darurat permanen.

Negara rakyat harus bergerak dari mobilisasi menuju partisipasi, dari komando menuju musyawarah, dari kepatuhan menuju kesadaran, dan

dari pengorbanan yang dipaksakan menuju tanggung jawab yang dibagi secara adil.

Rakyat bukan pasukan yang terus-menerus menunggu perintah. Mereka adalah pemilik negara. Aparat bukan penggerak massa bagi kepentingan penguasa. Aparat adalah pelindung rakyat dan konstitusi.

Pemimpin bukan komandan atas kehidupan seluruh manusia. Pemimpin adalah pemegang amanah yang wajib menjelaskan arah, mendengar rakyat, menanggung akibat keputusan, dan memastikan bahwa tujuan negara tidak dibayar dengan penghancuran martabat manusia.

Warisan Jepang karena itu tidak cukup dibaca sebagai sejarah pendudukan. Warisan Jepang harus dibaca sebagai peringatan peradaban yaitu negara yang mampu menggerakkan rakyat belum tentu menjadi negara rakyat.

Negara rakyat baru lahir ketika kekuatan kolektif masyarakat dibangun melalui kesadaran, musyawarah, keadilan, dan kepemilikan yang nyata atas arah kehidupan bersama.

Bab IX
Amerika Serikat, Perang Dingin, 1965, dan Orde Baru

A. Indonesia dalam Perang Dingin

Indonesia pada masa Perang Dingin bukan negara kecil yang berada di pinggir perhatian dunia. Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang besar, wilayah yang luas, sumber daya alam yang penting, posisi strategis di antara Samudra Hindia dan Pasifik, serta pengaruh kekuasaan yang besar di Asia dan dunia yang sedang mengalami dekolonisasi.

Letak geografis Indonesia menempatkannya di sekitar jalur pelayaran utama yang menghubungkan Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, Australia, dan Pasifik. Kekayaan minyak, gas, mineral, perkebunan, dan sumber daya lainnya memperbesar arti ekonomi dan strategisnya. Sebagai negara yang baru merdeka dan mempunyai pengaruh besar di antara bangsa-bangsa Asia-Afrika, arah Indonesia dipandang dapat memengaruhi keseimbangan kawasan. Karena itu, Indonesia tidak pernah dibaca oleh kekuatan besar hanya sebagai persoalan domestik.

Amerika Serikat melihat Indonesia dalam konteks persaingan global melawan komunisme. Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok juga mempunyai hubungan serta kepentingan terhadap Indonesia. Sementara Presiden Soekarno berusaha membangun ruang yang tidak sepenuhnya tunduk kepada blok Barat maupun blok komunis, meskipun dalam

perkembangan akhir pemerintahannya hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat dan negara-negara Barat semakin memburuk.

Di dalam negeri, Sukarno berusaha mempertahankan keseimbangan antara tiga kekuatan besar yang dirumuskan melalui konsep Nasionalisme, Agama, dan Komunisme atau Nasakom. Angkatan Darat, Partai Komunis Indonesia, kelompok-kelompok Islam, nasionalis, birokrasi, serta kekuatan lainnya hidup dalam hubungan yang semakin tegang.

PKI telah berkembang menjadi salah satu partai komunis terbesar di dunia di luar negara komunis. Angkatan Darat memandang perkembangan tersebut sebagai ancaman terhadap kedudukan, institusional, dan ideologisnya. Pada saat yang sama, Sukarno semakin mengandalkan keseimbangan di antara kekuatan-kekuatan tersebut untuk mempertahankan kepemimpinannya.

Dokumen pemerintah Amerika Serikat sebelum September 1965 memperlihatkan bahwa Washington memandang perkembangan Indonesia dengan kekhawatiran yang besar. Penilaian intelijen dan diplomatik Amerika menggambarkan meningkatnya pengaruh PKI, kedekatan Sukarno dengan kekuatan komunis, serta kemungkinan Indonesia bergerak semakin jauh dari negara-negara Barat. Namun dokumen-dokumen tersebut juga menunjukkan bahwa situasi Indonesia dipahami sebagai arena persaingan internal yang kompleks, bukan sebagai proses yang sepenuhnya dikendalikan dari luar.

Konfrontasi Indonesia terhadap pembentukan Federasi Malaysia turut memperburuk hubungan dengan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Dalam pandangan Sukarno, Malaysia merupakan proyek neokolonialisme Inggris. Bagi Amerika Serikat dan Inggris, kebijakan tersebut meningkatkan kekhawatiran bahwa Indonesia sedang bergerak menuju posisi yang semakin radikal dan berpotensi mengganggu stabilitas Asia Tenggara. Dengan demikian, menjelang 1965 Indonesia berada dalam pertemuan empat ketegangan besar.



Pertama, ketegangan internal antara PKI, Angkatan Darat, kelompok Islam, nasionalis, dan kekuatan lainnya. Kedua, ketegangan antara Presiden Sukarno dan sebagian pimpinan Angkatan Darat mengenai arah negara dan distribusi kekuasaan. Ketiga, ketegangan regional akibat Konfrontasi Malaysia. Keempat, persaingan global antara Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Republik Rakyat Tiongkok.

Peristiwa 1965 tidak dapat dipahami secara utuh apabila salah satu lapisan tersebut dihilangkan. Jika

hanya dibaca sebagai konflik internal, pengaruh Perang Dingin akan hilang. Jika hanya dibaca sebagai operasi asing, tindakan dan tanggung jawab aktor domestik akan terhapus. Jika hanya dibaca sebagai konflik ideologi, perebutan kekuasaan, konflik institusi, dan ketegangan sosial di berbagai daerah tidak akan terlihat.

Karena itu, naskah ini menggunakan istilah konfigurasi 1965. Istilah tersebut menunjukkan bahwa peristiwa itu lahir dan berkembang melalui pertemuan berbagai kekuatan, kepentingan, keputusan, ketakutan, serta tindakan yang tidak dapat disederhanakan menjadi satu aktor atau satu sebab.

B. Tahun 1965 sebagai Titik Balik Geopolitik

Gerakan 30 September pada malam 30 September dan dini hari 1 Oktober 1965 menculik serta membunuh sejumlah pimpinan Angkatan Darat. Mayor Jenderal Soeharto kemudian mengambil kendali atas kekuatan Angkatan Darat di Jakarta, menumpas gerakan tersebut, dan secara bertahap membangun posisi yang semakin kuat.

Identitas seluruh perancang, pembagian tanggung jawab, tingkat keterlibatan pimpinan PKI, hubungan dengan unsur militer, serta pengetahuan Presiden Sukarno tetap menjadi bagian dari perdebatan sejarah. Dokumen intelijen Amerika sendiri memperlihatkan adanya perubahan dan ketidakpastian dalam penilaian tentang apa yang sebenarnya terjadi. Salah satu studi CIA tahun 1968 menggambarkan gerakan tersebut terutama sebagai upaya pembersihan terhadap pimpinan Angkatan Darat, bukan sebagai

rencana sederhana untuk menggulingkan seluruh pemerintahan Sukarno.

Karena itu, naskah ini tidak menetapkan satu versi final mengenai seluruh asal-usul Gerakan 30 September. Kesimpulan harus tetap sebanding dengan bukti. Namun akibatnya lebih jelas.

Angkatan Darat di bawah Soeharto berhasil mengambil prakarsa. PKI dituduh sebagai kekuatan utama di belakang gerakan. Organisasi, anggota, simpatisan, dan orang-orang yang dianggap berkaitan dengan PKI kemudian menjadi sasaran penangkapan, kekerasan, pembunuhan, penahanan, dan pengucilan sosial dalam skala besar.

Dokumen diplomatik Amerika yang kini telah dibuka menunjukkan bahwa Kedutaan Besar Amerika Serikat menerima laporan terperinci mengenai pembunuhan dan penindasan terhadap PKI serta organisasi-organisasi yang dianggap berafiliasi dengannya. Dokumen tersebut mencatat bahwa pejabat Amerika mengetahui kampanye kekerasan sedang berlangsung, termasuk penangkapan dan eksekusi terhadap pimpinan serta anggota PKI.

Jumlah pasti korban tetap diperdebatkan. Perkiraan berbeda-beda karena tidak tersedia pencatatan nasional yang lengkap, banyak pembunuhan berlangsung di luar proses hukum, dan pengalaman setiap daerah berbeda. Oleh karena itu, naskah ini tidak menggunakan satu angka sebagai kepastian mutlak. Yang tidak dapat disangkal adalah bahwa kekerasan berlangsung dalam skala sangat besar

dan menghasilkan luka sosial yang melampaui generasi.

Bagi Amerika Serikat, perubahan yang terjadi setelah 1 Oktober 1965 dipandang sebagai pembalikan strategis yang sangat penting. Dokumen resmi hubungan luar negeri Amerika menggambarkan penghancuran PKI sebagai perubahan besar dalam orientasi kekuasaan Indonesia dan sebagai kesempatan untuk memindahkan Indonesia dari kecenderungan Soekarno menuju hubungan yang lebih dekat dengan negara-negara Barat.

Dokumen deklasifikasi juga menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak sekadar menjadi pengamat pasif. Pejabat Amerika membahas permintaan bantuan dari unsur Angkatan Darat Indonesia berupa peralatan komunikasi, perlengkapan medis, beras, dan kemungkinan senjata ringan. Sebuah memorandum November 1965 menyebut permintaan tersebut sebagai bantuan kepada Angkatan Darat dalam menghadapi PKI. Dokumen lain mencatat persetujuan serta pengiriman bantuan tertentu secara cepat, termasuk perangkat komunikasi yang dipandang dapat membantu koordinasi komando Angkatan Darat.

Fakta tersebut mendukung kesimpulan bahwa pemerintah Amerika Serikat mengetahui tindakan Angkatan Darat terhadap PKI dan memberikan dukungan material serta kekuasaan tertentu dalam konteks itu.

Namun bukti tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa Amerika Serikat merancang Gerakan 30 September atau mengendalikan seluruh

operasi kekerasan yang berlangsung setelahnya. Pernyataan seperti itu memerlukan bukti langsung mengenai perencanaan, komando, dan pelaksanaan yang belum dapat disimpulkan hanya dari dokumen bantuan serta dukungan oligarki. Perbedaan ini sangat penting.

Ada bukti bahwa Amerika Serikat menginginkan melemahnya PKI dan perubahan orientasi kekuasaan Indonesia.

Ada bukti bahwa pejabat Amerika memandang tindakan Angkatan Darat sebagai perkembangan yang menguntungkan kepentingan strategis Amerika. Ada bukti bahwa bantuan tertentu diberikan kepada Angkatan Darat.

Namun pertanyaan tentang siapa yang merancang setiap bagian peristiwa, siapa yang mengendalikan setiap gelombang kekerasan, dan bagaimana keputusan diambil di berbagai daerah membutuhkan penelitian yang lebih terperinci.

Dengan bahasa metodologis yang disiplin, dapat dikatakan bahwa Amerika Serikat merupakan aktor penting dalam konfigurasi internasional 1965 dan mendukung konsolidasi kekuatan anti-PKI setelah peristiwa 1 Oktober. Akan tetapi, tanggung jawab langsung aktor domestik dalam penculikan, pembunuhan, penahanan, dan pembangunan rezim baru tidak boleh dihapus dengan menjadikan kekuatan asing sebagai penjelasan tunggal.

Tahun 1965 menjadi titik balik karena sejak saat itu arah geopolitik Indonesia berubah secara mendasar. Konfrontasi dengan Malaysia dihentikan. Hubungan

dengan negara-negara Barat diperbaiki. Indonesia kembali bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pemerintahan baru semakin terbuka terhadap bantuan, pembiayaan, investasi, dan kerja sama ekonomi internasional.

Perubahan tersebut tidak hanya merupakan perubahan kebijakan luar negeri. Perubahan tersebut menjadi perubahan arsitektur kekuasaan, ekonomi, dan sosial Indonesia.

C. Tahun 1965 sebagai Luka Konstitusional dan Sosial

Peristiwa 1965 sering dibaca sebagai pergantian kekuatan yaitu PKI dihancurkan, kekuasaan Sukarno melemah, dan Soeharto secara bertahap menjadi pusat pemerintahan baru. Namun dampaknya jauh lebih dalam.

Tahun 1965 merupakan luka konstitusional karena perubahan kekuasaan berlangsung tidak hanya melalui mekanisme yang sepenuhnya terbuka dan normal, tetapi melalui keadaan darurat kekuasaan, kekuatan militer, penataan ulang lembaga, serta pembentukan legitimasi baru di tengah kekerasan dan ketakutan.

Soeharto tidak langsung menjadi Presiden pada 1 Oktober 1965. Peralihan berlangsung secara bertahap. Angkatan Darat mengambil kendali keamanan, membatasi ruang gerak Presiden Sukarno, membubarkan PKI, mengonsolidasikan dukungan, dan

memperoleh landasan kelembagaan melalui berbagai keputusan MPRS.

Proses tersebut menunjukkan bahwa konstitusi tidak bekerja dalam ruang yang terpisah dari distribusi kekuatan nyata. Teks hukum dapat tetap ada, tetapi arti kekuasaan berubah ketika satu institusi menguasai keamanan, informasi, organisasi, dan kemampuan menentukan siapa yang dianggap sebagai ancaman.

Setelah 1965, anti-komunisme tidak hanya menjadi sikap penguasa. Anti-komunisme berkembang menjadi dasar penataan negara. TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 membubarkan PKI, menyatakannya sebagai organisasi terlarang, serta melarang penyebaran ajaran komunisme, Marxisme-Leninisme. Ketetapan tersebut kemudian mempunyai akibat panjang terhadap hukum, pendidikan, politik, kebudayaan, dan kehidupan orang-orang yang dikaitkan dengan PKI.

Larangan tersebut tidak berhenti pada organisasi yang secara langsung terlibat. Dalam praktiknya, stigma meluas kepada keluarga, keturunan, mantan tahanan, seniman, guru, buruh, petani, dan orang-orang yang karena keadaan lokal atau konflik sosial dituduh mempunyai hubungan dengan komunisme. Di sinilah luka sosial berkembang.

Masyarakat tidak hanya kehilangan manusia melalui pembunuhan dan penahanan. Mereka juga kehilangan kemampuan membicarakan pengalaman secara terbuka. Ketakutan diturunkan di dalam keluarga. Identitas disembunyikan. Anak-anak belajar bahwa sejarah tertentu tidak boleh ditanyakan. Kekerasan membentuk keheningan.

Negara kemudian menghasilkan satu narasi resmi yang berfungsi sebagai dasar legitimasi pemerintahan. Angkatan Darat diposisikan sebagai penyelamat bangsa dari ancaman komunisme, sementara kompleksitas peristiwa, variasi daerah, dan penderitaan korban sulit memperoleh ruang.

Sebuah bangsa tentu membutuhkan ingatan bersama. Namun ingatan yang dibentuk hanya oleh pihak yang menang dapat berubah menjadi alat kekuasaan.

Ketika sejarah tidak boleh diuji, rakyat kehilangan salah satu bentuk kedaulatannya yaitu hak untuk memahami masa lalu yang membentuk negara mereka. Luka 1965 juga menjadi luka moral.

Banyak orang dihukum tanpa pengadilan. Hubungan sosial, agama, ekonomi, dan konflik lokal bercampur dengan operasi anti-PKI. Dalam sejumlah wilayah, organisasi masyarakat dan kelompok sipil ikut terlibat dalam kekerasan. Dokumen diplomatik Amerika bahkan mencatat pernyataan organisasi lokal mengenai niat membunuh anggota PKI yang mereka tangkap.

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa kekerasan negara tidak selalu dilakukan hanya oleh aparat formal. Negara dapat menciptakan kategori musuh, memberikan legitimasi, membentuk iklim, lalu membiarkan masyarakat menjalankan kekerasan terhadap sesamanya.

Rakyat yang seharusnya menjadi satu pemilik negara dipecah menjadi kelompok yang layak

dilindungi dan kelompok yang dianggap dapat dihilangkan.

Dalam perspektif Sekolah Negarawan, inilah salah satu bentuk hilangnya rakyat dari arsitektur negara. Negara tidak lagi melihat setiap manusia sebagai pihak yang mempunyai martabat dan hak. Identitas golongan menjadi dasar untuk menentukan siapa yang diakui sebagai rakyat dan siapa yang dikeluarkan dari perlindungan. Tahun 1965 karena itu tidak boleh diperlakukan hanya sebagai episode perang ideologi.

Tahun 1965 adalah ujian terhadap hukum, kepemimpinan, agama, masyarakat, dan kemanusiaan. Apakah negara tetap wajib melindungi manusia yang dianggap berbahaya? Apakah seseorang boleh dihukum tanpa proses hukum? Apakah keluarga dapat mewarisi kesalahan? Apakah keamanan negara dapat dibangun melalui penghapusan kebenaran? Pertanyaan-pertanyaan tersebut belum sepenuhnya selesai.

D. Orde Baru dan Negara Stabilitas

Orde Baru membangun legitimasi utamanya melalui janji memulihkan keamanan, ketertiban, dan ekonomi.

Setelah masa konflik, hiperinflasi, konfrontasi internasional, serta kekerasan 1965, stabilitas mempunyai daya tarik yang sangat kuat. Banyak masyarakat menginginkan kehidupan yang lebih teratur, harga yang dapat dikendalikan, pemerintahan

yang bekerja, dan berakhirnya konflik terbuka. Stabilitas bukan tujuan yang salah.

Negara tidak dapat melindungi rakyat apabila pemerintahan terus-menerus berada dalam krisis. Pembangunan membutuhkan kepastian. Ekonomi membutuhkan kemampuan perencanaan. Rakyat membutuhkan rasa aman.

Namun stabilitas dapat berubah menjadi ideologi ketika seluruh persoalan diukur berdasarkan apakah ia mengganggu atau mempertahankan kekuasaan.

Orde Baru membangun negara yang sangat terpusat. Militer memperoleh peranan kekuasaan dan sosial yang luas melalui doktrin dwifungsi. Birokrasi menjadi alat penting pengendalian kekuasaan. Partai-partai disederhanakan. Organisasi masyarakat, media, kampus, buruh, dan kehidupan desa ditempatkan dalam struktur pengawasan.

Pemilu tetap diselenggarakan, tetapi tidak bekerja sebagai kompetisi kekuasaan yang sepenuhnya terbuka. Pemerintahan mempunyai keunggulan melalui birokrasi, militer, regulasi, organisasi, dan kontrol informasi.

Dengan demikian, negara stabilitas tetap menggunakan institusi formal demokrasi, tetapi membatasi kemungkinan pergantian dan koreksi terhadap pusat kekuasaan.

Dalam negara stabilitas, rakyat dipandang melalui dua cara. Pertama, rakyat adalah objek pembangunan yang harus diarahkan, dididik, dan dimobilisasi untuk mencapai target ekonomi. Kedua,

rakyat adalah objek keamanan yang harus diawasi agar tidak menjadi sumber gangguan pemerintah. Warisan Belanda dan Jepang bertemu kembali.

Dari Hindia Belanda diwarisi negara administrasi yang mencatat, mengatur, memungut, dan mengendalikan penduduk. Dari pengalaman Jepang diwarisi kemampuan mobilisasi, komando, organisasi massa, dan pengorbanan atas nama tujuan negara.

Orde Baru menyatukan keduanya dalam negara pembangunan dan keamanan. Birokrasi mengatur rakyat. Aparat mengawasi rakyat. Partai politik menggerakkan rakyat. Pembangunan menjadi tujuan besar yang memberikan legitimasi kepada seluruh struktur tersebut.

Kritik dapat dipandang sebagai hambatan pembangunan. Konflik tanah dapat diperlakukan sebagai gangguan stabilitas. Tuntutan buruh dapat dianggap mengancam iklim investasi. Perbedaan pandangan dapat ditempatkan sebagai risiko keamanan.

Stabilitas kemudian tidak hanya berarti tidak adanya kekerasan. Stabilitas berarti terkendalinya masyarakat oleh negara.

Dalam perspektif kepemimpinan administratif, keadaan seperti itu dapat tampak berhasil. Program berjalan, pertumbuhan dicapai, infrastruktur dibangun, dan pemerintahan bertahan lama.

Namun Sekolah Negarawan mengajukan pertanyaan yang berbeda yaitu apakah rakyat semakin menjadi pemilik negara, atau semakin menjadi objek pembangunan dan keamanan?

E. Modal Asing dan Pembangunan

Perubahan pemerintahan setelah 1965 diikuti oleh perubahan besar dalam kebijakan ekonomi. Pemerintahan baru bergerak dari ekonomi yang semakin konfrontatif terhadap Barat menuju stabilisasi, pemulihan hubungan dengan lembaga keuangan internasional, bantuan luar negeri, serta pembukaan terhadap penanaman modal asing.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing menjadi salah satu simbol utama perubahan tersebut. Undang-undang itu disahkan pada 10 Januari 1967 dan membentuk dasar hukum baru bagi masuknya investasi langsung asing ke Indonesia.

Pembukaan modal asing tidak dapat dinilai hanya sebagai penyerahan kedaulatan. Indonesia pada saat itu menghadapi krisis ekonomi yang sangat berat, inflasi tinggi, keterbatasan pembiayaan, kelemahan industri, dan kebutuhan pembangunan yang luas.

Investasi, bantuan, serta kerja sama ekonomi dapat membantu pemulihan. Kebijakan stabilisasi juga berhasil menurunkan inflasi secara besar dalam beberapa tahun berikutnya dan menciptakan dasar bagi pertumbuhan ekonomi. Dokumen intelijen Amerika mencatat kemajuan stabilisasi sejak 1966 serta meningkatnya peranan bantuan dan investasi dalam orientasi ekonomi baru. Namun pembukaan tersebut juga harus dibaca sebagai bagian dari konfigurasi geopolitik baru.

Dokumen pemerintah Amerika menunjukkan bahwa Washington melihat bantuan ekonomi bukan

hanya sebagai tindakan kemanusiaan atau ekonomi, tetapi juga sebagai cara mendukung orientasi kekuasaan baru Indonesia. Memorandum resmi menghubungkan dukungan terhadap program stabilisasi dengan kebutuhan mempertahankan arah kekuasaan dan kepemimpinan yang dianggap menjanjikan bagi kepentingan Amerika serta keamanan Asia Tenggara.

Dalam sebuah dokumen tahun 1967, Kedutaan Besar Amerika bahkan menggambarkan Indonesia sebagai ruang bagi suatu "eksperimen terkendali dalam modernisasi", dengan bantuan multilateral, perantara teknokratik, serta perhatian terhadap korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan kecenderungan militerisme. Bahasa tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya dipandang sebagai penerima bantuan, tetapi sebagai masyarakat yang arah modernisasinya hendak dipengaruhi dan diamati.

Pernyataan itu tidak berarti bahwa seluruh kebijakan ekonomi Indonesia diperintah Amerika Serikat. Para teknokrat, pejabat, militer, pengusaha, dan aktor domestik Indonesia mempunyai peran serta gagasannya sendiri.

Namun dokumen tersebut memperlihatkan bahwa modernisasi Indonesia menjadi ruang pertemuan antara kepentingan domestik dan agenda negara-negara donor.

Di sinilah hubungan dengan konsep *Invited Colonialism* perlu dibaca secara hati-hati. Modal asing tidak otomatis merupakan kolonialisme. Bantuan tidak

otomatis menghilangkan kedaulatan. Indonesia membutuhkan pemulihan ekonomi.

Namun hubungan tersebut dapat menjadi problematik apabila arah pembangunan lebih banyak disesuaikan kepada kebutuhan kreditor, investor, dan tatanan internasional daripada kepada rakyat.

Sebuah penilaian intelijen Amerika tahun 1967 menyatakan bahwa program stabilisasi dan kebijakan ekonomi Indonesia dalam tingkat besar dirancang untuk memenuhi tuntutan kreditor asing. Dokumen lain mencatat bahwa meskipun IMF menilai kemajuan ekonomi secara positif, kehidupan rakyat biasa belum otomatis membaik; harga pangan tetap tinggi dan masalah sosial mendasar belum terselesaikan.

Di sini tampak perbedaan antara stabilisasi makroekonomi dan keadilan sosial. Negara dapat berhasil menata inflasi, utang, dan investasi, tetapi rakyat tetap menghadapi harga, tanah, upah, dan ketimpangan.

Pembangunan tidak dapat dinilai hanya dari pertumbuhan. Pertanyaan utamanya adalah siapa yang menjadi pemilik hasil pembangunan dan siapa yang menanggung biayanya.

F. Negara Keamanan dan Kontrol terhadap Rakyat

Setelah 1965, anti-komunisme berkembang menjadi dasar negara keamanan. Ancaman komunisme tidak hanya digunakan untuk menilai partai politik tertentu. Ancaman komunisme menjadi kategori luas yang dapat dipakai untuk mengatur pendidikan,

pekerjaan, kebudayaan, pers, serikat buruh, organisasi tani, kehidupan kampus, dan aktivitas masyarakat.

Negara keamanan mempunyai logika yang berbeda dari negara rakyat. Negara rakyat memulai dari anggapan bahwa rakyat adalah pemilik yang mempunyai hak, suara, serta kemampuan mengoreksi kekuasaan.

Negara keamanan memulai dari anggapan bahwa masyarakat mengandung potensi ancaman yang harus diketahui, diawasi, dan dikendalikan.

Dalam keadaan semacam itu, data penduduk, organisasi, pekerjaan, keluarga, dan riwayat kekuasaan menjadi alat untuk menentukan tingkat kepercayaan negara kepada seseorang.

Rakyat tidak hanya dinilai berdasarkan tindakan yang dilakukan. Mereka dapat dinilai berdasarkan hubungan keluarga, organisasi masa lalu, tempat tinggal, pergaulan, atau dugaan ideologis. Kontrol juga bekerja melalui ketakutan.

Tidak semua orang harus ditangkap agar masyarakat patuh. Cukup terdapat kesadaran bahwa kritik dapat menimbulkan akibat terhadap pekerjaan, pendidikan, keamanan, atau keluarga.

Dengan demikian, kekuasaan memasuki pikiran manusia. Rakyat melakukan penyensoran terhadap dirinya sendiri.

Negara keamanan juga mengubah hubungan aparat dengan rakyat. Aparat tidak hanya menjaga keamanan dari tindakan kekerasan. Aparat dapat memperoleh fungsi menentukan batas-batas kegiatan

pemerintah, organisasi, dan pemikiran yang dianggap aman bagi negara.

Ketika keamanan diperluas menjadi pengawasan terhadap seluruh kehidupan negara, aparat dapat berubah dari pelindung rakyat menjadi pengawas rakyat.

Hal ini tidak berarti bahwa negara tidak membutuhkan aparat kuat. Indonesia menghadapi ancaman nyata, konflik, separatisme, kekerasan, dan tantangan keamanan.

Namun kekuatan aparat harus selalu dibatasi oleh hukum, pertanggungjawaban, dan kedudukan rakyat sebagai pemilik negara.

Keamanan tidak boleh diartikan hanya sebagai keamanan pemerintah. Keamanan harus berarti keamanan manusia yang bebas dari kekerasan, kemiskinan, ketakutan, kesewenang-wenangan, serta hilangnya hak.

Orde Baru lebih sering menghubungkan keamanan dengan ketertiban negara dan kelangsungan pembangunan. Dalam kerangka tersebut, kelompok yang mengganggu kebijakan pemerintah dapat lebih mudah diposisikan sebagai ancaman terhadap negara.

Perbedaan antara pemerintah dan negara menjadi kabur. Kritik terhadap pemerintah dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas. Perlawanan terhadap proyek dianggap menghambat pembangunan. Perselisihan dengan aparat dianggap sebagai ketidaktaatan terhadap negara.

Ketika pemerintah menguasai definisi tentang siapa yang menjadi ancaman, rakyat kehilangan ruang aman untuk mengoreksi kekuasaan.

G. Kepemimpinan Stabilitas dan Harga yang Dibayar Rakyat

Kepemimpinan Soeharto berhasil membangun citra sebagai kepemimpinan yang mengembalikan ketertiban setelah kekacauan negara dan ekonomi. Pemerintahannya menciptakan stabilitas jangka panjang, membuka hubungan ekonomi internasional, membangun infrastruktur, meningkatkan produksi, dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang besar dalam beberapa periode.

Pencapaian tersebut merupakan bagian dari sejarah dan tidak perlu dihapus hanya karena terdapat kritik terhadap Orde Baru. Namun setiap stabilitas mempunyai biaya dan distribusi biaya itu harus diperiksa.

Siapa yang memperoleh keamanan?

Siapa yang kehilangan suara?

Siapa yang menikmati pertumbuhan?

Siapa yang kehilangan tanah?

Siapa yang memperoleh akses pendidikan dan ekonomi?

Siapa yang hidup di bawah stigma oligarki?

Dalam kepemimpinan stabilitas, keberhasilan dapat diukur dari kemampuan negara mengendalikan konflik. Namun konflik yang hilang dari permukaan belum tentu selesai. Konflik tersebut dapat ditekan, dipindahkan, atau disimpan di dalam masyarakat.

Rakyat yang tidak dapat berbicara belum tentu setuju. Masyarakat yang tidak berdemonstrasi belum tentu sejahtera. Media yang tenang belum tentu menunjukkan tidak adanya ketidakadilan.

Stabilitas juga dapat membuat kepemimpinan kehilangan mekanisme koreksi. Ketika pemerintah terlalu lama berada dalam kekuasaan, birokrasi, partai, militer, bisnis, dan keluarga elite dapat membentuk jaringan kepentingan yang saling melindungi.

Pemimpin kemudian menerima informasi yang telah disaring. Kritik dianggap ancaman. Keberhasilan dilaporkan ke atas, sedangkan penderitaan berhenti di bawah. Di sinilah krisis kepemimpinan yang dibahas Cak Nun memperoleh relevansi.

Pemimpin dapat tampak berhasil secara administratif, tetapi kehilangan kemampuan merasakan penderitaan rakyat. Pemimpin tersebut melihat manusia sebagai angka pembangunan, tenaga kerja, penduduk yang harus ditertibkan, atau massa yang harus digerakkan.

Kepemimpinan stabilitas menjadi berbahaya apabila stabilitas lebih penting daripada keadilan. Keadilan memang membutuhkan ketertiban. Namun ketertiban yang tidak adil hanya membekukan ketimpangan. Kemakmuran juga memerlukan stabilitas. Namun kemakmuran yang lahir dari penghilangan suara rakyat dapat berubah menjadi kemewahan bagi elite dan statistik yang tidak menyelamatkan manusia.

Harga lain yang dibayar adalah penyempitan makna kepemimpinan. Pemimpin dipandang berhasil

apabila mampu menjaga negara tetap terkendali, bukan apabila mampu membentuk rakyat yang berdaulat.

Rakyat yang mandiri dapat dianggap sulit diatur. Organisasi yang kritis dianggap berbahaya. Daerah yang menuntut keadilan dipandang mengganggu kesatuan.

Negara kemudian lebih memilih rakyat yang patuh daripada rakyat yang dewasa. Padahal tujuan negara bukan menghasilkan ketundukan. Tujuan negara adalah membangun manusia yang mampu menjalankan kedaulatannya dengan ilmu, nilai, dan tanggung jawab.

H. Amerika Serikat: Aktor Penting, Bukan Penjelasan Tunggal

Pembahasan mengenai Amerika Serikat harus dijaga dari dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah menyangkal bahwa Amerika mempunyai peran penting dalam perubahan Indonesia setelah 1965.

Dokumen resmi menunjukkan bahwa Amerika memandang penghancuran PKI dan naiknya Angkatan Darat sebagai perkembangan strategis yang menguntungkan. Amerika mengetahui berlangsungnya kekerasan, memberikan dukungan tertentu kepada Angkatan Darat, membantu program stabilisasi ekonomi, dan mendorong hubungan yang lebih dekat dengan pemerintahan Soeharto.

Ekstrem kedua adalah menjadikan Amerika sebagai pengendali tunggal seluruh peristiwa. Pandangan tersebut menghilangkan konflik internal Indonesia, keputusan pimpinan Angkatan Darat,

tindakan organisasi masyarakat, persaingan Sukarno–PKI–militer, serta variasi kekerasan di berbagai daerah.

Amerika juga dapat secara tidak sadar membebaskan elite dan institusi domestik dari pertanggungjawaban moral. Kekuatan asing dapat mendorong, mendukung, menyediakan bantuan, menyebarkan informasi, atau mengambil manfaat. Namun manusia Indonesia tetap membuat keputusan dan menjalankan tindakan di lapangan.

Dengan demikian, posisi yang lebih bertanggung jawab adalah menyatakan bahwa Amerika Serikat merupakan aktor penting dalam konfigurasi Perang Dingin, mendukung kekuatan anti-PKI, menyambut perubahan orientasi Indonesia, dan membantu konsolidasi pemerintahan baru.

Namun sejarah 1965 bukan cerita tentang Amerika Serikat saja. Sejarah 1965 adalah cerita tentang kelemahan arsitektur negara Indonesia, persaingan elite, konflik ideologi, ketakutan, kekerasan, peran militer, peran organisasi sipil, serta masyarakat yang belum mempunyai perlindungan konstitusional cukup kuat ketika negara menetapkan sebagian rakyat sebagai musuh. Pembacaan seperti ini justru lebih sesuai dengan tesis Sekolah Negarawan.

Kolonialisme struktural dan Invited Colonialism tidak terjadi hanya karena pihak luar mempunyai kepentingan. Kolonialisme struktural dan Invited Colonialism terjadi ketika struktur domestik membuka ruang, elite memperoleh manfaat, dan rakyat tidak mempunyai kedudukan untuk mengoreksi keputusan.

I. Penutup Bab

Indonesia pada masa Perang Dingin merupakan negara yang sangat penting. Posisi geopolitik, sumber daya, jumlah penduduk, dan pengaruh kekuasaan menjadikan arah Indonesia bagian dari persaingan dunia.

Peristiwa 1965 menjadi titik balik karena mengubah bukan hanya keseimbangan kekuasaan domestik, tetapi juga orientasi geopolitik, ekonomi, dan kelembagaan negara.

PKI dihancurkan sebagai kekuatan pemerintahan. Presiden Sukarno kehilangan kekuasaan secara bertahap. Angkatan Darat di bawah Soeharto menjadi pusat negara baru. Anti-komunisme berkembang menjadi dasar kekuasaan, hukum, pendidikan, dan keamanan.

Dokumen deklasifikasi memperlihatkan bahwa Amerika Serikat mengetahui berlangsungnya kampanye kekerasan terhadap PKI, menyambut hasil perubahan kekuasaan tersebut, serta memberikan bantuan tertentu kepada Angkatan Darat. Pemerintah Amerika kemudian mendukung program stabilisasi dan modernisasi pemerintahan Soeharto karena dipandang sesuai dengan kepentingan strategis Amerika di Asia Tenggara.

Namun bukti tersebut tidak cukup untuk mengubah sejarah 1965 menjadi teori bahwa seluruh peristiwa dirancang dan dikendalikan oleh Amerika Serikat.

Aktor domestik tetap mempunyai tanggung jawab. Angkatan Darat menjalankan penumpasan dan

membangun arsitektur negara baru. Organisasi masyarakat tertentu ikut terlibat dalam kekerasan. Pemerintah menyusun legitimasi. Birokrasi, pendidikan, hukum, media, dan masyarakat kemudian mereproduksi narasi serta struktur anti-komunisme dalam waktu yang panjang. Setelah 1965, Indonesia memasuki arsitektur kekuasaan dan ekonomi baru.

Negara dibangun berdasarkan stabilitas, keamanan, pembangunan, keterbukaan terhadap modal asing, bantuan internasional, dan kepemimpinan yang terpusat. Arsitektur tersebut menghasilkan kemajuan tertentu. Ekonomi distabilkan. Infrastruktur dibangun. Pemerintahan memperoleh kemampuan perencanaan. Hubungan internasional dipulihkan. Namun harga yang dibayar rakyat juga besar.

Sebagian rakyat kehilangan hidup, kebebasan, pekerjaan, identitas, dan hak untuk menceritakan sejarahnya. Masyarakat hidup dalam pengawasan. Kritik dibatasi. Keterlibatan masyarakat dalam kehidupan bernegara dikendalikan. Rakyat ditempatkan sebagai objek pembangunan sekaligus objek keamanan.

Karena itu, pertanyaan Sekolah Negarawan bukan apakah stabilitas diperlukan. Pertanyaannya adalah stabilitas untuk siapa, dibangun dengan cara apa, dan siapa yang membayar harganya? Kepemimpinan stabilitas dapat melindungi rakyat dari kekacauan. Namun ia dapat pula melindungi kekuasaan dari rakyat.

Negara keamanan dapat mencegah kekerasan. Namun ia dapat pula menjadikan rakyat sebagai pihak yang selalu dicurigai.

Modal asing dapat membantu pembangunan. Namun ia dapat pula membentuk ketergantungan apabila negara tidak mempunyai arah, ilmu, dan struktur pertanggungjawaban kepada rakyat.

Tahun 1965 menunjukkan bahwa kelemahan negara rakyat mempunyai akibat yang sangat besar. Ketika rakyat tidak mempunyai struktur hidup dalam negara, nasib mereka dapat ditentukan oleh konflik elite, institusi bersenjata, kepentingan geopolitik, dan narasi yang tidak dapat mereka koreksi.

Pelajaran terdalam dari periode ini bukan hanya bahwa Amerika Serikat mempunyai kepentingan atau bahwa komunisme dan anti-komunisme pernah bertarung.

Pelajarannya adalah bahwa negara yang tidak menempatkan manusia di atas ideologi dapat dengan mudah mengorbankan rakyatnya sendiri.

Negara yang tidak membatasi kekuasaan keamanan dapat mengubah perlindungan menjadi pengawasan. Negara yang menempatkan stabilitas di atas keadilan dapat terlihat kuat, tetapi menyimpan luka yang diwariskan kepada generasi berikutnya.

Indonesia tidak dapat membangun negara rakyat dengan menghapus sejarah 1965, membenarkan seluruh tindakan satu pihak, atau mengganti satu propaganda dengan propaganda lainnya. Indonesia harus membaca arsip, mengakui penderitaan, membedakan fakta dari

dugaan, serta memulihkan prinsip bahwa setiap manusia berhak memperoleh perlindungan hukum.

Dalam tata nilai Islam, manusia tidak boleh dihukum hanya karena prasangka, hubungan keluarga, atau identitas kelompok. Kekuasaan tidak boleh menghilangkan hak hidup tanpa keadilan. Keamanan tidak boleh dipisahkan dari amanah.

Karena itu, penyelesaian luka 1965 bukan hanya pekerjaan sejarah. Melainkan pekerjaan konstitusional dan peradaban.

Indonesia harus memastikan bahwa negara tidak lagi memilih siapa yang layak dianggap rakyat dan siapa yang dapat dikeluarkan dari perlindungan. Rakyat harus tetap menjadi manusia yang mempunyai martabat, bahkan ketika negara menuduhnya sebagai musuh.

Hanya melalui prinsip tersebut stabilitas dapat berubah dari alat pengendalian menjadi keadaan yang memungkinkan keadilan, kemakmuran, dan kedaulatan rakyat tumbuh bersama.

Bab X
Krisis 1997–1998, Lembaga Keuangan Internasional, dan Reformasi Ekonomi

A. Krisis Moneter dan Runtuhnya Orde Baru

Krisis 1997–1998 tidak hanya mengguncang nilai tukar, perbankan, dunia usaha, dan keuangan negara. Krisis tersebut mengguncang ketatanegaraan yang selama lebih dari tiga dasawarsa menopang Orde Baru.



Sebelum krisis, pemerintahan Soeharto memperoleh legitimasi penting dari stabilitas kekuasaan, pertumbuhan ekonomi, pembangunan

infrastruktur, pengendalian inflasi, dan kemampuannya mempertahankan pemerintahan dalam waktu panjang. Stabilitas menjadi dasar hubungan antara negara, birokrasi, militer, dunia usaha, dan rakyat. Namun stabilitas tersebut menyimpan kerentanan.

Hubungan antara kekuasaan dan kepentingan ekonomi sangat erat. Dunia usaha berkembang melalui kombinasi pasar, perlindungan negara, perizinan, konsesi, hubungan keluarga, kedekatan dengan pusat kekuasaan, dan akses terhadap pembiayaan. Sistem perbankan tumbuh cepat, tetapi pengawasan dan tata kelolanya belum selalu mampu mengimbangi ekspansi tersebut.

Ketika krisis keuangan Asia mulai meluas pada 1997, kelemahan yang sebelumnya tertutup oleh pertumbuhan dan stabilitas menjadi semakin terlihat. Nilai rupiah jatuh tajam, beban utang luar negeri swasta meningkat, kepercayaan terhadap perbankan menurun, modal keluar, perusahaan kesulitan membayar kewajibannya, dan aktivitas ekonomi melemah.

Bank Indonesia mencatat krisis 1997 sebagai krisis moneter Asia yang mendorong perubahan sistem nilai tukar, penutupan bank bermasalah, serta restrukturisasi perbankan. Krisis perbankan yang menyertainya kemudian menimbulkan biaya penyelamatan dan pemulihan yang sangat besar. Krisis moneter berubah menjadi krisis ekonomi.

Perusahaan-perusahaan mengurangi produksi atau berhenti beroperasi. Pengangguran meningkat. Harga kebutuhan pokok melonjak. Daya beli

masyarakat merosot. Kemiskinan bertambah. Kajian Bank Dunia memperkirakan bahwa produk domestik bruto Indonesia mengalami kontraksi lebih dari 13 persen pada 1998, sedangkan berbagai pengukuran menunjukkan kenaikan kemiskinan yang besar selama masa krisis. Namun rakyat tidak hanya menanggung akibat ekonomi.

Krisis memperlihatkan bahwa ketika hubungan antara negara, perbankan, korporasi, dan pejabat mengalami kegagalan, biaya penyelamatannya dapat dialihkan kepada masyarakat luas. Utang perusahaan menjadi krisis nasional. Kelemahan pengawasan menjadi beban fiskal. Keputusan elite menghasilkan kenaikan harga, hilangnya pekerjaan, dan ketidakpastian hidup bagi rakyat yang tidak pernah ikut merumuskan kebijakan tersebut. Di sinilah krisis menjadi ujian kedaulatan rakyat.

Rakyat menanggung akibat dari sistem ekonomi, tetapi belum tentu mempunyai kemampuan menentukan bagaimana sistem itu dibangun. Ketika krisis datang, rakyat kembali diminta menanggung pemulihan, tetapi juga tidak selalu menjadi pihak utama yang menentukan arah reformasi.

Krisis juga menghancurkan legitimasi utama Orde Baru. Negara stabilitas tidak lagi mampu menjamin stabilitas. Negara pembangunan tidak lagi mampu mempertahankan pertumbuhan. Kepemimpinan yang selama puluhan tahun tampil kuat terlihat tidak siap menghadapi perubahan ekonomi yang bergerak cepat melalui pasar keuangan internasional.

Krisis ekonomi kemudian bertemu dengan krisis kepemimpinan, tuntutan demokratisasi, ketidakpuasan terhadap korupsi, kolusi, nepotisme, represi, dan konsentrasi kekuasaan.

Gerakan mahasiswa, tekanan masyarakat, konflik elite, serta memburuknya kondisi ekonomi mempercepat berakhirnya pemerintahan Soeharto pada Mei 1998.

Dengan demikian, runtuhnya Orde Baru tidak dapat dijelaskan hanya oleh nilai tukar atau kebijakan moneter. Namun, merupakan hasil pertemuan antara kerentanan ekonomi, konsentrasi kekuasaan, krisis legitimasi, penderitaan rakyat, dan hilangnya kemampuan negara mempertahankan tatanan yang telah dibangunnya.

Krisis tersebut mengajarkan bahwa kedaulatan ekonomi tidak dapat dibangun hanya melalui slogan nasionalisme atau kekuatan pemerintahan. Negara yang terlihat kuat dapat kehilangan ruang geraknya apabila sistem keuangan, utang, korporasi, dan teknologinya tidak dibangun secara sehat dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. IMF dan Restrukturisasi Kebijakan

Ketika krisis memburuk, Pemerintah Indonesia meminta dukungan Dana Moneter Internasional atau IMF. Pada Oktober 1997, pemerintah menyampaikan *Letter of Intent* yang memuat kebijakan yang akan dilaksanakan dalam konteks permintaan dukungan keuangan. Dokumen tersebut merupakan dokumen

pemerintah Indonesia yang dipublikasikan oleh IMF berdasarkan persetujuan Indonesia.

Keterlibatan IMF tidak boleh dibaca melalui dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah melihat IMF sebagai penyelamat netral yang hanya memberikan solusi teknis tanpa membawa paradigma, kepentingan, dan persyaratan kebijakan.

Ekstrem kedua adalah melihat IMF sebagai kekuatan asing yang sepenuhnya menciptakan krisis dan memaksakan seluruh reformasi tanpa keterlibatan pemerintah serta elite domestik. Keduanya menyederhanakan kenyataan.

Indonesia memang berada dalam krisis berat dan membutuhkan dukungan likuiditas, pemulihan kepercayaan, restrukturisasi perbankan, penyelesaian utang, serta kerja sama internasional. IMF mempunyai sumber daya, pengalaman, dan posisi institusional untuk membantu proses tersebut. Namun dukungan keuangan datang bersama persyaratan dan agenda kebijakan.

Program awal IMF meliputi pengetatan dan penyesuaian kebijakan makroekonomi, restrukturisasi perbankan, penutupan bank yang dianggap tidak sehat, pembongkaran sejumlah monopoli serta fasilitas khusus, perubahan tata kelola, dan reformasi struktural di berbagai sektor. Program berikutnya terus diperbarui melalui rangkaian *Letter of Intent* dan memorandum kebijakan ekonomi yang mencakup pengelolaan anggaran, utang korporasi, restrukturisasi bank, privatisasi, serta perubahan kelembagaan lainnya.

Secara formal, kebijakan tersebut disampaikan dan disetujui oleh pemerintah Indonesia. Karena itu, tidak tepat menggambarkannya seolah-olah seluruh keputusan diambil oleh IMF tanpa keterlibatan negara. Namun juga tidak tepat menganggap hubungan tersebut sepenuhnya setara.

Negara yang berada dalam krisis mempunyai ruang pilihan yang jauh lebih sempit. Ketika nilai tukar jatuh, cadangan melemah, kepercayaan pasar hilang, dan pembiayaan dibutuhkan segera, kemampuan bernegosiasi tidak sama dengan keadaan normal.

Dalam posisi tersebut, lembaga keuangan internasional, kreditor, dan pasar mempunyai pengaruh besar terhadap arah kebijakan.

Pertanyaan pentingnya bukan hanya apakah pemerintah secara hukum menyetujui program tersebut. Pertanyaannya adalah seberapa bebas persetujuan dapat diberikan ketika negara berada di bawah tekanan ekonomi yang sangat besar? Namun pertanyaan tersebut tidak boleh digunakan untuk menghapus tanggung jawab domestik.

Krisis tidak datang kepada negara yang sepenuhnya sehat. Sistem perbankan, utang swasta, hubungan kekuasaan dengan konglomerasi, pengawasan, dan tata kelola domestik mempunyai kelemahan yang nyata. IMF tidak menciptakan seluruh kelemahan tersebut.

Program IMF juga tidak dapat dinilai sebagai satu kesatuan yang seluruhnya benar atau seluruhnya keliru.

Sebagian reformasi dibutuhkan untuk memperbaiki tata kelola, mengatasi bank bermasalah, membatasi fasilitas khusus, memperkuat transparansi, dan memulihkan kepercayaan. Namun desain awal program juga menghadapi kritik, termasuk mengenai asumsi bahwa krisis dapat ditangani sebagai penularan keuangan yang relatif sedang, padahal krisis Indonesia berkembang menjadi keruntuhan ekonomi, perbankan, dan sosial yang jauh lebih dalam. IMF sendiri dalam refleksi berikutnya mengakui bahwa program awal dibangun atas asumsi yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kedalaman krisis. Di sinilah disiplin analisis dibutuhkan.

Lembaga internasional tidak boleh dijadikan kambing hitam untuk menutupi kegagalan elite Indonesia. Namun pemerintah juga tidak boleh menggunakan kebutuhan bantuan sebagai alasan untuk menyerahkan arah kebijakan tanpa perdebatan publik dan pertanggungjawaban kepada rakyat.

Hubungan dengan IMF menunjukkan bahwa kedaulatan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh apakah suatu negara mempunyai pemerintah sendiri. Kedaulatan juga ditentukan oleh kemampuan negara menghadapi krisis tanpa kehilangan seluruh ruang untuk memilih.

C. Liberalisasi, Restrukturisasi, dan Privatisasi

Reformasi ekonomi yang berlangsung selama dan setelah krisis mencakup agenda yang sangat luas. Restrukturisasi perbankan menjadi salah satu pusatnya. Pemerintah menutup, mengambil alih,

menggabungkan, atau merekapitalisasi bank-bank yang mengalami masalah.

Langkah tersebut diperlukan karena perbankan merupakan sistem yang menjaga pembayaran, tabungan, kredit, dan aktivitas ekonomi. Keruntuhan perbankan tanpa tindakan negara dapat menghasilkan kerusakan yang lebih besar. Namun penyelamatan perbankan juga menimbulkan pertanyaan keadilan.

Siapa yang menerima perlindungan? Siapa yang menanggung kerugian? Apakah pemilik bank yang mengambil risiko harus memikul tanggung jawab yang sebanding? Mengapa kegagalan privat dapat berubah menjadi beban publik?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa krisis keuangan bukan hanya persoalan teknis tetapi juga persoalan distribusi kekuasaan, risiko, dan tanggung jawab.

Selain restrukturisasi perbankan, program reformasi mencakup liberalisasi perdagangan dan investasi, penghapusan berbagai monopoli serta hak khusus, reformasi badan usaha milik negara, dan privatisasi sebagian aset negara.

Liberalisasi dapat membawa manfaat. Pembukaan persaingan dapat mengurangi monopoli, memperluas pilihan, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi fasilitas khusus yang diberikan kepada kelompok yang dekat dengan kekuasaan. Transparansi dan disiplin pasar dapat memperbaiki sebagian praktik ekonomi Orde Baru.

Namun liberalisasi juga membawa risiko apabila negara membukanya dalam keadaan kapasitas domestik lemah.

Perusahaan nasional yang sedang terpukul krisis dapat berhadapan dengan modal luar yang jauh lebih kuat. Aset yang kehilangan nilai akibat krisis dapat dijual dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Sektor strategis dapat berpindah kendali ketika negara membutuhkan dana.

Privatisasi juga tidak dapat dinilai secara sederhana. Kepemilikan negara tidak otomatis menjamin efisiensi, keadilan, ataupun keberpihakan kepada rakyat. Badan usaha negara dapat menjadi ruang birokrasi, rente, atau kepentingan segelintir orang.

Sebaliknya, kepemilikan swasta tidak otomatis menghasilkan pelayanan yang lebih baik atau manfaat yang lebih adil. Perusahaan swasta mempunyai orientasi keuntungan dan dapat mengabaikan pelayanan publik apabila tidak diatur dengan kuat.

Karena itu, pertanyaannya bukan hanya negara atau swasta. Pertanyaannya adalah siapa yang mengendalikan, bagaimana pertanggungjawabannya, dan untuk kepentingan siapa aset strategis dikelola.

Privatisasi menjadi problematis apabila dilakukan hanya untuk memenuhi target fiskal jangka pendek tanpa mempertimbangkan kedaulatan jangka panjang, akses rakyat, dan posisi sektor tersebut dalam pembangunan nasional. Demikian pula liberalisasi menjadi berbahaya apabila pasar diperlakukan sebagai

mekanisme yang selalu lebih benar daripada keputusan publik.

Pasar dapat memberikan informasi harga dan mendorong efisiensi. Namun pasar tidak dengan sendirinya mempunyai kewajiban melindungi yang lemah, menjaga pemerataan, membangun daerah tertinggal, atau mempertahankan kedaulatan teknologi. Negara tetap diperlukan untuk menentukan arah.

Dalam kerangka Sekolah Negarawan, persoalan reformasi ekonomi bukan apakah Indonesia harus menolak pasar dan modal asing. Persoalannya adalah apakah pasar ditempatkan di bawah tujuan negara rakyat atau justru negara ditempatkan di bawah tuntutan pasar.

D. Rakyat Menanggung Krisis, Elite Menentukan Reformasi

Krisis 1997–1998 menunjukkan ketimpangan mendasar antara siapa yang menanggung akibat dan siapa yang menentukan arah penyelesaian.

Rakyat menanggung inflasi, kehilangan pekerjaan, penurunan pendapatan, hilangnya tabungan, kesulitan pendidikan, buruknya akses kesehatan, serta ketidakpastian sosial.

Namun negosiasi utama berlangsung di antara pemerintah, bank sentral, IMF, Bank Dunia, kreditor, teknokrat, pemilik perusahaan, perbankan, dan pejabat.

Rakyat hadir sebagai alasan reformasi, tetapi tidak selalu sebagai peserta yang menentukan desainnya.

Program perlindungan sosial kemudian dikembangkan untuk menahan dampak krisis. Dukungan internasional juga mencakup program penanggulangan kemiskinan dan reformasi kebijakan sosial. Bank Dunia mengakui bahwa krisis mengakhiri puluhan tahun pertumbuhan dan mendorong penyediaan dukungan struktural serta program penanggulangan kemiskinan.

Program tersebut penting. Negara memang harus membantu rakyat dalam keadaan darurat. Namun bantuan sosial tidak dapat menggantikan kedaulatan.

Rakyat tidak cukup diberi kompensasi setelah kebijakan diputuskan. Mereka seharusnya mempunyai kedudukan dalam menentukan arah pembangunan, distribusi risiko, penggunaan dana publik, dan reformasi kelembagaan.

Jika rakyat hanya menerima bantuan sementara sistem tetap ditentukan oleh elite, maka hubungan negara dengan rakyat tidak berubah secara mendasar.

Rakyat tetap menjadi objek penanganan. Dalam krisis, rakyat diposisikan sebagai kelompok rentan yang harus diselamatkan. Setelah krisis, mereka kembali menjadi tenaga kerja, konsumen, pemilih, wajib pajak, dan sasaran program.

Mereka belum tentu menjadi pemilik arah ekonomi. Di sinilah krisis menjadi bagian dari tesis besar naskah ini. Negara formal dapat membuat keputusan atas nama rakyat, tetapi rakyat belum mempunyai tubuh konstitusional yang cukup kuat untuk menentukan keputusan strategis. Krisis tidak

menciptakan keadaan tersebut. Krisis hanya memperlihatkannya secara lebih jelas.

E. Reformasi Kepemimpinan dan Demokrasi Elektoral

Berakhirnya pemerintahan Soeharto membuka periode Reformasi. Kebebasan pers berkembang. Partai politik bertambah. Pemilu menjadi lebih terbuka dan kompetitif. Kekuasaan Presiden dibatasi. Desentralisasi diperluas. Hak asasi manusia memperoleh ruang konstitusional yang lebih kuat.

Undang-Undang Dasar 1945 kemudian mengalami empat tahap perubahan pada 1999, 2000, 2001, dan 2002. Perubahan tersebut menata ulang hubungan antar-lembaga, membatasi masa jabatan Presiden, membentuk Mahkamah Konstitusi, menghadirkan Dewan Perwakilan Daerah, memperkuat jaminan hak, dan mengembangkan pemilihan Presiden secara langsung.

Reformasi tersebut merupakan perubahan yang besar. Rakyat memperoleh ruang lebih luas untuk berbicara, berorganisasi, memilih, mengkritik, dan mengganti pemerintahan. Negara keamanan Orde Baru tidak lagi dapat bekerja dengan bentuk yang sama. Namun demokrasi elektoral bukan akhir dari pembentukan negara rakyat.

Pemilu memberi rakyat kemampuan memilih pejabat. Namun kepemilikan negara menuntut lebih daripada memilih. Rakyat harus mempunyai kemampuan mengendalikan arah kebijakan, meminta pertanggungjawaban, mengoreksi mandat, mengawasi

anggaran, serta memastikan lembaga negara tidak dikuasai oleh partai, pemodal, keluarga pejabat, birokrasi, dan jaringan kepentingan.

Reformasi memindahkan legitimasi pemerintahan lebih kuat kepada pemilu. Namun kekuasaan untuk menentukan siapa yang dapat menjadi calon tetap banyak berada pada partai politik. Partai membutuhkan pembiayaan, organisasi, media, kandidat, dan jaringan. Dalam keadaan biaya kampanye tinggi, hubungan partai dengan modal menjadi semakin penting. Akibatnya, demokrasi dapat berkembang menjadi pasar kekuasaan.

Kandidat membutuhkan dukungan partai. Partai membutuhkan dana. Pemodal membutuhkan akses kebijakan. Media membutuhkan kepentingan ekonomi. Birokrasi mempunyai sumber daya administratif. Keluarga pejabat mempunyai nama dan jaringan. Rakyat tetap memilih, tetapi pilihan yang tersedia telah dibentuk oleh sistem sebelum sampai ke bilik suara.

Dengan demikian, demokrasi elektoral dapat memperluas kebebasan sekaligus menciptakan bentuk baru ketergantungan pejabat. Reformasi berhasil membuka kompetisi, tetapi belum otomatis mengubah algoritma kekuasaan.

F. Reformasi Kepemimpinan atau Sekadar Reformasi Prosedur?

Reformasi mengganti banyak aturan, lembaga, dan prosedur. Namun pertanyaan yang lebih dalam

adalah apakah Reformasi juga mengubah manusia dan kepemimpinan yang menjalankan negara.

Sebuah sistem dapat berubah dari pemerintahan otoriter menuju pemilu kompetitif, tetapi budaya kekuasaannya tetap bertahan.

Pejabat tetap dapat melihat jabatan sebagai sumber kehormatan, akses, proyek, dan akumulasi. Partai dapat bekerja sebagai kendaraan elite. Birokrasi dapat tetap lebih patuh kepada atasan daripada kepada rakyat. Aparat dapat tetap sulit dikoreksi. Kekuasaan dapat tetap dikuasai transaksi. Dalam keadaan demikian, Reformasi mengubah prosedur pergantian kekuasaan, tetapi belum sepenuhnya mengubah makna kekuasaan.

Pemimpin Orde Baru memperoleh legitimasi dari stabilitas dan pembangunan. Pemimpin era Reformasi memperoleh legitimasi dari pemilu. Namun keduanya dapat menggunakan negara secara administratif tanpa menghadirkan kepemimpinan peradaban.

Pemimpin elektoral dapat sangat mahir memenangkan suara, membangun citra, mengelola koalisi, dan menguasai media. Namun kemampuan tersebut tidak otomatis berarti ia memahami sejarah, tata nilai, geopolitik, teknologi, data, konstitusi, dan masa depan rakyat.

Demokrasi menghasilkan pemenang pemilu. Negara rakyat membutuhkan negarawan. Negarawan tidak hanya memikirkan bagaimana memperoleh dan mempertahankan jabatan. Sekolah Negarawan

memahami bahwa jabatan adalah amanah untuk membentuk masa depan bangsa.

Dalam konteks krisis, kepemimpinan nilai seharusnya menanyakan bukan hanya bagaimana pasar dipulihkan, tetapi juga bagaimana keadilan ditegakkan.

Bukan hanya bagaimana bank diselamatkan, tetapi siapa yang harus bertanggung jawab. Bukan hanya bagaimana investasi kembali masuk, tetapi bagaimana rakyat memperoleh kemampuan, kepemilikan, dan nilai tambah. Bukan hanya bagaimana kepercayaan kreditor dipulihkan, tetapi bagaimana kepercayaan rakyat kepada negara dibangun.

Reformasi prosedural tidak cukup apabila tidak disertai reformasi kepemimpinan. Namun reformasi kepemimpinan juga tidak cukup apabila hanya berbicara tentang moral pribadi. Sistem pemerintahan, pembiayaan, partai, media, birokrasi, dan hukum harus dirancang agar manusia yang berintegritas dapat masuk, bertahan, dan bekerja tanpa dipaksa mengikuti pola yang rusak. Karena itu, manusia dan sistem harus diperbaiki secara bersamaan.

G. Demokrasi, Oligarki, Aristokrasi, Konglomerasi, dan Birokrasi

Demokrasi menjanjikan bahwa rakyat menentukan kekuasaan. Namun demokrasi dapat kehilangan substansinya ketika berbagai pusat kekuatan membentuk persekutuan yang lebih kuat daripada rakyat.



Oligarki muncul ketika sumber daya ekonomi dan kekuasaan terkonsentrasi pada kelompok kecil yang mempunyai kemampuan memengaruhi keputusan negara.

Aristokrasi baru tumbuh ketika kekuasaan diwariskan melalui keluarga, dinasti, nama, hubungan, pendidikan elite, dan jaringan sosial.

Konglomerasi mempunyai kemampuan memengaruhi pasar, media, pembiayaan kampanye, pekerjaan, dan kebijakan melalui konsentrasi kekayaan. Birokrasi menguasai administrasi, data, prosedur, izin,

anggaran, dan pelaksanaan keputusan. Partai politik menghubungkan seluruh kekuatan tersebut dengan pintu kekuasaan elektoral.

Persekutuan ini tidak selalu dibentuk melalui rapat rahasia atau rencana tunggal. Persekutuan dapat tumbuh melalui kepentingan yang saling membutuhkan.

Politisi membutuhkan modal. Pemodal membutuhkan kebijakan. Birokrasi membutuhkan perlindungan pejabat. Dinasti membutuhkan partai. Media membutuhkan pasar dan akses. Partai membutuhkan popularitas.

Masing-masing bertindak berdasarkan kepentingannya sendiri, tetapi hasil akhirnya dapat berupa struktur yang menjauhkan rakyat dari negara.

Rakyat masih mempunyai suara, tetapi kekuasaan setelah pemilu berada dalam jaringan yang sulit mereka masuki.

Dalam bahasa Cak Nun, keadaan ini berisiko membentuk sistem ketika mereka yang mempunyai akses jabatan tergoda mengambil, sedangkan yang tidak mempunyai akses terus bergantung dan meminta. Demokrasi kemudian menghasilkan dua arus yang berlawanan. Di atas, jabatan menjadi jalan memperoleh akses terhadap anggaran, proyek, konsesi, informasi, dan regulasi. Di bawah, rakyat bergantung kepada bantuan, hubungan personal, proyek sementara, pekerjaan informal, dan belas kasihan elite.

Pernyataan tersebut bukan klasifikasi kaku tetapi merupakan kritik terhadap demokrasi yang tidak disertai distribusi kepemilikan dan tata nilai.

Demokrasi tanpa tata nilai dapat menjadi kompetisi untuk menguasai alat negara.
Demokrasi tanpa keadilan ekonomi dapat dikuasai oleh modal. Demokrasi tanpa pendidikan rakyat dapat dimanipulasi melalui informasi, identitas, ketakutan, dan bantuan. Demokrasi tanpa struktur pertanggungjawaban dapat berhenti setelah pemilu. Karena itu, masalahnya bukan demokrasi itu sendiri. Masalahnya adalah demokrasi yang tidak mampu mengembalikan rakyat sebagai pemilik.

H. Mengapa Reformasi Belum Cukup Menjadi Reformasi Bentuk Negara

Reformasi 1998 menghasilkan perubahan besar, tetapi belum sepenuhnya menjadi reformasi bentuk negara. Hal tersebut mengubah hubungan antar-lembaga, memperluas kebebasan, membatasi kekuasaan Presiden, dan membuka demokrasi elektoral. Namun Reformasi belum sepenuhnya menjawab pertanyaan yaitu di mana rakyat berada dalam arsitektur negara setelah suara diberikan?

Kedaulatan rakyat tetap lebih banyak diterjemahkan sebagai hak memilih. Belum terbentuk struktur hidup yang memungkinkan rakyat merumuskan haluan jangka panjang, mengawasi mandat, mengoreksi wakil, dan mempunyai kendali nyata terhadap kekayaan, data, teknologi, serta kebijakan strategis.

Reformasi ekonomi juga belum sepenuhnya menjawab hubungan antara pasar dan rakyat.

Liberalisasi, privatisasi, investasi, serta restrukturisasi dapat memperbaiki efisiensi dan tata kelola. Namun tanpa arah negara rakyat, semuanya dapat memperkuat konsentrasi kekuasaan ekonomi. Reformasi kekuasaan membuka kompetisi. Namun kompetisi yang mahal dapat memperkuat oligarki.

Desentralisasi mendekatkan kewenangan ke daerah. Namun ia juga dapat mendesentralisasikan korupsi, dinasti, dan patronase apabila tidak disertai pertanggungjawaban.

Kebebasan media membuka ruang informasi. Namun konsentrasi kepemilikan media dan algoritma platform dapat membentuk pusat pengaruh baru. Dengan demikian, Reformasi belum selesai karena ia lebih banyak mengubah prosedur negara daripada kepemilikan negara.

Negara rakyat tidak cukup mempunyai pemilu yang lebih bebas, tetapi juga membutuhkan rakyat yang mempunyai ilmu, struktur, posisi ekonomi, akses hukum, dan kemampuan menentukan arah.

Reformasi bentuk negara harus menghubungkan demokrasi dengan keadilan, kebebasan dengan tanggung jawab, pasar dengan kedaulatan, serta pemilu dengan kepemilikan rakyat.

I. Lembaga Keuangan Internasional dan Batas Kedaulatan

Krisis 1997–1998 menunjukkan bahwa lembaga keuangan internasional mempunyai peranan besar ketika suatu negara kehilangan kemampuan membiayai

dan menstabilkan dirinya. IMF, Bank Dunia, kreditor bilateral, dan komunitas donor menyediakan dana, pengetahuan, serta dukungan kebijakan. Tanpa dukungan luar, pemulihan dapat menjadi lebih sulit. Namun dukungan tersebut juga membentuk hubungan kekuasaan.

Lembaga pemberi dana mempunyai standar, paradigma, persyaratan, dan ukuran keberhasilan. Negara penerima mempunyai kebutuhan, tetapi tidak selalu mempunyai posisi tawar yang seimbang.

Hubungan ini tidak harus dipahami sebagai penjajahan. Kerja sama keuangan internasional dapat membantu negara mengatasi masalah yang nyata. Namun ia menjadi persoalan kedaulatan ketika pilihan kebijakan menyempit dan rakyat tidak mempunyai ruang yang cukup untuk mengetahui serta menguji arah yang disepakati.

Dokumen IMF memperlihatkan bahwa program Indonesia merupakan rangkaian kesepakatan kebijakan pemerintah Indonesia dalam konteks dukungan keuangan. IMF pada 1999 mencatat bahwa dukungan awal berbentuk *Stand-by Arrangement* yang kemudian ditambah dan diubah menjadi *Extended Arrangement*.

Secara hukum, pemerintah tetap menjadi pihak yang mengajukan dan menandatangani. Namun dalam konteks kekuasaan, pertanyaan tetap ada yaitu kepada siapa pemerintah mempertanggungjawabkan pilihan tersebut?

Kepada kreditor?

Kepada pasar?

Kepada parlemen?

Atau kepada rakyat yang akan menanggung akibatnya?

Kedaulatan tidak berarti pemerintah bebas membuat kebijakan apa pun tanpa memperhatikan dunia. Kedaulatan berarti rakyat melalui negara mempunyai kemampuan memahami pilihan, menentukan prioritas, dan menanggung keputusan yang dibuat secara sadar.

Jika kebijakan strategis dirumuskan dalam ruang yang jauh dari rakyat, maka sekalipun ditandatangani pemerintah nasional, ia belum tentu mencerminkan kedaulatan rakyat.

J. Penutup Bab

Krisis 1997–1998 bukan hanya krisis nilai tukar, perbankan, dan utang. Ini merupakan krisis bentuk negara. Krisis tersebut memperlihatkan bahwa sistem ekonomi Orde Baru dibangun melalui hubungan yang erat antara negara, birokrasi, militer, konglomerasi, perbankan, dan kekuasaan. Ketika sistem itu mengalami keruntuhan, rakyat menanggung akibat yang sangat besar.

Nilai rupiah jatuh. Perusahaan berhenti. Pekerjaan hilang. Harga meningkat. Kemiskinan bertambah. Kehidupan rakyat berubah oleh keputusan ekonomi yang sebelumnya tidak mereka tentukan.

Dalam keadaan itu, pemerintah meminta dukungan IMF dan lembaga keuangan internasional. Dukungan tersebut membantu menyediakan pembiayaan, restrukturisasi, dan kerangka pemulihan. Namun dukungan datang bersama agenda kebijakan

yang luas dan memperlihatkan betapa sempitnya ruang pilihan negara ketika berada dalam krisis.

Karena itu, lembaga internasional tidak perlu digambarkan sebagai kekuatan asing yang sepenuhnya jahat. Mereka bekerja berdasarkan mandat, paradigma, dan kepentingan institusionalnya. Namun Indonesia juga tidak boleh menyerahkan tanggung jawabnya kepada mereka.

Kelemahan perbankan, utang, korupsi, hubungan kekuasaan dengan konglomerasi, pengawasan, dan ketergantungan merupakan persoalan domestik yang telah berkembang sebelum program IMF dimulai.

Krisis lahir dari pertemuan kelemahan dalam negeri dan guncangan eksternal. Demikian pula reformasi lahir dari pertemuan tekanan rakyat, konflik elite, pasar, kreditor, lembaga internasional, dan kebutuhan negara menyelamatkan dirinya.

Reformasi membuka demokrasi elektoral dan kebebasan kekuasaan. Perubahan tersebut harus dihargai sebagai pencapaian besar. Namun Reformasi belum otomatis mengembalikan rakyat sebagai pemilik negara.

Rakyat memperoleh hak memilih, tetapi pilihan dibentuk oleh partai, modal, media, dinasti, dan algoritma kekuasaan. Lembaga bertambah, tetapi kedaulatan rakyat tetap sulit menemukan tubuhnya. Demokrasi dapat berubah menjadi persekutuan oligarki, aristokrasi, konglomerasi, dan birokrasi apabila tidak dipimpin oleh tata nilai.

Dalam keadaan demikian, Reformasi hanya mengganti prosedur seleksi elite. Negara tetap bekerja melalui jaringan kekuasaan yang sulit dikendalikan rakyat.

Pelajaran terbesar krisis 1997–1998 adalah bahwa kedaulatan ekonomi tidak cukup dibangun melalui retorika nasionalisme. Kedaulatan membutuhkan sistem perbankan yang sehat, ilmu pengetahuan, industri, teknologi, fiskal yang bertanggung jawab, pengawasan, kepemimpinan, dan kemampuan negara menghadapi tekanan tanpa kehilangan arah. Namun kedaulatan ekonomi juga tidak cukup hanya menjadi kedaulatan pemerintah. Tetapi, harus menjadi kedaulatan rakyat.

Rakyat yang menanggung biaya krisis harus mempunyai tempat dalam menentukan reformasi. Rakyat yang membayar penyelamatan harus mengetahui siapa yang bertanggung jawab. Rakyat yang diminta menerima penyesuaian harus memperoleh keadilan dan perlindungan. Karena itu, Reformasi belum selesai. Slama rakyat hanya menjadi pemilih, wajib pajak, pekerja, konsumen, dan penerima bantuan. Selama modal lebih mudah memasuki ruang keputusan daripada rakyat. Selama jabatan menjadi investasi, hukum menjadi alat transaksi, dan demokrasi menjadi jalan persekutuan elite.

Reformasi yang sebenarnya harus bergerak lebih dalam daripada perubahan prosedur. Hal tersebut juga harus mengubah kepemilikan negara. Serta, harus mengembalikan rakyat sebagai pemilik mandat, arah

pembangunan, kekayaan, data, teknologi, dan masa depan.

Dalam tata nilai Islam, krisis tidak boleh menjadi kesempatan bagi yang kuat untuk mengambil lebih besar. Krisis adalah ujian amanah. Beban harus dibagi secara adil. Harta publik harus dilindungi. Yang lemah harus didahulukan. Keputusan harus dibangun melalui ilmu dan pertanggungjawaban.

Kemakmuran tidak boleh dipisahkan dari keadilan. Pasar tidak boleh ditempatkan di atas manusia. Lembaga internasional tidak boleh menggantikan kedaulatan rakyat. Pemerintah tidak boleh menggunakan keadaan darurat untuk menghindari pertanggungjawaban.

Krisis 1997–1998 telah meruntuhkan Orde Baru. Namun meruntuhkan pemerintahan tidak sama dengan menemukan bentuk negara.

Reformasi membuka pintu demokrasi. Pekerjaan berikutnya adalah memastikan bahwa melalui pintu itu rakyat benar-benar masuk ke dalam negara, bukan hanya elite lama dan baru yang berganti tempat.

Bab XI
China: Ekonomi, Teknologi, Industri, dan Rantai Pasok Kontemporer

A. China dalam Ekonomi Indonesia Kontemporer



Hubungan Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok merupakan salah satu hubungan ekonomi paling penting dalam Indonesia kontemporer. China hadir bukan hanya sebagai negara tujuan ekspor atau asal impor, melainkan sebagai sumber investasi, teknologi, mesin industri, infrastruktur, pembiayaan, logistik, kawasan industri, dan bagian dari rantai pasok yang menghubungkan Indonesia dengan pasar global.

Kedudukan tersebut tidak muncul secara tiba-tiba. Kebangkitan industri China selama beberapa dasawarsa telah mengubah struktur ekonomi dunia. China berkembang dari basis produksi berbiaya rendah menjadi kekuatan manufaktur, perdagangan, infrastruktur, teknologi, energi terbarukan, kendaraan listrik, telekomunikasi, baterai, dan ekonomi digital.

Perubahan tersebut membawa China semakin dekat dengan kebutuhan pembangunan Indonesia. Indonesia membutuhkan modal, mesin, teknologi, industri pengolahan, infrastruktur, pasar ekspor, serta kemampuan mengubah sumber daya alam menjadi produk bernilai tambah. China mempunyai modal industri, perusahaan, teknologi produksi, jaringan logistik, dan pasar dalam skala besar. Pertemuan kepentingan tersebut menghasilkan hubungan yang berkembang cepat.

Data resmi menunjukkan China telah menjadi sumber utama impor nonmigas Indonesia. Selama Januari–Juni 2025, nilai impor nonmigas Indonesia dari China mencapai sekitar USD40 miliar atau hampir 40 persen dari keseluruhan impor nonmigas. Impor tersebut terutama berupa mesin mekanis, peralatan

listrik, kendaraan, dan komponen industri. Pada periode yang sama, China juga tetap menjadi salah satu mitra perdagangan terpenting Indonesia.

Kenyataan ini mempunyai dua makna.

Pertama, hubungan dengan China menyediakan barang modal, peralatan, dan komponen yang dibutuhkan bagi industrialisasi Indonesia. Mesin dan teknologi produksi dapat mempercepat pembangunan pabrik, meningkatkan kapasitas pengolahan, serta mendukung perkembangan sektor manufaktur.

Kedua, tingginya ketergantungan terhadap barang modal dan komponen dari satu negara menunjukkan adanya kerentanan struktural. Apabila industri Indonesia bergantung pada mesin, suku cadang, teknologi, pembiayaan, dan pasar yang sama, gangguan geopolitik, perubahan kebijakan, atau tekanan rantai pasok dapat memengaruhi kemampuan produksi nasional.

Karena itu, hubungan ekonomi Indonesia–China tidak boleh dibaca dengan kebencian, tetapi juga tidak boleh dibaca secara naif.

China tidak perlu ditempatkan sebagai penjajah baru hanya karena pengaruh ekonominya besar. Negara dan perusahaan China datang melalui kerja sama, investasi, perdagangan, dan kontrak yang secara formal disetujui oleh Pemerintah Indonesia serta aktor ekonomi domestik.

Namun bentuk legal dari kerja sama tidak otomatis menjamin bahwa hubungan tersebut selalu seimbang dan memberikan manfaat terbesar kepada rakyat.

Pertanyaan utamanya bukan apakah China baik atau buruk. Pertanyaannya adalah apakah Indonesia mempunyai strategi nasional sendiri ketika berhubungan dengan strategi nasional China?

China mengetahui kepentingan industrinya, kebutuhan energinya, keamanan rantai pasoknya, teknologi yang hendak dikuasainya, dan pasar yang hendak dimasukinya. Indonesia juga harus mempunyai kejelasan yang sama.

Apabila hanya satu pihak memiliki strategi, sedangkan pihak lain hanya menyediakan izin, tanah, bahan mentah, tenaga kerja, dan fasilitas, hubungan yang secara formal disebut kerja sama dapat menghasilkan ketergantungan struktural.

B. Hilirisasi, Nikel, dan Kawasan Industri

Nikel menjadi salah satu pusat hubungan ekonomi Indonesia–China. Indonesia mempunyai sumber daya nikel yang besar dan memandang hilirisasi sebagai jalan untuk mengakhiri pola lama ekspor bahan mentah. Melalui kebijakan pengolahan di dalam negeri, pemerintah berharap nikel tidak lagi hanya dijual sebagai bijih, tetapi diubah menjadi produk antara dan produk akhir bernilai lebih tinggi. Tujuan hilirisasi pada dasarnya benar.

Bangsa yang terus-menerus mengekspor bahan mentah akan berada pada lapisan rendah rantai nilai. Keuntungan terbesar biasanya dinikmati oleh pihak yang menguasai teknologi pengolahan, manufaktur, merek, distribusi, dan pasar akhir.

Dengan membangun smelter dan industri turunannya, Indonesia berusaha meningkatkan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, menambah penerimaan negara, memperkuat industri nasional, dan memasuki ekosistem baterai serta kendaraan listrik.

China memainkan peranan besar dalam proses tersebut. Perusahaan-perusahaan China membawa modal, teknologi smelter, pengalaman industri, jaringan pembeli, serta kemampuan membangun kawasan produksi dalam skala besar. Kementerian ESDM mencatat besarnya keterlibatan perusahaan China dalam pembangunan smelter nikel Indonesia; laporan strategis kementerian menyebut bahwa hingga 2023 perusahaan-perusahaan China telah membangun lebih dari 90 persen smelter nikel di Indonesia.

Keterlibatan tersebut membantu Indonesia mengubah struktur ekspor dan mempercepat pembangunan industri pengolahan. Produk besi dan baja, bahan bakar mineral, serta nikel dan produk turunannya kemudian menjadi bagian penting ekspor Indonesia ke China.

Namun keberhasilan hilirisasi tidak cukup diukur dari jumlah smelter, nilai ekspor, atau banyaknya investasi. Hilirisasi harus diperiksa melalui struktur kepemilikannya.

Siapa yang memiliki perusahaan pengolahan? Siapa yang menguasai teknologi? Dari mana mesin dan tenaga ahli berasal? Siapa yang membeli produk akhirnya? Di mana keuntungan dicatat? Berapa besar nilai tambah yang tetap berada di Indonesia? Apakah

perusahaan nasional mampu naik kelas atau hanya menjadi mitra lokal administratif?

Sebuah bijih dapat diolah di Indonesia, tetapi rantai nilainya belum tentu dikuasai Indonesia. Apabila modal berasal dari luar, mesin diimpor, teknologi tidak dipindahkan, pasar akhir dikendalikan pihak yang sama, dan perusahaan domestik hanya menyediakan izin, lahan, tenaga, serta bahan baku, maka ketergantungan tidak hilang. Ketergantungan hanya berpindah dari ekspor bahan mentah menuju ketergantungan industri.

Dahulu Indonesia bergantung pada pembeli bijih. Dalam struktur baru, Indonesia dapat bergantung pada investor smelter, penyedia mesin, sumber pembiayaan, teknologi pemrosesan, pasar, dan keputusan produksi pihak luar.

Perubahan tersebut tetap mempunyai manfaat. Pengolahan dalam negeri lebih baik daripada sekadar ekspor bahan mentah apabila menghasilkan pekerjaan, penerimaan, dan perkembangan wilayah. Namun hilirisasi baru dapat disebut sebagai transformasi nasional apabila ia membangun kemampuan milik bangsa.

Kawasan industri menjadi instrumen penting dalam perkembangan tersebut. Di wilayah seperti Sulawesi dan Maluku Utara, investasi nikel berkembang menjadi kawasan terintegrasi yang menggabungkan tambang, smelter, pembangkit listrik, pelabuhan, pergudangan, perumahan tenaga kerja, dan berbagai fasilitas pendukung.

Model kawasan terintegrasi mempunyai keunggulan efisiensi. Bahan baku, energi, pengolahan, dan logistik berada dalam satu wilayah sehingga biaya produksi dapat ditekan.

Namun kawasan industri juga dapat berkembang sebagai ruang ekonomi yang relatif terpisah dari masyarakat sekitarnya. Negara perlu memastikan bahwa kawasan tidak hanya menjadi enklave produksi yang memiliki infrastruktur modern di dalam pagar, sementara rakyat di luar kawasan tetap menghadapi ketertinggalan, kerusakan lingkungan, dan keterbatasan akses.

Kawasan industri harus terhubung dengan ekonomi rakyat, pendidikan lokal, pemasok domestik, perusahaan nasional, dan pembangunan wilayah.

Apabila seluruh kebutuhan kawasan dipenuhi oleh jaringan perusahaan yang sama, masyarakat hanya menjadi penyedia tenaga kerja dan ruang hidup. Industrialisasi hadir secara fisik, tetapi kemampuan ekonomi lokal tidak sungguh tumbuh.

C. Pembiayaan, Infrastruktur, dan Logistik

Hubungan Indonesia–China juga berkembang melalui pembiayaan dan pembangunan infrastruktur. China mempunyai pengalaman besar dalam pembangunan jalan, kereta, pelabuhan, pembangkit listrik, kawasan industri, dan konektivitas logistik. Kemampuan tersebut bertemu dengan kebutuhan Indonesia untuk menghubungkan wilayah kepulauan, mempercepat distribusi, menurunkan biaya logistik, dan meningkatkan daya saing industri.

Infrastruktur merupakan fondasi penting pembangunan. Industri tidak dapat berkembang tanpa listrik, jalan, pelabuhan, rel, air, telekomunikasi, dan jaringan logistik. Karena itu, kerja sama infrastruktur dengan China tidak perlu dilihat sebagai ancaman dengan sendirinya.

Masalahnya terletak pada desain pembiayaan, pembagian risiko, penggunaan teknologi, struktur kepemilikan, jaminan negara, dan manfaat jangka panjangnya.

Pembiayaan proyek dapat membantu Indonesia mewujudkan infrastruktur lebih cepat. Namun setiap pembiayaan menciptakan kewajiban. Apabila proyeksi ekonomi tidak tercapai, biaya membengkak, atau pendapatan proyek tidak mencukupi, beban dapat berpindah kepada badan usaha negara, pemerintah, atau pada akhirnya rakyat.

Negara harus membedakan antara infrastruktur yang memang dibutuhkan oleh rakyat dan infrastruktur yang dibangun terutama karena pembiayaannya tersedia.

Ketersediaan dana tidak boleh menjadi satu-satunya alasan pembangunan. Proyek harus lahir dari perencanaan nasional, kebutuhan ekonomi, kajian risiko, kemampuan fiskal, dan manfaat publik yang jelas.

Hubungan Indonesia–China juga berkembang melalui proyek kerja sama kawasan industri dan rantai pasok. Pemerintah kedua negara mengembangkan inisiatif *Two Countries, Twin Parks* untuk menghubungkan kawasan industri Indonesia dengan

kawasan di China, memperluas investasi manufaktur, dan memperkuat akses pasar. Pemerintah Indonesia menempatkan Batang dan kawasan lain sebagai bagian dari pengembangan skema tersebut.

Pada 2026, kedua pemerintah terus mempercepat implementasi program tersebut dan menghubungkannya dengan investasi baru serta pembentukan rantai pasok lintas negara.

Kerja sama ini dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk memasuki jaringan produksi yang lebih luas. Perusahaan Indonesia dapat memperoleh pasar, investasi, teknologi, dan hubungan dengan manufaktur global. Namun konsep *twin parks* juga harus diperiksa dari sisi keseimbangan.

Apakah kawasan Indonesia hanya menjadi lokasi produksi berbiaya lebih rendah bagi perusahaan China? Apakah perusahaan nasional dapat masuk sebagai pemilik teknologi dan pemasok utama? Apakah produk akhir menggunakan merek Indonesia? Apakah penelitian dan pengembangan dilakukan di dalam negeri? Apakah desain industri ditentukan bersama atau hanya mengikuti kebutuhan rantai pasok perusahaan luar?

Infrastruktur dan kawasan industri bukan sekadar kumpulan bangunan. Keduanya menentukan geografi ekonomi.

Pelabuhan menentukan ke mana barang mengalir. Rel menentukan kawasan mana yang tumbuh. Pembangkit menentukan industri mana yang memperoleh energi. Kawasan menentukan siapa yang memperoleh izin dan tanah. Karena itu, pembangunan

infrastruktur tidak netral. Pembangunan infrastruktur membentuk pusat kekuasaan ekonomi baru.

Jika negara tidak mempunyai kepemimpinan ekonomi yang kuat, infrastruktur dapat dibangun terutama untuk mempercepat keluarnya komoditas dan produk dari wilayah produksi, bukan untuk menghubungkan kebutuhan rakyat serta membangun ekonomi nasional yang menyeluruh.

Pola kolonial lama dapat muncul kembali dalam bentuk modern, seperti jalan, rel, dan pelabuhan berkembang cepat, tetapi terutama menghubungkan sumber daya dengan pasar luar.

Dekolonisasi infrastruktur berarti memastikan konektivitas tidak hanya mempercepat ekstraksi, tetapi juga membangun kemampuan masyarakat, perdagangan domestik, pendidikan, industri nasional, dan pemerataan wilayah.

D. Teknologi dan Rantai Pasok

China bukan hanya kekuatan manufaktur. China juga berkembang sebagai kekuatan teknologi. Perusahaan China mempunyai kedudukan penting dalam telekomunikasi, jaringan seluler, perangkat digital, pusat data, energi surya, baterai, kendaraan listrik, perdagangan elektronik, kecerdasan buatan, pengawasan digital, dan berbagai infrastruktur teknologi lainnya. Indonesia membutuhkan banyak teknologi tersebut.

Pembangunan jaringan digital, transformasi pemerintahan, industri 4.0, kendaraan listrik, energi terbarukan, dan kota pintar tidak dapat berjalan tanpa

perangkat, perangkat lunak, komputasi, jaringan, sensor, dan sistem pengelolaan data.

Kerja sama dengan perusahaan China dapat memberikan akses teknologi dengan biaya kompetitif, waktu pembangunan yang cepat, serta integrasi dengan jaringan industri yang telah matang.

Pemerintah Indonesia telah membuka berbagai ruang kerja sama, termasuk dalam ekonomi digital, pengembangan 5G, investasi teknologi, dan pembangunan ekosistem manufaktur. Namun teknologi tidak pernah hanya menjadi alat netral.

Setiap sistem teknologi membawa arsitektur kendali. Pihak yang menyediakan perangkat dapat mengetahui cara kerjanya. Pihak yang menyediakan perangkat lunak dapat mengatur pembaruan. Pihak yang mengendalikan platform dapat mengubah aturan. Pihak yang menyimpan data dapat memperoleh pengetahuan tentang masyarakat. Karena itu, kerja sama teknologi harus selalu dihubungkan dengan kedaulatan sistem dan data.

Indonesia perlu mengetahui bagian mana dari teknologi yang dapat diaudit, siapa yang memiliki kode, di mana data disimpan, bagaimana sistem diperbarui, dan apakah terdapat ketergantungan kepada satu vendor.

Ketergantungan vendor menjadi masalah ketika negara tidak mampu mengoperasikan, memperbaiki, atau mengganti sistem tanpa persetujuan dan bantuan penyedia. Dalam keadaan demikian, Indonesia secara formal memiliki infrastruktur, tetapi tidak sepenuhnya menguasainya.

Masalah yang sama terdapat dalam rantai pasok. Rantai pasok modern menghubungkan bahan mentah, komponen, teknologi, pabrik, pembiayaan, logistik, data, standar, dan pasar. Tidak ada negara yang menguasai seluruhnya sendirian. Karena itu, partisipasi dalam rantai pasok global merupakan kebutuhan.

Namun posisi setiap negara di dalam rantai tersebut berbeda. Ada negara yang menguasai desain, penelitian, teknologi inti, pembiayaan, dan merek. Ada negara yang menguasai manufaktur. Ada pula negara yang hanya memasok bahan mentah dan tenaga kerja.

Pertanyaan strategis Indonesia adalah pada lapisan mana Indonesia hendak berada? Apabila Indonesia hanya menjadi sumber nikel, lokasi smelter, pasar kendaraan, dan pengguna teknologi, maka industrialisasi belum menghasilkan kedaulatan.

Indonesia harus bergerak menuju penguasaan material maju, kimia baterai, rekayasa, mesin produksi, perangkat lunak industri, desain produk, standardisasi, kekayaan intelektual, dan merek.

Transfer teknologi karena itu tidak boleh hanya menjadi kata dalam kontrak. Transfer teknologi harus mempunyai ukuran konkret.

Berapa banyak tenaga ahli Indonesia yang dilatih? Bagian teknologi apa yang dapat dikembangkan sendiri? Apakah perguruan tinggi dan pusat penelitian nasional terlibat? Apakah pemasok domestik memperoleh kesempatan? Apakah setelah jangka waktu tertentu Indonesia mampu mengoperasikan sistem tanpa ketergantungan penuh?

Kajian resmi Komdigi mengenai transformasi teknologi telekomunikasi China menunjukkan bahwa keberhasilan China sendiri dibangun melalui kebijakan negara, pembiayaan riset, perusahaan milik negara, kewirausahaan domestik, transfer teknologi, dan penguatan kemampuan penelitian dalam negeri. Kajian tersebut justru merekomendasikan agar Indonesia membangun inovasi nasional, meningkatkan pembiayaan R&D, memperkuat industri lokal, dan memastikan kerja sama asing berlangsung dalam skema yang saling menguntungkan.

Pelajarannya jelas yaitu Indonesia tidak cukup membeli teknologi China. Indonesia harus mempelajari bagaimana China membangun kemampuan menciptakan teknologi.

E. Peluang Industrialisasi dan Risiko Ketergantungan Baru

Kerja sama dengan China membuka peluang industrialisasi yang nyata. Investasi dapat mempercepat pembangunan pabrik. Mesin dan teknologi dapat meningkatkan kemampuan produksi. Pasar China dapat menyerap komoditas dan produk Indonesia. Kawasan industri dapat menciptakan pekerjaan dan meningkatkan aktivitas ekonomi daerah.

Kementerian Investasi mencatat bahwa investasi China di Indonesia selama 2019 hingga September 2024 mencapai sekitar USD34,19 miliar atau sekitar 18 persen dari total investasi asing pada periode itu. Pemerintah

Indonesia juga terus memperoleh komitmen investasi baru dari perusahaan-perusahaan China.

Investasi hilirisasi secara keseluruhan telah menjadi pendorong penting realisasi investasi nasional. Pemerintah menempatkan pengolahan mineral, ekosistem baterai, dan industri turunannya sebagai bagian utama agenda transformasi ekonomi. Namun besarnya investasi tidak otomatis menunjukkan besarnya kedaulatan.

Sebuah negara dapat menerima investasi sangat besar, tetapi tetap berada dalam posisi rendah apabila tidak menguasai teknologi, kepemilikan, manajemen, data, dan pasar.

Peluang industrialisasi harus diukur melalui bertambahnya kemampuan bangsa, bukan hanya bertambahnya bangunan industri. Setidaknya terdapat beberapa risiko ketergantungan baru.

Pertama, ketergantungan modal. Proyek industri besar membutuhkan pembiayaan dalam jumlah sangat besar. Jika sumber pembiayaan terkonsentrasi, ruang pilihan Indonesia dapat menyempit.

Kedua, ketergantungan teknologi. Smelter, baterai, kendaraan listrik, dan sistem digital membutuhkan mesin, paten, keahlian, serta perangkat lunak yang mungkin tetap dikuasai pihak luar.

Ketiga, ketergantungan energi. Industri pengolahan mineral membutuhkan energi besar. Jika energi diperoleh dari pembangkit yang tidak efisien atau beremisi tinggi, hilirisasi dapat menghasilkan biaya ekologis yang berat.

Keempat, ketergantungan pasar. Apabila produk hanya mempunyai satu tujuan utama, perubahan permintaan atau kebijakan negara tujuan dapat mengguncang industri Indonesia.

Kelima, ketergantungan rantai pasok. Meskipun pengolahan berlangsung di Indonesia, bahan kimia, mesin, suku cadang, teknologi, dan pembeli dapat berasal dari jaringan yang sama.

Keenam, ketergantungan manajerial dan pengetahuan. Kawasan industri dapat berkembang cepat tanpa melahirkan jumlah tenaga ahli Indonesia yang sebanding.

Ketujuh, ketergantungan kekuasaan. Ketika hubungan ekonomi terlalu terkonsentrasi, negara dapat menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil posisi yang berbeda karena khawatir terhadap dampak perdagangan dan investasi.

Risiko-risiko tersebut tidak berarti Indonesia harus menghentikan hubungan dengan China. Justru karena hubungan itu penting, Indonesia membutuhkan strategi yang lebih matang.

Diversifikasi mitra harus dilakukan agar tidak bergantung kepada satu negara. Perusahaan nasional harus diperkuat. Transfer teknologi harus diwajibkan dan diukur. Pendidikan teknik harus dihubungkan dengan kebutuhan industri. Penelitian nasional harus memperoleh pembiayaan. Pengadaan pemerintah harus digunakan untuk membangun kapasitas domestik.

Hilirisasi juga harus diperluas dari mineral menuju pengetahuan. Indonesia tidak boleh hanya mengolah bijih. Indonesia harus mengolah data,

menciptakan mesin, mengembangkan bahan baru, membangun perangkat lunak, serta menghasilkan kekayaan intelektual.

Tanpa itu, Indonesia hanya berpindah dari ekonomi ekstraktif primer menjadi ekonomi ekstraktif industrial.

Bahan mentah memang diproses di dalam negeri, tetapi pengetahuan dan keuntungan utama tetap bergerak ke luar.

F. Lingkungan, Tenaga Kerja, dan Rakyat di Sekitar Industri

Industrialisasi tidak dapat dinilai hanya dari sisi investasi, nilai ekspor, dan kapasitas produksi. Industrialisasi harus dibaca dari pengalaman rakyat yang hidup di sekitar kawasan industri.

Pembangunan smelter dan kawasan pengolahan mineral membutuhkan tanah, air, energi, pelabuhan, jalan, dan ruang hidup dalam skala besar. Aktivitas tersebut dapat memengaruhi hutan, pesisir, pertanian, perikanan, kualitas udara, dan sumber air.

Karena itu, hilirisasi yang tidak disertai perlindungan lingkungan berisiko memindahkan biaya pembangunan kepada masyarakat lokal.

Nilai tambah dinikmati industri dan negara, sementara rakyat menanggung pencemaran, kehilangan ruang hidup, gangguan kesehatan, dan perubahan ekonomi lokal. Keadaan tersebut bertentangan dengan tujuan negara rakyat.

Rakyat tidak boleh hanya diminta menerima industrialisasi sebagai pengorbanan bagi kepentingan nasional. Kepentingan nasional tidak dapat dibangun dengan meniadakan kepentingan manusia yang tinggal di wilayah produksi.

Perlindungan tenaga kerja juga menjadi bagian penting. Investasi harus menghasilkan pekerjaan yang layak, keselamatan, peningkatan keahlian, kesempatan karier, dan perlindungan hukum. Tenaga kerja Indonesia tidak boleh hanya ditempatkan pada lapisan pekerjaan berisiko tinggi dan bernilai rendah, sementara posisi teknis serta manajerial strategis tetap didominasi tenaga luar.

Kehadiran tenaga ahli asing dapat dibutuhkan pada tahap awal. Namun harus terdapat rencana jelas untuk membangun tenaga ahli Indonesia.

Jika setelah bertahun-tahun operasi industri tetap tidak dapat berjalan tanpa tenaga, teknologi, dan manajemen asing, berarti transfer kemampuan belum berhasil.

Masyarakat lokal juga harus memperoleh bagian dalam perkembangan ekonomi. Perusahaan kecil dan menengah di sekitar kawasan harus dapat masuk sebagai pemasok. Sekolah dan lembaga pelatihan harus disesuaikan dengan kebutuhan industri. Pendapatan daerah harus digunakan untuk memperbaiki pelayanan. Infrastruktur kawasan harus memberi manfaat bagi masyarakat luas.

Jika kawasan industri hanya mempunyai hubungan langsung dengan pelabuhan dan pasar luar, sementara hubungannya dengan masyarakat sekitar

sangat lemah, kawasan tersebut menyerupai pulau ekonomi di dalam wilayah Indonesia.

Secara geografis berada di Indonesia, tetapi secara fungsional menjadi bagian dari strategi industri negara lain.

G. Kepemimpinan Ekonomi Nasional di Tengah Strategi Bangsa Lain

Masalah utama hubungan Indonesia–China bukan semata-mata besarnya pengaruh China. Masalah utamanya adalah kualitas kepemimpinan ekonomi Indonesia.

China mempunyai strategi jangka panjang untuk memperkuat industri, teknologi, pasar, keamanan energi, dan rantai pasoknya. Tidak ada kesalahan dalam kenyataan tersebut. Setiap negara memang harus memperjuangkan kepentingan bangsanya.

Indonesia juga harus melakukan hal yang sama. Kepemimpinan ekonomi tidak cukup merayakan investasi yang masuk. Kepemimpinan ekonomi harus menentukan industri apa yang ingin dikuasai Indonesia, teknologi apa yang harus dimiliki, lapangan kerja seperti apa yang dibangun, serta berapa besar nilai tambah yang harus tetap berada di dalam negeri.

Pemimpin administratif melihat jumlah proyek dan nilai investasi. Pemimpin peradaban melihat kemampuan bangsa yang lahir dari proyek tersebut.

Pemimpin administratif menghitung berapa smelter dibangun. Pemimpin peradaban menanyakan siapa yang menguasai teknologi smelter.

Pemimpin administratif menghitung ekspor besi dan baja. Pemimpin peradaban menanyakan apakah Indonesia mampu membuat mesin, bahan maju, dan produk akhir.

Pemimpin administratif meresmikan kawasan industri. Pemimpin peradaban memastikan kawasan itu terhubung dengan pendidikan, penelitian, perusahaan nasional, dan rakyat.

Pemimpin administratif melihat China sebagai sumber modal. Pemimpin peradaban membaca China sebagai bangsa yang mempunyai strategi, lalu menyiapkan strategi Indonesia untuk bernegosiasi secara setara. Kepemimpinan ekonomi nasional harus mampu menetapkan batas.

Sumber daya strategis tidak boleh diserahkan tanpa kendali. Data tidak boleh dikelola tanpa kedaulatan. Industri penting tidak boleh bergantung kepada satu pemasok. Kontrak tidak boleh mengikat generasi berikutnya tanpa pertanggungjawaban publik. Namun kepemimpinan juga harus mampu membuka peluang.

Indonesia tidak boleh menolak modal dan teknologi hanya karena berasal dari China. Penolakan berdasarkan sentimen rasial, ideologis, atau kebencian akan merugikan bangsa sendiri. Hubungan harus dinilai berdasarkan kepentingan rakyat, bukan identitas negara mitra.

Apabila investasi China memberikan transfer teknologi, pekerjaan layak, perlindungan lingkungan, penguatan perusahaan nasional, dan peningkatan kedaulatan, kerja sama tersebut harus didukung.

Apabila hubungan menghasilkan ketergantungan, konsentrasi kendali, kerusakan lingkungan, dan hilangnya posisi rakyat, negara harus berani memperbaiki atau menolaknya.

Ukuran yang sama harus diterapkan kepada Amerika Serikat, Jepang, Eropa, Arab, Rusia, dan seluruh mitra lainnya.

Indonesia tidak membutuhkan kebijakan anti-China. Indonesia membutuhkan kebijakan pro-kedaulatan rakyat.

H. China sebagai Cermin Keseriusan Membangun Industri

China tidak hanya penting sebagai mitra. China juga dapat dibaca sebagai cermin mengenai keseriusan membangun industri dan teknologi. Kemajuan China tidak lahir hanya karena masuknya investasi asing atau murahnya tenaga kerja. China menggabungkan kebijakan negara, pembangunan infrastruktur, pendidikan teknik, perusahaan nasional, riset, pasar domestik, transfer teknologi, perlindungan industri tertentu, dan ekspansi global. China menerima modal serta teknologi dunia, tetapi tidak berhenti menjadi penerima.

Perusahaan China belajar, meniru, mengembangkan, dan akhirnya menciptakan teknologi sendiri. Negara menggunakan pasar yang besar sebagai instrumen negosiasi. Investasi asing diarahkan untuk mendukung pembentukan kapasitas nasional.

Indonesia tidak perlu meniru seluruh model China. Struktur ketatanegaraan, sejarah, masyarakat, serta ukuran kedua negara berbeda. Namun Indonesia perlu belajar dari keseriusan strateginya.

Indonesia sering menganggap masuknya investasi sebagai akhir keberhasilan. Bagi bangsa yang mempunyai strategi, investasi hanyalah salah satu alat. Tujuan akhirnya adalah penguasaan kemampuan.

Kerja sama dengan China harus digunakan untuk membangun kemampuan Indonesia, sebagaimana China dahulu menggunakan kerja sama dengan negara maju untuk memperkuat industrinya sendiri.

Indonesia harus menghindari keadaan ketika China naik kelas melalui teknologi, sedangkan Indonesia tetap bertahan sebagai pemasok sumber daya bagi kenaikan tersebut. Hubungan yang adil harus membuat kedua pihak berkembang.

China memperoleh bahan, pasar, dan peluang investasi. Indonesia harus memperoleh teknologi, industri nasional, ilmu, pekerjaan berkualitas, serta kemampuan bersaing.

Jika hanya China yang memperkuat rantai pasoknya sementara Indonesia semakin bergantung, hubungan tersebut belum menjadi kemitraan peradaban yang setara.

I. Penjajahan Modern dalam Hubungan Indonesia–China

Hubungan Indonesia dan China pada abad ke-21 merupakan salah satu hubungan bilateral paling penting di kawasan Asia. Nilai perdagangan yang terus meningkat, investasi pada sektor pertambangan, pembangunan kawasan industri, pembiayaan infrastruktur, kerja sama teknologi, hingga integrasi dalam rantai pasok global menunjukkan bahwa kedua negara memiliki hubungan ekonomi yang semakin erat.

Dalam perspektif hubungan internasional, kondisi tersebut merupakan sesuatu yang wajar karena setiap negara berupaya memperluas pengaruh ekonomi demi memenuhi kepentingan nasionalnya.

China, sebagaimana negara besar lainnya, membangun kebijakan luar negeri yang berorientasi pada kepentingan nasional. Seluruh instrumen ekonomi, perdagangan, investasi, lembaga pembiayaan, hingga perusahaan-perusahaan strategis diarahkan untuk memperkuat posisi nasional China dalam persaingan global.

Tidak ada negara yang melakukan investasi lintas batas semata-mata karena alasan kemanusiaan. Selalu terdapat tujuan ekonomi, geopolitik, keamanan energi, penguasaan teknologi, ataupun penguatan rantai pasok nasional yang ingin dicapai.

Oleh karena itu, persoalan utama sebenarnya bukan terletak pada China, melainkan pada kesiapan

Indonesia dalam mengelola hubungan tersebut. Negara yang memiliki kepemimpinan kuat, sistem hukum yang kokoh, birokrasi yang profesional, serta arah pembangunan nasional yang jelas akan mampu menjadikan investasi asing sebagai instrumen mempercepat pembangunan nasional.

Sebaliknya, negara yang lemah dalam menentukan arah kebijakan justru berpotensi berubah menjadi pasar, penyedia bahan baku, sekaligus pemasok tenaga kerja murah bagi kepentingan ekonomi negara lain.

Dalam konteks inilah muncul konsep penjajahan modern. Penjajahan modern tidak lagi dilakukan melalui pendudukan militer sebagaimana kolonialisme klasik. Penjajahan modern berlangsung melalui mekanisme ekonomi, regulasi, pembiayaan, teknologi, ketergantungan industri, hingga pembentukan arah kebijakan publik.

Bentuk penjajahan ini jauh lebih halus karena tidak menghilangkan simbol-simbol kemerdekaan suatu negara. Bendera tetap berkibar, pemerintahan tetap berjalan, pemilu tetap dilaksanakan, namun ruang pengambilan keputusan strategis perlahan dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi yang berada di luar kendali rakyat.



Diagram "Penjajahan Modern (Versi China): Dari Negara-Partai ke Negara Mitra" menggambarkan mekanisme tersebut secara konseptual. Pada lapisan paling atas terdapat elite pusat negara-partai China

yang mengendalikan strategi nasional. Di bawahnya terdapat berbagai perusahaan investasi milik negara dan lembaga pembiayaan internasional yang menjadi instrumen pelaksanaan kepentingan nasional. Selanjutnya, hubungan tersebut diterjemahkan oleh elite nasional di negara mitra melalui kebijakan pemerintah, regulasi, program pembangunan, pembiayaan negara, kurikulum sumber daya manusia, hingga pembangunan kawasan industri. Pada akhirnya, seluruh proses tersebut bermuara kepada kehidupan rakyat sebagai pihak yang menerima konsekuensi langsung dari setiap kebijakan yang diambil.

Posisi elite nasional menjadi sangat menentukan. Elite birokrasi, teknokrat, maupun pelaku usaha dapat berfungsi sebagai translator dan gatekeeper kepentingan nasional. Apabila elite nasional memiliki orientasi kuat terhadap kepentingan rakyat, maka investasi asing akan diterjemahkan menjadi kesempatan membangun industri nasional, meningkatkan kemampuan teknologi, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, dan memperluas kesejahteraan masyarakat. Namun apabila orientasi tersebut bergeser menuju kepentingan jangka pendek, maka kebijakan publik berpotensi lebih banyak melayani kepentingan modal dibandingkan kepentingan rakyat.

Keadaan tersebut semakin kompleks ketika perubahan kebijakan dilakukan melalui mekanisme hukum yang sah. Dalam kondisi demikian, rakyat

sering kali tidak menyadari bahwa ruang kedaulatan negara sedang mengalami penyempitan karena seluruh proses berlangsung sesuai prosedur administrasi. Situasi inilah yang pernah disindir oleh Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) melalui istilah "penjajahan regulasi", yaitu keadaan ketika perubahan aturan hukum justru menjadi sarana yang memungkinkan berpindahnya kendali atas sumber daya dan arah pembangunan tanpa harus menggunakan kekuatan militer. Sebagaimana ungkapannya, "Kita sekarang mengalami penjajahan regulasi, jadi ini nanti caranya maling bukan ngambil duit, tetapi mengubah aturan yang disebut penjajahan regulasi."

Akibat dari proses tersebut bukan hanya munculnya ketergantungan ekonomi, tetapi juga ketergantungan dalam penguasaan teknologi, pembiayaan, industri, logistik, bahkan arah pembangunan nasional. Negara tetap tampak merdeka secara formal, tetapi ruang strategis untuk menentukan masa depan semakin dipengaruhi oleh kepentingan eksternal. Dalam keadaan demikian, rakyat hidup di negeri sendiri, namun tidak sepenuhnya menjadi pemilik atas arah pembangunan negaranya.

Rakyat hidup di negeri sendiri, tetapi terperangkap dalam sistem global yang tidak mereka kuasai. Mereka bekerja semakin keras, mematuhi hukum, dan menjalankan demokrasi, namun tetap kehilangan kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan. Akibatnya, uang tidak lagi menjadi alat, melainkan

tuan. Tanpa disadari, manusia berhenti mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan mulai menyembah "keuangan yang maha kuasa". Pada akhirnya, nilai-nilai Islam tidak lagi menjadi tata nilai yang membimbing kehidupan, melainkan tinggal sebagai simbol dan ritual.

Namun demikian, diagnosis tersebut tidak boleh dimaknai sebagai penolakan terhadap kerja sama dengan China ataupun dengan negara mana pun. Tidak ada negara yang dapat hidup sendiri dalam dunia yang saling terhubung. Yang diperlukan bukanlah memutus hubungan internasional, melainkan membangun negara yang memiliki kemampuan menyaring setiap kerja sama berdasarkan kepentingan nasional. Investasi harus menjadi alat pembangunan bangsa, bukan sebaliknya bangsa yang menjadi alat bagi investasi.

Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan bukanlah permusuhan terhadap negara lain, melainkan pembebasan peradaban. Pembebasan tersebut dimulai dengan mengembalikan tauhid sebagai dasar orientasi moral, memaknai kembali Pancasila sebagai tata nilai penyelenggaraan negara, serta melakukan perubahan struktur ketatanegaraan melalui penyempurnaan Konstitusi agar rakyat benar-benar menjadi pemilik kedaulatan negara. Dengan demikian, Indonesia dapat membangun hubungan yang setara dengan China maupun dengan seluruh bangsa di dunia, bukan sebagai objek kepentingan, melainkan sebagai negara

berdaulat yang bekerja sama atas dasar saling menghormati dan saling menguntungkan.

J. Penutup Bab

China telah menjadi salah satu kekuatan paling penting dalam ekonomi Indonesia kontemporer. China hadir melalui perdagangan, investasi, nikel, hilirisasi, kawasan industri, pembiayaan, infrastruktur, logistik, teknologi, ekonomi digital, dan rantai pasok.

Kehadiran tersebut membawa peluang yang besar. Indonesia dapat mempercepat industrialisasi, mengolah sumber daya di dalam negeri, membangun infrastruktur, memperoleh teknologi, menciptakan lapangan kerja, dan memasuki rantai produksi global. Namun peluang tersebut membawa risiko ketergantungan baru.

Indonesia dapat berhenti mengekspor bijih, tetapi tetap bergantung pada modal, mesin, teknologi, energi, manajemen, dan pasar luar. Smelter dapat berdiri di Indonesia, tetapi pengetahuan dan keuntungan utamanya belum tentu dimiliki Indonesia.

Kawasan industri dapat tumbuh, tetapi masyarakat sekitarnya belum tentu menjadi pemilik manfaat. Teknologi dapat digunakan, tetapi data dan sistemnya belum tentu dikuasai negara. Karena itu, China tidak boleh dibaca sebagai kolonialisme langsung. Hubungan Indonesia–China tidak dibangun melalui pendudukan wilayah atau penghapusan pemerintahan Indonesia.

Istilah yang lebih tepat adalah pengaruh ekonomi-struktural kontemporer yang dapat memperkuat industrialisasi, tetapi juga dapat menciptakan risiko ketergantungan apabila Indonesia tidak mempunyai strategi sendiri.

Persoalan utamanya bukan kekuatan China, melainkan kelemahan arah Indonesia. China akan menjalankan strategi untuk kepentingan bangsanya. Indonesia harus menjalankan strategi untuk kepentingan rakyatnya.

Bangsa yang mempunyai sumber daya tetapi tidak mempunyai kepemimpinan ekonomi akan menjadi ruang produksi bagi strategi bangsa lain. Bangsa yang mempunyai pasar tetapi tidak mempunyai teknologi akan menjadi konsumen. Bangsa yang mempunyai data tetapi tidak mempunyai sistem akan menjadi bahan baku digital. Bangsa yang mempunyai kawasan industri tetapi tidak mempunyai perusahaan nasional yang kuat akan menjadi penyedia tanah dan tenaga kerja. Karena itu, hilirisasi harus dilanjutkan menjadi industrialisasi yang sesungguhnya.

Industrialisasi harus dilanjutkan menjadi penguasaan teknologi. Penguasaan teknologi harus dilanjutkan menjadi kedaulatan ilmu, data, dan keputusan. Kepemimpinan ekonomi nasional harus memastikan bahwa setiap kerja sama dengan China menjawab pertanyaan berikut:

- Apakah kemampuan Indonesia bertambah?
- Apakah rakyat memperoleh kepemilikan dan nilai tambah?
- Apakah perusahaan nasional naik kelas?

- Apakah teknologi dipindahkan?
- Apakah lingkungan dan tenaga kerja dilindungi?
- Apakah Indonesia mampu berdiri tanpa ketergantungan penuh setelah kerja sama berlangsung?

Jika jawabannya tidak, maka investasi besar sekalipun belum tentu menghasilkan kemerdekaan. Dalam tata nilai Islam, kerja sama ekonomi harus berdiri di atas keadilan, amanah, keseimbangan, perlindungan harta, perlindungan manusia, dan kemaslahatan.

Modal tidak boleh ditempatkan di atas rakyat. Teknologi tidak boleh menghilangkan martabat manusia. Pertumbuhan tidak boleh mengorbankan keadilan. Kemakmuran tidak boleh hanya menjadi angka ekspor dan investasi.

Hubungan Indonesia–China harus dibangun tanpa kebencian dan tanpa ketundukan. Indonesia harus belajar dari kemampuan China membangun industri, tetapi tidak boleh menjadi bagian pasif dari strategi industrinya.

China dapat menjadi mitra penting. Namun arah Indonesia harus tetap ditentukan oleh manusia Indonesia, kepemimpinan Indonesia, dan rakyat Indonesia sebagai pemilik negara.

Kedaulatan bukan kemampuan menolak bangsa lain. Kedaulatan adalah kemampuan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa kehilangan kendali atas masa depan sendiri.

Bab XII
Rusia: Dibaca Secara Proporsional Sejauh Bukti Menunjukkan Peran Nyata

Dalam pembacaan geopolitik kontemporer, Rusia sering ditempatkan sebagai salah satu kutub utama dalam konfigurasi dunia multipolar. Posisi tersebut membuat berbagai analisis mengenai Indonesia kerap memasukkan Rusia sebagai aktor yang dianggap memiliki pengaruh besar terhadap arah perkembangan Indonesia. Namun naskah ini memilih pendekatan yang berbeda.

Sekolah Negarawan tidak menempatkan setiap negara besar sebagai aktor dominan hanya karena kapasitas militernya, luas wilayahnya, atau pengaruh geopolitiknya. Setiap negara harus dibaca berdasarkan bukti sejarah yang dapat diverifikasi serta tingkat pengaruh nyatanya terhadap pembentukan struktur Indonesia.

Dalam kerangka tersebut, Rusia—dan sebelumnya Uni Soviet—memang mempunyai peranan penting pada periode tertentu dalam sejarah Indonesia, terutama pada masa Presiden Soekarno. Uni Soviet memberikan dukungan dalam pembangunan pertahanan, industri strategis, pendidikan teknik, serta dukungan diplomatik terhadap perjuangan Indonesia di forum internasional.

Namun apabila dibandingkan dengan Belanda yang membangun administrasi kolonial selama ratusan tahun, Jepang yang membentuk pengalaman mobilisasi

militer masyarakat, Amerika Serikat dalam konfigurasi Perang Dingin dan perubahan pasca-1965, maupun China dalam struktur ekonomi dan rantai pasok kontemporer, pengaruh Rusia terhadap struktur ketatanegaraan Indonesia relatif lebih terbatas.

Karena itu, bab ini tidak dimaksudkan untuk membesar-besarkan ataupun mengecilkan peranan Rusia.

Tujuan utamanya adalah menunjukkan bahwa membaca dunia secara adil berarti memberikan bobot yang sesuai dengan fakta. Pendekatan semacam inilah yang membedakan diagnosis historis dari propaganda geopolitik.

A. Uni Soviet dan Indonesia Era Soekarno

Hubungan Indonesia dengan Uni Soviet berkembang sangat pesat pada akhir 1950-an hingga pertengahan 1960-an.

Pada masa tersebut, Indonesia sedang membangun negara yang baru merdeka sekaligus berusaha mempertahankan posisi bebas aktif di tengah rivalitas Amerika Serikat dan Uni Soviet.

Presiden Soekarno tidak menempatkan Indonesia sebagai bagian dari blok Timur maupun blok Barat. Namun dalam praktiknya, berbagai kebutuhan pembangunan nasional, terutama di bidang pertahanan dan infrastruktur strategis, membuka ruang kerja sama yang luas dengan Uni Soviet.

Uni Soviet memberikan kredit pembangunan, bantuan persenjataan, pelatihan militer, serta dukungan

diplomatik terhadap perjuangan Indonesia dalam pembebasan Irian Barat.

Berbagai aset strategis yang hingga kini masih dikenal masyarakat Indonesia termasuk kapal perang, pesawat tempur, kapal selam, serta sejumlah fasilitas industri, merupakan bagian dari kerja sama tersebut.

Dalam konteks ini, Uni Soviet berperan sebagai mitra pembangunan negara yang sedang memperkuat kapasitas pertahanannya.

Namun hubungan tersebut tidak berkembang menjadi dominasi institusional sebagaimana warisan kolonial Belanda.

Uni Soviet membantu memperkuat negara Indonesia, tetapi tidak membangun administrasi kolonial maupun sistem hukum yang bertahan hingga sekarang. Perbedaan ini penting ditegaskan agar pembacaan sejarah tetap proporsional.

B. Pertahanan dan Kerja Sama Militer

Bidang pertahanan menjadi ruang kerja sama paling nyata antara Indonesia dan Uni Soviet, kemudian Federasi Rusia. Berbagai sistem persenjataan Indonesia sejak era Soekarno hingga masa kini menunjukkan kesinambungan hubungan tersebut.

Kerja sama pertahanan juga berkembang melalui pelatihan personel, transfer peralatan, serta pembelian sistem senjata. Namun berbeda dengan hubungan ekonomi yang menciptakan ketergantungan rantai pasok jangka panjang, kerja sama pertahanan Indonesia dengan Rusia relatif berlangsung berdasarkan kebutuhan spesifik.

Indonesia tetap mempertahankan prinsip diversifikasi alutsista dengan bekerja sama pula dengan berbagai negara lain.

Karena itu, hubungan pertahanan Indonesia–Rusia lebih tepat dipahami sebagai salah satu unsur dalam strategi bebas aktif Indonesia daripada sebagai hubungan yang membentuk struktur dominasi.

C. Energi dan Geopolitik Multipolar

Setelah berakhirnya Perang Dingin, Rusia kembali muncul sebagai salah satu kekuatan utama dalam kekuasaan internasional. Dalam konteks Indonesia, hubungan berkembang pada bidang energi, nuklir sipil, eksplorasi sumber daya, dan diplomasi.

Indonesia memandang Rusia sebagai salah satu mitra strategis dalam membangun keseimbangan hubungan luar negeri. Bagi Rusia sendiri, Asia Tenggara merupakan kawasan penting dalam strategi Indo-Pasifik yang semakin kompetitif.

Namun hubungan tersebut tidak berkembang menjadi ketergantungan ekonomi yang sebanding dengan hubungan Indonesia–China maupun hubungan finansial Indonesia dengan sistem ekonomi Barat.

Karena itu, Rusia lebih tepat dipahami sebagai salah satu unsur dalam konfigurasi multipolar daripada sebagai pusat pengaruh dominan terhadap Indonesia.

D. Rusia dalam Imajinasi Dunia Non-Barat

Bagi banyak negara berkembang, Rusia sering dipersepsikan sebagai simbol perlawanan terhadap dominasi tunggal dunia.

Pandangan tersebut semakin menguat setelah munculnya berbagai forum multipolar seperti BRICS dan berkembangnya wacana mengenai tatanan dunia yang lebih seimbang. Namun naskah ini tidak membangun analisis berdasarkan simbol.

Sekolah Negarawan tidak menilai suatu negara berdasarkan apakah ia dianggap anti-Barat ataupun anti-Amerika. Yang dinilai adalah:

- sejauh mana negara tersebut memengaruhi struktur Indonesia;
- bagaimana hubungan tersebut berlangsung;
- apakah hubungan itu memperkuat atau justru melemahkan kedaulatan rakyat.

Dengan ukuran tersebut, Rusia memang mempunyai arti penting dalam geopolitik global, tetapi pengaruh langsungnya terhadap struktur sosial dan kekuasaan Indonesia tetap harus dibaca secara proporsional.

E. Penting, tetapi Harus Proporsional

Kesalahan dalam membaca sejarah sering muncul karena setiap negara besar dianggap mempunyai pengaruh yang sama. Padahal kenyataannya berbeda.

Belanda membentuk administrasi kolonial. Jepang membentuk pengalaman mobilisasi total. Amerika Serikat memengaruhi konfigurasi Perang Dingin dan perubahan kekuasaan pasca-1965. China mempunyai pengaruh besar dalam ekonomi, industri, investasi, teknologi, dan rantai pasok kontemporer. Adapun Rusia mempunyai pengaruh nyata terutama

pada bidang pertahanan, diplomasi tertentu, dan hubungan geopolitik.

Pengaruh tersebut penting, tetapi tidak cukup untuk menjelaskan struktur dominasi Indonesia saat ini. Membaca Rusia secara berlebihan justru akan melemahkan kualitas analisis. Sebaliknya, mengabaikan Rusia sama sekali juga akan menghilangkan bagian penting dari sejarah hubungan luar negeri Indonesia. Karena itu, posisi yang paling tepat adalah membaca Rusia secara disiplin, berdasarkan bukti.

F. Membaca Multipolaritas Tanpa Kehilangan Kedaulatan Rakyat

Perubahan dunia menuju konfigurasi multipolar membuka peluang yang lebih besar bagi negara-negara berkembang. Indonesia tidak lagi hanya berhadapan dengan satu pusat kekuatan dunia.

Hubungan dapat dibangun dengan Amerika Serikat, China, Rusia, Jepang, Eropa, India, Timur Tengah, maupun negara-negara lain. Namun bertambahnya pilihan mitra tidak otomatis menghasilkan kedaulatan.

Negara yang tidak mempunyai strategi nasional tetap akan bergantung kepada siapa pun yang paling kuat pada saat tertentu. Karena itu, multipolaritas bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya tetap sama, yaitu kemampuan bangsa menentukan arah pembangunannya sendiri.

Indonesia harus mampu bekerja sama dengan seluruh kekuatan dunia tanpa kehilangan kemampuan menentukan kepentingan nasionalnya.

Kepemimpinan strategis dibutuhkan agar kerja sama internasional tidak berubah menjadi ketergantungan baru.

G. Penutup Bab

Rusia menempati posisi penting dalam sejarah hubungan luar negeri Indonesia, terutama melalui hubungan dengan Uni Soviet pada masa Presiden Soekarno serta kerja sama pertahanan dan diplomasi pada masa kontemporer.

Namun bukti sejarah tidak menunjukkan bahwa Rusia membentuk struktur kolonial, administrasi negara, ataupun dominasi ekonomi Indonesia dalam skala yang sebanding dengan Belanda, Jepang, Amerika Serikat, atau China. Karena itu, Rusia harus dibaca secara proporsional.

Sikap ini sekaligus menunjukkan metode yang digunakan Sekolah Negarawan. Naskah ini tidak dibangun untuk mencari musuh baru ataupun menyusun daftar negara yang harus dipersalahkan. Tujuannya adalah memahami bagaimana jaringan dunia bekerja terhadap Indonesia, sejauh mana pengaruh masing-masing aktor dapat dibuktikan, dan bagaimana bangsa Indonesia dapat membangun kepemimpinan yang mampu berinteraksi dengan seluruh kekuatan dunia tanpa kehilangan arah peradabannya.

Dalam dunia yang semakin multipolar, ukuran keberhasilan Indonesia bukanlah kedekatan dengan satu negara tertentu, melainkan kemampuan mempertahankan kedaulatan rakyat di tengah

hubungan yang semakin kompleks. Bangsa yang memiliki kepemimpinan strategis tidak akan larut dalam persaingan antar-kekuatan besar, tetapi mampu menjadikan setiap hubungan internasional sebagai sarana memperkuat manusia, rakyat, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemaslahatan bangsa.

Dengan demikian, Rusia bukan ditempatkan sebagai pusat penjelasan atas Indonesia, melainkan sebagai salah satu bagian dari jaringan dunia yang perlu dipahami secara jujur, proporsional, dan berbasis bukti. Pendekatan inilah yang menjaga agar tesis "Iran Tidak Akan Memahami Indonesia Jika Tidak Memahami Dunia" tetap berdiri di atas disiplin akademik, bukan di atas prasangka geopolitik.

Bab XIII
Lembaga Keuangan, Korporasi Global, Teknologi, Data, Pendidikan, Jaringan Timur Tengah, AI, dan Elite Domestik

Perubahan besar dalam tata dunia selama beberapa dekade terakhir menunjukkan bahwa distribusi kekuasaan tidak lagi hanya ditentukan oleh negara. Arsitektur kekuasaan global semakin dipengaruhi oleh aktor non-negara yang memiliki kemampuan membentuk arus modal, teknologi, informasi, pendidikan, bahkan cara manusia memahami realitas. Lembaga keuangan internasional, perusahaan teknologi multinasional, penyedia layanan komputasi awan (*cloud*), platform digital, perusahaan kecerdasan buatan, lembaga pendidikan global, media transnasional, organisasi filantropi, hingga jaringan profesional lintas negara kini menjadi bagian dari ekosistem yang memengaruhi arah pembangunan banyak negara.

Dalam konteks tersebut, sejumlah ilmuwan ilmu politik dan ekonomi menggambarkan munculnya bentuk-bentuk baru ketergantungan yang berbeda dari kolonialisme klasik. Jika kolonialisme masa lalu identik dengan pendudukan wilayah secara langsung, maka pengaruh pada era globalisasi lebih sering bekerja melalui integrasi ekonomi, standar teknologi, arus data, pembentukan opini, investasi, serta jejaring pengetahuan. Pengaruh ini dapat memberikan manfaat besar berupa akses terhadap modal, inovasi, dan pasar,

tetapi juga dapat menimbulkan kerentanan apabila suatu negara tidak memiliki kapasasitas untuk menjaga kedaulatan kebijakan, data, dan kepentingan nasional.

Bagi Indonesia, tantangannya bukan menolak globalisasi, melainkan membangun kemampuan untuk berinteraksi secara setara. Negara yang memiliki kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata nilai yang kuat cenderung lebih mampu memanfaatkan globalisasi untuk kepentingannya sendiri. Sebaliknya, negara yang lemah dapat menjadi sangat bergantung pada teknologi, modal, maupun sistem pengetahuan yang dikembangkan pihak lain.

A. Kekuasaan Global Non-Negara

Kekuasaan dalam hubungan internasional dewasa ini semakin bersifat multidimensi. Selain negara, terdapat aktor-aktor non-negara yang memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan publik dan dinamika ekonomi global. Lembaga keuangan internasional, perusahaan teknologi, perusahaan farmasi, lembaga pemeringkat kredit, perusahaan konsultan global, platform media sosial, hingga organisasi filantropi internasional dapat memengaruhi pilihan kebijakan melalui mekanisme pembiayaan, investasi, standar teknis, penyebaran informasi, maupun produksi pengetahuan.

Kondisi tersebut tidak selalu dipahami sebagai bentuk dominasi. Dalam banyak kasus, keberadaan aktor-aktor ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi, transfer teknologi, peningkatan efisiensi, dan kolaborasi lintas negara. Namun demikian, pengaruh yang besar

juga menuntut adanya kapasitas negara untuk mengelola hubungan tersebut secara seimbang agar kepentingan nasional tetap menjadi orientasi utama.

B. Korporasi Global dan Penguasaan Sumber Daya

Globalisasi memperkuat peran perusahaan multinasional dalam berbagai sektor strategis, mulai dari energi, pertambangan, pangan, telekomunikasi, hingga ekonomi digital. Melalui investasi, rantai pasok internasional, dan penguasaan teknologi, perusahaan-perusahaan tersebut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus memengaruhi arah pembangunan.

Bagi negara berkembang, tantangan utamanya adalah memastikan bahwa investasi asing menghasilkan nilai tambah domestik, alih teknologi, pengembangan sumber daya manusia, serta memperkuat kapasitas industri nasional. Tanpa kebijakan yang tepat, ketergantungan pada teknologi dan modal eksternal dapat mengurangi ruang kemandirian ekonomi dalam jangka panjang.

C. Teknologi, Cloud, Platform, AI, dan Data

Perkembangan teknologi digital menjadikan data sebagai salah satu sumber daya strategis abad ke-21. Infrastruktur cloud, kecerdasan buatan (AI), platform digital, dan jaringan komunikasi membentuk fondasi baru bagi aktivitas ekonomi, pemerintahan, dan kehidupan sosial.

Di satu sisi, teknologi digital membuka peluang besar untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, inovasi industri, dan kualitas pendidikan. Di sisi lain, muncul tantangan mengenai keamanan siber, perlindungan data pribadi, interoperabilitas sistem, serta kedaulatan digital. Negara perlu memiliki kapasitas regulasi dan infrastruktur agar pemanfaatan teknologi tetap sejalan dengan kepentingan publik.

D. Globalisasi, Perang Pengetahuan, dan Ketidaksiapan Universitas

Dalam berbagai forum Maiyah, Cak Nun menyampaikan kritik bahwa Indonesia belum sepenuhnya siap menghadapi dinamika globalisasi, modernisasi, maupun perubahan teknologi yang sangat cepat. Kritik tersebut dapat dipahami sebagai ajakan untuk meningkatkan kesiapan bangsa dalam membangun kualitas manusia dan tata nilai, bukan sekadar mengejar kemajuan teknologi.

Persaingan antarbangsa kini semakin ditentukan oleh kemampuan menghasilkan ilmu pengetahuan, inovasi, dan sumber daya manusia unggul. Universitas tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer ilmu, tetapi juga sebagai pusat riset, inovasi, dan pengembangan kebijakan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan tinggi menjadi salah satu prasyarat penting bagi daya saing nasional.

E. Pendidikan dan Produksi Kesadaran

Pendidikan tidak hanya membentuk kompetensi teknis, tetapi juga membentuk cara pandang, etika, dan orientasi seseorang terhadap masyarakat. Kurikulum, metode pembelajaran, media, dan lingkungan akademik memiliki pengaruh terhadap pembentukan nilai-nilai publik.

Karena itu, pembangunan pendidikan perlu diarahkan agar menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan modern sekaligus memiliki integritas, tanggung jawab sosial, dan kemampuan berpikir kritis. Pendidikan yang hanya mengejar aspek teknis tanpa pembentukan karakter berisiko menghasilkan kemajuan yang tidak diimbangi dengan tanggung jawab moral.

F. Jaringan Timur Tengah, Pendidikan Keagamaan, Dana Sosial, dan Pengaruh Nilai

Hubungan Indonesia dengan berbagai negara di Timur Tengah memiliki sejarah panjang dalam bidang keagamaan, pendidikan, perdagangan, dan kebudayaan. Banyak ulama Indonesia menempuh pendidikan di kawasan tersebut, sementara berbagai lembaga sosial dan filantropi juga menjalin kerja sama dalam bidang kemanusiaan dan pendidikan.

Hubungan tersebut membawa berbagai manfaat, seperti pertukaran ilmu, penguatan jaringan akademik, dakwah, dan kerja sama sosial. Pada saat yang sama, sebagaimana hubungan internasional pada umumnya, setiap bentuk kerja sama juga membawa perspektif,

pengalaman, dan nilai yang dapat memengaruhi cara pandang masyarakat.

Oleh karena itu, penguatan kapasitas intelektual dan kebijakan nasional diperlukan agar setiap bentuk kerja sama dapat disaring dan disesuaikan dengan kebutuhan Indonesia.

G. Islam sebagai Wahyu, Arab sebagai Aktor Sejarah

Penting untuk membedakan antara Islam sebagai agama dan dunia Arab sebagai kawasan sejarah dan sosial. Islam merupakan ajaran yang bersumber dari wahyu dan menjadi pedoman hidup bagi umatnya, sedangkan masyarakat Arab adalah komunitas manusia yang memiliki keragaman budaya, sejarah, ketatanegaraan, dan kepentingan sebagaimana masyarakat di kawasan lain.

Dalam sejarah Islam, kawasan Arab memiliki peran penting sebagai tempat lahirnya Islam, pusat perkembangan bahasa Arab, serta salah satu sumber tradisi keilmuan. Namun, perkembangan Islam juga diperkaya oleh kontribusi berbagai peradaban lain, termasuk Persia, Turki, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Afrika. Dengan demikian, memahami Islam tidak identik dengan mengidentikkan seluruh dinamika dunia Arab sebagai representasi tunggal ajaran Islam.

H. Elite Domestik sebagai Penghubung Kepentingan

Dalam era globalisasi, hubungan antara aktor internasional dan negara sering kali berlangsung melalui berbagai bentuk kemitraan dengan elite

domestik, baik di sektor pemerintahan, bisnis, akademik, maupun masyarakat sipil. Peran mereka dapat bersifat positif ketika mampu membawa investasi, teknologi, dan pengetahuan yang bermanfaat bagi pembangunan nasional.

Namun demikian, tata kelola yang baik tetap diperlukan agar setiap bentuk kerja sama berlangsung secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Dengan demikian, hubungan internasional tidak dipahami sebagai arena dominasi, tetapi sebagai ruang kolaborasi yang tetap menjaga kedaulatan kebijakan nasional.

I. Kepemimpinan Elite dan Krisis Tanggung Jawab Peradaban

Kemajuan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh kekuatan ekonomi atau teknologi, tetapi juga oleh kualitas kepemimpinannya. Elite nasional memegang peranan penting dalam menentukan arah pembangunan, membangun kepercayaan publik, dan menjaga kesinambungan kebijakan.

Tanggung jawab kepemimpinan tidak berhenti pada pencapaian indikator ekonomi, melainkan juga mencakup kemampuan membangun keadilan, memperkuat institusi, menjaga integritas, serta mempersiapkan masyarakat menghadapi perubahan global.

J. Penjajahan Modern Global: Dari Negara Kolonial Menuju Sistem Global

Penjajahan pada abad ke-16 hingga abad ke-20 identik dengan pendudukan wilayah, pengerahan kekuatan militer, penguasaan sumber daya alam, serta pengendalian pemerintahan di negeri jajahan.

Bangsa-bangsa kolonial seperti Belanda dan Inggris membangun imperium melalui ekspedisi maritim, perusahaan dagang, administrasi kolonial, dan kekuatan bersenjata. Indonesia mengalami fase tersebut selama berabad-abad, sehingga bentuk penjajahan pada masa itu tampak jelas: wilayah dikuasai, pemerintahan dikendalikan, dan rakyat kehilangan kemerdekaan politik.

Namun, setelah gelombang dekolonisasi pada pertengahan abad ke-20, bentuk hubungan internasional mengalami perubahan.

Banyak negara memperoleh kemerdekaan secara formal, tetapi dunia memasuki era baru yang ditandai oleh saling ketergantungan ekonomi, perdagangan internasional, teknologi, lembaga keuangan, dan arus informasi lintas batas.

Dalam konteks inilah muncul gagasan bahwa dominasi tidak selalu berlangsung melalui pendudukan wilayah, melainkan dapat hadir melalui mekanisme yang lebih kompleks dan lebih halus.

Dalam perkembangan tersebut, Amerika Serikat menjadi salah satu aktor utama dalam membentuk

tatanan internasional pasca-Perang Dunia II melalui pengaruh ekonomi, keamanan, teknologi, sistem keuangan, dan jaringan aliansi global.

Inggris tetap mempertahankan pengaruh melalui sektor keuangan, hukum, dan jaringan Persemakmuran, sementara Belanda, meskipun tidak lagi memiliki imperium kolonial, masih menjadi bagian dari sistem ekonomi dan perdagangan internasional yang saling terhubung.

Di kawasan Timur Tengah, Israel berkembang sebagai salah satu negara dengan kemampuan tinggi dalam bidang teknologi, keamanan siber, pertahanan, dan inovasi, sehingga turut memiliki pengaruh pada dinamika geopolitik dan teknologi global. Keempat negara tersebut merupakan contoh aktor negara yang berpengaruh dalam berbagai bidang, meskipun masing-masing memiliki sejarah, kepentingan, dan peran yang berbeda.

Pada saat yang sama, dunia modern juga memperlihatkan semakin besarnya peranan aktor non-negara. Lembaga keuangan internasional, perusahaan investasi global, perusahaan teknologi, firma konsultan, lembaga standardisasi, media digital, penyedia layanan komputasi awan (*cloud*), pengembang kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), hingga perusahaan audit multinasional memiliki kemampuan untuk memengaruhi praktik ekonomi, tata kelola, dan arah pembangunan di banyak negara.



Infografik "Penjajahan Modern: Dari Elite Global ke Kehidupan Rakyat" menggambarkan perubahan tersebut. Pada lapisan paling atas terdapat elite global yang memengaruhi arah konsensus internasional melalui agenda, narasi, stabilitas sistem, dan berbagai

bentuk koordinasi ekonomi global. Di bawahnya terdapat institusi kebijakan multilateral, firma jasa profesional global (The Big Four), serta perusahaan investasi berskala global yang menjadi bagian dari ekosistem ekonomi internasional. Selanjutnya, kebijakan tersebut diterjemahkan oleh elite nasional sebelum diwujudkan dalam bentuk program pemerintah, regulasi, kebijakan fiskal, kurikulum, dan berbagai instrumen administrasi negara yang akhirnya berdampak langsung kepada kehidupan rakyat. Diagram tersebut juga menempatkan rakyat sebagai pihak yang menerima konsekuensi akhir dari setiap perubahan kebijakan, serta menawarkan gagasan pembebasan melalui penguatan nilai ketuhanan, Pancasila, dan pembaruan struktur ketatanegaraan.

Dalam kerangka ini, persoalan utama bukan terletak pada keberadaan satu negara tertentu, melainkan pada kemampuan suatu bangsa menjaga kedaulatan dalam menghadapi sistem global yang semakin kompleks. Negara-negara besar secara wajar akan memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Korporasi akan mengejar keuntungan. Lembaga keuangan akan menjalankan mandatnya. Perusahaan teknologi akan memperluas pasar dan pengaruhnya. Tantangan sesungguhnya adalah apakah negara penerima memiliki kapasitas untuk menyaring setiap pengaruh tersebut agar tetap sejalan dengan kepentingan rakyat.

Di sinilah posisi elite domestik menjadi sangat menentukan. Elite politik, birokrasi, teknokrat, akademisi, dan pelaku usaha dapat berperan sebagai penjaga kepentingan nasional, tetapi juga dapat menjadi penerjemah berbagai kepentingan eksternal ke dalam kebijakan domestik. Oleh karena itu, kualitas kepemimpinan dan integritas institusi jauh lebih menentukan daripada sekadar besar atau kecilnya investasi asing.

Perubahan bentuk dominasi juga tampak pada instrumen yang digunakan. Jika kolonialisme klasik bertumpu pada kekuatan militer dan administrasi kolonial, maka penjajahan modern lebih banyak bergerak melalui regulasi, pembiayaan, perdagangan, penguasaan teknologi, standar internasional, kepemilikan data, kecerdasan buatan, serta pengaruh terhadap opini publik dan produksi pengetahuan. Karena berlangsung melalui mekanisme yang sah dan sering kali disepakati bersama, bentuk dominasi seperti ini tidak selalu mudah dikenali.

Kondisi tersebut sejalan dengan peringatan Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) mengenai "penjajahan regulasi", yaitu keadaan ketika perubahan aturan dapat menjadi instrumen yang mengubah arah penguasaan sumber daya dan kehidupan masyarakat tanpa memerlukan pendudukan militer. Kritik tersebut mengingatkan bahwa kedaulatan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mempertahankan

wilayah, tetapi juga oleh kemampuan menjaga arah pembentukan hukum dan kebijakan publik.

Akibatnya, rakyat dapat hidup di negeri sendiri tetapi tetap merasa jauh dari hasil pembangunan. Mereka bekerja semakin keras, mematuhi hukum, membayar pajak, serta mengikuti prosedur demokrasi, namun belum tentu menikmati keadilan, kesejahteraan, dan kedaulatan yang nyata. Ketika seluruh aspek kehidupan semakin diukur berdasarkan indikator finansial, terdapat risiko bahwa uang tidak lagi dipandang sebagai alat untuk melayani manusia, melainkan menjadi tujuan yang mendominasi pengambilan keputusan. Pada titik inilah orientasi peradaban dapat bergeser dari nilai-nilai ketuhanan menuju orientasi yang semata-mata berpusat pada kepentingan ekonomi.

Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan dalam buku ini bukanlah membangun permusuhan terhadap negara mana pun, baik Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Israel, China, maupun negara lainnya. Hubungan internasional tetap diperlukan sebagai bagian dari kehidupan dunia yang saling terhubung. Yang harus diperkuat adalah kemampuan Indonesia untuk membangun negara yang memiliki kepemimpinan berintegritas, konstitusi yang mampu menjaga kedaulatan rakyat, institusi yang akuntabel, serta tata nilai yang menempatkan manusia, keadilan, dan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar penyelenggaraan negara.

Dengan demikian, pembebasan dari penjajahan modern bukan dimulai dengan menolak dunia, melainkan dengan membangun kemandirian moral, intelektual, ekonomi, teknologi, dan ketatanegaraan, sehingga Indonesia mampu bekerja sama dengan seluruh bangsa secara setara, tanpa kehilangan jati diri, kedaulatan, dan tanggung jawab terhadap rakyatnya.

K. Mengapa Tata Nilai Harus Mengendalikan Teknologi

Teknologi merupakan instrumen yang dapat mempercepat kemajuan manusia, tetapi arah penggunaannya ditentukan oleh nilai dan tujuan yang melandasinya. Kecerdasan buatan, analisis data, komputasi awan, dan platform digital dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan produktivitas ekonomi. Namun, tanpa tata kelola dan etika yang memadai, teknologi juga dapat memperbesar kesenjangan, memperkuat konsentrasi kekuasaan, atau mengurangi perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

Dalam perspektif ini, kritik Cak Nun dapat dipahami sebagai pengingat bahwa kemajuan teknologi perlu diimbangi dengan pembangunan tata nilai. Teknologi tanpa tata nilai berisiko menjadi alat dominasi atau penyalahgunaan kekuasaan, sedangkan tata nilai yang tidak didukung penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi akan sulit menjawab tantangan dunia modern.

Bagi Indonesia, pilihan strategisnya bukan antara menerima atau menolak globalisasi, melainkan membangun kapasitas agar mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kerja sama internasional secara mandiri, berkeadilan, dan sesuai dengan nilai-nilai yang menjadi dasar kehidupan berbangsa.

Dalam kerangka itulah, pembangunan manusia, penguatan institusi, dan penguasaan teknologi perlu berjalan seiring sebagai fondasi bagi kedaulatan nasional di abad ke-21.

L. Penutup Bab

Kolonialisme abad ke-21 tidak lagi bekerja terutama melalui kapal perang, benteng, atau pemerintahan kolonial. Kolonialisme abad ke-21 bekerja melalui sistem yang jauh lebih halus, yaitu lembaga keuangan, korporasi global, platform digital, cloud, data, kecerdasan buatan, pendidikan, media, jaringan nilai, jaringan filantropi, serta elite domestik yang menjadi penghubung antara kepentingan global dan kebijakan nasional.

Dalam konfigurasi seperti itu, Indonesia tidak cukup mempertahankan kedaulatan wilayah. Indonesia harus membangun kedaulatan pengetahuan, kedaulatan teknologi, kedaulatan data, dan terutama kedaulatan tata nilai.

Di sinilah kritik Cak Nun menjadi sangat relevan. Bangsa ini belum sepenuhnya siap menghadapi globalisasi, modernisasi, perang pengetahuan, dan AI karena pembangunan manusia sering tertinggal

dibanding pembangunan infrastruktur. Universitas, birokrasi, pasar, bahkan lembaga keagamaan ditantang untuk tidak hanya mengikuti perubahan dunia, tetapi juga membentuk arah perubahan tersebut.

Hubungan Indonesia dengan Arab dan Timur Tengah juga harus dibaca secara adil. Islam adalah wahyu yang bersifat universal, sedangkan Arab merupakan aktor sejarah yang membawa ilmu, bahasa, dakwah, budaya, perdagangan, pendidikan, serta dalam konteks modern juga berbagai jaringan sosial, filantropi, dan kepentingan. Keduanya tidak boleh disamakan. Ukuran yang harus digunakan bukan asal geografis, melainkan kesesuaiannya dengan tata nilai Islam dan kemaslahatan rakyat.

Pada akhirnya, tantangan terbesar Indonesia bukanlah memilih berpihak kepada Barat, Timur, China, Rusia, Arab, ataupun kekuatan global lainnya. Tantangannya adalah membangun kepemimpinan yang mampu berinteraksi dengan seluruh jaringan dunia tanpa kehilangan arah peradabannya sendiri.

Karena itu, masa depan Indonesia tidak akan ditentukan oleh siapa yang memiliki teknologi paling canggih semata, melainkan oleh siapa yang mampu memastikan bahwa teknologi tetap berada di bawah amanah, keadilan, ilmu pengetahuan, dan perlindungan terhadap manusia. Hanya dengan demikian Indonesia dapat memasuki era global dan kecerdasan buatan sebagai bangsa yang merdeka, bukan sekadar sebagai pengguna teknologi atau pasar bagi strategi peradaban bangsa lain.

Bab XIV
Mengapa Umat Islam Indonesia Besar tetapi Belum Menjadi Tata Nilai Primer

Indonesia dikenal sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Di hampir setiap daerah berdiri masjid, pesantren, majelis taklim, lembaga zakat, organisasi Islam, sekolah Islam, serta berbagai aktivitas keagamaan yang hidup di tengah masyarakat. Kehadiran Islam secara demografis tampak begitu kuat. Namun, pertanyaan yang lebih mendasar bukanlah berapa banyak umat Islam yang ada, melainkan sejauh mana nilai-nilai Islam membentuk kehidupan publik.

Bab ini berangkat dari sebuah tesis bahwa ukuran kebangkitan Islam tidak berhenti pada besarnya populasi, banyaknya simbol keagamaan, atau luasnya aktivitas ritual. Ukuran yang lebih substantif adalah apakah ajaran Islam sungguh menjadi tata nilai yang membimbing negara, ekonomi, pendidikan, hukum, ilmu pengetahuan, kepemimpinan, dan perlindungan terhadap manusia.

Dalam berbagai kesempatan, Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) menyampaikan sebuah kalimat yang sederhana tetapi sangat menggugah yaitu,*"Mudah-mudahan ajaran Rasulullah Nabi Muhammad SAW benar-benar dipakai di Indonesia."*

Kalimat tersebut bukanlah penolakan terhadap keberagamaan masyarakat Indonesia. Sebaliknya, ia merupakan kritik moral yang mengajak masyarakat

membedakan antara identitas keagamaan dan penerapan nilai-nilai kenabian dalam kehidupan bersama. Dari perspektif inilah bab ini membaca Indonesia yaitu sebagai negeri yang memiliki umat Islam sangat besar, tetapi masih menghadapi tantangan besar untuk menjadikan Islam sebagai tata nilai primer dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa.

A. Mayoritas Demografis Bukan Mayoritas Peradaban

Jumlah umat yang besar tidak otomatis melahirkan peradaban yang besar. Sejarah menunjukkan bahwa kekuatan suatu peradaban tidak hanya ditentukan oleh jumlah penduduk, tetapi oleh kualitas institusi, kepemimpinan, ilmu pengetahuan, keadilan, dan tata nilai yang mengarahkan kehidupan bersama.

Indonesia memiliki mayoritas Muslim. Namun mayoritas demografis berbeda dengan mayoritas peradaban. Mayoritas demografis berbicara tentang jumlah manusia. Mayoritas peradaban berbicara tentang kemampuan suatu masyarakat membangun keadilan, ilmu pengetahuan, keamanan, kemakmuran, serta perlindungan terhadap rakyat.

Karena itu, keberhasilan Islam tidak dapat diukur hanya dari banyaknya masjid, pesantren, pengajian, organisasi, atau pejabat yang beragama Islam. Ukurannya adalah apakah masyarakat benar-benar merasakan hadirnya keadilan, amanah, dan perlindungan terhadap martabat manusia.

B. Islam sebagai Tata Nilai Primer, Bukan Sekadar Identitas

Dalam naskah ini, Islam dipahami terlebih dahulu sebagai tata nilai sebelum dipahami sebagai identitas sosial.

Islam mengajarkan keadilan sebelum kemenangan, amanah sebelum kekuasaan, ilmu sebelum kebanggaan, pelayanan sebelum kepemimpinan, dan perlindungan terhadap manusia sebelum perluasan pengaruh kekuasaan. Karena itu, ukuran keberhasilan negara yang berpenduduk mayoritas

Muslim bukanlah seberapa sering simbol agama ditampilkan, melainkan sejauh mana negara mampu melindungi:

- jiwa manusia,
- harta masyarakat,
- martabat setiap warga,
- akal melalui pendidikan,
- keluarga sebagai institusi dasar,
- ilmu pengetahuan,
- keadilan hukum,
- masa depan generasi berikutnya.

Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan tujuan-tujuan umum syariat (maqāṣid al-syarī'ah) yang dalam tradisi pemikiran Islam dipahami sebagai perlindungan terhadap aspek-aspek fundamental kehidupan manusia.

Dalam kerangka itu, kebudayaan Jawa, Sunda, Aceh, Melayu, Bugis, Banjar, Minangkabau, Madura, dan seluruh kebudayaan Nusantara bukanlah lawan Islam. Kebudayaan merupakan ruang sosial tempat nilai-nilai Islam dapat hidup dan diwujudkan, sedangkan negara berfungsi mengorganisasi kehidupan bersama agar nilai tersebut terlindungi dalam praktik.

C. Nabi Muhammad SAW Diakui Secara Teknis, tetapi Nubuwwah Belum Menjadi Dasar Publik

Cak Nun pernah menyampaikan harapan, *"Mudah-mudahan ajaran Rasulullah Nabi Muhammad SAW benar-benar dipakai di Indonesia."* Pernyataan tersebut dapat dipahami sebagai kritik bahwa pengakuan kepada Nabi Muhammad SAW sering hadir dalam bentuk identitas, seremoni, atau penghormatan formal, sementara nilai-nilai kenabian belum sepenuhnya menjadi rujukan dalam membangun kehidupan publik.

Dalam pembacaan ini, yang dimaksud bukan sekadar pengakuan terhadap sosok Nabi, melainkan upaya menjadikan prinsip-prinsip yang beliau ajarkan seperti amanah, kejujuran, keadilan, kasih sayang, perlindungan terhadap yang lemah, dan tanggung jawab pemimpin, sebagai dasar etika dalam penyelenggaraan negara dan masyarakat.

Dengan demikian, pertanyaan utamanya bukan apakah masyarakat mencintai Nabi Muhammad SAW, melainkan sejauh mana nilai-nilai yang beliau bawa hadir dalam praktik kepemimpinan, hukum, ekonomi, pendidikan, dan pelayanan kepada rakyat.

D. Kemunafikan Sosial: Wajah Arif, Hati Kejam

Dalam berbagai forum Maiyah, Cak Nun menggunakan istilah "kemunafikan" sebagai diagnosis moral terhadap gejala sosial tertentu. Pandangan tersebut tidak ditujukan untuk memberi cap kepada seluruh masyarakat Indonesia, melainkan sebagai peringatan mengenai kemungkinan munculnya jarak antara penampilan lahiriah dan praktik kehidupan.

Kritik itu mengajak setiap orang melakukan introspeksi, yaitu apakah simbol-simbol kebaikan yang ditampilkan benar-benar diikuti oleh kejujuran, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama.

Dalam konteks kehidupan publik, tantangan tersebut dapat muncul ketika citra lebih diprioritaskan daripada pelayanan, ketika retorika lebih kuat daripada tindakan, atau ketika kepentingan pribadi mengalahkan kepentingan masyarakat.

Karena itu, diagnosis moral tersebut sebaiknya dipahami sebagai ajakan untuk memperkuat integritas pribadi dan institusi, bukan sebagai vonis terhadap suatu bangsa atau kelompok tertentu.

E. Keadilan, Amanah, Ilmu, dan Perlindungan Manusia

Dalam tradisi Islam, kekuasaan memperoleh legitimasi moral apabila digunakan untuk menegakkan keadilan dan menjaga amanah.

Negara yang baik bukan semata-mata negara yang kuat secara militer atau ekonomi, tetapi negara yang mampu:

- melindungi kehidupan rakyat,
- menjamin kepastian hukum,
- menyediakan pendidikan,
- mengembangkan ilmu pengetahuan,
- membatasi penyalahgunaan kekuasaan,
- memberi ruang bagi kemajuan teknologi yang berpihak kepada kemaslahatan manusia.

Dengan demikian, orientasi pembangunan tidak berhenti pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup kualitas manusia dan keadilan sosial.

F. Krisis Kepemimpinan Umat: dari Sosial, Ketatanegaraan, Budaya, hingga Ibadah Mahdhah

Cak Nun beberapa kali menyampaikan kritik bahwa tantangan kepemimpinan umat tidak hanya berada dalam ranah kekuasaan, tetapi juga menyentuh bidang sosial, budaya, pendidikan, dan bahkan kehidupan keagamaan itu sendiri.

Dalam perspektif tersebut, kualitas kepemimpinan tidak hanya diukur dari kemampuan administratif atau retorika, melainkan dari kemampuan membimbing masyarakat menuju akhlak yang lebih baik, memperkuat persatuan, serta menghubungkan ibadah ritual dengan tanggung jawab sosial.

Ibadah mahdhah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan seorang Muslim. Namun, ibadah ritual juga diharapkan memberi

dampak pada perilaku sehari-hari, seperti kejujuran, kepedulian, dan tanggung jawab terhadap sesama. Ketika hubungan tersebut melemah, muncul ruang refleksi bagi umat untuk memperkuat kembali keterkaitan antara ibadah dan etika sosial.

G. Mengapa Umat Islam Besar tetapi Negara Belum Bernilai Islam

Bab ini tidak berusaha mengukur "keislaman" suatu negara, melainkan mengajukan pertanyaan reflektif yaitu mengapa masyarakat dengan mayoritas Muslim masih menghadapi berbagai persoalan seperti korupsi, ketimpangan, lemahnya perlindungan hukum, atau rendahnya kualitas sebagian institusi publik?

Jawaban atas pertanyaan tersebut tidak dapat disederhanakan menjadi satu faktor. Berbagai unsur seperti sejarah, kualitas institusi, pendidikan, tata kelola, kepemimpinan, budaya, serta dinamika ekonomi global, turut memengaruhi perjalanan suatu bangsa.

Dalam perspektif yang diajukan di sini, tantangannya adalah bagaimana nilai-nilai Islam yang bersifat universal dapat semakin terwujud dalam tata kelola publik melalui penguatan integritas, keadilan, ilmu pengetahuan, dan pelayanan kepada masyarakat.

H. Dari Simbol Islam Menuju Arsitektur Nilai

Simbol memiliki arti penting sebagai identitas dan ekspresi keagamaan. Namun simbol akan memperoleh makna yang lebih dalam apabila didukung

oleh sistem nilai yang hidup dalam institusi dan perilaku sosial.

Arsitektur nilai berarti membangun kehidupan publik yang berpijak pada prinsip-prinsip seperti kejujuran, amanah, keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, perlindungan terhadap yang lemah, serta tanggung jawab terhadap generasi mendatang.

Dalam kerangka itu, teknologi, ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan menjadi sarana untuk mewujudkan nilai, bukan tujuan yang berdiri sendiri.

I. Doa Cak Nun: Mudah-Mudahan Ajaran Rasulullah Benar-Benar Dipakai di Indonesia

Bab ini ditutup dengan kembali pada harapan yang disampaikan Cak Nun, yaitu *"Mudah-mudahan ajaran Rasulullah Nabi Muhammad SAW benar-benar dipakai di Indonesia."*

Harapan tersebut dapat dibaca sebagai doa sekaligus ajakan refleksi. Intinya bukan sekadar memperbanyak simbol atau identitas keagamaan, melainkan memperkuat penerapan nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah SAW dalam kehidupan pribadi maupun publik.

Dalam konteks hubungan dunia Islam, pandangan tentang pentingnya solidaritas terhadap masyarakat yang mengalami penindasan, seperti terlepas dari perbedaan mazhab atau latar belakang yang sering menjadi tema yang juga disuarakan oleh berbagai pemimpin dan pemikir Muslim, termasuk Ayatollah Ali Khamenei. Dalam kerangka ini,

kepedulian terhadap Palestina, Lebanon, Myanmar, India, maupun komunitas Muslim lain dipahami sebagai bentuk empati kemanusiaan dan solidaritas umat, bukan semata-mata persoalan identitas mazhab.

Apabila kerja sama antara Indonesia dan Iran dibangun di atas nilai-nilai keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, ilmu pengetahuan, dan pembelaan terhadap mereka yang tertindas, maka fokusnya bergeser dari perbedaan identitas menuju kerja sama peradaban yang berlandaskan nilai-nilai Islam yang universal.

Pada akhirnya, pelajaran terbesar yang dapat dipetik dari Indonesia bukanlah bahwa mayoritas Muslim secara otomatis melahirkan peradaban Islam yang kuat. Pelajarannya justru menunjukkan bahwa jumlah penduduk, simbol keagamaan, dan identitas kolektif perlu disertai dengan pembangunan institusi, pendidikan, kepemimpinan yang amanah, penguasaan ilmu dan teknologi, serta tata kelola yang adil. Di titik itulah Islam dipahami bukan sekadar sebagai identitas sosial, melainkan sebagai tata nilai yang mengarahkan negara, masyarakat, dan perkembangan peradaban menuju kemaslahatan manusia.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

Bab XV
Dari Cak Nun Menuju Sekolah Negarawan: Krisis Kepemimpinan dan Jalan Pencarian Bentuk Negara

Tidak ada gagasan besar yang lahir dari ruang kosong. Gagasan tersebut selalu merupakan hasil dari perjalanan panjang membaca kehidupan, menyaksikan penderitaan manusia, mengamati perubahan zaman, serta merenungkan hubungan antara agama, kebudayaan, kekuasaan, dan masa depan suatu bangsa.

Dalam konteks Indonesia, perjalanan intelektual Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) selama puluhan tahun menghadirkan pembacaan yang khas. Cak Nun tidak memulai dari teori negara, tetapi dari manusia. Sosok tersebut tidak pertama-tama berbicara tentang kekuasaan, melainkan tentang martabat. Pemikiran Cak Nun tidak berangkat dari istana, tetapi dari desa. Cak Nun tidak memulai dari birokrasi, tetapi dari keluarga, tetangga, sawah, langgar, pasar, dan ruang hidup rakyat sehari-hari.

Melalui berbagai tulisan, forum Maiyah, dan terutama buku *Indonesia Bagian dari Desa Saya*, Cak Nun menawarkan cara membaca Indonesia yang berbeda. Negara tidak dipahami semata-mata sebagai bangunan hukum dan lembaga formal, tetapi sebagai ruang hidup yang seharusnya melayani manusia. Kritik-kritiknya terhadap kepemimpinan, pendidikan, agama, ketatanegaraan, dan kebudayaan bukan dimaksudkan untuk menolak negara, melainkan mengajak bangsa ini

terus mencari bentuk penyelenggaraan negara yang semakin sesuai dengan cita-cita keadilan.

Dalam kerangka itulah Sekolah Negarawan diposisikan dalam naskah ini. Sekolah Negarawan dipahami bukan sekadar sebagai lembaga pendidikan atau pusat kajian, melainkan sebagai ikhtiar untuk menerjemahkan gagasan mengenai manusia, rakyat, musyawarah, kepemimpinan, dan keadilan ke dalam rancangan kelembagaan, pendidikan, teknologi, kebudayaan, dan pembuktian sosial.

A. Cak Nun sebagai Alarm Budaya dan Peradaban

Selama beberapa dekade, Cak Nun lebih banyak berperan sebagai pengingat daripada penguasa. Cak Nun tidak membangun partai politik, tidak mengejar jabatan negara, dan tidak menawarkan slogan kekuasaan. Sebaliknya, Cak Nun berulang kali mengajak masyarakat bertanya kembali mengenai arah perjalanan bangsa.

Tema-tema yang ia angkat selalu kembali kepada persoalan mendasar:

- apakah manusia semakin dimuliakan,
- apakah rakyat semakin terlindungi,
- apakah agama semakin menghadirkan keadilan,
- apakah kebudayaan masih menjadi ruang hidup masyarakat,
- dan apakah negara sungguh bekerja untuk rakyat.

Dalam perspektif ini, Cak Nun dapat dipahami sebagai "alarm budaya" yang mengingatkan bahwa

kemajuan material tidak selalu identik dengan kemajuan peradaban apabila kehilangan orientasi moral.

B. "Belum Punya Negara" sebagai Kritik Bentuk Negara, Bukan Penyangkalan Hukum Internasional

Salah satu pernyataan Cak Nun yang sering menimbulkan perdebatan adalah ungkapannya bahwa Indonesia "belum punya negara." Dalam pembacaan akademik, pernyataan tersebut lebih tepat dipahami sebagai kritik terhadap kualitas penyelenggaraan negara daripada penyangkalan terhadap keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai subjek hukum internasional.

Indonesia jelas memenuhi unsur-unsur negara menurut hukum internasional yaitu wilayah, penduduk, pemerintahan, dan pengakuan internasional. Namun, Cak Nun mengajak melihat lapisan yang berbeda. Apakah rakyat benar-benar merasakan negara? Apakah negara hadir ketika keadilan dibutuhkan? Apakah kekuasaan sungguh menjadi pelayan masyarakat? Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan kritik terhadap substansi penyelenggaraan negara, bukan terhadap eksistensi negara secara hukum.

C. Krisis Kepemimpinan sebagai Sebab Kemunduran Peradaban

Berbagai persoalan bangsa pada akhirnya selalu bermuara pada kualitas kepemimpinan. Kepemimpinan bukan sekadar kemampuan administratif. Kepemimpinan adalah kemampuan membaca zaman, memahami persoalan manusia, mengambil keputusan yang adil, dan mengarahkan masyarakat menuju masa depan yang lebih baik.

Dalam banyak kesempatan, Cak Nun menyoroti krisis kepemimpinan sebagai persoalan lintas sektor. Bukan hanya ketatanegaraan, tetapi juga pendidikan, ekonomi, budaya, media, agama, dan kehidupan sosial. Apabila setiap sektor kehilangan kepemimpinan yang berintegritas, maka kerusakan tidak hanya terjadi pada institusi, tetapi juga pada karakter masyarakat.

D. Islam sebagai Tata Nilai Primer, Kebudayaan sebagai Tubuh Sosial, Indonesia sebagai Wadah Negara

Salah satu benang merah pemikiran yang dibangun dalam naskah ini adalah hubungan antara tiga unsur besar. Islam dipahami sebagai sumber tata nilai. Kebudayaan dipahami sebagai ruang hidup tempat nilai-nilai tersebut diwujudkan. Negara dipahami sebagai organisasi yang melindungi kehidupan bersama.

Ketiga unsur tersebut memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi. Nilai memberi arah. Budaya memberi bentuk sosial. Negara memberi

perlindungan kelembagaan. Apabila salah satunya kehilangan fungsi, keseimbangan kehidupan bersama ikut terganggu.

E. Dari Umat, Desa, Bangsa, Menuju Negara

Negara yang kuat tidak dibangun dari atas semata. Negara yang kuat tumbuh dari masyarakat yang sehat. Masyarakat yang sehat lahir dari keluarga yang kuat. Keluarga bertumbuh dalam desa, kampung, dan lingkungan sosial yang hidup.

Karena itu, pembangunan negara sesungguhnya dimulai dari pembangunan manusia. Dari manusia lahir keluarga. Dari keluarga lahir masyarakat. Dari masyarakat lahir bangsa. Dan bangsa kemudian membentuk negara.

Urutan tersebut menunjukkan bahwa negara bukan tujuan akhir, melainkan instrumen untuk melindungi kehidupan manusia.

F. *Indonesia Bagian dari Desa Saya*: Membaca Negara dari Ruang Hidup Rakyat

Buku *Indonesia Bagian dari Desa Saya* memberikan perspektif bahwa Indonesia tidak cukup dipahami melalui statistik nasional, pidato kenegaraan, atau dinamika pejabat.

Indonesia juga perlu dibaca dari ruang hidup rakyat. Dari desa, sawah, pasar, langgar, tetangga, gotong royong, pendidikan anak, dan kehidupan keluarga.

Cara membaca seperti ini mengingatkan bahwa keberhasilan negara tidak hanya diukur melalui indikator makro, tetapi juga melalui pengalaman nyata masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Negara yang baik adalah negara yang dapat dirasakan kehadirannya oleh rakyat, terutama ketika mereka membutuhkan perlindungan, pelayanan, dan keadilan.

G. Pemimpin Peradaban: Bukan Nasab, Bukan Uang, Bukan Elektoralitas Semata

Dalam berbagai refleksinya, Cak Nun sering mengajak masyarakat melihat kepemimpinan dari kualitas manusia, bukan semata-mata dari asal-usul, kekayaan, ataupun kemampuan memenangkan kontestasi perebutan kekuasaan.

Dalam konteks dunia yang berubah cepat, seorang pemimpin dituntut memiliki kemampuan membaca persoalan global, memahami perubahan teknologi, ekonomi, geopolitik, dan perkembangan kecerdasan buatan (AI), sekaligus mampu menerjemahkan tantangan tersebut menjadi kebijakan yang melindungi kepentingan rakyat.

Dengan demikian, kepemimpinan tidak cukup hanya memperoleh legitimasi prosedural melalui pemilihan umum. Kepemimpinan juga memerlukan legitimasi moral, intelektual, dan kemampuan strategis untuk mengarahkan bangsa menghadapi perubahan zaman.

H. Dari Kegelisahan Budaya Menuju Rancangan Ketatanegaraan

Kegelisahan budaya hanya akan menjadi wacana apabila tidak diterjemahkan ke dalam rancangan kelembagaan. Sebaliknya, rancangan kelembagaan yang kehilangan akar budaya akan mudah kehilangan legitimasi sosial. Karena itu, diperlukan jembatan antara refleksi kebudayaan dan desain ketatanegaraan.

Dalam kerangka naskah ini, gagasan mengenai musyawarah, amanah, perlindungan rakyat, pembatasan kekuasaan, dan keadilan diterjemahkan ke dalam usulan-usulan konstitusional yang dimaksudkan sebagai bahan diskusi mengenai penguatan sistem ketatanegaraan Indonesia.

I. Sekolah Negarawan sebagai Fase Eksekusi Gagasan

Jika perjalanan intelektual Cak Nun banyak berfokus pada pembacaan dan refleksi, maka Sekolah Negarawan diposisikan sebagai ruang untuk mengembangkan penerapan gagasan tersebut dalam bentuk pendidikan, penelitian, pengembangan kebijakan, dan inovasi sosial.

Dalam pengertian ini:

- gagasan tentang manusia diterjemahkan menjadi sistem yang melindungi manusia;
- gagasan tentang rakyat diterjemahkan menjadi rancangan kelembagaan;
- gagasan tentang musyawarah diterjemahkan menjadi mekanisme pengambilan keputusan;

- gagasan tentang teknologi diterjemahkan menjadi alat yang memperkuat pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, pendidikan kenegarawanan tidak berhenti pada diskusi konseptual, tetapi diarahkan pada pembentukan kapasitas kepemimpinan dan pengembangan solusi yang dapat diuji dalam praktik.

J. Rakyat sebagai Pemilik Kedaulatan Tertinggi

Dalam tradisi konstitusional Indonesia, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Prinsip tersebut menempatkan rakyat sebagai sumber legitimasi negara.

Konsekuensinya, seluruh lembaga negara memperoleh kewenangan untuk menjalankan amanat rakyat, bukan untuk menggantikannya sebagai pemilik kedaulatan.

Pandangan ini menjadi salah satu landasan dalam berbagai gagasan pembaruan ketatanegaraan yang berkembang di lingkungan Sekolah Negarawan.

K. MPR sebagai Wadah Kedaulatan Rakyat

Dalam kerangka pemikiran yang dikembangkan Sekolah Negarawan, Majelis Permusyawaratan Rakyat dipandang sebagai salah satu institusi yang dapat diperkuat fungsinya sebagai ruang permusyawaratan nasional.

Gagasan ini berangkat dari pandangan bahwa keberagaman masyarakat Indonesia memerlukan

forum yang mampu menghimpun aspirasi dari berbagai unsur kehidupan bangsa secara seimbang dan konstitusional.

Bentuk dan kewenangannya tetap merupakan wilayah pilihan konstitusional yang terbuka untuk didiskusikan melalui mekanisme demokratis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

L. Utusan Daerah, Utusan Golongan, Rohaniawan, Cendekiawan, Budayawan, dan Patriot

Salah satu gagasan yang diajukan dalam lingkungan Sekolah Negarawan adalah perlunya memperluas representasi dalam forum permusyawaratan nasional agar mencerminkan keragaman masyarakat Indonesia.

Usulan tersebut mencakup keterwakilan unsur daerah, profesi, keilmuan, kebudayaan, dan berbagai komponen masyarakat lainnya sebagai bahan pemikiran mengenai penguatan kualitas deliberasi kebangsaan.

Tujuannya adalah memperkaya perspektif dalam proses pengambilan keputusan strategis, bukan menggantikan mekanisme demokrasi yang telah diatur oleh konstitusi.

M. Presiden sebagai Kepala Pemerintahan

Dalam berbagai pembahasan konstitusional yang dikembangkan Sekolah Negarawan, terdapat gagasan untuk memperjelas fungsi Presiden sebagai kepala pemerintahan yang bertanggung jawab menjalankan

administrasi negara secara efektif, profesional, dan akuntabel.

Rancangan tersebut merupakan bagian dari diskusi akademik mengenai desain kelembagaan negara dan bukan uraian mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia yang berlaku saat ini.

N. Amandemen Kelima sebagai Pencarian Bentuk Negara Rakyat

Seluruh perjalanan pemikiran yang dipaparkan dalam naskah ini bermuara pada satu gagasan pokok bahwa konstitusi merupakan karya manusia yang dapat terus disempurnakan melalui mekanisme yang sah apabila bangsa memandang diperlukan.

Dalam perspektif Sekolah Negarawan, gagasan mengenai Amandemen Kelima dipahami sebagai bagian dari pencarian bentuk penyelenggaraan negara yang semakin mampu mewujudkan cita-cita keadilan, perlindungan rakyat, penguatan musyawarah, dan pembangunan manusia.

Terlepas dari diterima atau tidaknya usulan-usulan tersebut, yang terpenting adalah menjaga ruang dialog konstitusional yang terbuka, berbasis argumentasi, dan menghormati mekanisme demokrasi. Bab ini sekaligus menjadi jembatan antara refleksi kebudayaan yang banyak dikembangkan oleh Cak Nun dan upaya menerjemahkan refleksi tersebut ke dalam gagasan-gagasan kelembagaan yang dapat diuji melalui kajian akademik, diskusi publik, dan proses konstitusional yang sah. Dengan demikian, Sekolah

Negarawan diposisikan bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai ruang pembelajaran dan pengembangan gagasan mengenai bagaimana negara dapat semakin mampu melindungi manusia, memuliakan rakyat, serta menghadapi tantangan dunia modern dengan tetap berlandaskan nilai, ilmu pengetahuan, dan tanggung jawab peradaban.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

Bab XVI
Mengapa Kerja Sama Peradaban Harus Melalui Jalur Rakyat: Sekolah Negarawan sebagai Mitra Peradaban, Bukan Instrumen Kekuasaan

Hubungan antara Indonesia dan Iran pada dasarnya dibangun di atas prinsip-prinsip hubungan antarnegara yang diakui dalam hukum internasional yaitu penghormatan terhadap kedaulatan, tidak mencampuri urusan dalam negeri, kesetaraan, dan kerja sama yang saling menguntungkan. Prinsip-prinsip tersebut merupakan fondasi yang harus tetap dihormati dalam setiap bentuk interaksi resmi antara kedua negara.

Namun demikian, sejarah menunjukkan bahwa hubungan antarbangsa tidak hanya berkembang melalui diplomasi pemerintah. Pertukaran ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, penelitian, teknologi, organisasi profesi, lembaga pendidikan tinggi, komunitas keagamaan, dan masyarakat sipil juga memiliki peran penting dalam membangun hubungan jangka panjang. Jalur-jalur tersebut sering disebut sebagai *people-to-people diplomacy* atau diplomasi masyarakat.

Bab ini berangkat dari pemahaman bahwa kerja sama peradaban tidak dimaksudkan untuk menggantikan diplomasi negara, melainkan melengkapinya. Pemerintah tetap merupakan aktor utama dalam hubungan resmi antarnegara, tetapi

pembangunan kepercayaan, pertukaran ilmu, pengembangan kepemimpinan, dan pembentukan nilai-nilai bersama sering kali tumbuh melalui hubungan antarmanusia, antarlembaga pendidikan, dan komunitas yang memiliki kepedulian terhadap kemajuan bersama.

Dalam konteks inilah Sekolah Negarawan diposisikan. Bukan sebagai aktor kejahatan politik, bukan sebagai instrumen diplomasi negara, dan bukan sebagai representasi pemerintah, melainkan sebagai ruang pembelajaran dan kerja sama peradaban yang berorientasi pada pengembangan ilmu, kepemimpinan, dan tata nilai.

A. Hubungan Resmi Indonesia–Iran Tetap Penting dan Harus Dihormati

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Iran merupakan hubungan antarnegara yang dibangun melalui mekanisme diplomasi resmi. Pemerintah kedua negara memiliki kewenangan konstitusional untuk menyusun kebijakan luar negeri, menjalin perjanjian internasional, dan mengembangkan kerja sama di berbagai bidang.

Karena itu, setiap inisiatif masyarakat harus menghormati kerangka hukum nasional masing-masing negara serta prinsip-prinsip hukum internasional. Kerja sama masyarakat bukanlah pengganti hubungan pemerintah, melainkan pelengkap yang dapat memperluas ruang dialog di bidang

pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan inovasi.

B. Mengapa Kerja Sama Peradaban Tidak Cukup Melalui Pemerintah

Hubungan pemerintah pada umumnya mengikuti siklus kebijakan, dinamika kekuasaan, serta perubahan kepemimpinan. Sebaliknya, hubungan antarmasyarakat sering memiliki kesinambungan yang lebih panjang karena dibangun melalui pendidikan, penelitian, pertukaran gagasan, dan jejaring profesional.

Banyak kemajuan dalam sejarah lahir dari kerja sama antara universitas, lembaga riset, komunitas budaya, organisasi profesi, maupun kelompok masyarakat yang memiliki perhatian terhadap persoalan bersama.

Karena itu, kerja sama peradaban memerlukan ruang yang memungkinkan pertukaran ilmu, pengalaman, dan nilai secara berkelanjutan, tanpa mengaburkan batas antara kerja sama akademik dan proses kepemimpinan.

C. Pemerintah, Birokrasi, Regulasi, dan Keterbatasan Diplomasi Formal

Diplomasi formal memiliki mandat dan batasan tertentu. Pemerintah harus mempertimbangkan aspek hukum, kepentingan nasional, keamanan, ekonomi, dan hubungan internasional secara menyeluruh.

Sementara itu, persoalan-persoalan seperti pendidikan karakter, pembinaan pemuda,

pengembangan kepemimpinan, inovasi sosial, atau pertukaran kebudayaan sering berkembang lebih efektif melalui kolaborasi antarlembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan komunitas profesional.

Kedua jalur tersebut tidak saling bertentangan, tetapi menjalankan fungsi yang berbeda dan saling melengkapi.

D. Rakyat yang Secara Formal Memiliki Banyak Wakil, tetapi Secara Substantif Sering Merasa Tidak Terwakili

Dalam sistem ketatanegaraan modern, masyarakat memiliki berbagai institusi yang dirancang untuk mewakili dan melayani kepentingan publik, seperti presiden, parlemen, partai politik, pemerintah daerah, aparat negara, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, media, tokoh agama, dan berbagai lembaga publik lainnya.

Namun, dalam praktiknya, sebagian masyarakat dapat merasakan adanya jarak antara keberadaan institusi tersebut dengan pengalaman hidup sehari-hari mereka. Tidak semua kelompok masyarakat merasa bahwa kebutuhan, aspirasi, atau persoalan mereka memperoleh perhatian yang memadai.

Fenomena ini merupakan tantangan yang dihadapi banyak negara demokratis dan menjadi pengingat bahwa keberadaan institusi formal perlu terus disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, pendidikan kewargaan, serta kedekatan antara pemimpin dan masyarakat.

E. Cak Nun dan Kritik tentang "Meyatimkan Rakyat"

Dalam berbagai forum Maiyah, Cak Nun menggunakan ungkapan "meyatimkan rakyat" sebagai kritik moral terhadap situasi ketika masyarakat merasa kehilangan pengasuhan, pendampingan, atau perlindungan yang semestinya hadir melalui berbagai institusi sosial.

Ungkapan tersebut tidak ditujukan sebagai penilaian terhadap seluruh pejabat, lembaga, atau kelompok masyarakat, melainkan sebagai metafora yang mengajak melakukan refleksi.

Dalam pengertian ini, "meyatimkan rakyat" menggambarkan keadaan ketika sebagian warga merasa tidak memperoleh perhatian yang memadai terhadap hak-hak dasar mereka, baik dalam bidang pendidikan, pelayanan publik, maupun pembangunan sosial.

Kritik tersebut sekaligus menjadi ajakan agar kepemimpinan dipahami sebagai tanggung jawab untuk mengasuh, melayani, dan memberdayakan masyarakat, bukan sekadar menjalankan fungsi administratif.

F. Partai Politik, Lembaga Publik, dan Pendidikan Kewargaan

Partai politik, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, media, dan berbagai institusi publik memiliki peran penting dalam membangun kualitas demokrasi.

Selain fungsi representasi kekuasaan, lembaga-lembaga tersebut juga memiliki tanggung jawab untuk memperkuat pendidikan kewargaan, meningkatkan literasi publik, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa.

Semakin kuat fungsi pendidikan dan pemberdayaan tersebut, semakin besar pula peluang terciptanya masyarakat yang mampu berpartisipasi secara kritis dan bertanggung jawab dalam proses demokrasi.

G. Membangun Kepercayaan melalui Pembuktian Sosial

Kerja sama masyarakat sebaiknya tidak didasarkan pada label, gelar, atau posisi formal semata. Kepercayaan dibangun melalui rekam jejak, integritas, kompetensi, dan kontribusi nyata.

Karena itu, setiap lembaga, komunitas, akademisi, pemuka agama, profesional, maupun organisasi masyarakat perlu dinilai berdasarkan kualitas pengabdian kepada masyarakat serta kemampuannya menghasilkan manfaat yang dapat dibuktikan secara nyata.

Pendekatan seperti ini membantu mengurangi ketergantungan pada simbol dan memperkuat budaya akuntabilitas.

H. Solidaritas terhadap Kaum Tertindas sebagai Nilai Kemanusiaan

Dalam berbagai pidato dan tulisannya, Ayatollah Ali Khamenei menekankan pentingnya solidaritas terhadap masyarakat yang mengalami penindasan dan penderitaan, serta pentingnya kepedulian terhadap kondisi umat Islam di berbagai belahan dunia.

Dalam konteks kerja sama Indonesia–Iran, gagasan tersebut dapat dipahami dalam kerangka nilai kemanusiaan yang lebih luas yaitu kepedulian terhadap mereka yang terdampak konflik, kemiskinan, diskriminasi, atau ketidakadilan, tanpa menjadikan perbedaan mazhab sebagai penghalang untuk menunjukkan empati dan bantuan kemanusiaan.

Pendekatan seperti ini menempatkan solidaritas sebagai bagian dari tanggung jawab moral, bukan sebagai sarana memperluas pengaruh kekuasaan.

I. Jalur Rakyat sebagai Jalan Seleksi Nilai

Kerja sama antarmasyarakat tidak berarti bahwa setiap organisasi masyarakat atau tokoh publik secara otomatis mewakili kepentingan rakyat. Sebaliknya, diperlukan sikap kritis dalam membangun kemitraan.

Keberpihakan kepada masyarakat perlu dibuktikan melalui karya, integritas, kapasitas, dan pengabdian yang nyata.

Dengan demikian, jalur masyarakat dipahami bukan sebagai romantisasi masyarakat sipil, melainkan sebagai ruang untuk membangun kerja sama yang

bertumpu pada nilai, kompetensi, dan tanggung jawab sosial.

J. Sekolah Negarawan sebagai Mitra Peradaban, Bukan Instrumen Penguasa



Dalam kerangka naskah ini, Sekolah Negarawan diposisikan sebagai lembaga pendidikan dan pengembangan kepemimpinan yang berupaya

mempertemukan pemikiran, pengalaman, dan praktik dari berbagai kalangan untuk memperkuat kualitas kepemimpinan publik.

Orientasinya adalah pendidikan, penelitian, pengembangan kebijakan, inovasi sosial, dan pembangunan karakter kepemimpinan.

Dengan demikian, Sekolah Negarawan tidak dimaksudkan sebagai instrumen penguasa ataupun sebagai representasi kebijakan luar negeri suatu negara.

K. Kerja Sama Kepemimpinan Nilai, Bukan Kerja Sama Perebutan Kekuasaan

Fokus utama kerja sama yang diusulkan dalam naskah ini adalah pengembangan kepemimpinan yang berlandaskan integritas, ilmu pengetahuan, tanggung jawab sosial, dan kemampuan menjawab tantangan zaman.

Ruang kerja samanya meliputi pendidikan, penelitian, pengembangan teknologi yang bermanfaat, tata kelola pemerintahan, kebudayaan, serta pembinaan generasi muda.

Tujuannya bukan membangun aliansi kekuasaan, melainkan memperkuat kapasitas manusia dan institusi.

L. Bukan Intervensi, Bukan Oposisi, dan Bukan Ekspor Sistem Pemerintahan

Penting ditegaskan bahwa kerja sama peradaban yang dimaksud dalam naskah ini tidak diarahkan untuk melakukan intervensi terhadap urusan dalam negeri

negara mana pun, tidak dimaksudkan sebagai bentuk oposisi terhadap pemerintah yang sah, serta tidak bertujuan mengekspor sistem kekuasaan tertentu.

Kerja sama dibangun atas dasar saling menghormati kedaulatan, menghargai keragaman pengalaman masing-masing negara, dan membuka ruang pertukaran gagasan yang dapat dipelajari secara timbal balik.

Setiap bangsa memiliki sejarah, konstitusi, dan dinamika sosial yang berbeda sehingga tidak terdapat satu model tunggal yang dapat diterapkan secara universal.

M. Jalur Rakyat sebagai Jalan Membangun Ilmu, Tata Nilai, Kader, dan Pembuktian Sosial

Pada akhirnya, kekuatan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas manusianya. Karena itu, investasi terbesar bukan hanya pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pembangunan ilmu pengetahuan, etika publik, kepemimpinan, serta kemampuan masyarakat untuk bekerja sama menghadapi tantangan global.

Jalur masyarakat menjadi penting karena di sanalah lahir guru, peneliti, petani, nelayan, santri, mahasiswa, profesional, pelaku usaha, budayawan, dan berbagai kelompok yang membentuk kehidupan sehari-hari bangsa.

Dalam kerangka tersebut, Sekolah Negarawan diposisikan sebagai salah satu ruang pembelajaran yang berupaya menghubungkan ilmu, tata nilai,

kepemimpinan, teknologi, dan pengabdian kepada masyarakat. Perannya bukan menggantikan negara, bukan menjadi alat kekuasaan, dan bukan membawa agenda intervensi, melainkan menjadi mitra peradaban yang mendorong lahirnya pemimpin-pemimpin yang mampu mengintegrasikan pengetahuan, moralitas, dan tanggung jawab publik dalam menghadapi tantangan abad ke-21.

NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

SEKOLAH
NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

Bab XVII
Tawaran dan Program Konkret Kerja Sama Peradaban Indonesia–Iran



A. Dari Diagnosis Menuju Pembuktian

Seluruh pembahasan dalam enam belas bab sebelumnya pada akhirnya bermuara pada satu pertanyaan sederhana namun sangat menentukan. Apabila diagnosis terhadap Indonesia telah disusun, apabila sejarah telah dibaca, apabila kelemahan negara telah diidentifikasi, apabila hubungan antara agama, kebudayaan, kepemimpinan, teknologi, dan tata negara telah dijelaskan, maka apakah langkah berikutnya?

Sebuah gagasan hanya akan menjadi wacana apabila berhenti pada analisis. Sebuah peradaban tidak dibangun oleh kritik semata, melainkan oleh kemampuan mengubah nilai menjadi sistem, sistem menjadi institusi, institusi menjadi budaya, dan budaya menjadi kehidupan sehari-hari masyarakat.

Karena itu, kerja sama Indonesia–Iran yang ditawarkan dalam naskah ini tidak dimaksudkan sebagai proyek diplomasi tambahan, bukan pula sebagai forum seremonial yang menghasilkan pernyataan bersama tanpa pembuktian. Kerja sama ini juga tidak dimaksudkan untuk membangun aliansi kejahatan politik, menyusun blok geopolitik baru, atau memperluas pengaruh suatu negara terhadap negara lain. Yang ditawarkan adalah sesuatu yang jauh lebih mendasar, yaitu kerja sama peradaban.

Kerja sama peradaban dimulai dari pengembangan manusia. Proses tersebut berkembang melalui ilmu pengetahuan. Gagasan tersebut diuji melalui teknologi. Peradaban diperkuat oleh kepemimpinan yang berintegritas. Dan akhirnya

dibuktikan melalui perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.

Dalam kerangka tersebut, Sekolah Negarawan tidak memosisikan dirinya sebagai lembaga pendidikan agama formal, bukan pula universitas dalam pengertian konvensional. Sekolah Negarawan adalah ruang pertemuan antara ilmu, tata nilai, hukum, teknologi, kebudayaan, dan kepemimpinan. Lembaga ini merupakan laboratorium yang berusaha menjembatani pemikiran dengan implementasi, sehingga setiap gagasan dapat diuji manfaatnya dalam kehidupan nyata.

Oleh sebab itu, kerja sama yang diusulkan kepada Iran tidak dimulai dari kerja sama antarpesantren, antarkampus, atau antarlembaga keagamaan formal. Semua institusi tersebut tetap memiliki peran penting dalam bidangnya masing-masing, namun Sekolah Negarawan bergerak pada ruang yang berbeda. Ruang itu adalah ruang pembentukan kepemimpinan peradaban yang menghubungkan berbagai disiplin ilmu dan berbagai pengalaman sosial menjadi solusi yang dapat diterapkan.

Tujuan akhirnya bukan menghasilkan lebih banyak seminar, melainkan menghasilkan lebih banyak manusia yang mampu memimpin perubahan dengan ilmu, akhlak, teknologi, dan tanggung jawab kepada masyarakat.

B. Iran sebagai Mitra Strategis Peradaban

Dalam sejarah panjang hubungan antarbangsa, tidak semua kerja sama menghasilkan peradaban. Banyak hubungan internasional hanya menghasilkan perdagangan. Sebagian hanya menghasilkan kontrak. Sebagian lagi berhenti pada pertukaran pejabat dan kunjungan kenegaraan.

Padahal sejarah menunjukkan bahwa peradaban besar tumbuh ketika bangsa-bangsa saling bertukar ilmu, pengalaman, dan cara berpikir. Dunia Islam pada masa klasik berkembang bukan karena semua wilayah memiliki sistem ketatanegaraan yang sama, melainkan karena terdapat jaringan ilmu yang menghubungkan Baghdad, Isfahan, Nishapur, Damaskus, Kairo, Cordoba, Samarkand, hingga Nusantara. Para ulama, ilmuwan, pedagang, dan pemikir bergerak membawa pengetahuan, memperkaya satu sama lain, dan melahirkan inovasi yang melampaui batas negara.

Dalam konteks abad ke-21, semangat tersebut perlu diterjemahkan kembali dalam bentuk yang sesuai dengan tantangan zaman. Iran memiliki pengalaman dalam pengembangan sains, teknologi, kesehatan, pendidikan tinggi, serta ketahanan nasional di tengah tekanan geopolitik. Indonesia memiliki pengalaman dalam mengelola masyarakat yang sangat majemuk, membangun demokrasi konstitusional, dan mengembangkan kehidupan sosial yang plural.

Perbedaan pengalaman ini tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling menjauh. Justru di dalam perbedaan itulah terdapat ruang untuk saling belajar. Kerja sama yang dibangun bukanlah hubungan guru

dan murid, melainkan hubungan dua bangsa yang sama-sama memiliki pengalaman berharga dan bersedia memperkaya satu sama lain.

Dalam kerangka ini, Iran dipandang sebagai mitra strategis peradaban. Kemitraan tersebut tidak didasarkan pada kesamaan kekuatan, tetapi pada kesediaan bersama untuk membangun manusia, memperkuat ilmu pengetahuan, mengembangkan teknologi yang bertanggung jawab, dan memperluas ruang dialog mengenai masa depan masyarakat.

C. Kerja Sama Dimulai dari Tata Nilai, Bukan dari Kekuasaan

Banyak proyek kerja sama gagal bertahan karena dibangun di atas kepentingan pemerintah yang bersifat sementara. Ketika pemerintahan berganti, program berhenti. Ketika prioritas anggaran berubah, kerja sama menghilang. Ketika situasi geopolitik berubah, hubungan yang semula erat menjadi renggang.

Kerja sama peradaban tidak boleh dibangun di atas fondasi yang rapuh seperti itu. Kerja sama peradaban harus dimulai dari sesuatu yang lebih mendasar, yaitu tata nilai.

Tata nilai adalah orientasi moral yang mengarahkan ilmu pengetahuan, ekonomi, teknologi, hukum, dan kebijakan publik kepada tujuan yang melindungi manusia. Nilai seperti amanah, keadilan, tanggung jawab, penghormatan terhadap martabat manusia, serta pencarian ilmu merupakan fondasi yang dapat diterima lintas budaya dan lintas negara.



Dalam perspektif ini, kekuasaan bukanlah titik awal, melainkan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mewujudkan nilai. Oleh karena itu, kerja sama Indonesia–Iran yang diusulkan tidak

diarahkan untuk membahas bagaimana memperoleh kekuasaan, melainkan bagaimana membangun kapasitas manusia yang kelak, dalam bidang apa pun yang mereka tekuni, mampu menggunakan kewenangan secara bertanggung jawab.

Pendekatan ini juga membuat kerja sama menjadi lebih berkelanjutan. Nilai tidak bergantung pada satu rezim, satu organisasi, atau satu generasi. Nilai dapat diwariskan melalui pendidikan, penelitian, praktik sosial, dan pembentukan karakter.

D. Dari Gagasan Menuju Ekosistem Peradaban

Agar kerja sama tidak berhenti pada diskusi, diperlukan sebuah ekosistem yang menghubungkan berbagai unsur secara terpadu. Ekosistem tersebut terdiri atas lima komponen utama.

Komponen pertama adalah pengembangan ilmu pengetahuan. Setiap program harus menghasilkan pengetahuan baru, baik melalui penelitian, publikasi, dokumentasi praktik baik, maupun pengembangan metodologi yang dapat dipelajari oleh masyarakat luas.

Komponen kedua adalah pengembangan manusia. Kerja sama harus melahirkan kader-kader kepemimpinan yang memiliki kemampuan berpikir strategis, menguasai teknologi, memahami tata kelola, serta memiliki integritas moral yang tinggi.

Komponen ketiga adalah pengembangan teknologi sosial. Teknologi tidak hanya dipahami sebagai perangkat lunak atau kecerdasan buatan, tetapi sebagai cara baru mengorganisasi pelayanan publik, memperkuat partisipasi masyarakat, meningkatkan

transparansi, dan mempercepat penyelesaian persoalan bersama.

Komponen keempat adalah pembuktian sosial. Setiap gagasan harus diuji melalui proyek nyata. Keberhasilan tidak diukur dari banyaknya konsep yang ditulis, tetapi dari kemampuan menghadirkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat.

Komponen kelima adalah replikasi pengetahuan. Model yang berhasil tidak berhenti di satu lokasi. Model tersebut harus didokumentasikan, dievaluasi, disempurnakan, dan dapat diterapkan di tempat lain dengan penyesuaian terhadap konteks lokal.

Dengan demikian, kerja sama Indonesia–Iran berkembang menjadi suatu siklus yang utuh yaitu nilai melahirkan ilmu, ilmu melahirkan teknologi, teknologi diuji dalam masyarakat, pengalaman menghasilkan pengetahuan baru, dan pengetahuan tersebut kembali memperkaya nilai yang menjadi fondasinya.

E. Pusat Studi Indonesia–Iran: Dari Pertukaran Gagasan Menuju Produksi Pengetahuan

Setiap peradaban besar selalu memiliki pusat-pusat ilmu yang menjadi tempat bertemunya pemikiran, pengalaman, dan inovasi. Baghdad pada masa Abbasiyah memiliki Bayt al-Hikmah. Cordoba menjadi pusat perjumpaan ilmu antara dunia Islam dan Eropa. Isfahan pernah menjadi simpul penting perkembangan filsafat, seni, dan ilmu pengetahuan. Nusantara sendiri mengenal pesantren, surau,

padepokan, dan berbagai bentuk komunitas belajar yang menjadi ruang lahirnya pemimpin masyarakat.

Pada abad ke-21, fungsi tersebut perlu diterjemahkan dalam bentuk yang lebih sesuai dengan tantangan zaman. Kerja sama Indonesia–Iran membutuhkan sebuah pusat studi yang tidak sekadar mengumpulkan dokumen atau menyelenggarakan seminar, tetapi menjadi mesin produksi pengetahuan (*knowledge production engine*) yang terus bekerja menghasilkan gagasan, metodologi, model kebijakan, dan inovasi sosial.

Pusat Studi Indonesia–Iran yang diusulkan dalam naskah ini tidak dibangun sebagai institusi birokratis, melainkan sebagai jaringan kolaborasi yang menghubungkan para ahli hukum, teknolog, ekonom, ahli pertanian, sosiolog, budayawan, praktisi pemerintahan, pengembang kecerdasan buatan, serta pemimpin masyarakat. Setiap orang datang bukan untuk mempertahankan identitas kelembagaannya, tetapi untuk bersama-sama menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.

Fokus utama pusat studi ini bukan pada perdebatan ideologis, melainkan pada pencarian solusi. Setiap kajian harus berakhir pada rekomendasi yang dapat diuji di lapangan. Setiap konsep harus memiliki indikator keberhasilan. Setiap teori harus memiliki kemungkinan untuk diterapkan. Dengan demikian, pusat studi ini menjadi ruang yang mempertemukan refleksi akademik dengan pembuktian sosial.

Dalam jangka panjang, pusat studi ini diharapkan menghasilkan publikasi bersama, laporan

tahunan mengenai perkembangan masyarakat, modul pendidikan kepemimpinan, serta basis pengetahuan digital yang dapat diakses oleh generasi muda Indonesia, Iran, dan masyarakat internasional.

F. Center for Comparative Constitutional Statecraft

Salah satu persoalan terbesar dunia Islam bukanlah ketiadaan semangat keagamaan, melainkan minimnya ruang yang secara sistematis membandingkan pengalaman ketatanegaraan berbagai negara Muslim dan non-Muslim. Banyak perdebatan mengenai konstitusi berlangsung secara normatif, sementara sedikit yang benar-benar mempelajari bagaimana suatu sistem bekerja dalam praktik.

Karena itu, diusulkan pembentukan Center for Comparative Constitutional Statecraft, yaitu pusat kajian mengenai desain negara, tata kelola pemerintahan, konstitusi, dan kepemimpinan publik dalam perspektif komparatif.

Pusat ini tidak bertujuan mencari negara yang "paling benar". Sebaliknya, ia bertujuan memahami mengapa suatu sistem berhasil dalam konteks tertentu dan mengapa sistem yang sama belum tentu berhasil di tempat lain. Pendekatan seperti ini membuka ruang belajar yang lebih rendah hati sekaligus lebih produktif.

Kajian tidak hanya membandingkan Indonesia dan Iran, tetapi juga berbagai pengalaman internasional, termasuk negara-negara Asia Timur, Eropa, Afrika, dan Amerika Latin. Fokusnya adalah mengidentifikasi prinsip-prinsip yang dapat memperkuat perlindungan terhadap manusia,

meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat akuntabilitas pemerintahan, dan menjaga keseimbangan antara efektivitas negara dengan partisipasi masyarakat.

Dalam kerangka tersebut, konstitusi dipahami bukan sekadar kumpulan pasal, melainkan arsitektur yang menentukan hubungan antara negara, masyarakat, dan manusia. Oleh karena itu, penelitian tidak berhenti pada teks hukum, tetapi juga mencakup implementasi, budaya hukum, perilaku institusi, serta dampaknya terhadap kehidupan rakyat.

Hasil dari pusat kajian ini bukan berupa slogan semata, melainkan laporan kebijakan, indeks tata kelola, naskah akademik, dan rekomendasi yang dapat dipelajari oleh pembuat kebijakan, peneliti, maupun masyarakat umum.

G. Mustad'afin Observatory Indonesia

Salah satu kelemahan terbesar banyak kebijakan publik adalah keputusan sering diambil tanpa pemetaan yang utuh mengenai kondisi masyarakat. Negara memiliki banyak data, tetapi data tersebut sering tersebar, tidak saling terhubung, atau belum mampu menggambarkan kehidupan manusia secara menyeluruh.

Karena itu, diperlukan sebuah observatorium sosial yang tidak hanya mengumpulkan statistik, tetapi mampu membaca pola-pola ketidakadilan yang berkembang dalam masyarakat.

Mustad'afin Observatory Indonesia diusulkan sebagai laboratorium analisis sosial berbasis data yang

bertujuan mengidentifikasi kelompok-kelompok masyarakat yang menghadapi kerentanan dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, akses layanan publik, konflik agraria, ketahanan pangan, maupun kesenjangan digital.

Istilah *mustad'afin* dalam konteks ini dipahami sebagai mereka yang berada dalam posisi lemah atau rentan dalam struktur sosial, tanpa membatasi pada identitas agama, suku, atau kelompok tertentu. Pendekatan ini berorientasi pada perlindungan manusia dan penguatan kapasitas masyarakat.

Observatorium ini memanfaatkan berbagai sumber informasi, seperti data statistik resmi, pemetaan geospasial, survei lapangan, partisipasi masyarakat, dan analisis berbasis kecerdasan buatan untuk menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi sosial.

Tujuan akhirnya bukan sekadar menghasilkan laporan, tetapi menyediakan dasar yang lebih baik bagi penyusunan program pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan evaluasi kebijakan publik.

H. Institute for Post-Colonial State Reconstruction

Banyak negara berkembang masih menghadapi tantangan yang berakar pada sejarah kolonial, baik dalam sistem hukum, birokrasi, pendidikan, ekonomi, maupun tata ruang. Pengaruh sejarah tersebut tidak selalu bersifat negatif, karena sebagian institusi modern juga lahir melalui proses historis yang kompleks. Namun demikian, setiap bangsa perlu memahami

warisan tersebut secara kritis agar mampu melakukan pembaruan sesuai kebutuhannya sendiri.

Institute for Post-Colonial State Reconstruction diusulkan sebagai pusat penelitian multidisiplin yang mempelajari bagaimana sejarah membentuk institusi masa kini, serta bagaimana berbagai negara melakukan reformasi kelembagaan secara bertahap.

Kajian mencakup antara lain:

- evolusi sistem hukum;
- perkembangan birokrasi;
- transformasi administrasi publik;
- perubahan sistem pendidikan;
- dinamika ekonomi;
- perkembangan teknologi pemerintahan;
- tata kelola data dan kedaulatan digital.

Alih-alih menyederhanakan persoalan menjadi narasi tunggal, institut ini mendorong penelitian berbasis bukti yang dapat menjelaskan faktor-faktor keberhasilan maupun hambatan reformasi di berbagai negara.

Dengan demikian, pembelajaran mengenai sejarah tidak diarahkan untuk membangun rasa permusuhan terhadap masa lalu, tetapi untuk memperkaya kemampuan merancang masa depan.

I. School of Statesmanship for the Muslim World

Program paling penting dalam keseluruhan kerja sama ini adalah pembentukan manusia. Institusi dapat dibangun. Teknologi dapat dibeli. Gedung dapat didirikan.

Tetapi pemimpin yang memiliki ilmu, integritas, keluasan berpikir, dan keberanian moral hanya dapat dibentuk melalui proses pendidikan yang panjang.

Karena itu, School of Statesmanship for the Muslim World diusulkan sebagai program pengembangan kepemimpinan lintas disiplin yang mempersiapkan generasi baru pemimpin masyarakat.

Program ini tidak berfungsi sebagai universitas, tidak memberikan gelar akademik, dan tidak menggantikan pendidikan formal. Sebaliknya, ia menjadi ruang pembelajaran yang mempertemukan teori dengan praktik, ilmu dengan pengalaman, teknologi dengan etika, dan kepemimpinan dengan pengabdian.

Kurikulum disusun secara integratif. Seorang peserta tidak hanya mempelajari hukum, tetapi juga memahami perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan, ekonomi, pertanian, lingkungan, komunikasi publik, geopolitik, manajemen krisis, serta etika kepemimpinan.

Setiap peserta diwajibkan terlibat dalam proyek sosial yang nyata. Mereka tidak cukup menyelesaikan diskusi di ruang kelas, tetapi harus membuktikan kemampuan memimpin perubahan di tengah masyarakat. Dengan demikian, ukuran keberhasilan bukan sekadar kemampuan berbicara, melainkan kemampuan menghasilkan dampak yang dapat dirasakan oleh orang lain.

Dalam jangka panjang, sekolah ini diharapkan melahirkan jejaring pemimpin lintas profesi yang tetap terhubung setelah menyelesaikan program, sehingga

proses belajar tidak berhenti pada masa pendidikan, tetapi berkembang menjadi komunitas pembelajaran sepanjang hayat.

J. Program Transfer Pengetahuan Tata Kelola: Belajar Bersama, Bukan Menyeragamkan

Setiap bangsa memiliki pengalaman sejarah yang unik. Tidak ada satu negara yang berhasil karena menyalin seluruh sistem negara lain. Sebaliknya, kemajuan biasanya lahir ketika suatu bangsa mampu belajar dari pengalaman bangsa lain, lalu mengolahnya sesuai sejarah, budaya, konstitusi, dan kebutuhan masyarakatnya sendiri.

Oleh karena itu, kerja sama Indonesia–Iran yang ditawarkan dalam naskah ini tidak diarahkan sebagai proses ekspor gagasan ataupun adopsi sistem tertentu. Yang dibangun adalah mekanisme transfer pengetahuan, yaitu proses saling belajar mengenai bagaimana masing-masing bangsa menghadapi persoalan-persoalan nyata.

Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam mengelola masyarakat yang sangat majemuk dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam tradisi lokal. Iran memiliki pengalaman dalam membangun kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, kesehatan, serta ketahanan nasional di tengah dinamika geopolitik yang kompleks. Kedua pengalaman tersebut sama-sama bernilai dan dapat dipelajari secara terbuka.

Transfer pengetahuan ini tidak diarahkan pada perdebatan mengenai siapa yang paling benar, tetapi

pada pencarian praktik-praktik yang terbukti efektif. Bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan publik? Bagaimana memperkuat ketahanan pangan? Bagaimana membangun sistem pendidikan yang melahirkan inovator? Bagaimana mengembangkan teknologi yang tetap berpihak kepada manusia? Bagaimana memperkuat etika kepemimpinan di tengah masyarakat yang terus berubah?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi titik temu kerja sama. Jawabannya tidak dicari melalui retorika, tetapi melalui penelitian, dokumentasi, evaluasi, dan pembelajaran bersama.

Dalam kerangka itu, pengetahuan dipahami sebagai amanah yang harus dibagikan, bukan sebagai instrumen untuk membangun ketergantungan.

K. Teknologi Sosial, AI, dan Platform Pengetahuan Digital

Perubahan terbesar abad ke-21 bukan hanya terletak pada perkembangan kecerdasan buatan, komputasi awan, atau jaringan digital. Perubahan terbesar justru terletak pada cara manusia mengorganisasi kehidupan bersama melalui teknologi.

Selama beberapa dekade terakhir, teknologi lebih sering dipahami sebagai alat komersial atau instrumen efisiensi. Padahal teknologi juga dapat menjadi sarana untuk memperkuat partisipasi masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperluas akses pendidikan, dan mempercepat penyelesaian persoalan sosial.

Karena itu, kerja sama Indonesia–Iran perlu menempatkan teknologi sebagai teknologi sosial (*social technology*), yaitu teknologi yang dirancang bukan semata-mata untuk menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi untuk memperkuat kualitas kehidupan masyarakat.

Dalam kerangka ini, kecerdasan buatan tidak diposisikan sebagai pengganti manusia, melainkan sebagai alat bantu bagi manusia. AI dapat membantu menganalisis data sosial, memetakan kebutuhan masyarakat, mendukung perencanaan pembangunan, mengidentifikasi pola kerentanan, serta mempercepat proses pengambilan keputusan yang berbasis bukti.

Namun penggunaan AI harus selalu disertai prinsip-prinsip etika. Data masyarakat harus dilindungi. Keputusan yang menyangkut hak-hak warga tidak boleh sepenuhnya diserahkan kepada algoritma. Transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan privasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan teknologi tersebut.

Untuk mendukung tujuan itu, diusulkan pengembangan Platform Pengetahuan Digital Indonesia–Iran, yaitu ruang kolaborasi daring yang mempertemukan penelitian, publikasi, modul pembelajaran, data terbuka yang sesuai ketentuan hukum, praktik baik, dan hasil inovasi yang dapat dimanfaatkan oleh para peneliti, praktisi, maupun masyarakat luas.

Platform ini bukan sekadar perpustakaan digital, tetapi menjadi ekosistem pembelajaran yang terus berkembang melalui kontribusi bersama.

L. Tongkat Musa Zaman Now: Metafora Kepemimpinan yang Membebaskan

Di sepanjang sejarah, setiap zaman memiliki tantangannya sendiri. Kisah Nabi Musa AS mengajarkan bahwa keberanian menghadapi ketidakadilan tidak hanya memerlukan keyakinan, tetapi juga kemampuan untuk bertindak sesuai petunjuk Allah dan menggunakan sarana yang tersedia pada zamannya.

Dalam naskah ini, istilah "Tongkat Musa Zaman Now" digunakan sebagai metafora, bukan sebagai simbol literal.

Jika pada masa Nabi Musa tongkat menjadi tanda pertolongan Allah dalam menghadapi penindasan, maka pada masa kini "tongkat" itu dapat dipahami sebagai kemampuan manusia memadukan ilmu, integritas, dan teknologi untuk menghadapi persoalan-persoalan modern.

Tongkat tersebut memiliki beberapa unsur yang saling melengkapi. Pertama adalah hukum, yang menjaga keadilan dan memberikan kepastian bagi masyarakat. Kedua adalah ilmu pengetahuan, yang membimbing manusia memahami realitas secara objektif. Ketiga adalah data, yang membantu melihat persoalan berdasarkan fakta, bukan prasangka.

Keempat adalah teknologi dan kecerdasan buatan, yang memperluas kemampuan manusia dalam mengelola informasi dan menyelesaikan persoalan. Kelima adalah akhlak, yang memastikan seluruh kemampuan tersebut digunakan secara bertanggung

jawab. Keenam adalah kepemimpinan, yang menghubungkan nilai dengan tindakan. Ketujuh adalah spiritualitas, yang mengingatkan bahwa ilmu dan kekuasaan harus selalu diarahkan kepada kemaslahatan manusia.

Dengan demikian, "Tongkat Musa Zaman Now" bukanlah simbol kekuatan untuk mengalahkan orang lain, melainkan simbol kemampuan membebaskan masyarakat dari kebodohan, ketidakadilan, kemiskinan, dan ketertinggalan melalui perpaduan antara ilmu, teknologi, dan integritas.

M. Spiritualitas sebagai Fondasi Kepemimpinan

Kemajuan teknologi tidak otomatis melahirkan kemajuan peradaban. Sejarah menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan dapat digunakan untuk membangun, tetapi juga dapat digunakan untuk merusak. Perbedaannya terletak pada karakter manusia yang menggunakannya.

Karena itu, pembangunan kepemimpinan tidak cukup berhenti pada peningkatan kompetensi teknis. Pembangunan kepemimpinan harus menyentuh dimensi yang lebih dalam, yaitu pembentukan karakter, disiplin, tanggung jawab, empati, dan kesadaran bahwa setiap keputusan publik akan memengaruhi kehidupan banyak orang.

Dalam tradisi Islam, dimensi spiritual dipahami sebagai sumber kekuatan batin yang menumbuhkan keberanian, kesabaran, dan kejujuran. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan agar ilmu pengetahuan dan teknologi tidak berubah menjadi alat dominasi,

melainkan tetap menjadi sarana untuk melayani masyarakat.

Pendekatan ini juga sejalan dengan tujuan pendidikan kepemimpinan yang dikembangkan Sekolah Negarawan. Seorang pemimpin tidak hanya dituntut cerdas, tetapi juga mampu mengendalikan dirinya sendiri, menjaga amanah, dan memandang kekuasaan sebagai tanggung jawab, bukan sebagai hak istimewa.

N. Musa Village Project: Laboratorium Hidup Peradaban

Seluruh gagasan dalam buku ini pada akhirnya harus diuji dalam kehidupan nyata. Sebuah konsep mengenai kepemimpinan, tata kelola, teknologi, maupun pembangunan masyarakat hanya memperoleh makna apabila mampu menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan oleh warga.

Atas dasar itu, diusulkan Musa Village Project, yaitu sebuah desa atau komunitas percontohan yang berfungsi sebagai laboratorium hidup bagi penerapan berbagai gagasan yang telah dibahas dalam naskah ini.

Desa tersebut tidak diposisikan sebagai proyek simbolik, melainkan sebagai ruang eksperimen sosial yang mengintegrasikan berbagai unsur pembangunan.

Di bidang pendidikan, dikembangkan model pembelajaran yang menghubungkan literasi, teknologi, kewirausahaan, dan pembentukan karakter.

Di bidang ekonomi, diperkuat koperasi, usaha mikro, pertanian berkelanjutan, dan rantai nilai lokal yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di bidang tata kelola, dikembangkan mekanisme musyawarah yang transparan, pemanfaatan data untuk perencanaan desa, serta sistem informasi yang membantu warga memahami berbagai program pembangunan.

Di bidang teknologi, digunakan perangkat digital, pemetaan geospasial, kecerdasan buatan yang etis, dan sistem informasi yang mempermudah pelayanan publik sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat setempat.

Keberhasilan Musa Village Project tidak diukur dari kecanggihan teknologinya, melainkan dari perubahan nyata yang terjadi seperti apakah pendidikan membaik, apakah pelayanan publik lebih cepat, apakah ekonomi lokal berkembang, apakah partisipasi masyarakat meningkat, dan apakah kualitas hidup warga benar-benar mengalami kemajuan.

Dengan demikian, desa percontohan ini menjadi ruang pembuktian bahwa nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kepemimpinan dapat berjalan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan manusia.

O. Forum Tahunan Peradaban Indonesia–Iran

Setiap kerja sama yang ingin bertahan lintas generasi memerlukan ruang dialog yang hidup. Dialog bukan sekadar pertemuan untuk bertukar pendapat, tetapi mekanisme untuk saling mengoreksi, saling

belajar, dan bersama-sama memperbarui arah perjalanan sesuai perubahan zaman.

Oleh karena itu, salah satu program utama yang diusulkan adalah Forum Tahunan Peradaban Indonesia–Iran, sebuah forum yang mempertemukan pemikir, praktisi, pemimpin masyarakat, profesional, teknolog, ahli hukum, peneliti, pelaku usaha sosial, dan generasi muda dari kedua negara.

Forum ini tidak dirancang sebagai konferensi seremonial yang berhenti pada pembukaan resmi dan penandatanganan nota kesepahaman. Sebaliknya, setiap pertemuan harus menghasilkan keluaran yang nyata. Setiap peserta datang membawa pengalaman lapangan, data, hasil penelitian, maupun inovasi yang telah diuji. Setiap diskusi berakhir dengan rencana kerja yang dapat dilaksanakan dan dievaluasi pada pertemuan berikutnya.

Agar forum ini memiliki kesinambungan, setiap tahun ditetapkan tema utama yang merefleksikan tantangan bersama. Pada satu tahun, fokus dapat diarahkan kepada kepemimpinan publik dan tata kelola pemerintahan. Pada tahun berikutnya, perhatian dapat beralih kepada transformasi digital, kecerdasan buatan, ketahanan pangan, pendidikan, atau pembangunan desa. Dengan cara demikian, forum tidak menjadi pengulangan agenda yang sama, tetapi terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat.

Forum ini juga menjadi ruang bertemunya berbagai disiplin ilmu. Ahli hukum dapat berdialog dengan ilmuwan data. Peneliti pertanian dapat bekerja sama dengan pengembang kecerdasan buatan. Pakar

kesehatan masyarakat dapat bertukar pengalaman dengan praktisi teknologi informasi. Budayawan dapat berdiskusi dengan ekonom. Pertemuan lintas disiplin seperti inilah yang sering melahirkan inovasi yang tidak muncul apabila setiap bidang bekerja sendiri-sendiri.

Di samping forum tahunan, dibentuk pula kelompok kerja tematik (*working groups*) yang bekerja sepanjang tahun. Kelompok-kelompok ini bertugas mengembangkan riset bersama, menyusun rekomendasi kebijakan, membangun modul pendidikan, mengembangkan perangkat digital, serta mendampingi proyek-proyek percontohan yang telah disepakati.

Dengan demikian, forum tahunan bukan merupakan tujuan akhir, melainkan simpul yang menghubungkan berbagai kegiatan sepanjang tahun sehingga kerja sama benar-benar hidup dan berkembang.

P. Pembuktian adalah Bahasa Peradaban

Seluruh gagasan dalam naskah ini pada akhirnya bermuara pada satu prinsip sederhana. Peradaban tidak dibangun oleh teori semata. Peradaban juga tidak dibangun oleh slogan. Peradaban dibangun oleh pembuktian.

Bangsa yang besar bukanlah bangsa yang paling banyak berbicara mengenai keadilan, melainkan bangsa yang mampu menghadirkan keadilan dalam kehidupan masyarakatnya. Bangsa yang besar bukanlah bangsa yang paling sering mengucapkan pentingnya ilmu pengetahuan, melainkan bangsa yang menjadikan ilmu

sebagai budaya. Demikian pula teknologi tidak menjadi ukuran kemajuan apabila tidak memperbaiki kualitas hidup manusia.

Karena itu, seluruh program yang diajukan dalam bab ini disusun berdasarkan satu pendekatan yang sama yaitu setiap gagasan harus dapat dibuktikan.

Apabila kepemimpinan nilai diyakini penting, maka ia harus melahirkan pemimpin yang lebih jujur, lebih amanah, dan lebih mampu melayani masyarakat.

Apabila kecerdasan buatan diyakini bermanfaat, maka ia harus membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat akses pendidikan, memperkuat transparansi, dan memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pengetahuan.

Apabila tata kelola yang baik diyakini penting, maka ia harus menghasilkan birokrasi yang lebih sederhana, lebih terbuka, dan lebih berpihak kepada kepentingan warga.

Dengan cara berpikir seperti itu, ukuran keberhasilan berubah. Ukuran keberhasilan bukan lagi banyaknya seminar yang diselenggarakan, bukan pula banyaknya dokumen yang diterbitkan, tetapi sejauh mana kehidupan masyarakat benar-benar menjadi lebih baik.

Sekolah Negarawan karena itu tidak memandang dirinya sebagai tujuan akhir. Sekolah Negarawan hanyalah salah satu instrumen untuk menghubungkan gagasan dengan tindakan. Nilai dengan sistem. Ilmu dengan masyarakat. Teknologi dengan kemanusiaan. Kepemimpinan dengan pelayanan.

Keberhasilannya tidak diukur dari besarnya organisasi, melainkan dari banyaknya manusia yang menjadi lebih mampu melayani sesamanya.

Q. Bab Penutup Bab XVII

Menuju Kerja Sama Peradaban yang Membebaskan Manusia Naskah ini diawali dengan pertanyaan mengenai bagaimana memahami Indonesia secara lebih utuh. Pembahasannya kemudian bergerak dari sejarah kolonialisme, perkembangan konstitusi, hubungan antara negara dan rakyat, peran Islam sebagai tata nilai, hingga tantangan global berupa teknologi, kecerdasan buatan, dan perubahan geopolitik.

Seluruh pembahasan tersebut membawa kita pada satu kesimpulan penting yaitu masa depan tidak ditentukan oleh siapa yang paling besar kekuasaannya, melainkan oleh siapa yang paling mampu membangun manusia.

Indonesia dan Iran memiliki sejarah yang berbeda, sistem ketatanegaraan yang berbeda, pengalaman kepemimpinan yang berbeda, bahkan lingkungan geopolitik yang berbeda. Perbedaan itu tidak perlu dihapuskan. Justru melalui perbedaan tersebut kedua bangsa dapat saling belajar, saling memperkaya pengalaman, dan membangun bentuk kerja sama yang lebih dewasa.

Kerja sama yang ditawarkan dalam naskah ini tidak diarahkan untuk menyatukan sistem pemerintahan, menyeragamkan cara berpikir, atau membangun blok geopolitik baru. Kerja sama ini juga

bukan sarana untuk melakukan intervensi terhadap urusan dalam negeri negara mana pun, bukan pula upaya mengekspor ideologi, mazhab, ataupun model pemerintahan tertentu.

Yang ditawarkan adalah kerja sama yang berpusat pada manusia. Kerja sama yang menjadikan ilmu pengetahuan sebagai bahasa bersama. Kerja sama yang menjadikan teknologi sebagai alat pelayanan. Kerja sama yang menjadikan kepemimpinan sebagai amanah. Kerja sama yang menjadikan tata nilai sebagai fondasi pembangunan.

Dalam perspektif itu, "Tongkat Musa Zaman Now" menjadi simbol bahwa setiap zaman memiliki instrumen perjuangannya sendiri. Jika pada masa lalu tongkat melambangkan keberanian menghadapi penindasan, maka pada abad ke-21 tongkat itu hadir dalam bentuk ilmu pengetahuan, hukum yang berkeadilan, teknologi yang bertanggung jawab, data yang jujur, kecerdasan buatan yang berpihak kepada manusia, serta kepemimpinan yang mampu menghubungkan seluruh potensi tersebut menjadi kemaslahatan bersama.

Apabila semua unsur itu berjalan seiring, maka kerja sama Indonesia–Iran tidak lagi dipahami sebagai hubungan dua negara semata. Kerja sama tersebut berkembang menjadi kemitraan peradaban yang bertujuan memperkuat manusia, membangun institusi yang melayani, mengembangkan ilmu pengetahuan yang membebaskan, serta menghadirkan masa depan yang lebih adil bagi masyarakat.

Pada akhirnya, keberhasilan kerja sama ini tidak akan diingat karena banyaknya pertemuan yang pernah diselenggarakan atau dokumen yang pernah ditandatangani. Kerja sama ini akan dikenang apabila mampu melahirkan generasi pemimpin yang berilmu, berakhlak, menguasai teknologi, menghormati martabat manusia, dan meninggalkan jejak nyata dalam kehidupan rakyat. Di situlah sebuah kerja sama berhenti menjadi proyek. Dan mulai menjadi peradaban.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

Penutup
Indonesia yang Sedang Dicari

A. Indonesia sebagai Bangsa yang Sedang Mencari Bentuk Negara

Setiap bangsa memiliki perjalanan sejarahnya sendiri. Ada bangsa yang lahir melalui revolusi, ada yang tumbuh dari kerajaan-kerajaan lama, ada yang terbentuk melalui penyatuan wilayah, dan ada pula yang muncul setelah melepaskan diri dari kolonialisme. Indonesia lahir dari pergulatan yang panjang. Kemerdekaan 17 Agustus 1945 menandai berakhirnya penjajahan formal, tetapi tidak mengakhiri seluruh proses pencarian mengenai bagaimana negara ini seharusnya diselenggarakan.

Naskah ini berangkat dari keyakinan bahwa perjalanan Indonesia belum selesai. Bangsa ini masih terus mencari bentuk penyelenggaraan negara yang paling mampu menghadirkan keadilan, kesejahteraan, perlindungan terhadap rakyat, serta ruang bagi berkembangnya ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan kehidupan beragama yang bermartabat.

Yang sedang dicari bukanlah nama negara baru, bukan pula pengingkaran terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang sedang dicari adalah bagaimana negara yang telah ada dapat semakin mendekati cita-cita yang diletakkan oleh para pendiri bangsa, di mana negara yang melindungi seluruh rakyat, menegakkan keadilan, mencerdaskan

kehidupan bangsa, dan ikut mewujudkan perdamaian dunia.

Dengan demikian, pencarian bentuk negara bukan berarti menolak negara yang ada, melainkan terus menyempurnakan kualitas penyelenggaraannya agar semakin berpihak kepada manusia.

B. Kemerdekaan Sejati sebagai Kedaulatan Rakyat

Kemerdekaan bukan hanya peristiwa sejarah ketika penjajah meninggalkan suatu wilayah. Kemerdekaan juga merupakan keadaan ketika rakyat benar-benar merasakan dirinya sebagai subjek, bukan sekadar objek pembangunan.

Kemerdekaan sejati tampak ketika hukum melindungi yang lemah, bukan hanya menghukum yang kalah.

Kemerdekaan sejati tampak ketika kekayaan alam dikelola sebagai amanah bagi kesejahteraan bersama.

Kemerdekaan sejati tampak ketika ilmu pengetahuan membuka jalan pembebasan dari kebodohan dan kemiskinan.

Kemerdekaan sejati tampak ketika teknologi memperkuat pelayanan kepada masyarakat, bukan sekadar meningkatkan efisiensi ekonomi.

Kemerdekaan sejati tampak ketika pemimpin memahami bahwa jabatan adalah amanah untuk melayani, bukan hak untuk menguasai.

Dan kemerdekaan sejati mencapai maknanya ketika rakyat tidak lagi merasa jauh dari negaranya sendiri.

Dalam pengertian itulah kedaulatan rakyat bukan hanya konsep konstitusional, tetapi pengalaman yang hidup dalam keseharian masyarakat.

C. Krisis Kepemimpinan dan Kebutuhan Akan Negarawan

Seluruh pembahasan dalam buku ini akhirnya bermuara pada satu persoalan yang terus berulang yaitu kepemimpinan. Konstitusi dapat diperbaiki. Institusi dapat direformasi. Teknologi dapat diperbarui. Ekonomi dapat tumbuh.

Namun apabila kepemimpinan kehilangan integritas, arah pembangunan akan mudah bergeser dari kepentingan publik menuju kepentingan sempit.

Karena itu, bangsa mana pun memerlukan bukan hanya administrator yang mampu menjalankan pemerintahan, tetapi juga negarawan yang mampu membaca perubahan zaman, menjaga kepentingan rakyat dalam jangka panjang, dan mengambil keputusan berdasarkan tanggung jawab moral.

Negarawan tidak lahir karena garis keturunan. Tidak lahir karena kekayaan. Tidak lahir semata-mata karena kemenangan elektoral.

Negarawan lahir melalui pembentukan karakter, keluasan ilmu, pengalaman, dan kesediaan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan dirinya sendiri.

Di sinilah Sekolah Negarawan memosisikan dirinya bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai ruang pembelajaran untuk menyiapkan manusia yang

mampu memadukan nilai, ilmu, teknologi, dan kepemimpinan.

D. Cak Nun sebagai Alarm Indonesia

Dalam keseluruhan naskah ini, pemikiran Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) dibaca bukan sebagai doktrin, melainkan sebagai alarm moral dan kebudayaan.

Kritiknya mengenai kepemimpinan, hubungan negara dan rakyat, atau ungkapan tentang "meyatimkan rakyat" merupakan ajakan untuk bertanya kembali apakah institusi, pemimpin, dan masyarakat telah menjalankan tanggung jawabnya secara adil.

Istilah "meyatimkan rakyat" dalam pembacaan ini dipahami sebagai metafora sosial yaitu keadaan ketika sebagian warga merasa kehilangan pengasuhan, perlindungan, atau pendampingan yang seharusnya hadir melalui keluarga, masyarakat, maupun institusi publik.

Demikian pula ketika Cak Nun menyampaikan harapan agar ajaran Rasulullah SAW benar-benar dipakai di Indonesia, pesan yang dapat ditangkap adalah pentingnya menjadikan nilai-nilai seperti amanah, kejujuran, kasih sayang, dan keadilan sebagai fondasi kehidupan bersama, bukan sekadar identitas atau simbol.

Dengan demikian, Cak Nun tidak hanya mengkritik keadaan, tetapi juga mengajak masyarakat untuk terus memperbaiki dirinya.

E. Imam Khomeini dan Pelajaran tentang Perubahan Konstitusional

Perjalanan Revolusi Islam Iran tahun 1979 memberikan satu pelajaran penting bahwa perubahan sebuah bangsa tidak cukup berhenti pada pergantian pemerintahan. Perubahan harus memperoleh bentuk kelembagaan agar dapat hidup melampaui satu generasi. Karena itu, setelah revolusi, Iran membangun tatanan konstitusional baru melalui penyusunan Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran sebagai dasar penyelenggaraan negara.

Bagi penulis, pelajaran terpenting dari pengalaman tersebut bukanlah bentuk sistem ketatanegaraan Iran, melainkan keberanian menerjemahkan gagasan menjadi arsitektur negara. Sebuah cita-cita hanya akan menjadi pidato apabila tidak memperoleh bentuk konstitusional yang mampu mengatur hubungan antara rakyat, negara, kepemimpinan, dan kekuasaan.

Dalam titik inilah Sekolah Negarawan menemukan ruang dialog dengan pengalaman Iran.

Gagasan Amandemen Kelima yang dikembangkan Sekolah Negarawan tidak dimaksudkan untuk meniru Konstitusi Republik Islam Iran, tidak pula mengembalikan Indonesia kepada struktur ketatanegaraan sebelum Reformasi. Amandemen Kelima dipahami sebagai ikhtiar konstitusional untuk

terus mencari bentuk negara yang semakin sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia.

Pertanyaan utamanya bukan sekadar bagaimana mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, melainkan bagaimana mengembalikan rakyat ke dalam pusat arsitektur negara. Bagaimana negara menjaga kesinambungan pembangunan tanpa kehilangan kontrol rakyat. Bagaimana konstitusi mampu menjawab tantangan baru seperti kedaulatan data, kecerdasan buatan, ekonomi digital, lingkungan hidup, dan perlindungan generasi mendatang.

Dalam pandangan Sekolah Negarawan, konstitusi bukan hanya dokumen hukum. Konstitusi adalah kesepakatan moral sebuah bangsa mengenai bagaimana kekuasaan dijalankan untuk melayani rakyat.

Karena itu, Amandemen Kelima bukanlah tujuan akhir. Amandemen Kelima hanyalah instrumen. Tujuan akhirnya tetap sama sebagaimana cita-cita kemerdekaan Indonesia, yaitu menghadirkan negara yang semakin mampu melindungi rakyat, menegakkan keadilan, memajukan ilmu pengetahuan, mengembangkan teknologi untuk kemaslahatan, serta menjaga martabat manusia.

Di sinilah Indonesia tidak perlu menjadi Iran, sebagaimana Iran tidak perlu menjadi Indonesia. Akan tetapi, kedua bangsa dapat saling belajar bahwa perubahan peradaban memerlukan keberanian bukan hanya memperbaiki manusia, tetapi juga memperbaiki

bangunan konstitusional yang menjadi rumah bersama seluruh rakyat.

F. Khamenei sebagai Cermin Ketahanan dan Solidaritas Umat

Dalam naskah ini, pemikiran Ayatollah Ali Khamenei tidak diposisikan sebagai model kekuasaan yang harus diikuti oleh bangsa lain, melainkan sebagai salah satu perspektif mengenai pentingnya ketahanan moral, pendidikan, dan solidaritas terhadap masyarakat yang mengalami penindasan.

Salah satu pesan yang relevan adalah bahwa kekuatan suatu masyarakat tidak hanya bertumpu pada kemampuan material, tetapi juga pada keteguhan nilai, kesiapan menghadapi tantangan, dan kepedulian terhadap sesama.

Dalam konteks dunia Islam, solidaritas terhadap masyarakat yang mengalami penderitaan dapat dipahami sebagai ekspresi nilai kemanusiaan dan tanggung jawab moral, tanpa harus menghapus keberagaman sejarah, budaya, maupun mazhab yang ada di antara umat Islam sendiri.

Pendekatan seperti ini membuka ruang bagi dialog yang lebih dewasa. Bukan untuk menyeragamkan, melainkan untuk saling menguatkan dalam hal-hal yang menjadi kepentingan bersama.

G. Indonesia dan Iran: Tidak Saling Meniru, tetapi Saling Belajar

Tidak ada satu bangsa yang memiliki jawaban atas seluruh persoalan dunia. Indonesia memiliki pengalaman yang dapat dipelajari. Iran memiliki pengalaman yang juga dapat dipelajari.

Keduanya memiliki kelebihan, tantangan, dan sejarah yang berbeda. Karena itu, kerja sama yang ditawarkan dalam buku ini bukanlah ajakan untuk saling meniru, melainkan untuk saling belajar.

Belajar bagaimana membangun manusia. Belajar bagaimana memperkuat ilmu pengetahuan. Belajar bagaimana memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab. Belajar bagaimana menjaga keseimbangan antara pembangunan material dan pembangunan moral.

Hubungan seperti inilah yang lebih sesuai dengan semangat kerja sama peradaban: menghargai perbedaan sambil mencari titik temu yang bermanfaat bagi masyarakat.

H. Tongkat Musa Zaman Now: Dari Simbol Menuju Pembuktian

Di sepanjang buku ini, Tongkat Musa Zaman Now digunakan sebagai metafora kepemimpinan yang memadukan ilmu, hukum, teknologi, data, akhlak, dan spiritualitas.

Metafora tersebut mengingatkan bahwa setiap zaman memiliki perangkatnya sendiri untuk menghadapi tantangan.

Pada masa kini, "tongkat" itu dapat berupa hukum yang adil, pendidikan yang membebaskan, teknologi yang etis, data yang akurat, kecerdasan buatan yang bertanggung jawab, dan pemimpin yang menjadikan semua itu sebagai sarana untuk melayani masyarakat.

Namun seluruh instrumen tersebut hanya akan bermakna apabila dibuktikan melalui tindakan nyata. Pembuktian itulah bahasa universal setiap peradaban.

I. Kebangkitan Tata Nilai bagi Indonesia dan Dunia Islam

Akhirnya, seluruh pembahasan dalam naskah ini kembali kepada persoalan yang paling mendasar yaitu bagaimana membangun masyarakat yang mampu melindungi manusia.

Dalam perspektif penulis, nilai-nilai Islam seperti keadilan, amanah, penghormatan terhadap martabat manusia, pencarian ilmu, perlindungan terhadap kehidupan, keluarga, dan kepedulian terhadap sesama, memberikan kontribusi penting bagi percakapan mengenai pembangunan masyarakat yang bermartabat. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi inspirasi bagi kehidupan publik ketika diterjemahkan secara bijaksana ke dalam institusi, pendidikan, teknologi, dan pelayanan kepada masyarakat.

Apabila kerja sama Indonesia–Iran dikembangkan di atas fondasi tersebut, maka kerja sama itu tidak diarahkan untuk menyeragamkan sistem ketatanegaraan, tidak menjadi bentuk intervensi

terhadap urusan dalam negeri negara lain, dan tidak menjadi proyek ekspor mazhab. Sebaliknya, ia menjadi ruang belajar bersama mengenai bagaimana nilai, ilmu pengetahuan, dan teknologi dapat dipadukan untuk memperkuat kualitas manusia dan kehidupan masyarakat.

Mungkin pada akhirnya, pertanyaan terbesar bukanlah apakah Indonesia telah menemukan bentuk negara yang sempurna, atau apakah Iran telah memiliki seluruh jawaban atas tantangan zaman. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah kedua bangsa bersedia terus belajar, memperbaiki diri, dan bekerja sama dengan rendah hati demi menghadirkan kehidupan yang lebih adil, lebih berilmu, dan lebih bermartabat.

Jika perjalanan panjang buku ini memiliki satu pesan utama, maka pesannya adalah bahwa masa depan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh besarnya wilayah, kuatnya ekonomi, atau majunya teknologi. Masa depan ditentukan oleh kemampuan menjaga hubungan antara nilai dan kekuasaan, antara ilmu dan akhlak, antara inovasi dan tanggung jawab, serta antara negara dan manusia.

Di situlah makna kemerdekaan terus diperjuangkan. Di situlah kepemimpinan menemukan amanahnya. Dan di situlah kerja sama peradaban memperoleh makna terdalamnya. Bukan untuk memenangkan satu bangsa atas bangsa lain, melainkan untuk memperluas manfaat bagi manusia.

Epilog

A. Peradaban Tidak Dibangun untuk Mengalahkan Bangsa Lain, tetapi untuk Memuliakan Manusia

Pada akhirnya, perjalanan panjang dalam naskah ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan bahwa Indonesia harus menjadi Iran, atau Iran harus menjadi Indonesia. Sejarah telah membentuk keduanya melalui jalan yang berbeda. Konstitusi, kebudayaan, pengalaman kepemimpinan, struktur sosial, dan dinamika masyarakat kedua bangsa lahir dari konteks yang tidak sama. Perbedaan itu bukanlah persoalan yang harus dihapuskan, melainkan kenyataan yang harus dipahami dengan jujur dan dihormati dengan dewasa.

Karena itu, kerja sama yang ditawarkan dalam naskah ini bukanlah kerja sama penyeragaman. Kerja sama ini bukan ajakan untuk meniru sistem ketatanegaraan negara lain. Kerja sama ini bukan proyek untuk mengekspor model kepemimpinan tertentu. Kerja sama ini juga bukan sarana memperluas pengaruh suatu negara ke wilayah negara lain.

Demikian pula, kerja sama ini tidak dibangun untuk membawa perdebatan mazhab ke ruang hubungan internasional. Islam telah hidup selama berabad-abad dengan keragaman tradisi keilmuan, mazhab, dan pengalaman sejarah. Keragaman tersebut merupakan bagian dari perjalanan intelektual umat yang harus dikelola melalui ilmu, adab, dan dialog, bukan melalui saling meniadakan.

Yang ingin dibuktikan melalui kerja sama Indonesia–Iran adalah sesuatu yang jauh lebih mendasar.

Bahwa tata nilai Islam masih memiliki kemampuan untuk menjawab tantangan zaman modern.

Bahwa nilai-nilai seperti keadilan, amanah, kasih sayang, penghormatan terhadap martabat manusia, pencarian ilmu, tanggung jawab sosial, dan perlindungan terhadap yang lemah tidak berhenti sebagai ajaran moral, tetapi dapat diterjemahkan menjadi sistem yang bekerja.

Tata nilai tersebut harus mampu melindungi jiwa, sehingga kehidupan manusia menjadi tujuan utama setiap kebijakan.

Tata nilai tersebut harus mampu menjaga harta, sehingga kekayaan tidak berubah menjadi alat penindasan, tetapi menjadi amanah bagi kesejahteraan bersama.

Tata nilai tersebut harus menjaga martabat manusia, sehingga setiap orang diperlakukan sebagai subjek yang memiliki hak dan kehormatan, bukan sekadar objek kekuasaan atau angka dalam statistik pembangunan.

Tata nilai tersebut harus mengembangkan akal, melalui pendidikan yang membebaskan, penelitian yang jujur, serta budaya ilmu yang mendorong lahirnya inovasi.

Tata nilai tersebut harus memperkuat keluarga, sebagai ruang pertama tempat nilai, kasih sayang, dan

tanggung jawab diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya.

Tata nilai tersebut harus memuliakan ilmu, bukan hanya sebagai sarana memperoleh pekerjaan, tetapi sebagai jalan membangun peradaban yang lebih adil dan lebih bijaksana.

Tata nilai tersebut harus membentuk kepemimpinan yang memandang kekuasaan sebagai amanah pelayanan, bukan sebagai hak untuk menguasai.

Tata nilai tersebut harus mengarahkan teknologi agar menjadi instrumen pembebasan manusia, memperkuat transparansi, memperluas akses terhadap pendidikan dan pelayanan publik, serta memastikan bahwa kecerdasan buatan, data, dan inovasi digital tetap berada di bawah kendali etika, bukan sebaliknya.

Pada akhirnya, tata nilai tersebut harus menjaga masa depan manusia, agar kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak menghilangkan kemanusiaan itu sendiri.

Dalam pengertian itulah, kerja sama Indonesia–Iran yang ditawarkan dalam naskah ini bukanlah proyek kekuasaan, melainkan proyek pembuktian.

Pembuktian bahwa agama dapat hadir sebagai sumber inspirasi bagi pelayanan publik.

Pembuktian bahwa ilmu pengetahuan dapat berjalan seiring dengan akhlak.

Pembuktian bahwa teknologi dapat berkembang tanpa kehilangan nurani.

Pembuktian bahwa kepemimpinan dapat kembali dipahami sebagai amanah, bukan sekadar jabatan.

Pembuktian bahwa negara dapat dibangun bukan hanya dengan kekuatan institusi, tetapi juga dengan kekuatan manusia yang berilmu, berintegritas, dan memiliki keberanian moral.

Apabila pembuktian itu berhasil dilakukan, kerja sama ini tidak hanya akan memberi manfaat bagi Indonesia ataupun Iran. Kerja sama ini akan menjadi sumbangan kecil bagi percakapan dunia mengenai bagaimana agama, ilmu pengetahuan, konstitusi, teknologi, dan kemanusiaan dapat berjalan dalam satu arah yang sama.

Mungkin pada akhirnya, warisan terbesar yang dapat ditinggalkan oleh sebuah bangsa bukanlah gedung-gedung yang tinggi, bukan pula kekuatan ekonominya semata, melainkan kemampuan melahirkan manusia yang memuliakan manusia lain.

Sebab peradaban yang paling besar bukanlah peradaban yang paling kuat menguasai dunia.

Peradaban yang paling besar adalah peradaban yang paling mampu menjaga kehidupan, menegakkan keadilan, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan memuliakan martabat manusia.

Apabila Indonesia dan Iran dapat berjalan bersama dalam semangat itu, kerja sama yang lahir bukanlah kerja sama kepentingan sesaat, melainkan kerja sama peradaban yang menghormati kedaulatan setiap bangsa, terbuka terhadap dialog, dan berikhtiar membuktikan bahwa nilai-nilai luhur dapat

diwujudkan menjadi sistem, pelayanan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh umat manusia.

SEKOLAH
NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

Daftar Pustaka

Abrahamian, E. (1982). Iran between two revolutions. Princeton University Press.

Al-Attas, S. M. N. (1993). Islam and secularism. International Institute of Islamic Thought and Civilization.

Auda, J. (2008). Maqasid al-shari'ah as philosophy of Islamic law: A systems approach. International Institute of Islamic Thought.

Couldry, N., & Mejias, U. A. (2019). The costs of connection: How data is colonizing human life and appropriating it for capitalism. Stanford University Press.

Furnivall, J. S. (1939). Netherlands India: A study of plural economy. Cambridge University Press.

Khamenei, A. (2019). The second phase of the revolution statement addressed to the Iranian nation.

Kwet, M. (2019). Digital colonialism: US empire and the new imperialism in the Global South. Race & Class, 60(4), 3–26. https://doi.org/10.1177/0306396818823172.

Nadjib, E. A. (1992). Indonesia bagian dari desa saya. Sipress.

Ricklefs, M. C. (2001). A history of modern Indonesia since c. 1200 (3rd ed.). Stanford University Press.

Robinson, G. B. (2018). The killing season: A history of the Indonesian massacres, 1965-66. Princeton University Press.

Roosa, J. (2006). Pretext for mass murder: The September 30th movement and Suharto's coup d'état in Indonesia. University of Wisconsin Press.

Simpson, B. R. (2008). Economists with guns: Authoritarian development and U.S.-Indonesian relations, 1960-1968. Stanford University Press.

Warburton, E. (2023). Resource nationalism in Indonesia: Booms, big business, and the state. Cornell University Press.